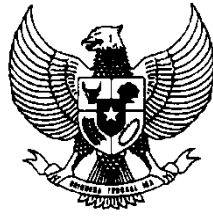




**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022
Nomor 21 Tahun 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021**



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan maksud dijadikan sebagai:
 - a. pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
 - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1 (satu) tahun anggaran bagi Perangkat Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - h. Bab VIII Penutup.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 juni 2021

GUBERNUR BANTEN,

Ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di
Serang
pada tanggal 28 juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 21



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022
Nomor 21 Tahun 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2021**

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk tahun 2022.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kelima dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang

RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMD, maka indikator dan target kinerja RPJMD, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, diagendakan tercapai pada tahun rencana. Adapun Visi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang hendak diwujudkan, yaitu *“Mewujudkan Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah”*. Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

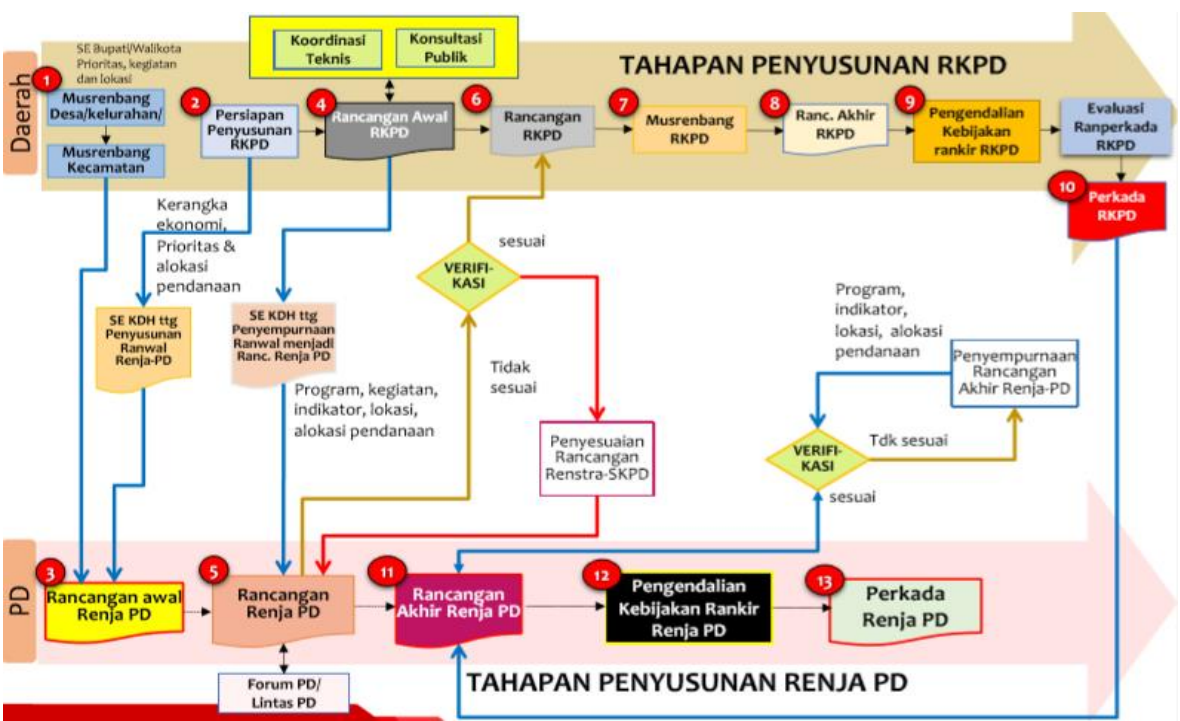
Dengan demikian, kedudukan RKPD Tahun 2022 ini sangat krusial untuk menunaikan visi dan misi RPJMD tersebut.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, yang ditetapkan dalam RPJMD, ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai perwujudan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Selain kedudukannya yang strategis tersebut, RKPD juga merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif, karena disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN, serta SPM, yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

Penyusunan RKPD, secara teknis, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, tahapan penyusunan RKPD terdiri dari Persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Proses penyusunan RKPD secara komprehensif disajikan dalam diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1-1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, saat ini, adalah pada tahap penyusunan RKPD, yang disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

1.2. DASAR HUKUM

Selain berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

- Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

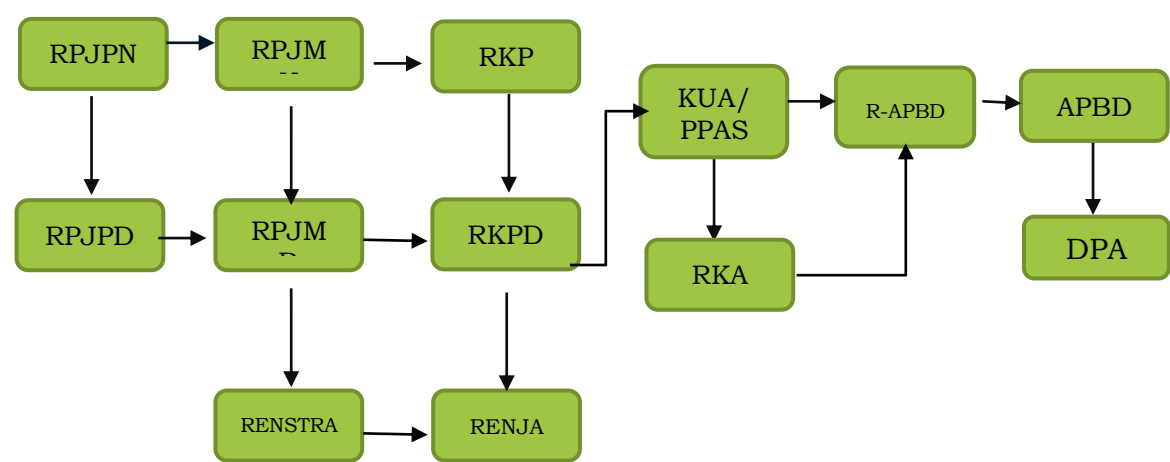
17. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 69);
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dasar hukum tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan RAPBD. Secara umum, hubungan antara RKPD dengan dokumen lain yang relevan, disajikan dalam diagram berikut



Gambar 1-2. Hubungan Antar Dokumen

Untuk menjamin konsistensi antara dokumen rencana dan anggaran, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS, serta RKA Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergitas dan harmoni perencanaan pembangunan daerah, RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 akan menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. RKPD juga merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuannya adalah:

1. Sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

2. Sebagai pedoman penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Penyusunan RKPD Tahun 2022, Kabupaten/Kota melakukan penyalarsan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi pada tahun 2022.

1.5. Sistematika RKPD Provinsi Banten Tahun 2022

Penyusunan RKPD Provinsi, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , mencakup:

- a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. Penelaahan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- e. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- f. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA, dan menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Hasil penyusunan RKPD provinsi tersebut disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Hubungan antar Dokumen
- I.4. Maksud dan Tujuan
- I.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- II.1. Kondisi Umum Daerah
- II.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020 dan realisasi RPJMD
- II.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- III.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- III.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- IV.1. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Banten
- IV.2. Arah Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten
- IV.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- IV.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022
- IV.5. Arah Kebijakan Tematik Holistik Integratif Spasial Pembangunan Provinsi Banten
- IV.6. Inovasi Daerah

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

- V.1. Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota
- V.2. Rencana Program Kegiatan di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- VI.1. Rencana Program Kegiatan Tahun 2022

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

- VII.1. Indikator Kinerja Daerah
- VII.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten, luas Provinsi Banten yaitu 8.651,20 km². Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas Provinsi Banten yaitu 9.662,92 km², dengan batas wilayah Provinsi Banten adalah :

- a) Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- c) Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia; dan
- d) Sebelah Barat dengan Selat Sunda dan Provinsi Lampung.

Berdasarkan letak geografis dan batas administratif tersebut, maka Provinsi Banten memiliki posisi strategis secara geografis dan secara regional, karena menjadi jalur utama penghubung perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagai kesatuan wilayah koridor andalan pengembangan ekonomi nasional. Selain itu, berdasarkan aspek kemaritiman, wilayah perairan wilayah maritim Banten dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menghubungkan lalulintas laut antara Samudra Hindia ke wilayah Asia.

Secara administratif wilayah Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) daerah otonom Kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang serta 4 (empat) daerah otonom Kota yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya secara rinci terdiri dari 155 kecamatan, dan 1552 desa/kelurahan (1.238 desa dan 313 kelurahan) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

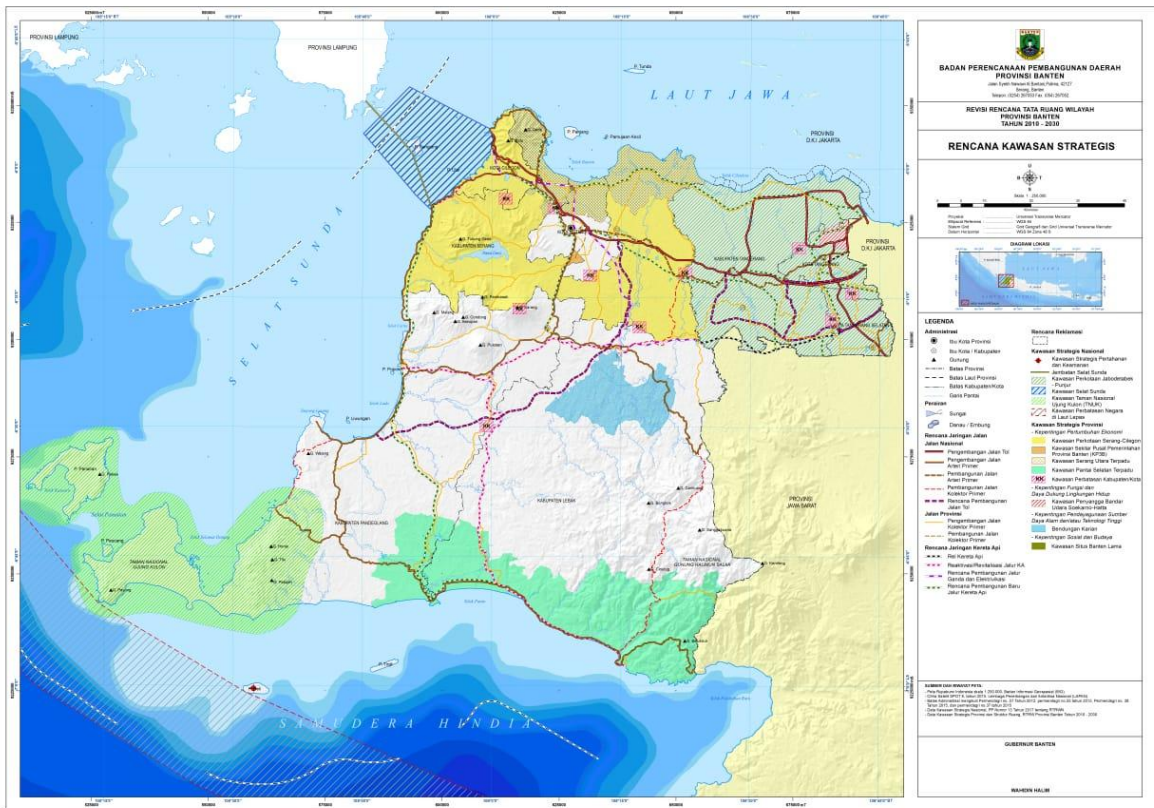
Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai sebelah utara melingkar menuju Selat Sunda di sebelah barat.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin muson dan gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 21,20C-36,20°C, dengan kelembaban udara bervariasi antara 37%-100%. Jumlah hari dan curah hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 206 hari dan 2.697,80 mm. (Sumber : Provinsi Banten Dalam Angka, BPS 2021)

2. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa Kawasan Strategis Nasional (KSN) antara lain: KSN Selat Sunda, KSN Ujungkulon, KSN JABODETABEKJUR, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung, serta terdapat 21 Kawasan Industri di wilayah Provinsi Banten dengan produk manufaktur unggulan: baja, metrokimia, alas kaki, elektronik, semen dan makanan yang didukung oleh beberapa pusat perdagangan tradisional dan modern, infrastruktur dan simpul transportasi meliputi Bandara Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Merak, Jalan Tol Jakarta-Merak, Jalan Tol Serpong-Jakarta-Purbalenyi, dan Kereta Api Jakarta-Merak.

Terdapat Lokasi Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, selanjutnya dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar II-1. Peta Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Banten

3. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa potensi bencana yang ada di wilayah Provinsi Banten yang teridentifikasi, antara lain:

a. Wilayah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten/Kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Cibeber, Cilegon, Purwakarta, dan Grogol;
- 2) Kota Serang meliputi Kecamatan Kasemen, Cipocok jaya, Serang, dan Walantaka;
- 3) Kota Tangerang meliputi Kecamatan Tangerang, Cipondoh, Batuaceper, Ciledug, Jatiuwung, Benda, Karawaci, Cibodas, Periuk, Neglasari, Pinang, Karangtengah, dan Larangan;
- 4) Kota Tangerang Selatan meliputi Kecamatan Serpong, Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren;

- 5) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cimarga, Rangkasbitung, dan Cibadak;
- 6) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Labuan, Pagelaran, Cikedal, Perdana, Patia, Sukaresmi, Panimbang, Pagelaran, Sumur, dan Carita;
- 7) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Kramatwatu, Bojonegara, Puloampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Tunjungteja, Cikeusal, Pamarayan, Anyer, dan Cinangka.

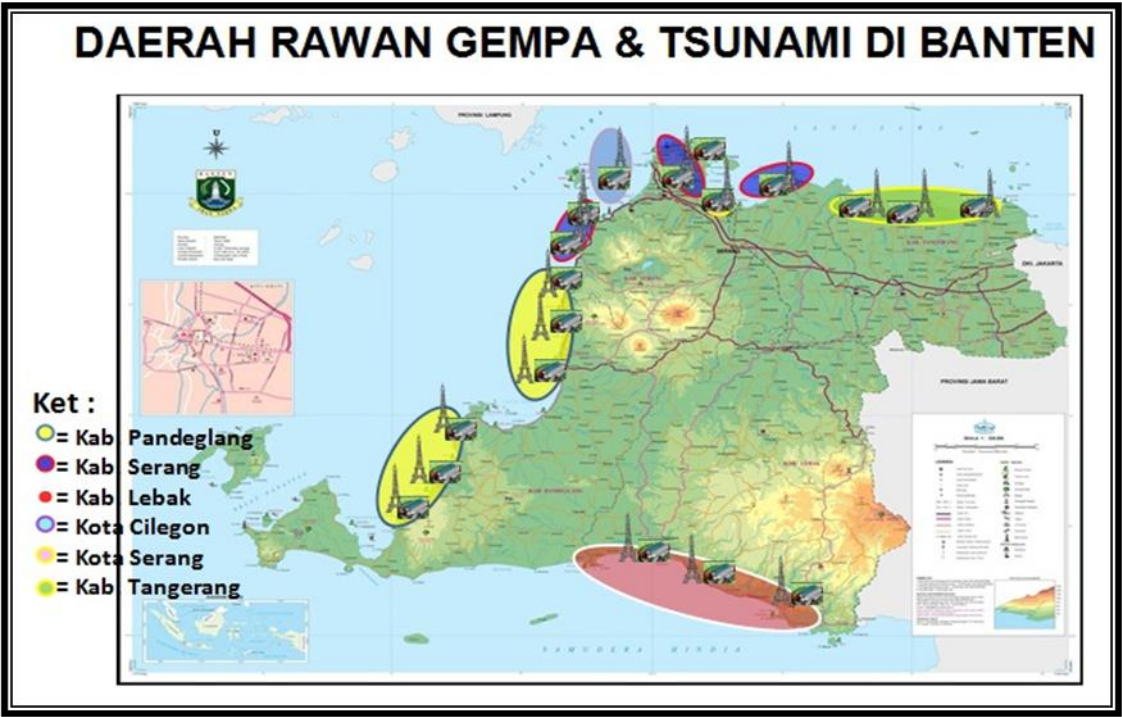
b. Wilayah Rawan Longsor

Daerah rawan longsor di Provinsi Banten tersebar di beberapa kecamatan di kabupaten/kota, yang dapat teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Cilegon meliputi Kecamatan Pulomerak dan Purwakarta;
- 2) Kabupaten Serang meliputi Kecamatan Bojonegara dan Cikeusal;
- 3) Kabupaten Lebak meliputi Kecamatan Cipanas, Muncang, Cibeber, dan Bayah;
- 4) Kabupaten Pandeglang meliputi Kecamatan Pandeglang, Cadasari, dan Mandalawangi.

c. Tsunami

Daerah rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Utara, Barat, sampai Selatan Provinsi Banten meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya lokasi rawan bencana tsunami di Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:



Gambar II-2. Peta Daerah Rawan Gempa dan Tsunami di Banten

4. Demografi

Kondisi Demografi Banten secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan Hasil Sensus Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2020, jumlah Penduduk Banten tahun 2020 mencapai 11.904.562 jiwa yang terdiri dari atas 6.070.271 jiwa penduduk laki-laki dan 5.834.291 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.87 % artinya pada tahun 2019 (Data Juni) setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 1,87 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II-1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2020

KAB/KOTA	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan Penduduk
Kab.Pandeglang	2.746,89	653.411	619.276	1.272.687	10,69
Kab. Lebak	3.426,56	714.052	672.741	1.386.793	11,65
Kab. Tangerang	1.011,86	1.660.705	1.584.914	3.245.619	27,26
Kab. Serang	1.734,28	830.075	792.555	1.622.630	13,63
Kota Tangerang	153,93	959.009	936.477	1.895.486	15,92
Kota Cilegon	175,50	220.889	214.007	434.896	3,65

KAB/KOTA	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan Penduduk
Kota Serang	266,71	353.971	338.130	692.101	5,81
Kota Tangsel	147,19	678.159	676.191	1.354.350	11,38
Provinsi Banten	9.662,92	6.070.271	5.834.291	11.904.562	100,00

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021 (Hasil Sensus BPS Tahun 2020)

Tabel II-2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2017 – 2020 (Jiwa)

KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020
1. Kab. Pandeglang	1,205,203	1,295,810	1,211,909	1.272.687
2. Kab. Lebak	1,288,103	1,209,011	1,302,608	1.386.793
3. Kab. Tangerang	3,584,770	3,692,693	3,800,787	3.245.619
4. Kab. Serang	1,493,591	1,501,501	1,508,397	1.622.630
5. Kota Tangerang	2,139 ,891	2,185,304	2,229,901	1.895.486
6. Kota Cilegon	425,103	431,305	437,205	434.896
7. Kota Serang	666,600	677,804	688,603	692.101
8. Kota Tangsel	1,644,899	1,696,308	1,747,906	1.354.350
Provinsi Banten	12,448,160	12,689.736	12,927,316	11.904.562

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

Jumlah Kecamatan terbanyak terdapat di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang sebanyak 29 Kecamatan, dan paling sedikit di Kota Tangerang Selatan sebanyak 7 Kecamatan.

Tabel II-3. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten(Jiwa)

Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah desa	Luas wilayah (m2)	Jumlah penduduk (jiwa)	Keterangan
Kab. Pandeglang	35	13	326	2.746,89	1.272.687	
Kab. Lebak	28	5	340	3.426,56	1.386.793	
Kab. Tangerang	29	28	246	1.011,86	3.245.619	
Kab. Serang	29		326	1.734,28	1.622.630	PP. No. 32 Tahun 2012
Kota Tangerang	13	104	-	153,93	1.895.486	
Kota Cilegon	8	43	-	175,50	434.896	
Kota Serang	6	67	-	266,71	692.101	PP. No. 32/2007-PP 32/2012 Pemindahan Ibukota
Kota Tangerang Selatan	7	54	-	147,19	1.354.350	UU No. 51/2008
Jumlah	155	314	1.238	9.662,92	11.904.562	

Sumber Data : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

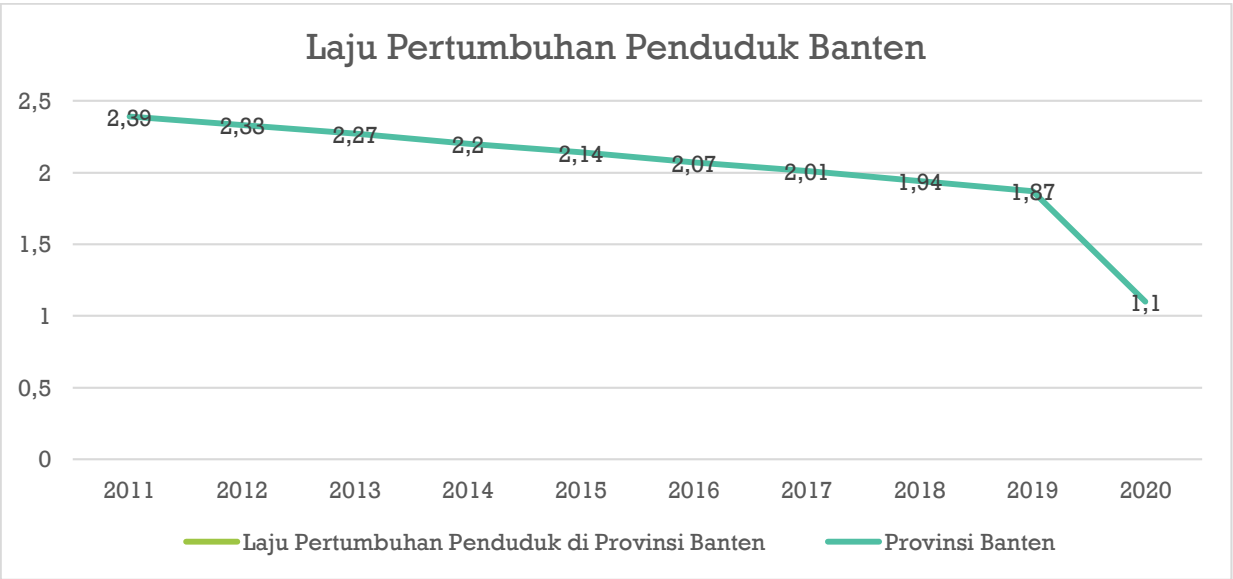
Penduduk Banten tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September) mencapai 11.904.562 jiwa yang terdiri atas 6.070.271 jiwa

penduduk laki-laki dan 5.834.291 jiwa penduduk perempuan, sedangkan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 sebesar 1,10 persen.

Tabel II-4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2017-2020 (Persen)

KAB/KOTA	2017	2018	2019	2020
1. Kab. Pandeglang	0.39	0,32	0,24	0,99
2. Kab. Lebak	0.68	0,60	0,52	1,38
3. Kab. Tangerang	3.08	3,01	2,93	1,32
4. Kab. Serang	0.61	0,53	0,46	1,42
5. Kota Tangerang	2.21	2,12	2,04	0,51
6. Kota Cilegon	1.53	1,46	1,37	1,46
7. Kota Serang	1.77	1,68	1,59	1,76
8. Kota Tangsel	3.21	3,13	3,04	0,47
Provinsi Banten	2.01	2,17	1,87	1,10

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2021

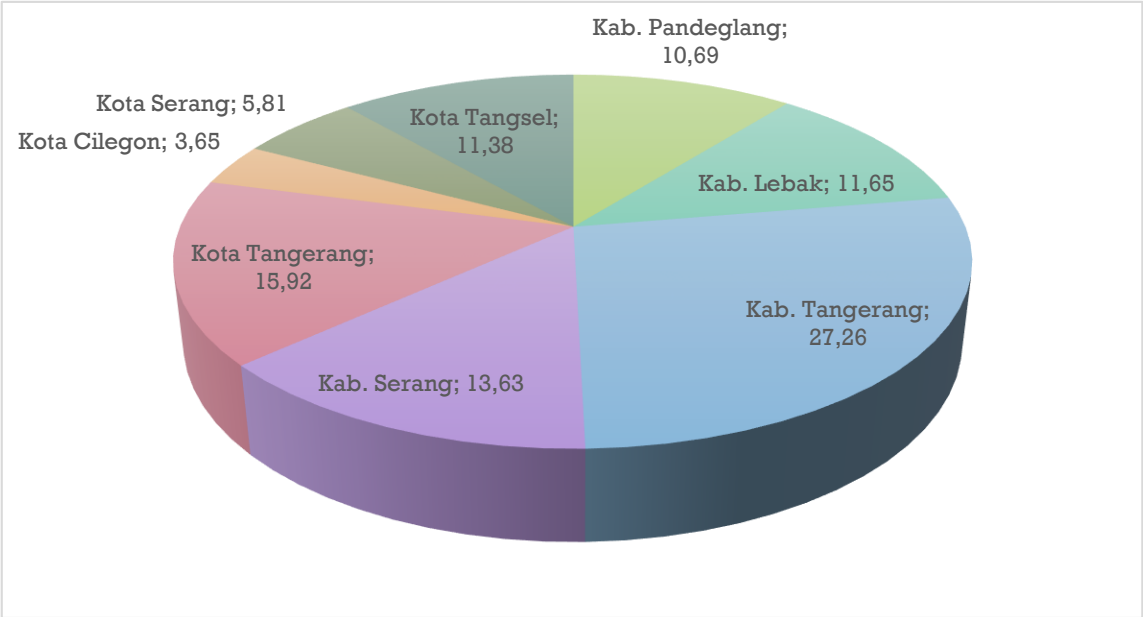


Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

Gambar II-3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2020 mencapai 1.232 jiwa/Km². Persebaran penduduk Provinsi Banten tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan luas wilayah 1.312,98Km² (14% dari luas wilayah Provinsi Banten), ketiga wilayah tersebut pada tahun 2020 dihuni oleh sekitar 54,56 % dari jumlah penduduk Banten. Sedangkan 45,44 % penduduk tersebar di 5 (lima) wilayah yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Akibatnya tingkat kepadatan penduduk antar wilayah di Banten menjadi tidak merata.

Tercatat, Kota Tangerang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mencapai 12.314 jiwa per km². Sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebak yaitu dengan tingkat kepadatan penduduk hanya 405 jiwa per km². Berarti, Kota Tangerang hampir 31 kali lebih padat bila dibandingkan dengan Kabupaten Lebak. Sebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

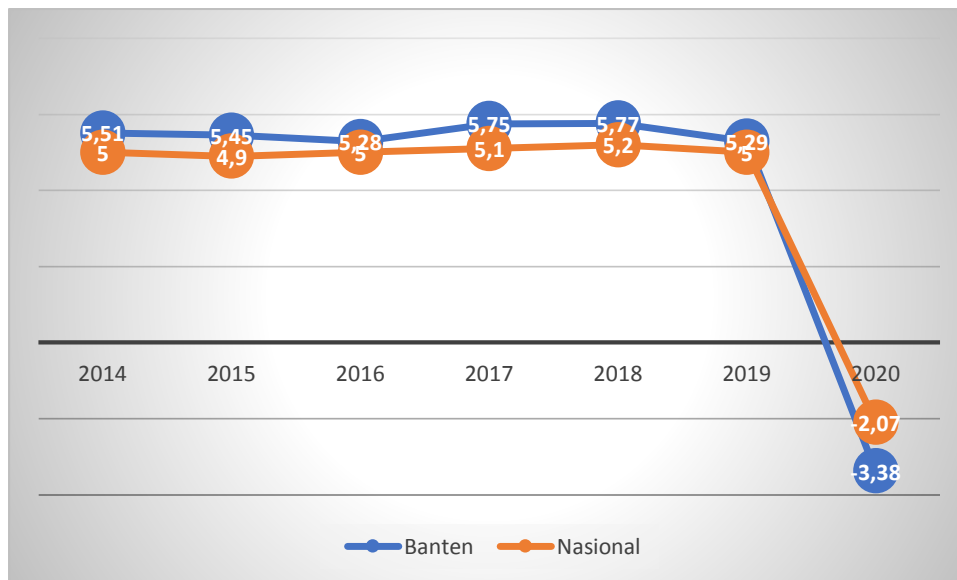
Gambar II-4. Sebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten dapat dilihat pada Gambar berikut :



Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021

Gambar II-5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2014 – 2020

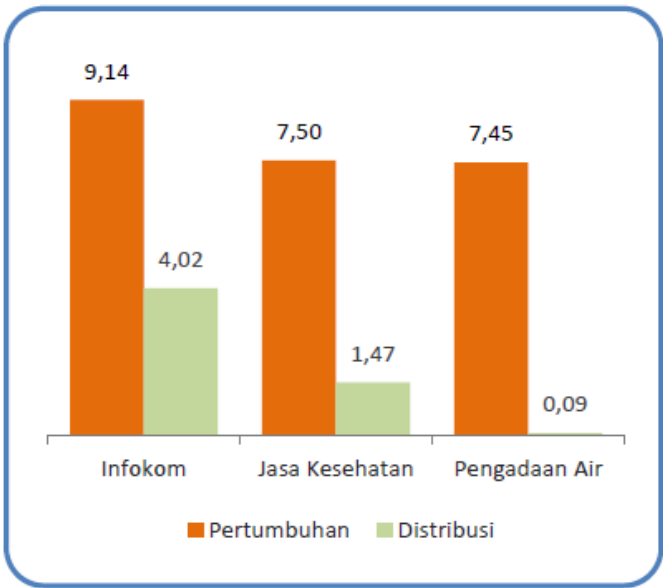
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada tahun 2020 mengalami kontraksi -3,38 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 (5,29%), Hal tersebut terjadi akibat besarnya pengaruh pandemi Covid-19, sebagian besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Banten mengalami kontraksi pertumbuhan. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten 2020, sumber pertumbuhan negatif terdalam berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar - 1,84 persen, Tren yang sama diikuti industri pengolahan sebesar negatif 1,58 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar negatif 0,39 persen. Selanjutnya konstruksi sebesar negatif 0,28 persen serta sumber pertumbuhan ekonomi Banten dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,71 persen.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang Tahun 2020 menyebabkan ekonomi Banten mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 3,38 persen. Sebagian besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Banten mengalami kontraksi pertumbuhan. Namun beberapa lapangan usaha lainnya mampu tumbuh positif dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,14 persen; diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,50 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,45 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten Tahun 2020, sumber pertumbuhan negatif terdalam berasal dari Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar negatif 1,84 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar negatif 1,58 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar negatif 0,39 persen; dan Konstruksi sebesar negatif 0,28 persen. Sumber pertumbuhan

ekonomi Banten dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,71 persen. Pertumbuhan dan distribusi PDRB beberapa lapangan usaha Tahun 2020 (persen) dan sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2020 (persen) dapat dilihat pada grafik berikut:

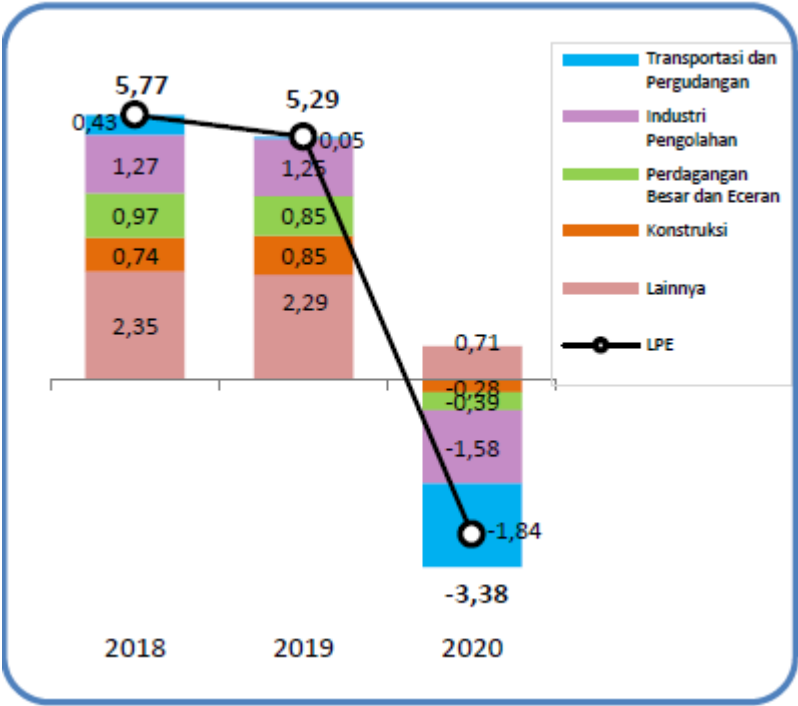
Grafik II -1. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB beberapa Lapangan Usaha Tahun 2020 (Persen)



Sumber :BPS Provinsi Banten 2021

Struktur PDRB Banten menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 menunjukkan adanya pergeseran lapangan usaha. Dimana Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan yang memiliki peranan terbesar ke empat, turun menjadi ke lima.

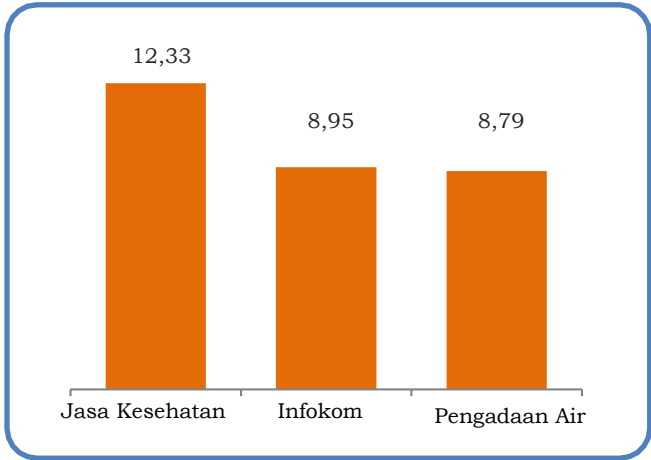
Grafik II-2. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Perekonomian Banten didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,21 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,33 persen; Konstruksi sebesar 11,43; dan Real Estate sebesar 8,66 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Banten mencapai 64,63 persen.

Grafik II-3. Laju Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2020 (y-on-y) (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Ekonomi Banten triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) tumbuh negatif 3,92 persen. Namun beberapa lapangan usaha masih tumbuh positif dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,33 persen; diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,95 persen; Pengadaan

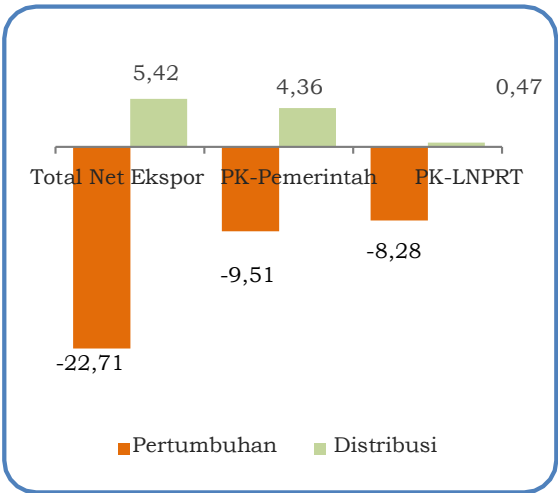
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 8,79 persen; serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,90 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2020 dibanding triwulan III-2020 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,01 persen. Hal ini disebabkan sebagian besar lapangan usaha sudah mampu tumbuh positif antara lain Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,87 persen; Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,89 persen; Konstruksi sebesar 7,29 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,40 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten Tahun 2020 (*c-to-c*) tumbuh negatif sebesar 3,38 persen. Pertumbuhan negatif terjadi pada semua komponen. Dengan pertumbuhan negatif terdalam masing-masing terjadi pada komponen Total Ekspor Netto sebesar 22,71 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 9,51 persen dan PK-LNPRT sebesar 8,28 persen. Demikian juga untuk komponen PK-RT yang mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen diikuti dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,74 persen.

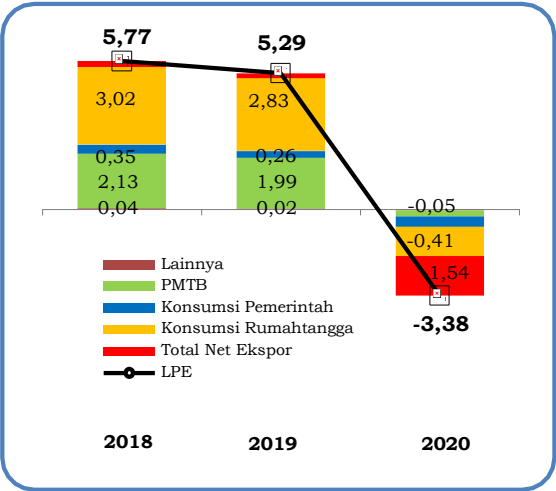
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten tahun 2020 (*c-to-c*), Komponen Total Net Ekspor dan Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Banten dengan berkontribusi negatif masing-masing sebesar 1,54 persen dan 1,15 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya sebesar negatif 0,69 persen.

Grafik II-4. Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Beberapa Komponen Tahun 2020 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Grafik II-5. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2020 (persen)

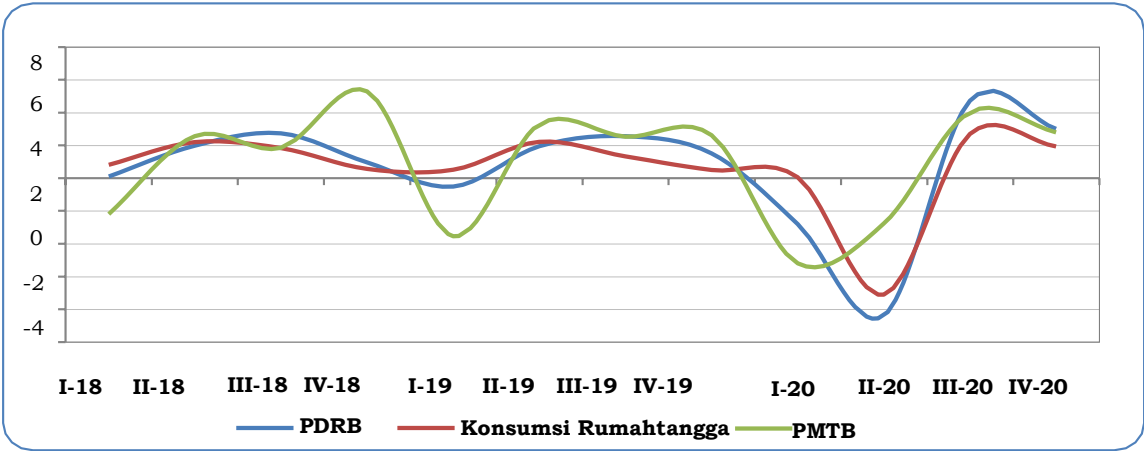


Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Struktur PDRB Banten menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Banten masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Banten yaitu sebesar 55,15 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 34,60 persen; Komponen Total Net Ekspor sebesar 5,42 persen; Komponen PK-P sebesar 4,36 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,47 persen.

Ekonomi Banten triwulan IV-2020 dibanding triwulan III-2020 (*q-to-q*) mengalami pertumbuhan sebesar 3,01 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di seluruh komponen pengeluaran. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,61 persen. Peningkatan realisasi belanja daerah di akhir tahun mendorong sektor pemerintah tumbuh lebih tinggi.

Grafik II-5. Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen (*q-to-q*) (persen)

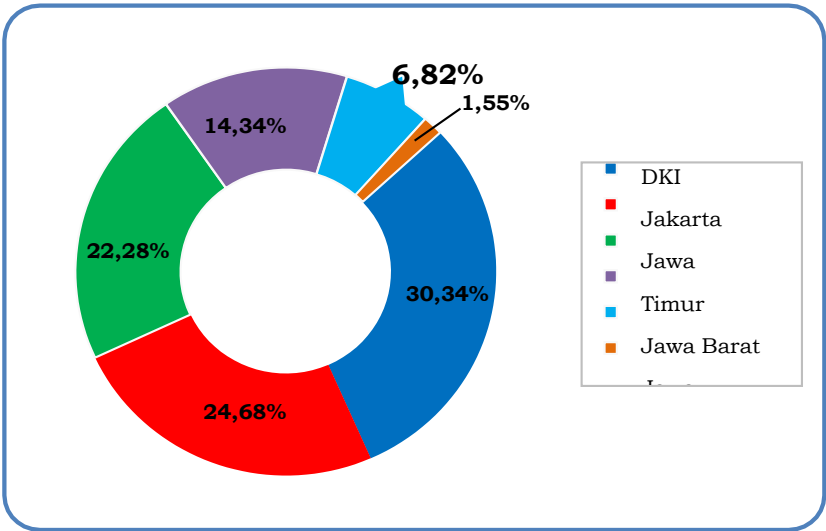


Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Berikutnya komponen Total Net Ekspor tumbuh sebesar 4,65 persen. Pertumbuhan kinerja perdagangan terkonfirmasi pada peningkatan kinerja ekspor luar negeri Banten lebih tinggi dibandingkan peningkatan impor luar negerinya selama triwulan IV-2020.

Komponen LNPRT juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,17 persen. Selanjutnya komponen PMTB tumbuh sebesar 2,81 persen dan terakhir komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 1,94 persen.

Grafik II -7. Peranan PDRB Provinsi se-Jawa Triwulan IV-2020 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Tabel II-5. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi se- Jawa (persen)

Provinsi	Triw III- 2020 Terhadap Triw II- 2020 <i>(q-to-q)</i>	Triw IV- 2020 Terhadap Triw III- 2020 <i>(q-to-q)</i>	Triw IV- 2020 Terhadap Triw IV- 2019 <i>(y-on-y)</i>	Laju Pertumbuh an 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKI Jakarta	8,41	2,54	-2,14	-2,36
Jawa Barat	3,39	0,22	-2,39	-2,44
Jawa Tengah	4,79	-1,89	-3,34	-2,65
DI Yogyakarta	9,25	3,18	-0,68	-2,69
Jawa Timur	6,06	-0,94	-2,64	-2,39
Banten	4,73	3,01	-3,92	-3,38
Pulau Jawa	5,85	0,49	-2,60	-2,51

Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2021

Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada triwulan IV-2020 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 30,34 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,68 persen, Provinsi

Jawa Barat sebesar 22,28 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 6,82 persen.

2. Inflasi

Pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60. Ketiga kota IHK di Provinsi Banten mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 107,08. Diikuti oleh kota Serang sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 107,42 dan kota Tangerang sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 105,04

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,97 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08; ; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,07 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen. Sementara kelompok yang lainnya mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,55 persen; kelompok transportasi sebesar 0,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,07 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan mengalami perubahan indeks namun tidak signifikan sebesar kurang dari 0,01 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) adalah sebesar 1,45 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Banten di 3 kota, pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,38 pada November 2020 menjadi 105,60 pada Desember 2020. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) adalah sebesar

1,45 persen. Perkembangan laju inflasi menurut kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel II.6 berikut:

Tabel II-6. IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 3 Kota IHK Provinsi Banten Desember 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2019	IHK Desember 2019	IHK November 2020	Tingkat Inflasi November 2020 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi November 2020 (%)
Umum (Headline)	104,10	105,38	105.38	0,21	1.45	1.45	0.21
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,10	105,71	105.71	0.97	2,53	2.53	0.25
Pakaian dan Alas Kaki	103,00	105,80	105.80	0,08	2,81	2.81	0.00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	105,02	105.05	105.05	0.02	0.05	0.05	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106.66	108,93	108.93	-0,10	2.03	2.03	-0,01
Kesehatan	103.56	104,45	104.45	0.04	0.89	0.89	0.00
Transportasi	103.98	103.16	103.16	-0.18	-0.96	-0.96	-0.02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	92.58	92.00	92.00	0.00	-0.63	-0.63	0.00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	106.26	106.82	106.82	-0.07	0.45	0.45	0.00
Pendidikan	106.37	107,05	107.05	0.00	0.65	0.65	0.00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	103.70	105,52	105.52	0.07	1.82	1.82	0.01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	107.18	116,64	116.64	-0,55	8.23	8.23	-0.03

¹⁾ Persentase perubahan IHK November 2020 terhadap IHK November 2020.

²⁾ Persentase perubahan IHK November 2020 terhadap IHK Desember 2019.

³⁾ Persentase perubahan IHK November 2020 terhadap IHK Desember 2019.

Sumber :BPS Provinsi Banten 2021

Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2020 ini sebanyak 226 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 80 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2020 antara lain: cabai merah, cabai rawit, tomat, telur ayam ras, kol putih/kubis, cabai hijau, ketimun, ikan kerapu, kembang gula dan telur asin. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2020, antara

lain: petai, bawang merah, buncis, buah naga, melon, emas perhiasan, anggur, kemiri, ayam hidup dan gula merah.

Pada Desember 2020 dari 11 kelompok pengeluaran, 3 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi diatas atau sama dengan 0,01 persen, 3 kelompok memberikan andil/sumbangan deflasi dibawah atau sama dengan 0,01 persen, dan 5 kelompok memberikan andil kurang signifikan atau kurang dari 0,01 persen. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi diatas atau sama dengan 0,01 persen, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,25 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya dan kelompok Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran masing-masing sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,03 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,02 persen, serta kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok Pakaian dan Alas Kaki, kelompok Kesehatan, kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan, kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya serta kelompok Pendidikan masing-masing memberikan andil/sumbangan inflasi/deflasi kurang dari 0,01 persen

Beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, minyak goreng, kopi bubuk, bayam, tomat, sabun mandi dan susu cair kemasan. Sementara komoditas yang dominan menyumbang deflasi pada bulan Desember ini adalah komoditas: emas perhiasan, bawang merah, angkutan udara, pepaya, melon, pisang, anggur, sabun detergen bubuk, jeruk dan pir.

3. Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan

Pada September 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,365. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,363.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,361 naik dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,360.

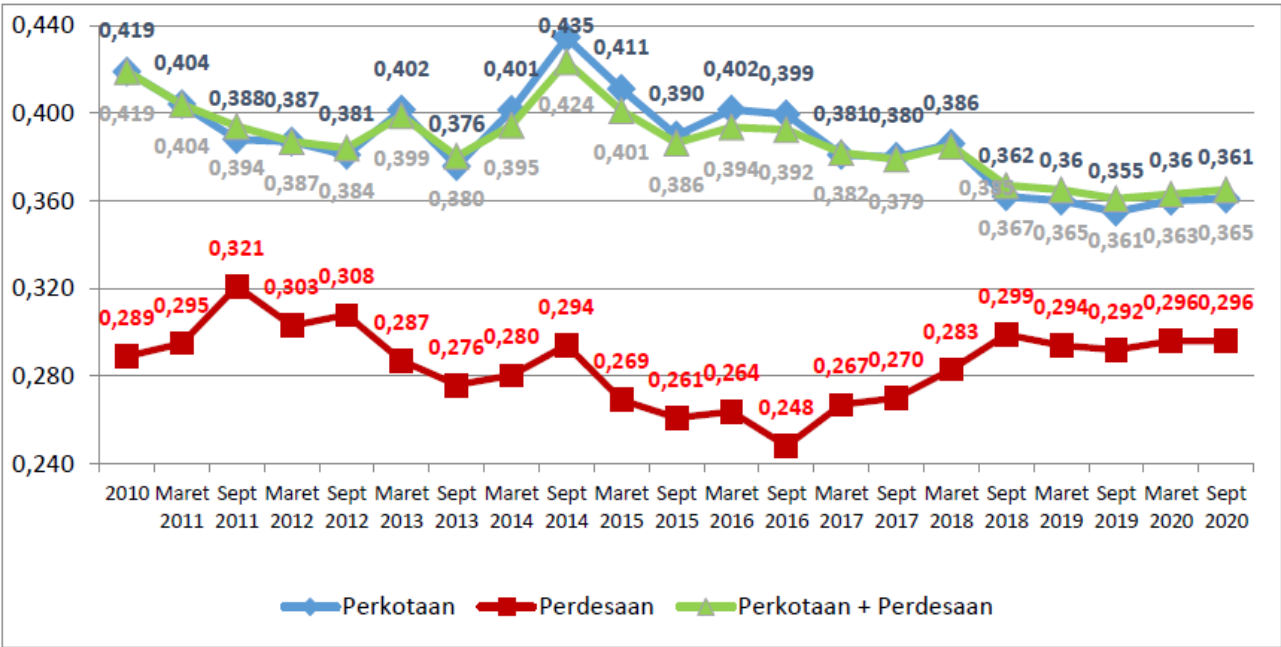
Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2020 masih sama seperti Maret 2020 yaitu sebesar 0,296.

Pada September 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,71 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,99 persen dan di daerah perdesaan sebesar 22,00 Persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel II-7. Gini Rasio Provinsi Banten Tahun 2017-2020

Klasifikasi Daerah	2017	2018	2019	2020
Perkotaan	0,380	0,362	0,355	0,361
Perdesaan	0,270	0,299	0,292	0,296
Perkotaan + Perdesaan	0,379	0,367	0,361	0,365

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021 (data tiap September)



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010-September 2020

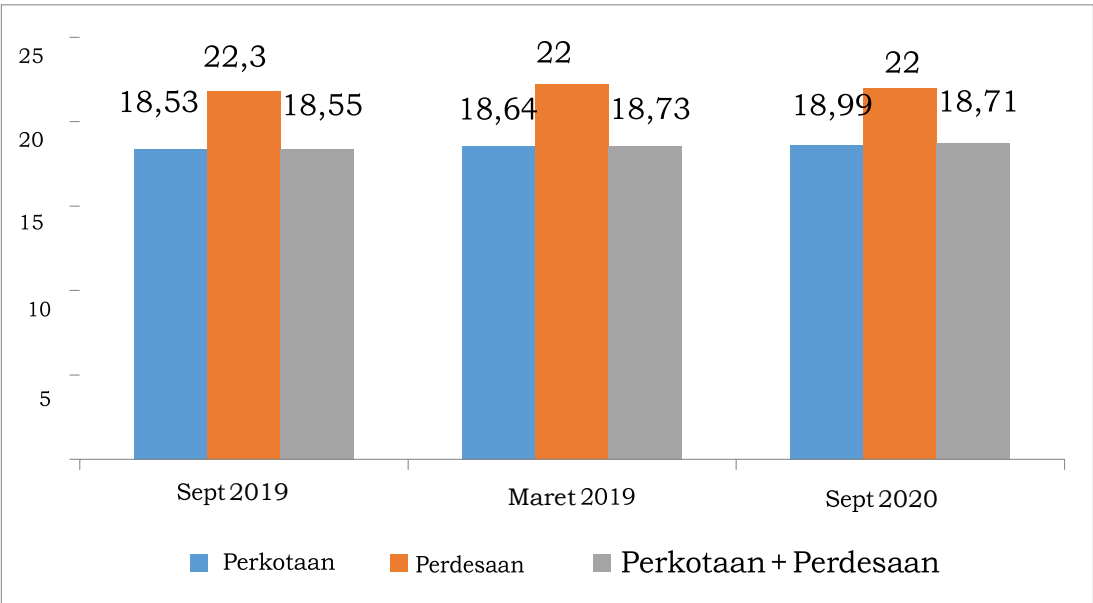
Gambar II-6. Perkembangan Gini Ratio Banten, 2010 – September 2020

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada tahun 2010 Gini Ratio Banten tercatat sebesar 0,419. Angka ini terus bergerak turun hingga September 2012 yaitu sebesar 0,384. Pada September 2014 nilai Gini Ratio mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada

periode Maret 2015 - September 2020 nilai Gini Ratio menunjukkan kecenderungan fluktuatif hingga mencapai angka 0,365.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,361. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,360. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,296, masih sama seperti angka Gini Ratio Maret 2020. Nilai Gini Ratio di perdesaan lebih kecil dibandingkan di perkotaan. Artinya ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih rendah.

Tabel II-8. Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40 Persen Terbawah September 2019, Maret 2019 dan September 2020 (Persentase)



Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2019, Maret 2020 dan September 2020

4. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2020 sebesar 6,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2020) yang sebesar 5,92 persen. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin sebanyak 81,65 ribu orang dari 775,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 857,64 ribu orang pada September 2020.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2020 sebesar 5,03 persen naik menjadi 5,85 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 8,18 persen naik menjadi 8,57 persen pada September 2020.

Selama periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 67,31 ribu orang (dari 472,84 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 540,15 ribu orang pada September 2020), demikian pula di daerah perdesaan naik sebanyak 14,35 ribu orang (dari 303,14 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 317,49 ribu orang pada September 2020).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2020, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,89 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 71,78 persen.

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2020 di perkotaan dan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, susu bubuk, serta kopi bubuk & kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Tabel II-9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2020 - September 2020

DAERAH/TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
Perkotaan		
Maret 2020	472,84	5,03
September 2020	540,15	5,85
Perdesaan		
Maret 2020	303,14	8,18
September 2020	317,49	8,57
Perkotaan/Perdesaan		
Maret 2020	775,99	5,92
September 2020	857,64	6,63

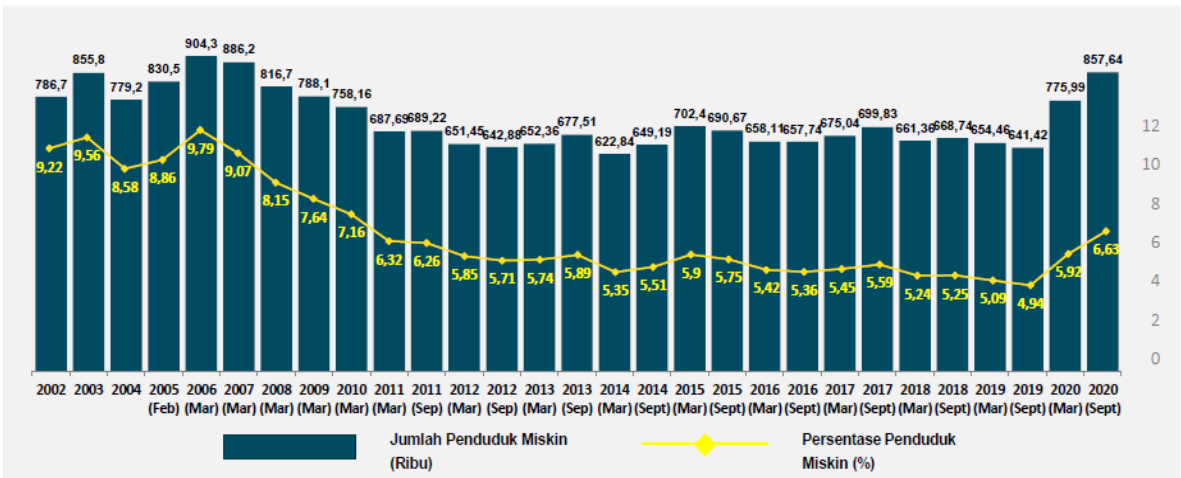
Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan September 2020 mencapai 6,63 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2020, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,71

poin (dari posisi 5,92 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,03 persen menjadi 5,85 persen dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 8,18 persen pada Maret 2020 menjadi 8,57 persen pada September 2020.

Sejalan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 81,65 ribu orang dari 775,99 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 857,64 ribu orang pada bulan September 2020.

Gambar berikut menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan 2020:



Gambar II-7. Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Banten, 2002-September 2020
 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Catatan : * Hasil backcasting dengan menggunakan penimbang Proyeksi Penduduk 2010-2035
 Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selain di tingkat provinsi, jumlah dan persentase penduduk miskin di kabupaten/kota juga mengalami penurunan dengan besaran yang Secara umum, pada periode 2002–2020 tingkat kemiskinan di Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari

kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode Maret 2020 dan September 2020 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19. Gambar 1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan September 2020.

Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-10. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	Jumlah (Ribuan Jiwa)			Presentase		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	116.16	114.09	120,44	9.61	9.42	9,92
Kab Lebak	108.81	107.93	120,83	8.41	8.30	9,24
Kab Tangerang	190.05	193.97	242,02	5.18	5.14	6,23
Kab Serang	64.46	61.54	74,80	4.30	4.08	4,94
Kota Tangerang	103.49	98.37	118,22	4.76	4.43	5,22
Kota Cilegon	13.96	13.20	16,31	3.25	3.03	3,69
Kota Serang	36.21	36.21	42,24	5.36	5.28	6,06
Kota Tangerang Selatan	28.21	29.16	40,99	1.68	1.68	2,29
Provinsi Banten	661.36	654.46	775,99	5.24	5.09	5,92

Sumber : BPS Banten Dalam Angka, 2021

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa meskipun angka kemiskinan di tingkat provinsi berada di kisaran 5 persen, di Kabupaten/Kota masih ada yang lebih tinggi dari 5%, dengan kinerja penurunan angka kemiskinan yang bervariasi antar Kabupaten/Kota.

5. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel dibawah menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada periode Maret 2020-September 2020.

Tabel II-61. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Banten Tahun 2017-2020

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makan	Total
<i>Perkotaan</i>			
Maret 2020	374.474	153.303	527.777
September 2020	376.950	155.147	532.096
Perubahan (%)	0,66	1,20	0,82
<i>Perdesaan</i>			
Maret 2020	342.546	118.175	460.721
September 2020	355.550	118.937	474.487
Perubahan (%)	3,80	0,64	2,99
<i>Perkotaan+ Perdesaan</i>			
Maret 2020	364.725	143.367	508.091
September 2020	370.293	144.818	515.110
Perubahan (%)	1,53	1,01	1,38

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 dan September 2020

Selama periode Maret 2020-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,38 persen, yaitu dari Rp 508.091,- per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp 515.110,- per kapita per bulan pada September 2020. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Sumbangan GKM terhadap GK pada September 2020 adalah sebesar 71,89 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan Maret 2020 yang sebesar 71,78 persen.

Tabel II-7. Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, September 2020

Komoditi	Perkotaan	Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Makanan</i>			
<i>Rokok kretek filter</i>	18,13	<i>Beras</i>	22,09
<i>Beras</i>	12,63	<i>Rokok kretek filter</i>	15,54
<i>Susu Bubuk</i>	3,77	<i>Telur ayam ras</i>	3,93
<i>Telur ayam ras</i>	3,32	<i>Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)</i>	3,43
<i>Daging ayam ras</i>	2,58	<i>Daging ayam ras</i>	3,10
<i>Bukan Makanan</i>			
<i>Perumahan</i>	10,38	<i>Perumahan</i>	11,09
<i>Bensin</i>	4,22	<i>Bensin</i>	2,17
<i>Listrik</i>	2,34	<i>Listrik</i>	1,10
<i>Pendidikan</i>	1,69	<i>Perlengkapan mandi</i>	0,98
<i>Perlengkapan mandi</i>	0,69	<i>Pendidikan</i>	0,95

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020

Pada September 2020, rokok kretek filter masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan (18,13%) sedangkan di perdesaan yang berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan adalah beras (22,09%). Keempat komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras (12,63%), susu bubuk (3,77%), telur ayam ras (3,32%), dan daging ayam ras (2,58%). Sedangkan di daerah perdesaan, empat komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut-turut adalah rokok kretek filter (15,54%), telur ayam ras (3,93%), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (3,43%) serta daging ayam ras sebesar 3,10%.

Sementara komoditi non makanan pemberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan (10,38%), bensin (4,22%), listrik (2,34%), pendidikan (1,69%) dan perlengkapan mandi (0,69%). Di perdesaan lima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (11,09%), bensin (2,17%), listrik (1,10%), perlengkapan mandi (0,98%) dan biaya pendidikan sebesar 0,95%.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan, selain jumlah dan persentase penduduk miskin, adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain berupaya memperkecil jumlah penduduk miskin, juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang menggambarkan kesejahteraan penduduk miskin.

Pada periode Maret 2020-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,995 pada Maret 2020 menjadi 1,141 pada September 2020. Demikian pula Indeks Keparahannya Kemiskinan naik dari 0,229 menjadi 0,345 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tabel II-8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Banten Menurut Daerah, September 2019 – Maret 2020

Komoditi	Kota	Desa	Kota + Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2020	0,842	1,381	0,995
September 2020	0,980	1,543	1,141
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2020	0,195	0,317	0,229
September 2020	0,301	0,455	0,345

Sumber : BPS Provinsi Banten(Susenas), 2021

Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan nilai P1 naik dari 0,842 pada Maret 2020 menjadi 0,980 pada September 2020, dan nilai P2 naik dari 0,195 menjadi 0,301 pada periode yang sama. Sementara di perdesaan nilai P1 naik 0,161 poin dan nilai P2 naik 0,138 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perdesaan masih terpuruk.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selama periode Maret 2020-September 2020 antara lain adalah:

1. Laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2020 sebesar -5,77 persen, lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2020 (3,09 persen), meskipun tidak berkorelasi langsung.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) September 2020 sebesar 101,97 lebih rendah dibanding Maret 2020 sebesar 106,01. NTP di atas 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani lebih baik.
3. Inflasi Pedesaan periode Maret 2020-September 2020 sebesar 0,38 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode Maret 2020-September 2020 sebesar 0,30 persen.
4. Terjadi kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 2,53 poin, dimana pada Agustus 2019 sebesar 8,11 persen meningkat menjadi 10,64 persen pada Agustus 2020.

Tabel II-9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

NO.	JENIS PMKS	JUMLAH	KET.
1	Rumah Tangga Miskin (RTM)	648,660	KK
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	69,606	Jiwa
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	2,839	KK
4	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	6,368	KK
5	Anak Balita Terlantar	14,312	Jiwa
6	Anak Terlantar	111,215	Jiwa

NO.	JENIS PMKS	JUMLAH	KET.
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1,010	Jiwa
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	93	Jiwa
9	Anak Jalanan	646	Jiwa
10	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	2,798	Jiwa
11	Anak yang Menjadi KTK / Diperlakukan Salah	125	Jiwa
12	Lanjut Usia Terlantar	59,771	Jiwa
13	Gelandangan	462	Jiwa
14	Pengemis	706	Jiwa
15	Pemulung	6,070	Jiwa
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	1,556	Jiwa
17	Korban Penyalahgunaan Napza	1,465	Jiwa
18	Tuna Susila	289	Jiwa
19	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	765	Jiwa
20	Kelompok Minoritas	255	Jiwa
21	Penyandang Disabilitas	27,539	Jiwa
22	Korban Tindak Kekerasan	188	Jiwa
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	185	Jiwa
24	Korban <i>Trafficking</i>	64	Jiwa
25	Korban Bencana Alam	36,211	Jiwa
26	Korban Bencana Sosial	17,186	Jiwa

Tabel II-10. Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

NO.	JENIS PSKS	JUMLAH	KET.
1	Pekerja Sosial Profesional	46	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	5,241	Orang
3	Karang Taruna	1,397	Lembaga
4	Dunia Usaha yang melakukan UKS	157	Badan Usaha
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	684	Lembaga
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	155	Orang
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1,450	Orang
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	770	Lembaga
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	17	Lembaga
10	Keluarga Pioner	396	Orang
11	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	581	Orang
12	Penyuluh Sosial :		Orang
	a. Penyuluh Sosial Fungsional	-	Orang
	b. Penyuluh Sosial Masyarakat	2,576	Orang

Sumber : Data PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Povinsi Banten Tahun 2020

Jika dibandingkan dengan Provinsi terdekat, penduduk miskin di Provinsi Banten lebih banyak dibanding DKI Jakarta, namun dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten lebih rendah, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel II-11. Tingkat Kemiskinan Provinsi banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat September 2020

Provinsi	Tingkat kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
Banten	6,63	857,64
Dki Jakarta	4,69	496,84
Jawa Barat	8,43	4.188,52
Indonesia	10,19	27.549,69

Sumber: BPS Pusat, 2021 (Diolah)

6. Indeks Fokus Pembangunan Manusia (IPM)

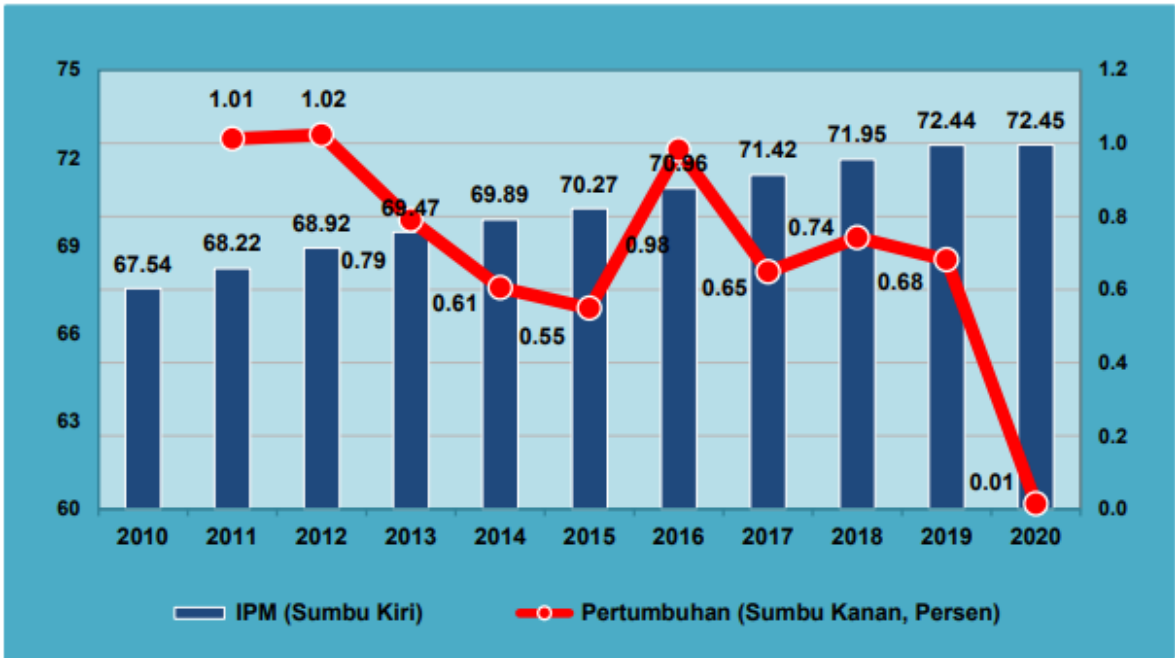
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan manusia dalam memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial dan politik. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pengetahuan, serta indeks pengeluaran. Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat tercermin dari IPM.

IPM di Provinsi Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2020, IPM Banten mencapai 72,45, atau meningkat 0,01 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 72,44. Selama sepuluh tahun terakhir ini, IPM Banten telah meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2020.

Sebagai sebuah indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah, terdapat dua aspek dari IPM yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Apabila dari aspek pencapaian selalu meningkat, dari aspek pertumbuhan atau kecepatan kemajuan, IPM Banten pada tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM pada tahun 2020 yang hanya 0,01 persen, lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 0,68 persen.

Secara umum pembangunan manusia Banten selama sepuluh tahun terakhir ini, secara konsisten terus mengalami kemajuan. Dimana, IPM Banten meningkat dari 67,54 pada tahun 2010 menjadi 72,45 pada tahun 2020. Hanya saja, pertumbuhan atau kecepatan kemajuannya pada

tahun 2020 mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 1). Selain itu, status pembangunan manusianya masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$).. Secara rinci, capaian dan pertumbuhan IPM Banten disajikan pada Gambar berikut:



Gambar II-8. Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2020

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2020, mencapai 69,96 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2020 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 69 tahun 11 bulan. Sepanjang periode 2010 hingga 2019, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,46 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 telah mencapai 12,89 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2019, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II di

perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2020 telah mencapai 8,89 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2020 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Malah, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara rinci, perkembangan IPM Banten berdasarkan komponen pembentuknya dari Tahun 2010 sampai dengan 2019, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-12. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten Menurut Komponen Tahun 2010-2020

Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Harapan Hidup Saat lahir (UHH, Tahun)	68,50	68,68	68,86	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49	69,64	69,84	69,96
Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	11,02	11,41	11,79	12,05	12,31	12,35	12,70	12,78	12,85	12,88	12,89
Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	7,92	7,95	8,06	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53	8,62	8,74	8,89
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (PKP, Ribuan Rupiah)	10.777	10.933	11.008	11.061	11.150	11.261	11.469	11.659	11.994	12.267	11.964
IPM	67,54	68,22	68,92	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45
Pertumbuhan IPM (Persen)	-	1,01	1,02	0,79	0,61	0,55	0,98	0,65	0,74	0,68	0,01

Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota pada tahun 2020 cukup bervariasi, dengan IPM tertinggi dicapai oleh Kota Tangerang

Selatan (81,36) dan terendah pada Kabupaten Lebak (63,91). Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel II-13. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2020

KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019	2020
Kab Pandeglang	63.82	64,34	64,91	65,00
Kab Lebak	62.95	63,37	63,88	63,91
Kab Tangerang	70.97	71,59	71,93	71,92
Kab Serang	65.6	65,93	66,38	66,70
Kota Tangerang	77.01	77,92	78,43	78,25
Kota Cilegon	72.29	72,65	73,01	73,05
Kota Serang	71.31	71,68	72,10	72,16
Kota Tangerang Selatan	80.84	81,17	81,46	81,36
Provinsi Banten	71.42	71,95	72,44	72,45

Sumber : BPS Provinsi Banten 2021

Dari kecepatan atau pertumbuhan IPM nya, tercatat, Kabupaten Serang tumbuh 0,48 persen, sehingga menjadi daerah yang pembangunan manusianya mengalami kemajuan paling pesat. Kemajuannya itu didorong oleh cepatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Sementara Kota Tangerang yang penurunan IPM nya paling besar, dipengaruhi turunnya dimensi standar hidup layak serta lambatnya perbaikan pada dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan.

Tabel II-14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional se Jawa Menurut Komponen Tahun 2020

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribu Rupiah)	IPM		Peringkat Nasional
					Nilai	Pertumbuhan (Persen)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DKI Jakarta	72,91	12,98	11,13	18.227	80,77	0,012	1
DI Yogyakarta	74,99	15,59	9,55	14.015	79,97	-0,025	2
Kalimantan Timur	74,33	13,72	9,77	11.728	76,24	-0,483	3
Kepulauan Riau	69,96	12,87	10,12	14.209	75,59	0,146	4
Bali	72,13	13,33	8,95	13.929	75,50	0,159	5
Sulawesi Utara	71,69	12,85	9,49	10.791	72,93	-0,082	6
Riau	71,60	13,20	9,14	10.675	72,71	-0,397	7
BANTEN	69,96	12,89	8,89	11.964	72,45	0,014	8
Sumatera Barat	69,47	14,02	8,99	10.733	72,38	-0,014	9

Provinsi	Umur Harapan Hidup (UHH, Tahun)	Harapan Lama Sekolah (HLS, Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS, Tahun)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP, Ribu Rupiah)	IPM		Peringkat Nasional
					Nilai	Pertumbuhan (Persen)	
Jawa Barat	73,04	12,50	8,55	10.845	72,09	0,083	10
Indonesia	71,47	12,98	8,48	11.013	71,94	0,028	-

Sumber : BPS Pusat 2021

Pencapaian pembangunan manusia Banten selama setahun terakhir ini di antara provinsi dalam peringkat 10 besar di Indonesia, hanya kalah dari Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Kondisi yang demikian ditandai oleh pertumbuhan angka IPM nya yang menempati urutan keempat. Hanya

saja, kecepatannya itu ternyata masih di bawah rata-rata Nasional yang mencapai 0,03 persen. Meskipun demikian, angka IPM Banten tetap berada pada peringkat kedelapan tertinggi di Indonesia (Tabel diatas).

Betapapun juga, bila besaran angka dan peringkat IPM Banten tidak ingin dilampaui oleh Provinsi Sumatera Barat dan Jawa Barat, harus dilakukan perbaikan pada beberapa dimensi/komponen pembentuk. Pertama, capaian pada dimensi umur panjang dan hidup sehat harus diperbaiki kembali. Hal ini karena, capaiannya bukan saja berada pada peringkat kesembilan dan di bawah Provinsi Jawa Barat, bahkan masih lebih rendah dari rata-rata Nasional.

Kedua, capaian pada dimensi pengetahuan, khususnya pada komponen Harapan Lama Sekolah, harus terus ditingkatkan. Hal ini karena dalam jangka panjang, capaiannya tersebut dapat mempengaruhi capaian komponen Rata- rata Lama Sekolah. Adapun capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Banten memang masih berada pada peringkat ketujuh dan kesembilan, namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pilihan;
4. Urusan Pelayanan Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa asas desentralisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi banten sebagai daerah otonom merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;
3. Peningkatkan Daya Saing Daerah, Mitigasi Bencana dan Integrasi Antar Wilayah;
4. Pemantapan Tata kelola Pemerintahan.

NO	UPAYA	FOKUS
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Penciptaan Lapangan Kerja	- peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemenuhan biaya pendidikan, - peningkatan kualitas SDM kesehatan, - pengurangan kemiskinan, - penurunan angka pengangguran, - pengembangan kewirausahaan pemuda, - penanganan PMKS dan bansos, validasi

NO	UPAYA	FOKUS
		data kesejahteraan social
2.	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	- peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, - peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, - pengembangan destinasi pariwisata, - peningkatan hubungan industrial, - pengendalian inflasi daerah, - pengembangan pusat distribusi -
3.	Peningkatkan Daya Saing Daerah, Mitigasi Bencana dan Integrasi Antar Wilayah	- Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur, - Pengendalian Pemanfaatan Lahan, - Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana, - Diversifikasi Pangan, - Pengembangan Produk Unggulan, - Penyediaan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian, - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup berkelanjutan -
4.	Peningkatkan Daya Saing Daerah, Mitigasi Bencana dan Integrasi Antar Wilayah	- Optimalisasi SIPD Yang Terintegrasi, - Peningkatan Reformasi Birokrasi, - Peningkatan Capaian SAKIP, - Peningkatan Profesionalitas ASN - Peningkatan Kerjasama Pemerintahan

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.

Daya dukung wilayah Provinsi Banten dalam menyediakan pangan bagi penduduknya pada tahun 2019 pph ketersediaanya sebesar 94,0 dengan rincian ketersediaan energi sebesar 2.593 kkal/kap/hari atau 108,1% AKE dan ketersediaan protein 84,94 g/kap/hari atau 134,82 % AKP. ketersediaan protein sebesar 31,19 g/kap/hari (49,5% AKP). Kualitas

(keanekaragaman) pangan yang dapat disediakan secara mandiri oleh Provinsi Banten yaitu sebesar 42,81 dari skor maksimal 100.

Jika berpedoman pada batas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari, yaitu 2.150 *kcal*, maka rata-rata konsumsi kalori penduduk Banten pada 2019 sudah mencapai standar kecukupan yakni hanya sebesar 2.248,65 *kcal*.

Tabel II-15. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (kcal) Tahun 2017-2019

Kelompok Makanan	2017	2018	2019
Padi-padian	861,81	850,90	828,63
Umbi-umbian	37,81	28,88	32,15
Ikan	50,83	53,03	53,64
Daging	87,87	76,48	78,74
Telur dan susu	72,63	78,48	71,23
Sayuran	33,47	34,41	37,80
Kacang-kacangan	60,35	58,58	55,84
Buah-buahan	47,64	52,58	44,78
Minyak dan lemak	262,06	265,54	277,35
Bahan minuman	78,76	73,99	77,51
Bumbu-bumbuan	14,56	13,84	12,79
Konsumsi lainnya	75,78	73,21	65,05
Makanan dan minuman jadi	565,76	601,85	613,15
Jumlah	2.249,33	2.261,77	2.248,65

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020

2. Nilai Tukar Petani

NTP (Nilai Tukar Petani) merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan

NTP Banten Februari 2021 sebesar 100,92, mengalami penurunan sebesar 0,24 persen dari NTP bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 0,04 persen lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,28 persen.

Pada Februari 2021 terjadi inflasi perdesaan di Provinsi Banten sebesar 0,26 persen. Inflasi terjadi pada delapan kelompok pengeluaran yaitu Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, Kelompok Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya, Kelompok Kesehatan , Kelompok Makanan, Minuman Dan Tembakau, Kelompok Transportasi, Kelompok Pakaian Dan Alas Kaki, Kelompok Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga dan Kelompok Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya, sedangkan Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami deflasi dan Kelompok Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan serta kelompok pendidikan tetap.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten Februari 2021 sebesar 100,39 atau turun 0,24 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya. Rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Februari 2021 mengalami penurunan untuk Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 1,35 persen dan Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 1,83 persen. Rata-rata harga gabah bulan Februari 2021 di tingkat petani kualitas GKG sebesar Rp. 4.714,- , GKP Rp. 4.275,- dan Kualitas Rendah Rp.3.846,- per Kg. Untuk kualitas GKG pada varietas Ciherang dengan harga terendah sebesar Rp. 4.500,- dan harga tertinggi sebesar Rp.5.200,- dengan varietas yang sama Ciherang.

Upah nominal buruh tani pada Februari 2021 Rp. 66.279,- per hari, naik 0,20 persen dari bulan sebelumnya, namun secara riil mengalami penurunan sebesar 0,06 persen, yaitu dari Rp. 60.760,- menjadi Rp.60.721,- per hari.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di empat Kabupaten di Provinsi Banten pada Februari 2021 NTP secara umum mengalami penurunan sebesar 0,24 persen dibandingkan NTP Januari 2021. Penurunan NTP yang terjadi pada Februari 2021 ini dikarenakan oleh rendahnya kenaikan indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 0,04 persen dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,28 persen.

Tabel II-16. Nilai Tukar Petani Provinsi Banten Bulan Februari 2021
(2018=100)

Rincian	Bulan		Persentase Perubahan
	Januari 2021	Februari 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Indeks yang diterima (It)	110,25	110,30	0,04
b. Indeks yang dibayar (Ib)	108,99	109,29	0,28
c. Indeks Konsumsi Rumah Tangga	108,87	109,15	0,26
d. Indeks BPPBM	109,56	109,88	0,28
e. Nilai Tukar Petani (NTP)	101,16	100,92	-0,24

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2021

Pada Februari 2021 ini, penurunan NTP terjadi pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,77 persen dan subsektor Peternakan sebesar 0,22 persen, sedangkan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 1,82 persen, begitupun untuk subsektor Perikanan yang naik sebesar 1,39 persen dan subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 0,94 persen.

Tabel II-17. Produksi Padi dan Beras menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten 2019

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Luas Panen (ha) <i>Harvested Area (ha)</i>	Produktivitas (ton/ha) <i>Productivity (ton/ha)</i>	Produksi (ton) <i>Production (ton)</i>
<i>Kabupaten/Regency</i>			
Pandeglang	83 996,17	4,99	419 229,97
Lebak	78 398,93	4,45	348 869,03
Tangerang	54 913,73	5,04	276 627,35
Serang	72 559,52	4,76	345 163,17
<i>Kota/Municipality</i>			
Tangerang	553,31	6,32	3 496,82
Cilegon	1 753,43	5,56	9 751,86
Serang	11 552,60	5,83	67 344,61
Tangerang Selatan	4,11	5,00	20,54
Banten	303 731,80	4,84	1 470 503,35

Sumber: BPS Provinsi Banten “Banten dalam angka 2021

Produksi padi dan beras pada tabel tersebut menunjukan wilayah Banten masih cukup punya kemampuan dalam memproduksi sektor pangan terutama Beras lumbung beras di Banten ada pada wilayah kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang. Untuk daerah Kota sendiri produksi mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena alih fungsi lahan yang cukup cepat. Untuk itu wilayah lumbung beras

akan diupayakan bisa meningkatkan produksinya agar ketahanan pangan Banten tetap terjaga.

Tabel II-18 Jumlah pelanggan, daya tersambung dan energi terjual perusahaan PLN di Provinsi Banten

Klasifikasi <i>Classification</i>	Jumlah Pelanggan <i>Number of Customers</i>	Daya Tersambung <i>Connected Power (kVA)</i>	Energi Terjual <i>Sold Electrical Energy (MWh)</i>
1. Sosial (S1, S2, S3) <i>Public</i>	64.033	234.316	315
2. Rumah Tangga (R1, R2, R3) <i>Household</i>	3.223.519	3.325.217	5.871
3. Bisnis (B1, B2, B3) <i>Business</i>	186.004	1.900.413	2.651
4. Industri (I1, I2, I3) <i>Industry</i>	6.829	5.632.918	13.027
5. Pemerintahan (P)	11.538	168.998	241
6. Lainnya (P, T, M) <i>Others</i>	5.035	85.719	246
Jumlah/ <i>Total</i>	3.496.958	11.347.580	22.352

Sumber : PT PLN (Persero) Distribusi Banten/State Electricity Distribution Company – Banten

Sejalan dengan kontribusi Industri yang paling utama dalam membentuk PDRB wilayah, bisa kita lihat dengan konsumsi daya listrik yang sebagian besar untuk memenuhi Industri sebesar 14.601 MWh. Untuk itu selain kebutuhan industri yang akan terus dipenuhi, rasio elektrifikasi dalam waktu dua tahun terakhir akan 100%.di wilayah-wilayah terpencil akan terus dilakukan peningkatan elektrifikasinya.

3. Rasio ketergantungan

Pada tahun 2019 Sebanyak 27,70 persen penduduk Banten berusia muda (0-14 tahun), 68,69 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 3,61 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Banten sebesar 45,42.

Kab/kota	Kondisi Jalan (Km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
Kota Cilegon	1,70	1,66	-	-
Kota Serang	41,07	11,00	-	-
Kota Tangsel	48,48	2,66	0,42	0,05
Banten	598,44	120,99	15,83	26,77

Sumber: BPS Banten Dalam Angka, 2021

Kondisi Jalan Lebar Menuju Standar Jalan Provinsi Banten yang sesuai standar target RPJMD adalah 128,17 km dengan sisa target Tahun 2022 95,94 Km, sedangkan Panjang Jalan Provinsi target RPJMD 194.70 Km dengan sisa target Tahun 2022 sepanjang 35,01 Km , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II-21. Target Kondisi Jalan Provinsi Banten Tahun 2022

OPD / URAIAN	TARGET KINERJA RPJMD/RENSTRA	REALISASI KINERJA		DIRENCANAKAN		SISA TARGET	SATUAN
	2017-2022	2018	2019	2020	2021	2022	
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
Panjang Jalan Provinsi	194.70	54,11	66,48	6,64	32,46	35,01	Km
Jalan Baru	15.08	-	-		16,21	-	Km
Jalan Standar Teknis 7 M	128.17	11,68	8,3	2,15	10,1	95,94	Km

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Banten Tahun 2020

Terminal bus merupakan transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Provinsi Banten pada Tahun 2019 memiliki 3 terminal tipe A, 8 terminal tipe B dan 12 terminal tipe C. Sarana prasarana terminal pada tiap tahunnya akan selalu dilengkapi dengan fasilitas utama dan pendukung untuk kenyamanan para pengguna, dimana hal ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas penduduk supaya lebih nyaman. Untuk membantu mengatasi kemacetan pada ruas jalan utama pada wilayah perkotaan, diperlukan upaya untuk mengurangi beban lalu lintas jalan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Peningkatan layanan angkutan umum penumpang di perkotaan perlu ditingkatkan kenyamanan, kehandalan serta keamanannya melalui pengembangan transportasi massal perkotaan dan Terminal untuk meningkatkan pariwisata daerah dan meningkatkan sektor jasa, terminal dan klarifikasi terminal di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-22. Terminal dan klasifikasi terminal di Provinsi Banten

No.	Lokasi	Nama Terminal	Klasifikasi
1.	Kota Serang	1) Terminal Pakupatan	Tipe A
		2) Terminal Cipocok	Tipe B
		3) Terminal Kepandean	Tipe C
2.	Kabupaten Serang	4) Terminal Anyer	Tipe C
3.	Kabupaten Pandeglang	5) Terminal Labuan	Tipe B
		6) Terminal Anten	Tipe C
		7) Terminal Lampe Labuan	Tipe C
4.	Kabupaten Lebak	8) Terminal Kadu Agung	Tipe B
		9) Terminal Malingping	Tipe B
		10) Terminal Sunan Kalijaga	Tipe C
		11) Terminal Bayah	Tipe C
		12) Terminal Binuangen	Tipe C
5.	Kota Cilegon	13) Terminal Merak	Tipe A
		14) Terminal Seruni	Tipe B
6.	Kabupaten Tangerang	15) Terminal Kp. Melayu	Tipe C
		16) Terminal Balaraja	Tipe B
7.	Kota Tangerang	17) Terminal Porisplawad	Tipe A
		18) Terminal Cimone	Tipe B
		19) Terminal Ciledug	Tipe B
		20) Terminal Cibodasari	Tipe C
		21) Terminal Pasar Baru	Tipe C
8.	Kota Tangerang Selatan	22) Terminal Pondok Cabe 23) Terminal Bumi Serpong Damai	Tipe C

Sumber:Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam “Perhubungan dalam angka 2019”

5. Kondisi Sektor Industri dan Perbankan

Kondisi sektor industri di Provinsi Banten terdapat 2.515 Perusahaan, jumlah industri terbanyak ada pada Kabupaten Tangerang yang memiliki 1.148 perusahaan namun dalam sisi nilai produksi Kota Cilegon memiliki nilai produksi yang cukup tinggi dengan 105 industri. Artinya untuk industri padat karya ada pada daerah Tangerang Raya namun Industri padat modal ada pada wilayah Industri Cilegon. Daerah indutri lain seperti Kabupaten Serang juga merupakan hal yang bisa kita pastikan potensial untuk terus berkembang. Penanaman modal dan nilai investasi di Banten terus naik dan kondusivitas wilayah baik dari sisi keamanan dan perizinan akan terus diperbaiki sebagai upaya Banten sebagai tujuan investasi utama di Jawa, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-23. Jumlah Perusahaan, tenaga kerja, Investasi, dan nilai Produksi pada Industri Besar dan sedang Menurut kabupaten/kota di Provinsi Banten, 2018

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Perusahaan <i>Number of Companies</i>	Tenaga Kerja <i>Number of Employees</i>	Investasi (ribu rupiah) <i>Investment (thousand rupiahs)</i>	Nilai Produksi (ribu rupiah) <i>Production Value (thousand rupiahs)</i>
<i>Kabupaten/Regency</i>				
Pandeglang	10	515	...	376 377 911
Lebak	32	5.802	...	7 321 353 453
Tangerang	1 148	252.332	...	246 285 358 501
Serang	256	67.109	...	112 628 890 875
<i>Kota/Municipality</i>				
Tangerang	792	179 462	...	166 019 743 150
Cilegon	105	21 932	...	134 939 619 394
Serang	38	2 045	...	786 280 915
Tangerang Selatan	134	25 979	...	30 152 414 467
Banten	2 515	555 176	...	698 510 038 666

Sumber:Banten Dalam Angka 2021

Tabel posisi kredit mikro menunjukan bahwa 3 tahun terakhir usaha UMKM di Banten menunjukan kenaikan dalam upaya pengembangan usahanya. Kredit modal kerja dan investasi menunjukan bahwa sektor UMKM di Provinsi Banten bisa lebih berupaya untuk meningkatkan peluang dan semakin sejahtera.Dalam situasi wabah covid 19, sektor UMKM banyak terdampak dari situasi ini, upaya recovery ekonomi akan di maksimalkan dengan fokus pada upaya tumbuhnya UMKM yang dimasa covid 19 ini terdampak dan menjadi gulung tikar.

Tabel II-24. Posisi Kredit Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan di Provinsi Banten

Jenis Penggunaan <i>Type of Loans</i>	2018	2019	2020
1. Modal Kerja <i>Working Capital</i>	33 703 426	35 396 237	34 164 813
2. Investasi <i>Investment</i>	11 613 452	13 606 236	11 999 170
3. Konsumsi <i>Consumption</i>	-	-	-
Jumlah/ <i>Total</i>	45 316 877	49 002 473	46 163 983

Sumber:Banten Dalam Angka 2021

Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha dalam upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada akhir RPJMD 2022 sebesar 6.10%. Terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun

oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten yang dievaluasi setiap triwulan. Pada tahap penyusunan RKPD Provinsi Banten tahun 2022 telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 sampai triwulan IV.

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Triwulan IV Tahun 2020

Rencana program dan kegiatan disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 dan sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 besarnya rencana anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.526.871.021.802,00 serta Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 dilaksanakan melalui 179 program dan 1.082 kegiatan yang tersebar di 42 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

A. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja serta terjadi pelemahan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat.

B. Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 17 Urusan Bidang, 53 program dan 214 kegiatan yang tersebar di 13 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi; Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Perhubungan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Capaian Pelaksanaan kinerja Program berdasarkan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar terdapat poin penting antara lain :

1. Capaian terhadap 119 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 111 indikator program (93%) dan belum tercapai sebanyak 8 indikator program (7%);
2. Faktor pendukung dalam Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah:
 - Komitmen pimpinan baik dari Gubernur dan wakil Gubernur sampai pada tingkat Kepala Perangkat Daerah;
 - Kemudahan layanan perijinan dengan menggunakan Teknologi Informasi serta transparansi;
 - Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Layanan transportasi berupa penyediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
 - Peningkatan budaya literasi serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan program pembangunan;
3. Faktor penghambat dalam urusan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah:

- Adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sehingga Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan *Refocusing* anggaran sebanyak tiga kali. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pendanaan program kegiatan yang berdampak terhadap pencapaian target kinerja;
- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Covid-19 juga berpengaruh terhadap Dunia Usaha dan Dunia Industri, yang berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja serta terjadi pelemahan pada sektor ekonomi yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat;
- Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data teknis;

C. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang, 31 program dan 145 kegiatan yang tersebar di 6 Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pariwisata; Dinas Pertanian; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Capaian pelaksanaan kinerja program berdasarkan Urusan Pilihan terdapat poin penting antara lain:

1. Capaian terhadap 87 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 82 indikator program (94%) dan belum tercapai sebanyak 5 indikator program (6%);
2. Faktor pendukung dalam Urusan Pilihan adalah:
 - Komitmen pimpinan;
 - Dukungan kebijakan/regulasi dan kelembagaan, serta
 - Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian terutama dalam masa pandemi Covid-19;
3. Faktor penghambat dalam urusan Urusan Pilihan adalah:
 - Kondisi iklim/cuaca yang tidak mendukung;
 - Kompetensi SDM yang menguasai Teknologi Informasi masih terbatas;

- Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung mobilitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- Tidak stabilnya jaringan internet sehingga terdapat kendala saat melakukan pertemuan melalui daring maupun untuk upload dokumen.

D. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang, 47 program dan 234 kegiatan yang tersebar di 17 Perangkat Daerah, yaitu: Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pendapatan Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; Badan Penghubung; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Pembangunan Daerah; Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan; Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Biro Bina Perekonomian; Biro Hukum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Organisasi; Biro Pemerintahan; Biro Umum; Inspektorat; dan Sekretariat DPRD.

Capaian pelaksanaan kinerja program berdasarkan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdapat poin penting antara lain :

1. Capaian terhadap 150 indikator kinerja program, dengan kondisi telah tercapai sebanyak 149 indikator program (99%) dan belum tercapai sebanyak 1 indikator program (1%);
2. Faktor pendukung dalam urusan Urusan Penunjang adalah:
 - Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) artinya pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten sudah berjalan baik;

- Terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian;
- Perjanjian Kinerja yang berakibat pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggungjawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan prima;

3. Faktor penghambat dalam urusan Urusan Penunjang adalah:

- Keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah masih belum optimal;
- Belum ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan *Grand Design* Teknologi Informasi (*Road Map E-Government*).

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program dan kegiatan berdasarkan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2020, sebagai berikut:

II.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi yang tidak melakukan perubahan RPJMD terkait dengan terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi , kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) namun provinsi Banten telah melakukan pemetaan Program dan Urusan dengan tetap mempertahankan target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berkenaan dengan hal tersebut didalam RKPD Tahun 2022 Provinsi Banten masih menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan amanat permendagri 13 Tahun 2006, sehingga tabel Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagai berikut :

Tabel 2.25
Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan								
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya penyusunan perencanaan dan Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan	4	4	100	
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya BinteK dan Pelatihan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	1	1	100	
				4	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	- Terlaksananya kualitas pelayanan Tata Usaha Cadin Dikbud Kab Lebak	4	4	100	
				5	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	- Terlaksananya kualitas Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	4	4	100	
				6	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon dan Kota Serang dan Kab. Serang	- Terlaksananya kualitas Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	4	4	100	
				7	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	- Terlaksananya kualitas pelayanan Tata Usaha Cabang Dindikbud Wilayah Kabupaten Tangerang.	4	4	100	
				8	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya kualitas pelayanan Tata Usaha Cadin Dikbud Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	4	4	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	- Terlaksananya Kualitas Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan	4	2	50	Adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19
				10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Taman Budaya dan Museum	- Terlaksananya kualitas Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Taman Budaya dan Museum	41	2	4,88	Adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19
				11	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4	4	100	
			Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	2. Program Pendidikan Khusus						
						1 Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	51	60,84	119,28	
				1	Peningkatan Kurikulum Pendidikan Khusus	- Terlaksananya kualitas kurikulum Sekolah khusus	100	0	0	Tidak ada alokasi anggaran karena dialihkan untuk penanganan COVID 19

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					3	Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	98,01	41,60	42,44	Sertifikasi Guru merupakan program dari kemendikbud dan kuota penambahan peserta sertifikasi ditentukan oleh kemendikbud dimana setiap tahunnya diberikan dengan jumlah yang tidak sama.
					4	Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	67,31	28,01	41,61	Sertifikasi Guru merupakan program dari kemendikbud dan kuota penambahan peserta sertifikasi ditentukan oleh kemendikbud dimana setiap tahunnya diberikan dengan jumlah yang tidak sama.
					5	Persentase Mutu guru SKH yang bersertifikat (Satuan: %)	100	35,03	35,03	Sertifikasi Guru merupakan program dari kemendikbud dan kuota penambahan peserta sertifikasi ditentukan oleh kemendikbud dimana setiap tahunnya diberikan dengan jumlah yang tidak sama.
				1	Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan Khusus	-	Terlaksananya Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA, Layanan Pendidikan Khusus	3	2	66,67

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
				2	Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK	- Terlaksananya Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK	3	2	66,67	Anggaran tidak terserap 100% karena adanya include paket dan efisiensi anggaran karena adanya perubahan luring menjadi daring	
				3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan	- Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan	1	0	0	tidak ada alokasi anggran dan sub kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan Cascading	
			Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	4.	Program Peningkatan Mutu Pembelajaran						
						1	Persentase pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan dan Kebudayaan (Satuan: %)	100	25	25	Karena kegiatan melibatkan orang banyak yang tidak memungkinkan dilakukan dimasa pandemi dan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid 19
				1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	- Terlaksananya Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikann	3	1	33,33	Karena adanya wabah Pandemi sehingga kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan	
				2	Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	- Terlaksananya Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	1	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19	
			Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	5.	Program penyelenggaraan pendidikan menengah dan khusus						
						1	Angka Putus Sekolah (Satuan: %)	0,24	0,43	55,38	

No	Ururan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					2	Angka Kelulusan (Satuan: %)	99,50	99,61	100,11	
					3	Nilai Rata-rata Ujian (Satuan: %)	54,14	77,32	142,81	
					4	Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	51	60,84	119,28	
					5	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	46,25	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					6	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	41,64	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					7	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	41,42	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					8	Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD Kabupaten Lebak (Satuan: %)	100	61,57	61,57	Karena keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan melibatkan banyak orang serta adanya pengalihan anggaran guna penanganan covid-19
					9	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	46,81	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					10	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	42,34	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					11	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	41,42	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					12	Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di KCD Kabupaten Pandeglang (Satuan: %)	100	69,33	69,33	Karena keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan melibatkan banyak orang serta adanya pengalihan anggaran guna penanganan covid-19
					13	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan: %)	52,23	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					14	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang (Satuan: %)	45,25	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					18	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	46,36	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					19	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kabupaten Tangerang (Satuan: %)	43,35	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					20	Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kabupaten Tangerang) (Satuan: %)	100	61,66	61,66	Karena keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan melibatkan banyak orang serta adanya pengalihan anggaran guna penanganan covid-19
					21	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPA di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	63,25	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					22	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMA IPS di di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	56,12	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					23	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMK di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	49,25	0	0	Sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) untuk Ujian Nasional ditahun 2020 tidak dilaksanakan
					24	Cakupan Layanan Pendidikan Khusus di wilayah KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan (Satuan: %)	100	65,24	65,24	Karena keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan melibatkan banyak orang serta adanya pengalihan anggaran guna penanganan covid-19
				1	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pandeglang	12	12	100	
				2	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Pandeglang	12	12	100	
				3	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Pandeglang	12	12	100	
				4	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Pandeglang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Pandeglang	12	12	100	
				6	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Pandeglang	12	12	100	
				7	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Pandeglang	12	12	100	
				8	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang - Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Pandeglang	12	12	100	
				9	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Pandeglang	12	12	100	
				10	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Pandeglang	12	12	100	
				11	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Pandeglang	12	12	100	
				12	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Pandeglang	12	12	100	
				13	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Pandeglang	12	12	100	
				14	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Pandeglang	12	12	100	
				15	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Pandeglang	12	12	100	
				16	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Pandeglang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Pandeglang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				29	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				30	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				31	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				32	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				33	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				34	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 16 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				35	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 17 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				36	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				37	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 19 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				38	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 20 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				39	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 21 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 21 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				40	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 22 Kabupaten Tangerang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				41	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 23 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				42	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 24 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 24 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				43	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 25 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				44	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 26 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				45	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 27 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				46	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 28 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				47	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 29 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				48	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Pandeglang	12	12	100	
				49	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Pandeglang	12	12	100	
				50	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Pandeglang	12	12	100	
				51	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Pandeglang	12	12	100	
				52	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Pandeglang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				53	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Pandeglang	12	12	100	
				54	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Pandeglang	12	12	100	
				55	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Pandeglang	12	12	100	
				56	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Pandeglang	12	12	100	
				57	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Pandeglang	12	12	100	
				58	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Pandeglang	12	12	100	
				59	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				60	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				61	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				62	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				63	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				64	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kabupaten Tangerang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				65	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				66	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				67	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				68	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 10 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				69	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 11 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				70	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Kabupaten Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 12 Kabupaten Tangerang	12	12	100	
				71	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Pandeglang	12	12	100	
				72	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	- Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	12	12	100	
				73	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	- Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	12	12	100	
				74	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	- Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				75	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	12	12	100	
				76	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Lebakwangi Kabupaten Serang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Lebakwangi Kabupaten Serang	12	12	100	
				77	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18 Pandeglang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 18 Pandeglang	12	12	100	
				78	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Panggarangan Kabupaten Lebak	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Panggarangan Kabupaten Lebak	12	12	100	
				79	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Waringinkurung Kab. Serang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Waringinkurung Kab. Serang	12	12	100	
				80	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Padarincang Kab. Serang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Padarincang Kab. Serang	12	12	100	
				81	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 13 Pandeglang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 13 Pandeglang	12	12	100	
				82	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Wanasalam Kab. Lebak	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Wanasalam Kab. Lebak	12	12	100	
				83	Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 03 Lebak	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 03 Lebak	12	12	100	
				84	Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Lebak	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SKHN 01 Lebak	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				93	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	- Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SKh Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	12	12	100	
				94	Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	12	12	100	
				95	Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	12	12	100	
				96	Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	12	12	100	
				97	Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	12	12	100	
				98	Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMA dan Kebudayaan pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				99	Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				100	Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Pandeglang	12	12	100	
				101	Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	12	12	100	
				102	Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Tangerang	12	12	100	
				103	Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan SMK dan SKh pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				104	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 14 Pandeglang	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 14 Pandeglang	12	12	100	
				105	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Banjarsari	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Banjarsari	12	12	100	
				106	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Banjarsari	12	12	100	
				107	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bayah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bayah	12	12	100	
				108	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Bayah	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Bayah	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				109	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojongmanik	12	12	100	
				110	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibadak	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibadak	12	12	100	
				111	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibeber	- Terlaksananya Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cibeber	12	12	100	
				112	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Cibeber	- Terlaksananya Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Cibeber	12	12	100	
				113	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cibeber	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cibeber	12	12	100	
				114	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cigemblong	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cigemblong	12	12	100	
				115	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cihara	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cihara	12	12	100	
				116	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cijaku	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cijaku	12	12	100	
				117	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikulur	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikulur	12	12	100	
				118	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cileles	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cileles	12	12	100	
				119	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilograng	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilograng	12	12	100	
				120	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cimarga	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cimarga	12	12	100	
				121	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cipanas	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cipanas					
				122 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Curugbitung	12	12	100	
				123 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Kencana	12	12	100	
				124 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kalanganyar	12	12	100	
				125 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Leuwidamar	12	12	100	
				126 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Leuwidamar	12	12	100	
				127 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Maja	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Maja	12	12	100	
				128 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Maja	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Maja	12	12	100	
				129 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Malingping	- Terlaksananya Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Malingping	12	12	100	
				130 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Malingping	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Malingping	12	12	100	
				131 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Muncang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Muncang	12	12	100	
				132 Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Panggarangan	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				133	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Rangkas Bitung	12	12	100	
				134	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Rangkas Bitung - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Rangkas Bitung	12	12	100	
				135	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Rangkas Bitung - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Rangkas Bitung	12	12	100	
				136	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sajira - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sajira	12	12	100	
				137	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sobang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Sobang	12	12	100	
				138	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Wanasalam - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Wanasalam	12	12	100	
				139	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Warung Gunung - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Warung Gunung	12	12	100	
				140	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Anyer - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Anyer	12	12	100	
				141	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bandung - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bandung	12	12	100	
				142	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Baros - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Baros	12	12	100	
				143	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Binuang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Binuang	12	12	100	
				144	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Bojonegara	12	12	100	
				145	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Carenang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Carenang					
				146	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikande	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikande	12	12	100	
				147	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikeusal	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cikeusal	12	12	100	
				148	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cinangka	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cinangka	12	12	100	
				149	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciomas	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciomas	12	12	100	
				150	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciruas	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Ciruas	12	12	100	
				151	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Gunung Sari	12	12	100	
				152	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Jawilan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Jawilan	12	12	100	
				153	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kibin	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kibin	12	12	100	
				154	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kopo	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kopo	12	12	100	
				155	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kragilan KJ SMAN 1 Ciruas	12	12	100	
				156	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kramat Watu	12	12	100	
				157	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Mancak	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Mancak	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				158	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pabuaran	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pabuaran	12	12	100	
				159	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Padarincang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Padarincang	12	12	100	
				160	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan	- Terlaksananya Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pamarayan	12	12	100	
				161	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Petir	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Petir	12	12	100	
				162	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pontang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Pontang	12	12	100	
				163	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Puloampel	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Puloampel	12	12	100	
				164	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tirtayasa	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tirtayasa	12	12	100	
				165	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Waringinkurung	12	12	100	
				166	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Cilegon	12	12	100	
				167	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Krakatau Steel Cilegon	12	12	100	
				168	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Cilegon	12	12	100	
				169	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Cilegon	12	12	100	
				170	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Cilegon	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				171	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Serang	12	12	100	
				172	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Kota Serang	12	12	100	
				173	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Kota Serang	12	12	100	
				174	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Kota Serang	12	12	100	
				175	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Kota Serang	12	12	100	
				176	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Kota Serang	12	12	100	
				177	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Kota Serang	12	12	100	
				178	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Kota Serang	12	12	100	
				179	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Tangerang	12	12	100	
				180	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 2 Tangerang	12	12	100	
				181	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 3 Tangerang	12	12	100	
				182	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 4 Tangerang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				183	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 5 Tangerang	12	12	100	
				184	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 6 Tangerang	12	12	100	
				185	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 7 Tangerang	12	12	100	
				186	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 8 Tangerang	12	12	100	
				187	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 9 Tangerang	12	12	100	
				188	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 10 Tangerang	12	12	100	
				189	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 11 Tangerang	12	12	100	
				190	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 12 Tangerang	12	12	100	
				191	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 13 Tangerang	12	12	100	
				192	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 14 Tangerang	12	12	100	
				193	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Tangerang - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 15 Tangerang	12	12	100	
				194	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Tangerang Selatan - Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 1 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				218	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Rangkasbitung	12	12	100	
				219	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Warunggunung	12	12	100	
				220	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Anyer	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Anyer	12	12	100	
				221	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cikande	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cikande	12	12	100	
				222	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cinangka	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cinangka	12	12	100	
				223	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Ciruas	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Ciruas	12	12	100	
				224	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kragilan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kragilan	12	12	100	
				225	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kramatwatu	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kramatwatu	12	12	100	
				226	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Puloampel	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Puloampel	12	12	100	
				227	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tanara	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tanara	12	12	100	
				228	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tunjung Teja	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tunjung Teja	12	12	100	
				229	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Cilegon	12	12	100	
				230	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Cilegon	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				231	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Cilegon	12	12	100	
				232	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Cilegon	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Cilegon	12	12	100	
				233	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Serang	12	12	100	
				234	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Serang	12	12	100	
				235	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Serang	12	12	100	
				236	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Serang	12	12	100	
				237	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Serang	12	12	100	
				238	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Serang	12	12	100	
				239	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Serang	12	12	100	
				240	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN Pertanian	12	12	100	
				241	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Tangerang	12	12	100	
				242	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Tangerang	12	12	100	
				243	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Tangerang	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
					Tangerang					
				244	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Tangerang	12	12	100	
				245	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Tangerang	12	12	100	
				246	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Tangerang	12	12	100	
				247	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Tangerang	12	12	100	
				248	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 8 Tangerang	12	12	100	
				249	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Tangerang	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 9 Tangerang	12	12	100	
				250	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 1 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				251	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 2 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				252	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 3 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				253	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 4 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				254	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan - Pendidikan SMKN 5 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				255	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan - Pendidikan SMKN 6 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				256	Penyelenggaraan Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Penyelenggaraan - Pendidikan SMKN 7 Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				257	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) - pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	12	12	100	
				258	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) - pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	12	12	100	
				259	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) - pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	12	12	100	
				260	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) - pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kab. Lebak	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	
				261	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	-	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Cilegon, Kota Serang dan Kab. Serang	12	12	100		
				262	Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	-	Terlaksananya Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri (DAK) pada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	12	12	100		
				263	Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 30 Kabupaten Tangerang	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN 30 Kabupaten Tangerang	12	12	100		
			Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing		6.	Program Pendidikan Menengah Atas						
						1	Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: %)		0,16	0,11	145,45	
						2	Angka Kelulusan SMA (Satuan: %)		99,07	99,80	100,74	
						3	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)		54,48	82,04	150,59	
						4	Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)		50,84	81,87	161,03	
						5	Presentase Lulusan SMA yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi (Satuan: %)		50	51,08	102,16	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6 Persentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B (Satuan: %)	70	74,52	106,46	
				1	Peningkatan Kurikulum SMA - Terlaksananya Peningkatan Kurikulum SMA	231	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19
				2	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA - Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA	1348	482	35,76	Karena kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak memungkinkan dilaksanakan dimasa pandemi dan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19
				3	Peningkatan Peserta Didik SMA - Terlaksananya Peningkatan Peserta Didik SMA	27	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19
				4	Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik) - Terlaksananya Sarana dan Prasarana SMA (DAK Fisik)	109	46	42,20	1. Untuk Pembangunan Prasarana Belajar SMA telah terealisasi 31 Ruang akan dialokasikan kembali di tahun depan. 2. Untuk Pengadaan Sarana Belajar SMA telah terealisasi 12 Paket akan dialokasikan kembali di tahun depan. 3. Untuk Pembangunan Prasarana Belajar SMA telah terealisasi 3 Ruang akan dialokasikan kembali di tahun depan
				5	Pengadaan Lahan SMA - Terlaksananya Pengadaan Lahan SMA	2	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	7. Program Pendidikan Menengah Kejuruan					
					1 Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: %)	0,32	0,29	110,34	
					2 Angka Kelulusan SMK (Satuan: %)	99,92	99,94	100,02	
					3 Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	57,10	82,58	144,62	
					4 Persentase SMK yang Menerapkan link and Match (Satuan: %)	51	30	58,82	karena adanya wabah Pandemi sehingga mempengaruhi Dunia Usaha dan dunia Industri dan kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan dan dilakukan relokasi anggaran.
					5 Persentase Lulusan SMK yang Terserap di Pasar Kerja (Satuan: %)	80	51,01	63,76	Adanya pandemi covid-19 mempengaruhi Dunia Usaha dan dunia Industri, yang berdampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja.
				1 Peningkatan Kurikulum SMK	- Terlaksananya Peningkatan Kurikulum SMK	585	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2	Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	- Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK	299	194	64,88	1. Untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK telah terealisasi 180 RKB akan dialokasikan kembali di tahun depan. 2. Untuk Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya telah terealisasi 8 Paket akan dialokasikan kembali di tahun depan. 3. Untuk Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya telah terealisasi 5 Paket akan dialokasikan kembali di tahun depan
				3	Peningkatan Peserta Didik SMK	- Terlaksananya Peningkatan Peserta Didik SMK	267	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19
				4	Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik)	- Terlaksananya Sarana dan Prasarana SMK (DAK Fisik)	106	50	47,17	1. Untuk Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya telah terealisasi 8 Paket akan dialokasikan kembali di tahun depan. 2. Untuk Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya telah terealisasi 5 Paket akan dialokasikan kembali di tahun depan
				5	Pengadaan Lahan SMK	- Terlaksananya Pengadaan Lahan SMK	2	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19
2	Kesehatan									
		Dinas Kesehatan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kesehatan						
				1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
				2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
				3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
			1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (satuan: dokumen)	8	8	100	
			2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu (satuan: dokumen)	25	25	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang kompeten (satuan: dokumen)	18	18	100	
				4	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas (satuan: kegiatan)	17	15	88,24	
				5	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelatihan Kesehatan	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran (satuan: kegiatan)	13	9	69,23	Anggaran mengalami recofocing untuk membiayai penanganan pandemi covid19
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran (satuan: kegiatan)	13	13	100	
				7	Dukungan Manajemen BOK (DAK)	- Terlaksananya dukungan manajemen BOK sesuai petunjuk teknis DAK (satuan: kegiatan)	3	3	100	
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	2.	Program Tata Kelola Pemerintahan RSUD Banten					
				1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)		100	100	100	
				2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)		100	100	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100	
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100	
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada RSUD Banten	-	6	6	100	
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada RSUD Banten	-	25	25	100	
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Banten	-	2	2	100	
				4	Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSUD Banten	-	10	10	100	
				5	Pelayanan Tata Usaha pada UPT RSUD Banten	-	7	7	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
					1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	86	95,89	111,50		
					2	Prevalensi Stunting (Satuan: %)	24,60	23,40	95,12		
					3	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat (Satuan: Kab/Kota)	7	7	100		
				1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	-	Meningkatnya Akses dan Kualitas Upaya Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Di Kab/Kota (satuan: kab/kota)	8	8	100	
				2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	Terlaksananya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas (satuan: kegiatan)	5	5	100	
				3	Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Meningkatnya Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga di Kab/Kota (satuan: kab/kota)	8	8	100	
				4	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	-	Meningkatnya upaya Kesehatan Lingkungan di Kab/Kota (satuan: kab/kota)	8	8	100	
				5	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK)	-	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi (DAK) (satuan: kegiatan)	6	6	100	
				6	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (DAK)	-	Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (satuan: kegiatan)	6	4	66,67	Kegiatan Lomba PHBS bersama PKK di 8 Kab/Kota dan Kegiatan Perkemahan Peran Saka di Bangka Belitung tidak diselenggarakan dikarenakan masa pandemi Covid19
				7	Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga (DAK)	-	Terlaksananya Kegiatan Upaya Kesehatan kerja dan Olah Raga (satuan: kegiatan)	7	7	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
				8	Peningkatan Kesehatan Lingkungan (DAK)	-	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (satuan: kab/kota)	8	8	100	
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	5.	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan						
					1	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	100	83,78	83,78		
					2	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	86	100	116,28		
					3	Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	50	50	100		
					4	Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	40	40	100		
			1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	-	Tercapainya Rumah sakit dan Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi (satuan: RS/Labkesda	109	109	100		
			2	Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	-	Terselenggaranya penguatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (satuan: kegiatan)	3	3	100		
			3	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	-	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang mudah diakses (satuan: pasien)	1100	800	72,73	recofusing anggaran untuk penanganan pandemi covid19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3	Asuhan dan Etika Keperawatan	- Terselenggaranya pelayanan asuhan keperawatan sesuai dengan SAK (Standar Asuhan Keperawatan) RSUD Banten yang baik (Satuan: dokumen)	6	6	100	
				4	Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan	- Terselenggaranya ketepatan waktu yang sesuai dengan standar SOP (Satuan: dokumen)	6	6	100	
				5	Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten	- Pengelolaan dan pengadaan barang medis RSUD Banten yang baik dan benar (Satuan: bulan)	12	12	100	
				6	Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten	- Pengelolaan dan pengadaan barang non medis RSUD Banten yang baik mengutamakan kebutuhan keselamatan pasien (Satuan: bulan)	12	12	100	
				7	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	- Terlaksananya SIM RS RSUD Banten yang baik dan informatif (Satuan: dokumen)	12	12	100	
				8	Rekam Medis	- Terdokumentasinya pelayanan pasien RSUD Banten dalam rekam medis sesuai standar SOP (Satuan: dokumen)	12	12	100	
				9	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	- Terselenggaranya pelayanan kesehatan BLUD sesuai dengan standar sarana dan prasana pelayanan minimal dan kebutuhan sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas (Satuan: bulan)	12	12	100	
			Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit	7.	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit					
						1 keberhasilan Pengobatan TB (success rate) di Kab/Kota (Satuan: %)	90	92	102,22	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	
					2	Prevalensi HIV (Satuan: %)		-0,50	-0,33	151,52		
					3	Pevalensi Hipertensi (Satuan: %)		24	30	125		
					4	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi (Satuan: %)		100	100	100		
					5	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Satuan: %)		100	100	100		
					6	Persentase Kab/Kota yang Mencapai Imunisasi Dasar Lengkap (IDL 95%) (Satuan: %)		75	50	66,67	Pelayanan Imunisasi di Posyandu dan Fasskes terganggu(pernah dihentikan) Karena Pandemi Covid 19	
					7	Terlaksananya gerakan bebas pasung di kab/kota (Satuan: Kab/Kota)		8	8	100		
					8	Inciden Rate DBD (Per 100.000 Penduduk) (Satuan: Kasus)		-49	-23,67	207,01		
					1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	-	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai standar di kab/kota (satuan: kab/kota)		8	8	100
				2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular	-	Meningkatnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai standar di Kab/Kota (satuan: kab/kota)		8	8	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3	Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan	- Meningkatnya pengamatan penyakit, Imunisasi dan Respon terhadap Krisis Kesehatan sesuai standar (satuan: kegiatan)	6	6	100	
				4	Upaya Kesehatan Jiwa	- Meningkatnya upaya kesehatan jiwa sesuai standar di Kab/Kota (satuan: kab/kota)	8	8	100	
				5	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang	- Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang sesuai standar di Kab/Kota (satuan: kab/kota)	8	8	100	
				6	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Menular Bersumber Binatang (DAK)	- Terlaksananya Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Menular Bersumber Binatang sesuai Juknis DAK (satuan: kegiatan)	9	9	100	
				7	Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (DAK)	- Terlaksananya upaya Pencegahan, Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sesuai Juknis DAK (satuan: kegiatan)	5	5	100	
				8	Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan (DAK)	- Terlaksananya Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sesuai Juknis DAK (satuan: kegiatan)	10	10	100	
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	8.	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	
					1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	470	441	93,83			
					2	Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	100	100	100			
					3	Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	70	70	100			
				1	Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (satuan: dokumen)	3	3	100		
				2	Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	-	Tersedianya obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai standar (satuan: kegiatan)	3	3	100		
				3	Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan	-	Terlaksananya Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan sesuai standar di Kab/Kota (satuan: sarana)	354	248	70,06		
				Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit		9.	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah					
						1	Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	45	47,34	105,20		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				1	Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	- Tercapainya Pelayanan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sesuai standar parameter (satuan: kegiatan)	3	3	100	
				2	Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah	- Tersusunnya dokumen pengendalian mutu laboratorium kesehatan sesuai standar (satuan:dokumen)	12	12	100	
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit	10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan						
						1 Cakupan Terlatihnya SDM Kesehatan dan Masyarakat (Satuan: Orang)	150	150	100	
				1	Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu Kesehatan	- tersusunnya dokumen mutu pendidikan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat (satuan: dokumen)	15	11	73,33	recofusing anggaran untuk penanganan pandemi covid19
				2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	- Terlaksananya kegiatan pelatihan bidang kesehatan sesuai standar (satuan: orang)	150	150	100	
			Peningkatkan Kelas Pelayanan Rumah Sakit	11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping (Satuan: %)	100	74,24	74,24	SPM di eselon III mencapai 100% sesuai dengan hitungan rekapitulasi secara keseluruhan indikator yang berdasarkan PERGUB (36 TAHUN 2017) SPM RSUD MALINGPING, namun bila dilihat per indikator ada beberapa yang belum tercapai seperti : indikator visit dokter pada instalasi rawat inap, sertifikat kapasitas nakes tidak terpenuhi dengan adanya pandemi covid19, pasien pulang paksa pada instalasi rawat inap.
					2 Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Malingping (Satuan: %)	100	98,08	98,08	
					3 Capaian SPM penunjang RSUD Malingping (Satuan: %)	100	88,91	88,91	
				1 Pengembangan Mutu dan Kerjasama RSUD Malingping	- Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Akreditasi RSUD Malingping Sesuai Standar (Satuan: kegiatan)	5	5	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2	Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keperawatan Rawat Inap Sesuai Standar (Satuan: kegiatan)	5	5	100	
				3	Peningkatan Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Khusus	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keperawatan Rawat Jalan dan Khusus Sesuai Standar (Satuan: kegiatan)	7	7	100	
				4	Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping	Pengelolaan dan pengadaan barang medis RSUD Malingping yang baik dan benar (Satuan: kegiatan)	5	5	100	
				5	Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping	Pengelolaan dan pengadaan barang non medis RSUD Malingping yang baik dan benar (Satuan: kegiatan)	9	9	100	
				6	Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SPM Pelayanan Medis RSUD Malingping Sesuai Standar (Satuan: kegiatan)	5	5	100	
				7	Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Terlaksananya Pelayanan di RS RSUD Malingping yang baik dan informatif (Satuan: bulan)	12	12	100	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100	
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100	
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100	
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100	
			1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	14	14	100	
			2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	9	100	
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Terlaksannya Peningkatan Kapasitas Aparatur	2	2	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	2	2	100	
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	15	15	100	
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengujian Bahan, Konstruksi Bangunan dan Informasi Konstruksi	10	10	100	
				7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	3	3	100	
				8	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	11	11	100	
				9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	15	15	100	
				10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Tangerang	4	4	100	
				11	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Serang-Cilegon	4	4	100	
				12	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Pandeglang	4	4	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
				13	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Lebak	4	4	100		
			Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	2.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
					1	Persentase Jalan dan Jembatan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (min perkerasan 7 m) (Satuan: %)	64,94	64,94	100		
					2	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	93,50	93,50	100		
					4	Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Serang Cilegon (Satuan: %)	100	100	100		
					5	Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Tangerang (Satuan: %)	100	100	100		
					6	Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Pandeglang (Satuan: %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					7	Persentase pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah Lebak (Satuan: %)	100	100	100	Masih proses pengadaan tanah. Belum ada pekerjaan konstruksi
					8	Prosentase Penyelesaian Jalan Baru (15 Km) (Satuan: %)	10	0	0	
				1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara	- Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara	8	8	100	
				2	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan	- Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan	1	1	100	
				3	Pembangunan Jembatan	- Terlaksananya Pembangunan Jembatan	5	5	100	
				4	Pengadaan Lahan Kebinamargaan	- Terlaksananya Pengadaan Lahan Kebinamargaan	3	3	100	
				5	Peningkatan Jalan Provinsi (DAK)	- Terlaksananya Peningkatan Jalan Provinsi (DAK)	1	1	100	
				6	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan	21	16	76,19	
				7	Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	- Terlaksananya Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	5	5	100	
				8	Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak	- Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Lebak	9	9	100	
				9	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak	- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Lebak	3	3	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				10	Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang	- Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Pandeglang	2	2	100	
				11	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang	- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Pandeglang	15	15	100	
				12	Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon	- Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Serang dan Cilegon	15	15	100	
				13	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon	- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon	4	4	100	
				14	Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang	- Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Bahan/Peralatan Kebinamargaan Wilayah Tangerang	12	12	100	
				15	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang	- Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah Tangerang	5	5	100	
			Penigkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi	3.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					
				1	Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)		30	30	100	
				2	Persentase layanan pengujian bahan dan konstruksi bangunan (Satuan: %)		100	100	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
					3	Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan: %)	31,89	31,89	100		
					4	Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciujung-Cidanau (Satuan: %)	100	100	100		
					5	Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Cidurian-Cisadane (Satuan: %)	100	100	100		
					6	Persentase operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air pada WS Ciliman-Cisawarna (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	-	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	14	13	92,86	
				2	Perencanaan Teknis Bidang PJPA	-	Terlaksananya Perencanaan Teknis Bidang PJPA	9	9	100	
				3	Penatagunaan Pemanfaatan Air	-	Terlaksananya Penatagunaan Pemanfaatan Air	2	2	100	
				4	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	-	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	3	6	200	
				5	Perencanaan Teknis Bidang PJSA	-	Terlaksananya Perencanaan Teknis Bidang PJSA	4	4	100	
				6	Penatagunaan Sumber Daya Air	-	Terlaksananya Penatagunaan Sumber Daya Air	4	3	75	Terkena Refocusing Anggaran
				7	Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air	-	Terlaksananya Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air	5	5	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				8	Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air	- Terlaksananya Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air	5	4	80	Paket Pengawasan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisiuh tidak dilaksanakan karena Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisiuh dihentikan kontraknya
				9	Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	- Terlaksananya Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	4	3	75	Tidak terjadi kejadian bencana pada tahun anggaran 2020
				10	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	- Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cidurian-Cisadane	14	14	100	
				11	Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	- Terlaksananya Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	3	3	100	
				12	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	- Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciliman-Cisawarna	4	3	75	Efisiensi anggaran
				13	Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	- Terlaksananya Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	29	29	100	
				14	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	- Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada UPTD Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ciujung-Cidanau	36	36	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), Laporan Pajak, yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : dokumen)	13	11	84,62	
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan, Laporan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan, Laporan Evaluasi dan Pengendalian yang tepat waktu, Monitoring dan Evaluasi , dan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : %)	100	100	100	
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (Satuan : %)	100	100	100	
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD, dan Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (Satuan : Bulan)	12	12	100	
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dan Koordinasian Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (Satuan : Kegiatan)	1	1	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	- Terlaksananya Pembangunan Perumahan, Peningkatan PSU Permukiman, dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : unit)	683	683	100	
				5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : Dok dan Laporan)	59	59	100	
				6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	- Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna (Satuan : Kegiatan)	1	1	100	
				7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	- Pengadaan Lahan Hunian Tetap 8.861 M2 (Pembayaran Lahan Hunian Tetap) (Satuan : M2)	8861	8861	100	
			Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi	3.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan					
				1		persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	83	83	100	
				2		persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	75	69,91	93,21	
				3		persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	100	100	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					3 Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan: %)	5	1	20	Adanya pengurangan target saat refocusing dan perubahan APBD
				1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih - Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, pembangunan instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota, dan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : ltr/dtk)	159,31	159,31	100	
				2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi - Terlaksananya Penyediaan IPALD, yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : KK)	238	238	100	
				3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan - Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : M2)	20060	20060	100	
				4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan - Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi dan Pembanguann Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : Jiwa)	488420	0	0	Rencana Pembangunan TPST Bojongmenteng mendapat penolakan dari masyarakat sehingga tidak dapat dilaksanakan
				5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis dan Pengawasan Infrastruktur Keciaptakaryaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : dokumen)	51	49	96,08	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3	Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	- Terselenggaranya Kerjasama Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Satuan: Kegiatan)	25	25	100	
			Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM	3.	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah					
						1 Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	80	80	100	
				1	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	- Terselenggaranya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan (Satuan: Kegiatan)	63	63	100	
				2	Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis	- Terselenggaranya Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis (Satuan: Kegiatan)	27	26	96,30	
				3	Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten	- Terselenggaranya Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten (Satuan: Kegiatan)	14	14	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				1	Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	- Terselenggaranya Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	3	3	100	
				2	Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi	- Terselenggaranya Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi	2	1	50	Karena mempedomani Pergub Banten No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Banten No. 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Penanganan Covid 19 di Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan unsur masyarakat (kerumunan massa)
				3	Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran	- Terselenggaranya Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran	5	4	80	
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	6. Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
				1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)		100	100	100	
				2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)		100	100	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	10	10	100		
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Satuan: Dokumen)	31	31	100		
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan: Kegiatan)	18	18	100		
				4	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	-	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (Satuan: Bulan)	12	12	100		
			Peningkatan Wawasan Bangsa pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	7.	Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Bangsa							
							1	Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	27	27	100	
							1	Pembinaan Kewarganegaraan	-	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kewarganegaraan (Satuan: Kegiatan)	4	4

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
				2	Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	- Terlaksananya Kegiatan Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)(Satuan: Kegiatan)	10	10	100		
			Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	8.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional						
						1	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah (Satuan: %)	100	100	100	
				1	Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA	-	Terlaksananya Pencegahan Dini Potensi Kerawanan Konflik Politik, Ekonomi, Sosial dan SARA (Satuan: Kegiatan)	5	5	100	
				2	Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing	-	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Masalah Perbatasan dan Orang Asing (Satuan: Kegiatan)	5	5	100	
			Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	9.	Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi						
						1	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	75	75	100	
				1	Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam Kerangka Ketahanan Nasional	-	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Ketahanan ekonomi dalam Kerangka Ketahanan Nasional (Satuan: Kegiatan)	4	4	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
				2	Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional	-	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya dalam Rangka Mendorong Ketahanan Nasional (Satuan: Kegiatan)	6	6	100	
				Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	10.	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat					
						1	Angka pemilu/pemilukada (Satuan: %)	76	67,27	88,51	
			1	Pembinaan Partai Politik	-	Pembinaan Partai Politik (Satuan: Kegiatan)	8	8	100		
			2	Penyelenggaraan Desk Pemilu	-	Penyelenggaraan Desk Pemilu(Satuan: Kegiatan)	4	4	100		
			3	Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya	-	Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya(Satuan: Kegiatan)	6	6	100		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	11.	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Laporan Kinerja keuangan dan neraca aset yang akuntabel (satuan : dokumen)	13	13	100	
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang terarah, terukur dan tepat waktu (satuan : dokumen)	29	29	100	
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Tersedianya Aparatur yang berkopeten dan berwawasan (satuan : orang)	55	55	100	
				4	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	-	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas (satuan : bulan)	12	12	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	12. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana					
					1 Indek Ketahanan Daerah (Satuan: %)	0,42	0,70	166,67	
				1 Pencegahan Daerah Rawan Bencana	- Tersedianya kebijakan teknis dan pedoman serta operasional pencegahan kebencanaan yang terukur dan berkelanjutan (satuan: dokumen)	21	17	80,95	
				2 Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	- terlaksananya kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang efektif dan berkelanjutan (satuan: dokumen)	7	7	100	
			Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	13. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana					
					1 Persentase penanganan darurat bencana (Satuan: %)	100	100	100	
					2 Persentase bantuan logistik dan dukungan peralatan penanggulangan bencana (Satuan: %)	100	100	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				1	PUSDALOPS Penanggulangan Bencana	- terlaksanannya penanganan kedaruratan bencana yang berkelanjutan (satuan: dokumen)	8	8	100	
				2	Peningkatan Penanganan Kedaruratan Bencana	- Terlaksananya penanganan kedaruratan logistik bencana yang terukur, terencana dan tepat sasaran (satuan: dokumen)	14	14	100	
				3	Penanganan Kedaruratan Logistik Bencana	- Telaksananya PUSDALOPS Penanggulangan Bencana yang terstruktur dan terkoordinir (satuan: bulan)	12	12	100	
			Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	14. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana						
						1 Persentase penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satuan: %)	100	100	100	
					Rehabilitasi Pasca Bencana	- terlaksananya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana yang tepat sasaran (satuan: dokumen)	1	1	100	
					Rekonstruksi Kebencanaan	- terlaksananya rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana yang terarah (satuan: dokumen)	1	1	100	
6	Sosial									
		Dinas Sosial								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Kompeten (satuan : %)	100	100	100	
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah (satuan: bulan)	12	12	100	
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas (satuan: bulan)	12	12	100	
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Sosial	- Tersedianya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Sosial yang Efektif dan Efisien (satuan: kegiatan)	13	13	100	
				7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial	- Tersedianya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Perlindungan Sosial yang Efektif dan Efisien (satuan: kegiatan)	12	12	100	
				2. Program Rehabilitasi Sosial						
			Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Kelembagaan Perawatan dan Pengasuhan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
					1	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: %)	663	481	72,55	Adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid19		
					1	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	-	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia (satuan:orang)	220	220	100	
					2	Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	-	Terlaksananya Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (satuan: orang)	141	141	100	
					3	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (satuan:orang)	120	120	100	
				Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Kelembagaan Perawatan dan Pengasuhan	3.	Program Pemberdayaan Sosial						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
					1	Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya (Satuan: Orang)	1.483	233	15,71	Adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi covid19	
				1	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	-	Capaian PSKS yang Meningkat Partisipasi Sosialnya (satuan:orang)	221	221	100	
				2	Kepahlawanan, Keberintisan, Keuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	-	Capaian Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Keuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosialnya (satuan:orang)	122	122	100	
				3	Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	-	Capaian Meningkatnya Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (satuan:paket)	3	3	100	
			Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Kelembagaan Perawatan dan Pengasuhan	4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
					1	Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: (%))	100	100	100		
					2	Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: KK)	50.000	50000	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10				
					3	Cakupan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi (Satuan: Orang)	1.300	1800	138,46					
					1	Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	-	Tersedianya Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (satuan: dokumen)	26	26	100			
					2	Perlindungan Sosial Korban Bencana	-	Terlindunginya Korban Bencana Alam dan Sosial (satuan: orang)	1800	1800	100			
					3	Jaminan Sosial Keluarga	-	Terlaksananya Jaminan Sosial Keluarga (satuan: KK)	50000	50000	100			
				Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penanganan Kelembagaan Perawatan dan Pengasuhan	5.	Program Penanganan Fakir Miskin								
							1	Cakupan Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota (Satuan: Kab/Kota)	8	8	100			
							1	Penanganan Fakir Miskin Perdesaan	-	Tertanganinya Fakir Miskin Perdesaan (satuan: kab/kota)	4	4	100	
							2	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	-	Tertanganinya Fakir Miskin Perkotaan (satuan: kab/kota)	4	4	100	
							3	Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Tertanganinya Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (satuan: kab/kota)	1	1	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
				2	Perlindungan Sosial Anak Terlantar di Dalam Panti	- Terpuhinya Kebutuhan Dasar Anak Telantar di Dalam Panti (satuan: orang)	15	15	100	
				3	Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penunjang Dalam Panti Reabilitasi Sosial Lanjut Usia (DAK Fisik)	- Terpuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (DAK Fisik) (satuan: paket)	2	0	0	Anggaran dari Pusat dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid 2019

II.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 2.26

Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketenaga Kerjaan										
		Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (satuan : dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (satuan: dokumen)	61	15	24,59	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (satuan : kegiatan)	15	15	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	-	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (satuan : bulan)	12	12	100			
				5	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaa	-	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					n Kota Cilegon dan Kota Serang	berkualitas						
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	4	3	75	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
				7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	4	4	100			
				8	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	4	4	100			
				9	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (satuan : bulan)	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Perkantoran							
				10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Latihan Kerja	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas	4	4	100			
			Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan	2.	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja							
						1 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,42	5,02	113,57			
						2 Capaian Pelatihan dan Kompetensi Kerja Berbasis Masyarakat (Satuan: %)	1,13	0	0	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
				1	Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan	- Tingkat Kelulusan Pelatihan Berbasis Masyarakat	744	372	50	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
				2	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	330	104	31,52	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
				3	Pengembangan Kelembagaan dan Akreditasi	- Tingkat Lembaga Latihan yang Terakreditasi	150	107	71,33	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	3. Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan									
						1	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	5,25	3,77	71,73	Adanya SK Gubernur Banten Nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Status KLB atas Wabah Virus Corona di Provinsi Banten	Membatasi jumlah peserta dan menerapkan protocol kesehatan	
						2	Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10	10	100			
			3	Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)		9,54	10	104,82					
			1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja	-	Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan - Tingkat Parselisihan Hubungan Industrial	17	17	100				
			2	Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	-	Tingkat PP yang Disahkan - Tingkat PKB yang Disahkan	700	500	71,43	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19		
							3	Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP	-	Proporsi Besaran Upah Minumim terhadap KHL - Tingkat Pekerja/Buruh yang Menjadi Anggota BPJS Aktif - Tingkat Perusahaan yang menjadi Anggota BPJS	12	12	100

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan							
					1 Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	3,10	3,35	108,13			
					1 Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) - Tingkat Penerapan SMK3 di Perusahaan	651	301	46,24	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
					2 Peningkatan Pengawasan Norma Kerja - Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Provinsi	810	380	46,91	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
					3 Pengawasan Ketenagakerjaan - Tingkat Kepatuhan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Provinsi	3504	501	14,30	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	
					4 Peningkatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan - Tingkat Kecelakaan Kerja	9	4	44,44	Adanya Pandemi Covid 19	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid - 19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	- Tingkat Kelulusan Pelatihan	1184	1184	100			
				2	Pengembangan dan Pemasaran Peserta Latihan Kerja	- Tingkat Kapasitas Pelatihan	4	4	100			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1.	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel	13	13	100			
				2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Akuntabel	33	33	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur DP3AKKB dalam Melaksanakan Tupoksi	18	18	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksannya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang Optimal	2	2	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang Optimal	12	12	100			
			Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga	2. Program Pemberdayaan Perempuan								
				1	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Satuan: %)		15,29	17,65	115,42			
				2	Persentase Peningkatan Kontribusi Perempuan Di Bidang Ekonomi (Satuan: %)		32,13	31,29	97,39			
				3	Persentase Peningkatan Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (Satuan: %)		16,67	92,98	557,78			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					4	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Provinsi Yang Responsif Gender (Satuan: %)	82,22	100	121,62			
						Terlaksananya Perencanaan Responsif Gender untuk meningkatkan program kegiatan pembangunan berprespektif gender	6	6	100			
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan partisipasi politik perempuan	8	8	100			
						Terlaksananya Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dalam meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	7	7	100			
			Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	3.	Program Perlindungan Perempuan dan Anak							
					1	Persentase Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					2	Persentase Pengembangan Kab/Kota menuju KLA Kategori Nindya (Satuan: %)	25	12,50	50	Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B.566/KPPPA/D.IV/Sesdep/06/2020, Tanggal, 22 Juni 2020, Perihal : Evaluasi KLA Tahun 2020	Mengikuti arahan surat selanjutnya	
					3	Persentase Peningkatan Sinergitas Program dan Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak (Satuan: %)	25	77,42	309,68			
				1	Perlindungan dan peningkatan tumbuh kembang anak	- Terlaksananya peningkatan tumbuh kembang anak untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	5	5	100			
				2	Perlindungan khusus terhadap anak	- Terlaksananya Optimalisasi Perlindungan Khusus Anak	10	10	100			
				3	Perlindungan Hak Perempuan	- Terlaksananya Perlindungan Hak Perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan	8	8	100			
3	Pangan											
		Dinas Ketahanan Pangan										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	12	12	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	28	28	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan kapasitas Aparatur (Satuan: Kegiatan)	3	3	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (Satuan: Bulan)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (Kegiatan)	3	3	100			
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Satuan: Kegiatan)	3	3	100			
			Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah	2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93,50	88,91	95,09			
				1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	- Terlaksananya Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah (Satuan: Dokumen)	3	3	100		
				2	Pengelolaan Sumberdaya Pangan	- Terlaksananya Pengelolaan Sumberdaya Pangan (Satuan: Dokumen)	2	2	100		
				3	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	- Terlaksananya Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Satuan: Kecamatan)	6	6	100		
				4	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten (Satuan: Dokumen)	2	2	100		
			Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah	3.	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan						
					1 Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	84,50	81,02	95,88			
				1	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	- Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	220	665,86	302,66		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						(Satuan: Lembaga)						
				2	Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan	- Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Distribusi Pangan (Satuan: Dokumen)	11	11	100			
				3	Pengelolaan Penataan Harga Pangan	- Terlaksananya Pengelolaan Penataan Harga Pangan (Satuan: Dokumen)	3	2	66,67	Belum adanya penetapan harga pangan lokal Provinsi, karena belum adanya usulan dari Kab/Kota serta adanya pengurangan/realokasi pada tahapan Refocusing anggaran untuk pembahasan penyusunan draft Pergub tersebut.	Penyusunan Draft penetapan harga minimum daerah pangan lokal akan dilanjutkan pada tahun 2021.	
			Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah	4.	Program Perlindungan Konsumen Pangan							
						1 Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	80,50	75,84	94,21			
						2 Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang terdaftar atau tersertifikasi (Satuan: %)	10	16,88	168,80			
				1	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	- Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan (Satuan: Kegiatan)	5	5	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan (Satuan: Kegiatan)	3	3	100			
				3	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan (Satuan: Sampel PSAT)	10	33	330			
				4	Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Satuan: No Registrasi / Sertifikasi PSAT)	15	134	893,33			
				5	Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya Pelayanan Teknis Kemanan Pangan pada UPTD Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan (Satuan: No Registrasi / Sertifikasi PSAT)	20	134	670			
4	Lingkungan Hidup											
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1.							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (satuan : dokumen)	13	12	92,31			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu (satuan: dokumen)	22	22	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang berkompeten (satuan : dokumen)	18	4	22,22	secara umum tidak ada permasalahan		
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (satuan : dokumen)	12	0	0	refocusing anggaran	kegiatan ditangguhkan	
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: kegiatan)	12	12	100			
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Lingkungan	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: dokumen)	11	10	90,91			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak dan Tangerang	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: dokumen)	11	11	100			
				8	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, dan Cilegon	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: dokumen)	11	11	100			
				9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: dokumen)	11	11	100			
				10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha Perkantoran yang efektif, efisien dan berdaya guna (satuan: dokumen)	11	11	100			
			Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	2.	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					1	Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	52,50	54,83	104,44			
					2	Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	66,80	73,74	110,39			
					3	Persentase peningkatan pelayanan Laboratorium Lingkungan (Satuan: %)	16,90	17,17	101,60			
				1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	- Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara serta tersusunnya kebijakan dan strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan sesuai standar baku mutu dan kriteria kerusakan (satuan : dokumen)	4	3	75	1).Penyesuaian pelaksanaan kegiatannya baik dari aspek anggaran maupun teknis pelaksanaan kegiatannya, seperti : a) tolok ukur Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan dan tata laksana pengendalian pencemaran air tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 dan pada perubahan anggaran 2020 tidak dianggarkan. 2) Pemantauan kualitas udara ambien, dengan target terpantaunya kualitas udara ambien di 8 Kab/Kota, masing-masing Kab/Kota sebanyak 4 titik, 2 kali (tahap) pemantauan, tahun 2020 ini hanya bisa dilaksanakan 1 kali (tahap). Hal ini akan menyulitkan dala+N12m penghitungan Indeks Kualitas Udara	1) Penyusunan dokumen perencanaan pengendalian pencemaran lingkungan diusulkan kembali untuk dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 bersamaan dengan penyusunan rencana aksi pengendalian pencemaran sungai. 2) Untuk penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2020, dibantu dan dijadikan Referensi juga hasil penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dilaksanakan oleh KLHK tahun 2020 di	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										(IKU).	8 Kab/Kota di Provinsi Banten dan untuk pelaksanaan pengukuran IKU pada tahun 2021 diusulkan untuk tetap dianggarkan agar bisa melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebanyak 2 tahap.	
				2	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	- Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan terhadap pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3 sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah dan limbah B3	11	3	27,27	'Perjalanan dinas tidak terlaksana karena situasi covid, premi asuransi terdapat pot harga dari BPJS, ekstra fooding terdapat pengurangan THL 1 orang	pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dan dapat berjalan lancar sesuai rencana, tepat waktu, efektif dan efisien.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya pembinaan proklam, pemantauan dan pengawasan konservasi kehati dan pemanfaatan SDA, penyusunan data dan informasi kehati serta evaluasi dan pelaporan emisi GRK sektor limbah sesuai dengan pedoman dan SOP (satuan: dokumen)	6	4	66,67	Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup , adanya pengurangan anggaran dalam masa pandemic covid 19 sehingga beberapa tolak ukur belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berdampak dalam penyelesaian kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan GRK Sektor Limbah yaitu kurangnya koordinasi antar kabupaten/kota terkait serta minimnya data pencapaian GRK sektor limbah dari kabupaten/kota karena belum terbentuknya Tim PEP RAD GRK tingkat Kab/Kota.	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran yang tersedia dengan memperhatikan protokol kesehatan serta mengoptimalkan teknologi informasi/komunikasi yang ada dalam rangka koordinasi dan pemenuhan data serta untuk segera memfasilitasi dan mendorong pembentukan Tim RAD GRK Tingkat Kabupaten dan Kota	
				4	Peningkatan Jaminan Mutu Laboratorium Lingkungan	- Prosentase peningkatan kompetensi laboratorium lingkungan sesuai dengan ISO/IEC 17025 Tahun 2017 (satuan : parameter)	30	30	100			
				5	Pengujian dan analisa laboratorium lingkungan	- Terlaksananya pemantauan parameter kualitas air dan udara sesuai dengan baku mutu (satuan: sampel)	179	106	59,22	secara umum tidak ada permasalahan	secara umum tidak ada permasalahan	
				6	Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup (DAK)	- pada aplikasi Simral, indikator kinerja program dan kegiatan kosong	2	0	0	Anggaran dipangkas oleh Kemenkeu, SE Menkeu	kegiatan tidak dilaksanakan. Dianggarkan kembali 2021	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	3. Program Penataan Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup							
					1	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup (Satuan: %)	98	98	100		
					2	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok)	68	73	107,35		
				1	Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup	- Tersusunnya perencanaan penilaian pengkajian dampak lingkungan hidup sesuai SOP (satuan : dokumen)	7	4	57,14	Karena kondisi WFH jadi perjalanan dinas ke LH Kab/Kota tidak dapat dilaksanakn semua karena sebagian pelaksanaan rapat Amdal dari LH Kab/Kota dilaksanakan via zoom, dan juga pelaksanaan binwas dilaksanakan via online, dan pengiriman datanya via email sehingga terdapat sisa anggaran perjalanan dinas	Pelaksanaan kegiatan melalui daring tanpa mengurangi esensi utama dari kegiatan yang dilaksanakan
				2	Pelayanan pengaduan dan penegakan hukum	- Tertanganinya penanganan kasus – kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup serta meningkatnya ketaatan dalam pengelolaan	2	2	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						lingkungan hidup Sesuai SOP (satuan dokumen)						
				3	Peningkatan kapasitas lingkungan hidup	meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat, kelompok, dan sekolah dalam upaya perlindungan dan pengelola Lingkungan Hidup Sesuai SOP (satuan : dokumen)	34	25	73,53	Pembinaan sekolah adiwiyata secara berjenjang tingkat wilayah Kab/Kota dan Provinsi terkendala oleh kewenangan /khususnya terhadap sekolah SLTA /SMK yang pembinaan nya tidak dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kab/Kota tetapi langsung pada tingkat provinsi)	menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten agar kegiatan pembinaan untuk tingkat SLTA dan SMK dapat tetap bisa dijalankan serta koordinas dengan stkaeholder tingkat kabupaten/kota	
5	Administrasi Kependudukan dan Capil											
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana										
			Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi	1.	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kependudukan										
					1	Persentase Fasilitas Dalam Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el di Kab/Kota (Satuan: %)	75	100	133,33				
					2	Persentase Fasilitas Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 18 Tahun (Satuan: %)	87,50	100	114,29				
					3	Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK versi ter-update (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Oleh SKPD Provinsi (Satuan: %)	50	16,13	32,26	Belum semua OPD melaksanakan PKS tentang Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatkan koordinasi dengan OPD untuk mendorong PKS		
				1	Pembinaan Penyelenggaraa n Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)	-	Terlaksananya Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kepemilikan KTP-El	3	3	100			
				2	Pembinaan Penyelenggaraa n Catatan Sipil di Kabupaten/Kota	-	Penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kepemilikan dokumen	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					(DAK)	catatan sipil						
				3	Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)	- Terlaksananya peningkatan pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota untuk penyajian data kependudukan tingkat provinsi	6	6	100			
				4	Peningkatan Penyelenggaraan KTP-EL dan KIA	- Terlaksananya Penyelenggaraan KTP-EL dan KIA untuk meningkatkan Kepemilikan KTP-EL dan KIA	4	4	100			
				5	Peningkatan Administrasi Catatan Sipil	- Terlaksananya peningkatan administrasi catatan sipil untuk meningkatkan kepemilikan dokumen catatan sipil	6	6	100			
				6	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	- Terlaksananya peningkatan pengelolaan data dan informasi kependudukan untuk penyajian data kependudukan tingkat provinsi	5	5	100			
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa											
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	29	29	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terciptanya Kapasitas Aparatur DPMD Provinsi Banten yang Handal (satuan; kegiatan)	3	3	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang Berlaku (Satuan: bulan)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (satuan:bulan)	12	12	100			
			Penataan serta PembinaanKelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan	2.	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan							
					1	Lembaga Kemasyarakatan desa yang diberdayakan di 48 Desa tertinggal (Satuan:	20	20	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						Desa)						
				1	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat	-	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat yang tepat sasaran (satuan: Jumlah Lembaga)	20	20	100		
				2	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	Terlaksananya Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	20	20	100		
				3	Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	-	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (satuan: Jumlah Lembaga)	20	20	100		
				4	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan TP PKK Provinsi	-	Terlaksanannya Lembaga TP PKK Provinsi yang handal (Satuan: Jumlah Desa)	20	20	100		
			Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan		3.	Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan						
						1	Lembaga Ekonomi Masyarakat yang di berdayakan di 48 desa Tertinggal (Satuan: Desa)	20	20	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa	Terlaksananya Pengembangan Pelaku Ekonomi Masyarakat Desa yang Handal (Satuan: Jumlah Desa)	20	20	100			
				2	Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terlaksananya Penataan dan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terukur (satuan: Jumlah Desa)	20	20	100			
				3	Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa	Terlaksananya Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Satuan: Jumlah Desa)	20	20	100			
				4	Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Tenaga Profesional terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana sesuai dengan Peraturan yang berlaku (Satuan: Orang)	70	70	100			
				5	Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terwujudnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan: Jumlah Desa)	20	20	100			
			Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan	4.	Program Bina Pemerintahan Desa/kelurahan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB)	- Pelaksananya Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan (AKIE) Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan Kepesertaan BerKB	7	7	100			
				3	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	- Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Sejahtera untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga	72	72	100			
8	Perhubungan											
		Dinas Perhubungan										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perhubungan								
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)						
					3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (satuan : dokumen)	13	13	100			
				2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (satuan: dokumen)	26	24	92,31			
				3 Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				4 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (satuan : bulan)	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (satuan : bulan)	12	12	100			
				6	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan (satuan : kegiatan)	3	3	100			
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggara n Perhubungan							
						1 Persentase Perencanaan Transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	50	50	100			
				1	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi	- Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi (satuan : dokumen)	2	2	100			
				2	Pengembangan Prasarana Transportasi	- Tersusunnya dokumen Pengembangan Prasarana Transportasi (satuan : dokumen)	1	1	100			
				3	Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan	- Tersusunnya dokumen Pengembangan Sarana Transportasi dan Kelengkapan Jalan (satuan : dokumen)	1	1	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
					1	Prosentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (Satuan: %)	10	10	100		
					2	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan Prasarana Transportasi (Satuan: %)	30,77	30,77	100		
					3	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian (Satuan: %)	15	15	100		
				1	Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api	- Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang	- Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang (satuan : kegiatan)	2	2	100		
				3	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana	- Terselenggaranya Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana (satuan : kegiatan)	3	2,50	83,33		
			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					1	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100	100	100				
					2	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jaringan Jalan (Satuan: %)	10	10	100				
					3	Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas (Satuan: %)	20	20	100				
				1	Penyelenggaraa n Keselamatan Lalu Lintas Jalan	-	Terselenggaranya peningkatan keselamatan lalu lintas jalan (satuan : kegiatan)	2	2	100			
				2	Pengendalian dan Penyelenggaraa n Lalu lintas Jalan	-	Terselenggaranya Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan (satuan : kegiatan)	2	2	100			
				3	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	-	Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (satuan : kegiatan)	7	7	100			
				4	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (DAK)	-	Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan DAK (satuan : kegiatan)	1	1	100			
				Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan	5.	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
						1	Persentase Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Regional (Satuan: %)	50	25	50	1. kurang optimal dalam melakukan desiminasi pelayanan kepada pemilik kendaraan AKDP; 2. Pembatasan perjalanan Dinas dan refocusing Anggaran. 3. keterbatasan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pengumpan	1.Desiminasi pelayanan kepada pemilik AKDP dilakukan melalui media elektronik 2. Koordinasi dengan Pengelola Pelabuhan Pengumpan terkait data penyelenggaraan kepelabuhanan melalui media elektronik. 3. masih tetap menempatkan petugas Posko Nataru namun jumla personil dibatasi.	
						2	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Sarana Transportasi Darat (Satuan: %)	20	20	100			
				1	Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan	-	Terselenggaranya Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat dan Pengendalian Operasional Angkutan pada UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan (satuan : 2 kegiatan)	2	2	100			
				2	Pengelolaan Prasarana Perhubungan	-	Terselenggaranya Pengelolaan Prasarana Perhubungan Laut	1	1	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Laut	(satuan : kegiatan)						
			Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	6.	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara							
						1	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (Satuan: %)	50	50	100		
						2	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Penyelenggaraa n Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut	-	Terselenggaranya Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut (satuan : kegiatan)	1	1	100		
				2	Penyelenggaraa n Keselamatan Penerbangan	-	Terselenggaranya Penyelenggaraan Keselamatan Penerbangan (satuan : peserta)	100	100	100		
				3	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan	-	Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan (satuan : kegiatan)	1	1	100		
9	Komunikasi dan											

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Informatika										
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian							
					1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3. Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset -	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan -	23	23	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur -	15	15	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan -	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran -	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi	2. Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
					1	Persentase penyediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan: %)	67,31	54,11	80,39		
					2	Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (Satuan: %)	67,31	67,31	100		
					3	Capaian Standar LPSE dalam Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan (Satuan: Jumlah)	12	10	83,33		
					1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik - terlaksananya Layanan Pengadaan Barang Jasa Elektronik sesuai standar layanan (dokumen)	12	12	100		
					2	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi - Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan sesuai standar (unit)	94	94	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	- Terselenggaranya pengawasan, pengendalian dan pendayagunaan pemanfaatan TIK sesuai dengan perundang undangan TIK (kegiatan)	16	7	43,75	- adanya kelalaian pada saat penyesuaian target output di KKL pada saat penyusunan APBD perubahan yang semula 16 kegiatan seharusnya menjadi 7 kegiatan. - Kendala adanya pandemi covid 19 sehingga membatasi mobilitas pelaksanaan kegiatan	- melalui media daring.	
				4	Pengelolaan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	- terkelolanya infrastruktur TIK yang berkualitas (dokumen)	4	4	100			
				5	Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	- Terlaksananya Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan aturan (dokumen)	14	14	100			
				6	Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas	- Terbangunnya dan terintegrasinya Aplikasi di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten secara efektif dan berdayaguna (aplikasi)	9	9	100			
			Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi	3.	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	60	60,31	100,52			
				1 Pelayanan Informasi Publik	- Terselenggaranya Layanan Informasi Publik yang berkualitas (dokumen)	340	340	100			
				2 Kemitraan Komunikasi Publik	- terjalinnya Hubungan kemitraan yang baik di bidang komunikasi dengan berbagai lembaga (kegiatan)	8	8	100			
				3 Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	- Terkelolanya Aspirasi dan Opini Publik terhadap pemerintah yang positif (bulan)	12	12	100			
				4 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	- terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan standar layanan Informasi Publik (bulan)	12	12	100			
				5 Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	- Terselenggaranya Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (bulan)	12	12	100			
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dan Menengah									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Satuan: %)						
					1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Tersusunnya Laporan Kinerja keuangan dan neraca aset yang akuntabel (satuan : dokumen)	17	17	100			
					2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Tersusunnya Dokumen Perencanaan Evaluasi dan pelaporan yang tepat waktu(satuan : dokumen)	22	22	100			
					3 Peningkatan Kapasitas Aparatur - Tercapainya Peningkatan kapsaitas aparatur yang kompeten (satuan : dokumen)	18	18	100			
					4 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran - Tersedinaya barang dan jasa pengadaaaan dan pemeliharaan sarana prasaran perkantoran yang berkualitas(satuan : kegiatan)	14	14	100			
					5 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan - Terlaksananya pengelolaan arsip dan pelayanan [perpustakaan yang dapat mendukung kelancaran tugas administrasi perangkat daerah (satuan : bulan)	12	12	100			
			Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM	2. Program Pengembangan Sistem Pendukung							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Usaha Bagi Usaha Kecil							
					1	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain (Satuan: %)	1	0	0	Keputusan Gubernur no 443 kep 214-Huk/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi Banten pada Bulan Maret 2020, berdampak pada kegiatan yang telah direncanakan di Renja Dinas koperasi dan UKM tahun 2020 sehingga target outcome yang telah ditetapkan tidak tercapai	kebijakan Strategis sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM yang terdampak akibat pandemic Covid 19 maka Dinas Koperasi UKM berupaya melakukan kebijakan strategis melalui kegiatan stimulus penguatan permodalan usaha bagi Koperasi dan Usaha kecil yang anggarannya sebesar Rp. 2.500.000.000,-/ dua milyar limaratus juta rupiah yang tertuang dalam Pergub 518/Kep.269-Huk/2020 tentang Penetapan besaran stimulus bantuan modal bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang terkena dampak ekonomi

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										akibat pandemi corona Virus Disease -19 Penyaluran BTT sebanyak 310 bagi Usaha Kecil pada Tahun 2020	Commerce, 2. Pelatihan Digital Marketing bagi Usaha Kecil, 3. Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi melalui E Commerce, 4. Pembinaan Pemanfaatan Aplikasi Bagi Pengembangan Koperasi Online 5. Pelatihan peningkatan teknologi kapasitas produksi Koperasi
				1	Bina Usaha Kecil	- Terlaksananya pengembangan bina usaha kecil untuk peningkatan kemitraan secara aktif dengan dunia usaha lain (satuan : kegiatan)	11	1	9,09		
				2	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	- Terfasilitasinya akses permodalan, pembiayaan produk bahan baku dan sentra bagi usaha kecil untuk meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha lain (satuan :	17	4	23,53		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						kegiatan)						
				3	Penyusunan Strategi Peningkatan SDM Usaha Kecil	- Tersusunnya kajian peningkatan SDM usaha kecil untuk meningkatkan kemitraan secara aktif dengan dunia usaha lain (satuan : dokumen)	4	0	0			
				4	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil	- Terlatihnya SDM usaha Kecil dalam pengembangan usaha peningkatan kapasitas pendampingan UKM untu meningkatkan kemitraan secara aktif denga dunia usaha lain (satuan : kegiatan)	3	2	66,67			
				5	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Pemberdayaan SDM Usaha kecil (DAK)	- Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan SDM UKM untuk meningkatkan kemitraan secara aktif dengan dunia usaha lain (satuan : kegiatan)	4	0	0			
			Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan	3.	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	6	6	100			
				1	Kelembagaan dan Perizinan - Terfasilitasinya kelembagaan perizinan pembinaan dan penyuluhan koperasi untuk pencapaian koperasi aktif (satuan : kegiatan)	18	2	11,11			
				2	Keanggotaan dan Penerapan Peraturan - Terlaksananya pembinaan penerapan peraturan terhadap anggota koperasi untuk pencapaian koperasi aktif (satuan : kegiatan)	7	3	42,86			
				3	Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan - Terlaksananya pengawasan pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi (satuan : kegiatan)	9	1	11,11			
				4	Penyelenggaraa n Pelatihan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi - Terlatihnya satgas pengawasan dan penilaian koperasi untuk pencapaian koeprasi aktif (satuan : kegiatan)	2	0	0			
				5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengawasan SDM Koperasi (DAK) - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengawasan SDM Koperasi (DAK) (satuan: kegiatan)	2	0	0			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan	4. Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi								
					1	Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan: %)	6	1	16,67	Refocusing ke 3	Target Program yang belum tercapai pada tahun 2020 akan dicapai pada tahun 2021	Untuk mencapai target Outcome tahun 2020 akan dilaksanakan pada tahun 2021 dalam kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			1	Bina Usaha Koperasi	-	Terlaksananya pengembangan bina usaha koperasi untuk peningkatan koperasi yang bankable (satuan : kegiatan)	6	2	33,33			
			2	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi	-	Tersusunnya kajian peningkatan kualitas SDM koperasi untuk peningkatan koperasi yang bankable (satuan : kegiatan)	11	2	18,18			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Penyusunan Strategi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	- Terlatihnya SDM Koperasi dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas pendampingan koperasi untuk peningkatan koperasi yang bankable (satuan : kegiatan)	4	0	0			
				4	Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi	- Terlatihnya SDM Koperasi dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan kapasitas Pendampingan Koperasi untuk peningkatan koperasi bankable (satuan : kegiatan)	8	0	0			
				5	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Pemberdayaan SDM Koperasi (DAK)	- Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha dan pemberdayaan koperasi untuk peningkatan koperasi yang bankable (satuan : kegiatan)	5	2	40			
11	Penanaman Modal											
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas 1. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
					1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya laporan kinerja keuangan dan Neraca Aset yang akuntabel (satuan : dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang tepat waktu (satuan : dokumen)	36	36	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang kompeten (satuan : dokumen)	18	18	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya pengelolaan kearsipan dinamis OPD (satuan : 12 bln)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang berkualitas (satuan : kegiatan)	42	41	97,62			
				Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan								
				2.	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Jumlah calon investor yang mendaftar (Satuan: Investor)	1.000	1526	152,60		
					2	Jumlah Kerjasama BUMD (Satuan: BUMD)	2	3	150		
				1	Penyelenggaraa n Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal	- Terselenggaranya promosi penanaman modal melalui berbagai media untuk menarik minat investasi calon investor (Partisipasi bisnis forum dan pameran dalam negeri, Promosi penanaman modal melalui media massa,Penguatan dan fasilitasi promosi terpadu (satuan : kegiatan)	5	5	100		
				2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi	- Tersedianya Alat dan Bahan Promosi (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				3	Pembinaan BUMD dan Kerjasama Penanaman Modal	- Terlaksananya Peningkatan Kerjasama BUMD (satuan : kegiatan)	2	3	150		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	3. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal							
					1 Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Pengembangan data potensi penanaman modal daerah - Termutakhirnya Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal dengan Kab/Kota (satuan : dokumen)	3	3	100			
				2	Perencanaan dan pengembangan Penanaman modal daerah - Tersedianya dokumen perencanaan dan pengembangan penanaman modal (satuan : dokumen)	1	1	100			
				3	Pengembangan Sistem informasi penanaman modal daerah - Tersedianya sistem informasi penanaman modal dan perizinan yang andal (satuan : dokumen)	4	4	100			
			Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	4. Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					1	Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100	100	100			
					1	Pelayanan Perizinan - Tersusunnya Dokumen Perizinan (satuan : dokumen)	1000	2053	205,30			
					2	Pelayanan Non Perizinan - Tersusunnya Dokumen Non Perijinan (satuan : dokumen)	50	83	166			
					3	Pelaporan dan Pengaduan Pelayanan Perizinan - Tersusunnya Laporan Perizinan dan Non Perizinan (satuan : dokumen)	36	36	100			
			Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku	5.	Program Pengendalian Penanaman Modal							
					1	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: Cakupan)	17,15	26,14	152,42			
					1	Pemantauan Realisasi Penanaman Modal - Terpantaunya perkembangan realisasi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (satuan : PMA/PMDN)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pembinaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Dunia Usaha dan Non Dunia Usaha sesuai peraturan (Penanganan permasalahan investasi, Pembinaan dunia usaha, Pembinaan Non dunia usaha) (satuan : kegiatan)	3	2	66,67	Kegiatan pembinaan kepada non dunia usaha tidak dilaksanakan karena dampak dari pandemi covid-19 dan adanya PSBB		
				3	Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan	Terlaksananya Pengawasan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan PMA/PMDN (satuan : perusahaan)	100	66	66	Dari target 100 perusahaan, tdk tercapai target karena pandemi covid-19 (pembatasan sosial dan Refocusing anggaran penanganan Pandemi)		
12	Kepemudaan dan Olahraga											
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1.	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga							
						1. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100				
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset Yang Akuntabel (Dok)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Yang Tepat Waktu (Dok)	25	25	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Kompetensi (Keg)	3	3	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	-	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan Yang Dapat Mendukung	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										Surat Edaran Gubernur terkait PSBB.		
				2	Penguatan Kelembagaan Pemuda	- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kepemudaan (Keg)	5	3	60	Tidak dilaksanakanya Kegiatan Hari Sumpah Pemuda Tingkat Provinsi (1 Keg), 2. Pelatihan Karakter Building Pemuda (1 Keg), Sosialisasi Penanggulangan HIV / AIDS dan Bahaya Narkoba (1 Keg) Berkaitan dengan Surat Edaran Gubernur terkait PSBB sehingga tidak dapat di realisasikan.		
				3	Pendidikan Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda	- Terlaksananya Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda (Keg)	7	2	28,57	Tidak dilaksanakanya Kegiatan Pengembangan wawasan purna paskibraka Indonesia (PPI) Provinsi Banten, Kegiatan Lomba tata upacara bendera dan Baris Berbaris (LTUB dan LBB) tingkat Provinsi Banten dan Kegiatan Fasilitasi seleksi pemuda pelopor dan Temu karya pemuda berprestasi tingkat Provinsi Banten Berkaitan dengan Surat Edaran Gubernur terkait PSBB.		
				4	Pengembangan Wawasan dan Kreativitas	- Terlaksananya Pengembangan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda	5	0	0	Refocusing		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Pemuda	(Keg)						
				5	Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan	- Terlaksananya Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Keg)	5	0	0	Refocusing		
				6	Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda	- Terlatihnya Pemuda dalam keterampilan (Keg)	5	5	100			
			Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	3.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga							
						1 Cakupan Pelayanan pembinaan olahraga (Satuan: %)	80	73	91,25			
				1	Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus	- Terbinanya Olahraga Pendidikan dan Olahraga layanan Khusus	7	4	57,14	Tidak dilaksanakanya Sub Kegiatan Pekan Olahraga Paralympic Pelajar (1 Keg), Kejuaraan dalam rangka Hari Olahraga Nasional (1 keg), Pekan Olahraga Mahasiswa (1 keg) Berkaitan dengan Surat Edaran Gubernur terkait PSBB dan di tindak lanjuti Oleh Kab/Kota selaku tuan rumah pada event tersebut sehingga Event Olahraga tidak dapat di realisasikan.		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan Industri Olah Raga	- Terbinanya Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga	5	1	20	Tidak dilaksanakannya 4 Sub Kegiatan Fasilitas Olahraga Rekreasi Tingkat Nasional / Internasional (1 keg), Pekan Olahraga Tradisional Asli Daerah Tk. Provinsi Banten (1 keg), Temu Forum Stakholder Industri Olahraga (1 keg) dan Pembinaan Industri Olahraga (1 keg) Berkaitan dengan Surat Edaran Gubernur terkait PSBB dan di tindak lanjuti Oleh Kab/Kota selaku tuan rumah pada event tersebut sehingga Event Olahraga tidak dapat di realisasikan.		
				3	Pengadaan Sarana Prasarana Keolah Ragaan	- Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Sarana Olahraga	5	1	20	Tidak dilaksanakannya 4 Sub Kegiatan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) (1 Keg), Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) (1 Keg), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) (1 Keg), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (1 Keg) adapun kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Keolahragaan Berkaitan dengan event - event yang ada di masing - masing kegiatan sehingga berpengaruh pada capaian realisasi sub kegiatan sarana dan prasarana		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	4. Program Peningkatan Prestasi Olah Raga							
					1 Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	85	69	81,18			
				1 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	- Terlaksananya Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga	7	3	42,86	Tidak dilaksanakannya Sub Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) (1 Keg), 3. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) (1 Keg), Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional (1 Keg), dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Internasional (1 Keg) Berkaitan dengan Surat Edaran Gubernur terkait PSBB dan di tindak lanjuti Oleh Kab/Kota selaku tuan rumah pada event tersebut sehingga Event Olahraga tidak dapat di realisasikan.		
				2 Peningkatan SDM Keolah Ragaan	- Terlaksananya Peningkatan SDM Keolahragaan	4	4	100			
				3 Pelayanan dan pengawasan organisasi keolahragaan	- Terlaksananya Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Olahraga	6	6	100			
			Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	5. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						1 Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	85	65	76,47			
				1	Pembinaan dan Pelatihan Olah Raga Pelajar	- Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	9	6	66,67	Tidak dilaksanakannya Sub kegiatan Kejuaraan Nasional (1 keg), Tryout Atlet (1 keg) dan kejuaraan internasional (1 keg) berkaitan dengan surat edaran dari Kementerian kepemudaan dan Olahraga sehingga event tersebut sehingga Event Olahraga tidak dapat di realisasikan.		
				2	Peningkatan sarana dan prasarana atlet PPLP	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Atlet PPLP	3	3	100			
13	Statistik											
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian										
			Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral	1.	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Ketersediaan Database Sektoral (Satuan: %)	50	50	100			
					1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	12	12	100			
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
			peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan	2. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
					1 Terpenuhiya Kebutuhan Data untuk Perencanaan Pembangunan Sesuai SIPD (Satuan: %)	70	84	120			
					1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	2	2	100			
14	Persandian										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian									
			Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi	1. Program Tata Kelola Persandian							
					1 Cakupan pengelolaan persandian dan keamanan informasi (Satuan: %)	60	75	125			
				1 Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	- Terkelolanya Persandian dan Keamanan Informasi yang handal (dokumen)	2	2	100			
15	Kebudayaan										
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan									
			Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten	1. Program Pelestarian Kebudayaan							
					1 Cakupan Pembinaan Organisasi Seni Budaya (Satuan: %)	100	57,01	57,01	karena kegiatan melibatkan banyak orang yg tidak memungkinkan dimasa pandemi dan adanya keterbatasan anggaran serta pengalihan anggaran	Perlu adanya penambahan anggaran untuk mensertifikasi organisasi kesenian sesuai dengan kewenangan provinsi berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Lampiran V	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
										tentang pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan			
						6	Persentase Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah sesuai standar (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman	-	Terlaksananya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dan Permuseuman	10	1	10	Tidak dilaksanakan kegiatan melibatkan banyak orang yang tidak memungkinkan dimasa pandemi	Telah tersusunnya anggaran 2021 yang telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan	
				2	Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian	-	Terlaksananya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sejarah, Nilai Tradisi dan Kesenian	2	1	50	Tidak dilaksanakan kegiatan melibatkan banyak orang yang tidak memungkinkan dimasa pandemi	Telah tersusunnya anggaran 2021 yang telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan	
				3	Peningkatan Sumberdaya Manusia Kebudayaan	-	Terlaksananya Peningkatan Sumberdaya Manusia Kebudayaan	4	2	50	Tidak dilaksanakan kegiatan melibatkan banyak orang yang tidak memungkinkan dimasa pandemi	Telah tersusunnya anggaran 2021 yang telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan	
				4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	-	Terlaksananya Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum (DAK)	1	0	0	Tidak ada alokasi anggaran, dialihkan untuk penanganan COVID 19	Telah tersusunnya anggaran 2021 yang telah menyesuaikan dengan kondisi saat ini dengan tetap	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											menerapkan protokol kesehatan	
16	Perpustakaan											
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						fungsi SKPD (Satuan: %)						
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset Yang Akuntabel	100	100	100		
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dok Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Yang Tepat Waktu	100	100	100		
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Aparatur Yang Kompetensi	100	100	100		
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	-	Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan Dan Pelayanan Perpustakaan Yang Dapat Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi Administrasi Perangkat Daerah	100	100	100		
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	-	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran Yang Berkualitas	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Yang Berkualitas						
17	Kearsipan											
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah										
			Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	1.	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan							
						1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	90	90	100		
						2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	90	90	100		
						3	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	95	95,35	100,37		
				1	Penelusuran, Akuisisi dan Pemeliharaan Arsip Statis	-	Terlaksananya akuisisi , pemeliharaan dan tersimpannya dokumen arsip statis daerah melalui digitalisasi arsip Dalam Mewujudkan Keamanan dan Pelestarian Dokumen	100	100	100		

II.2.2. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 2.27
Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kelautan dan Perikanan										
		Dinas Kelautan dan Perikanan									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkan nya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya pelaksanaan Laporan Keuangan dan Neraca Aset (Satuan :Dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- tersusunnya pelaksanaan program evaluasi dan pelaporan (Satuan:Dokumen)	18	18	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Tersusunnya dokumen Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan : Dokumen)	16	16	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terkelolanya kearsipan pelayanan perpustakaan (12 bulan)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya penyediaan sarpras kantor 12 bulan. pengadaan paket sebanyak 6 paket , pemeliharaan sarana prasarana kantor (12 bulan) dan koordinasi luar dan dalam daerah (12 bulan)	12	12	100			
				6	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	- Tersedianya dan terlaksananya pengadaan barang/jasa perkantoran (Satuan 16 kg)	16	16	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7	Pelayanan Tata Usaha pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	- Tersedianya dan terlaksananya pemeliharaan pengadaan barang/jasa perkantoran (Satuan: 17 keg)	17	17	100			
				8	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	- Tersedianya pelayanan dan pemeliharaan pengadaan barang/jasa perkantoran sebanyak 12 bln)	12	12	100			
				9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	- Tersedianya pengadaan dan pemeliharaan pengadaan barang/jasa perkantoran Satuan: 15 keg)	15	15	100			
				10	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan	- Tersedianya pengadaan dan pemeliharaan pengadaan barang/jasa perkantoran (Satuan: 15 keg)	15	15	100			
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap								
						1 Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8,16	69,86	856,13	Data yg dihasilkan oleh validator Kab/kota belum tervalidasi oleh KKP	Akan dilakukan evaluasi dan pembinaan terhadap validator data kelautan perikanan yang ada	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12
												di Kab/Kota	
						2	Persentase capaian kinerja pelayanan usaha kepelabuhanan (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	-	Tercapainya produktifitas perikanan tangkap (Satuan: 4000 kg/unit)	4000	4000	100			
				2	Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	-	Terlaksananya jasa pelayanan usaha perikanan tangkap (Satuan: 175 Dokumen)	175	175	100			
				3	Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan	-	Terlaksananya Revilitasi dan Operasional pelabuhan perikanan (Satuan: 3 Dokumen)	3	3	100			
				4	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan - UPTD Provinsi Banten (DAK)	-	Rehabilitasi sarana prasarana pelabuhan perikanan (Satuan: 0 lokasi)	1	0	0	Recofusing anggaran dampak pandemi covid 19	Apabila diperlukan untuk direncanakan kembali penganggaran pada tahun berikutnya	
				5	Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Kepelabuhan	-	Terlaksananya Tatakelola pelayanan dan usaha Pelabuhan perikanan (Satuan: 3 Dokumen)	3	3	100			
				6	Pelaksanaan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	-	Terlaksananya kesyahbandaran pada Pelabuhan perikanan (Satuan: 85 Dokumen)	85	85	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								
					1	Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	25	25	100			
			1	Penanganan Pelanggaran	-	Terlaksananya penangana kasus dan pencegahan konflik (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
			2	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	-	Terlaksananya pengawasan pada usaha perikanan dan kemampuan pokmaswas (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
			3	Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	-	Terlaksananya pengawasan Jasa Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Satuan: 20 Dokumen)	20	20	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	4. Program Peningkatan Daya Saing Perikanan							
					1	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Jumlah ruang lingkup pengujian dan mutu hasil perikanan pada ISO 17025 (Satuan: Dokumen)	1	1	100		
					3	Produksi Benih Ikan Laut dan Payau (Satuan: Milyar)	1	1	100		
				1	Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	-	Adanya sertifikat kelayakan pengelolaan SKP sertifikat halal bagi unit pengolah ikan (Satuan: 20 Dokumen)	20	20	100	
				2	Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan	-	Terlaksananya invesatasi promosi produk kelautan (Satuan: 1 Dokumen)	1	1	100	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya	Terlaksananya penerbitan Rekomendasi CBIB dan pembinaan kelompok usaha budidaya yang bankable (Satuan: 32 Dokumen)	32	32	100			
				4	Peningkatan Kualitas Pengujian	Terlaksananya Operasional sarana Laboratorium dan pengujian mutu bahan baku dan produk olahan (Satuan: 250 sampel)	250	250	100			
				5	Pengendalian Mutu Perikanan	Tersusunya akreditasi SNI ISO dan kaji terap pengelolaan ikan (Satuan: 9 sampel)	9	9	100			
				6	Produksi Benih Ikan Air Laut dan Payau	Tercapainya tingkat produksi benih ikan laut dan payau (Satuan: 2 juta benih)	2	2	100			
				7	Pelayanan Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut	Tersusunya kajian terap teknologi pembenihan dan budidaya ikan (Satuan: 1 Dokumen)	1	1	100			
				Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan		5. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: Poin)	118	98,73	83,67		
					2	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	- Terlaksananya Pelayanan dan pembinaan pesisir (Satuan: 1 Dokumenl)	1	1	100		
				2	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	- Tersusunya Regulasi Rekomendasi usaha jasa kelautan (Satuan: 2 Dokumenl)	2	2	100		
				3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	- Terlaksananya Penguatan usaha perikanan dan kemampuan SDM wilayah pesisir (Satuan: 12 Dokumenl)	12	12	100		
				4	Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	- Tersusunnya Rekomendasi teknis usaha kelautan wilayah utara (Satuan: 5 Dokumenl)	5	5	100		
				5	Pengelolaan dan Pengendalian Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	- Tersusunnya Rekomendasi teknis usaha kelautan wilayah selatan (Satuan: 5 Dokumenl)	5	5	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				6	Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Utara	- Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi teknis usaha kelautan wilayah utara (Satuan: 6 Dokumenl)	6	6	100			
				7	Pelayanan Usaha Jasa Kelautan pada Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Wilayah Selatan	- Terlaksananya fasilitasi Rekomendasi teknis usaha kelautan wilayah selatan (Satuan: 2 Dokumenl)	2	2	100			
2	Pariwisata											
		Dinas Pariwisata										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkan nya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pariwisata								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	
						1	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	4.044.827	3881738	95,97				
				1	Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	-	Terbinanya Usaha Industri Pariwisata yang handal dan profesional (satuan : industri)	5	5	100				
				2	Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	Peningkatan Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan : dokumen)	2	2	100				
				3	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	-	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif (satuan : kegiatan)	20	20	100				
			Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	3. Program Pemasaran Produk Pariwisata										
						1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	16.361.411	17930768	109,59				
						2	Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,44	1,58	109,72				
				1	Promosi Pariwisata Provinsi Banten	-	Terlaksananya promosi Pariwisata Provinsi Banten yang tepat sasaran dalam mendatangkan wisatawan (satuan : kegiatan)	6	6	100				
				2	Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	-	Penyiapan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Provinsi Banten (satuan : kegiatan)	4	4	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona (Satuan: %)	20	20	100			
				1 Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten	- Penyediaan amenities dan Aksesibilitas (satuan : objek)	9	9	100			
				2 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	- Pengembangan Atraksi Wisata (satuan : objek)	12	11	91,67			
				3 Optimalisasi Atraksi Wisata Provinsi Banten	- Berkembangnya Pemberdayaan masyarakat Destinasi pariwisata provinsi Banten yang berbasisis sapta pesona (satuan : objek/lokasi)	3	3	100			
3	Pertanian										
		Dinas Pertanian									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkan nya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Pertanian							
					1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	13	13	100		
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	30	30	100		
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan kapasitas Aparatur (Satuan: Kegiatan)	3	3	100		
				4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner	- Terlaksananya Pelayanan tata Usaha Perkantoran (Satuan: Kegiatan)	12	12	100		
				5	Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DAK)	- Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DAK) (Satuan: Paket)	5	3	60	Tidak Dapat Dilaksanakan secara keseluruhan dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										covid 19 dan Program Penunjang tidak terinput pada aplikasi Krisna sehingga Pelaksanaan Kegiatan inti tidak dapat dilaksanakan		
				6	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang dan jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana perkantoran (Satuan: Kegiatan)	12	12	100			
				7	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Terlaksananya Pelayanan tata Usaha Perkantoran (Satuan: Kegiatan)	11	11	100			
				8	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	- Terlaksananya Pelayanan tata Usaha Perkantoran (Satuan: Kegiatan)	12	12	100			
				9	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengujian Pakan dan Pembibitan Ternak	- Tersedianya sarana prasarana Kantor (Satuan: Kegiatan)	2	2	100			
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)									
				2.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Kw/Ha)	51,72	48,36	93,50		
					2	Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2.001.710	2132128	106,52		
					3	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	23.790	89270	375,24		
					4	Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7.873,01	895	11,37	Capaian Pelaksanaan Tidak Mencapai target karena sasaran Program kedelai APBN 2020 mengalami refocusing 100%	
					5	Penyediaan benih sumber Tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai) (Satuan: Ton)	15	15	100		
					6	Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	5	6,41	128,20		
					7	Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman pangan (Satuan: %)	10	9,30	93		
				1	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serealia	-	461617	462686	100,23		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi	- Terwujudnya peningkatan produksi dan mutu produk Aneka Kacang dan Umbi (Satuan: Ha)	52126	9012,80	17,29	Capaian Pelaksanaan Tidak Mencapai target, karena sasaran Program kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi jalar APBN 2020 mengalami refocusing 100%	sudah dilakukan koordinasi akan diprioritaskan di tahun 2021 bagi kelompok yang tidak terpenuhi di tahun 2020	
				3	Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan	- Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Pasaca Panen Tanaman Pangan (Satuan: Kelompok)	25	25	100			
				4	Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan	- Meningkatnya Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Pangan (Satuan: Ton)	15	15	100			
				5	Perlindungan Tanaman Pangan	- Terlaksananya Perlindungan Tanaman Pangan (Satuan: Ha)	20300	21601,23	106,41			
				6	Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan	- Meningkatnya Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman pangan (Satuan: Unit)	394	765	194,16			
				3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura								
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	10.101	12781,50	126,54		
					2	Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	810,33	1133	139,82		
					3	Penyediaan benih sumber Tanaman Hortikultura (Satuan: Ton)	25	25	100		
					4	Pengamanan Produksi Tanaman Hortikultura dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	5	5,73	114,60		
					5	Persentase Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih tanaman Hortikultura (Satuan: %)	10	5,23	52,30	Penentuan target sertifikasi benih didasarkan pada potensi kegiatan produksi para produsen benih yang bergantung pada pesanan, kondisi pandemi covid-19 banyak yang membatalkan, sehingga produsen tidak melanjutkan sertifikasi, dan pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap capaian target kinerja.target	menginformasikan dan memfasilitasi kepada lembaga pemerintah provinsi/kabupaten/ kota yang mempunyai program pengembangan hortikultura supaya memanfaatkan sumber benih dari penangkar lokal.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
										kinerja.		
					6	Pengembangan Kawasan Buah Durian (Satuan: Ha)	35	598,64	1710,40			
				1	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	- Terwujudnya Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura (Satuan: Ha)	9124	9124	100			
				2	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	- Terwujudnya Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (Satuan: Ha)	1880	8769	466,44			
				3	Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura	- Terwujudnya Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura (Satuan: Kelompok)	14	20	142,86			
				4	Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura	- Meningkatkan Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Hortikultura (Satuan: Ton)	26	26	100			
				5	Perlindungan Tanaman Hortikultura	- Terlaksananya Perlindungan Tanaman Hortikultura (Satuan: Ha)	39	98,32	252,10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5	Pengamanan Produksi Tanaman Perkebunan dari gangguan serangan OPT dan DPI (Satuan: %)	10	14,77	147,70		
					6	Pengawasan Benih Perkebunan (Satuan: Komoditi)	3	3	100		
				1	Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan	- Meningkatkan Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan (Satuan: Batang)	500	500	100		
				2	Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan	- Meningkatkan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Perkebunan (Satuan: Unit)	30	33	110		
				3	Perlindungan Tanaman Perkebunan	- Terlaksananya Perlindungan Tanaman Perkebunan (Satuan: Ha)	50	52,39	104,78		
				4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	- Terwujudnya peningkatan produksi komoditas perkebunan (Satuan: Ha)	130	130	100		
				5	Pengembangan Komoditas Perkebunan	- Terwujudnya Pengembangan Komoditas Perkebunan (Satuan: Ha)	300	300	100		
				6	Pengembangan Aneka Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan	- Terwujudnya Pengembangan Aneka Usaha dan Pemasaran Hasil Perkebunan (Satuan: Unit)	15	16	106,67		
				Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan	5. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bahan baku industri (agroindustri)								
					1 Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	145.135	181067	124,76			
					2 Peningkatan Capaian Retribusi UPTD BP3T (Satuan: %)	10	21,21	212,10			
				1 Pengembangan Perbibitan Ternak	- Terwujudnya Pengembangan dan Pengawasan Perbibitan Ternak (Satuan: Komoditi)	5	5	100			
				2 Pengembangan Pakan ternak	- Terwujudnya Mutu dan Keamanan pakan Ternak (Satuan: Lokasi)	112	112	100			
				3 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	- Penguatan Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Peternakan (Satuan: Kelompok)	10	15	150			
				4 Pengujian Mutu Pakan dan Hijauan Pakan ternak	- Meningkatnya Pengujian Mutu Pakan dan HPT (Satuan: %)	100	100	100			
				5 Perbibitan Ternak	- Terwujudnya perbibitan Ternak (Satuan: Ekor)	1120	862	76,96			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	6. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian							
					1 Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	90	90	100			
				1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian	- Terwujudnya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian (Satuan: Unit)	75	75	100			
				2 Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi	- Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi (Satuan: Ha)	2000	2725	136,25			
				3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani	- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani (Satuan: Kelompok Tani)	2	3	150			
			Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	7. Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Satuan: Kasus)	28	45	160,71		
					2	Peningkatan Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Satuan: Unit)	22	32	145,45		
					3	Peningkatan Capaian Retribusi UPTD Pelayanan dan Pengujian Veteriner (Satuan: %)	10	125,66	1256,60		
				1	Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	- Teratasinya penyebaran Penyakit Hewan Menular strategis (Satuan: Kasus)	45	45	100		
				2	Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Terkendalinya Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: Unit Usaha)	120	87	72,50	- Adanya Refocusing Anggaran Covid 19 - Adanya Permentan No II tahun 2020 tentang NKV dan Permentan No 8 tahun 2020 tentang pejabat Otovet dan dokter hewan, - Belum ada Pejabat Otoritas Veteriner (Otovet) SK Tim Auditor NKV Baru ditandatangani oleh Pak Gubernur pada Akhir Tahun 2020	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan	- Terawasinya keamanan Obat dan Produk Asal Hewan (Satuan: Unit Usaha)	137	170	124,09			
				4	Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	- Meningkatnya Pelayanan dan pengujian kesehatan masyarakat veteriner (Satuan: Kelompok Tani)	2570	2570	100			
				5	Peningkatan Penyidikan, Pengujian, Pengendalian Penyakit Hewan Menular dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	- Meningkatnya Pelayanan dan pengujian kesehatan hewan (Satuan: %)	100	100	100			
4	Kehutanan											
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
			Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta	1.	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan							
						1 Peningkatan Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat (Satuan: %)	10	25,38	253,80			
						2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Kelompok)	3	3	100			
						3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan: Kelompok)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Perencanaan dan penatagunaan hutan	Terwujudnya perencanaan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan tata guna hutan dan perencanaan hutan (satuan: dokumen)	4	5	125			
				2	Pemanfaatan hutan dan penatausahaan hasil hutan	Meningkatnya pengelolaan hutan dan hasil hutan secara lestari sesuai dengan rencana tata kelola hutan (satuan : dokumen)	2	2	100			
				3	Pengembangan aneka usaha dan promosi kehutanan	Terlaksananya pengembangan dan promosi aneka usaha kehutanan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu (satuan : dokumen)	4	4	100			
				4	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai SOP (satuan : dokumen)	8	8	100			
				5	Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai SOP (satuan : dokumen)	8	8	100			
			Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai	2. Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan								
						1 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS) (Satuan: %)	20	36	180			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan (Satuan: Kelompok)	10	10	100		
					3	Tersedianya benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat (Satuan: Batang)	180.000	180010	100,01		
					4	Peningkatan fungsi UPTD TAHURA (Satuan: %)	12,50	12,50	100		
					5	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi wilayah Lebak dan Tangerang (Satuan: Ha)	2.500	2542,88	101,72		
					6	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon (Satuan: Ha)	2.500	3358,01	134,32		
					1	Konservasi SDA dan Ekosistem					
					-	Terbinanya daerah penyangga, sumberdaya alam hayati dan ekosistem kawasan konservasi yang lestari (satuan dokumen)	7	4	57,14	Adanya arahan untuk tidak melakukan perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI jakarta)	Menyesuaikan kegiatan dengan arahan pimpinan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Perlindungan dan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Banten	- Terlaksananya perlindungan kawasan TAHURA dan Rehabilitasi kawasan TAHURA sesuai dengan peraturan pengelolaan taman hutan raya (satuan : hektar)	1608,4	1608,4	100	Terbatasnya SDM baik teknis maupun admisnitrasi pada UPTD Tahura Banten khususnya dalam upaya peningkatan fungsi Taman Hutan Raya seluas 1.595,9 Ha serta belum adanya tenaga Fungsional Polisi Hutan yang bertugas dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan Taman Hutan Raya Banten	Mengusulkan kebutuhan tenaga teknis dan adminsitrase pada UPTD Tahura serta telah mengusulkan kebutuhan tenaga fungsional Polisi Kehutanan serta telah membuat Anjab dan ABK Pejabat Fungsional Polhut yang telah disampaikan ke BKD dan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Banten	
				4	Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Banten	- Terbangunnya sarana dan prasarana fasilitas pemanfaatan wisata sesuai RPJP(satuan : dokumen)	4	4	100	a. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat. b.Adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid 19	a. Mengalokasikan anggaran untuk perluasan Tahura Banten agar pelaksanaan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan dapat berjalan sebagaimana mestinya. b. Koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan KemenLHK mengenai kegiatan perubahan fungsi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											kawasan hutan untuk perluasan Tahura Banten.	
				5	Sertifikasi dan Proteksi Peredaran Benih Tanaman Hutan	Terlaksananya Sertifikasi dan pengawasan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan sesuai SOP (satuan : dokumen)	4	4	100	Dampak Pandemic Covid 19 berdampak pengurangan pagu anggaran degan mengurangi/menghilangkan kegiatan kegiatan penunjang dalam pengelolaan perbenihan (Bimtek, Workshop, pelatihan-pelatihan teknis) dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan perbenihan secara umum.	Untuk peningkatan kompetensi SDM, kegiatan langsung dilapangan masih sangat diperlukan dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. . Kiranya di tahun 2021 dapat memperoleh anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku perbenihan. Di tahun 2020 dengan adanya reconfusing anggaran, dalam rangka peningkatan SDM lebih banyak dilaksanakan secara on line untuk	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											mendapatkan bahan-bahan mengenai pembibitan dan pengembangannya.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				6	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Lebak dan Tangerang	- Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Lebak dan Tangerang sesuai target (satuan: hektar)	2500	3358,01	134,32	Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM), Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas, Terbatasnya anggaran untuk kegiatan RHL, Berkurangnya anggaran RHL akibat Pandemi Covid 19.	Penugasan, rapat kerja teknis, sosialisasi, sinkronisasi dan bimbingan teknis yang terus menerus kepada SDM aparatur Seksi RLPM pada CDLHK-LT, 3. Optimalisasi teknologi komunikasi melalui alat komunikasi handphone. 4. Keterbatasan anggaran RHL di wilayah kerja CDLHK-LT yang bersumber dari APBD Provinsi Banten disiasati dengan terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang optimal dengan UPT Kementerian LHK RI, Program dan kegiatan yang bersifat pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, swakelola dan padat karya; dapat	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											dijadikan salah satu alternatif pemecahan masalah menurunnya daya beli dan perekonomian masyarakat akibat efek domino dari pandemic Covid 19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7	Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas LHK Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	- Terlaksananya Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Hutan di Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon sesuai Target (satuan: hektar)	2500	2542,88	101,72	Terbatasnya dukungan jumlah Sumberdaya Manusia (SDM), Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung Mobilitas, Terbatasnya anggaran untuk kegiatan RHL, Berkurangnya anggaran RHL akibat Pandemi Covid 19.	Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat ini adalah kegiatan Kebun Bibit Desa dan Penanaman Bibit Tanaman sangat tergantung kepada musim dalam hal ini musim hujan. Hal ini berdampak pada realisasi kegiatan dan keuangan bertumpuk di triwulan IV dan beresiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Kendala lain adalah proses Kebun Bibit Desa (KBD) tingkat keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan dan komitmen kelompok tani, padahal dalam kebun bibit desa melalui pemberdayaan masyarakat, kelompok tani	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
											secara umum kelompok tani pemula dan sangat minim pengalaman. Adanya refocusing anggaran akibat adanya pandemi corona	
				8	Pengelolaan DAS	Terlaksananya pengelolaan DAS terpadu (satuan : dokumen) -	4	3	75	Merebaknya pandemi Covid 19 secara langsung mempengaruhi seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dan Pemberlakuan Work From	Melakukan perencanaan ulang dan memilah kegiatan yang dapat ditunda/dibatalkan dan yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				9	Penyuluhan Kehutanan	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, sdm penyuluh kehutanan, dan Kelembagaan Kehutanan sesuai kompetensi (satuan : kelompok)	54	15	27,78	1). Dampak Pandemic Covid 19, pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kehutanan menyesuaikan dengan kondisi pandemic covid 19 sebagian besar dilaksanakan melalui mekanisme daring/virtual, namun tidak semua KTH (kelompok Tani Hutan)/Penyuluh lapangan menguasai teknologi informasi/Komunikasi (gadget) serta lemahnya sinyal di beberapa lokasi (lapangan) sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat. 3). Terbatasnya SDM kehutanan khususnya Penyuluh Kehutanan sebagai ujung	1).Optimalisasi kegiatan melalui media daring dan untuk kegiatan yang harus melaksanakan secara luring menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku yang di perintahkan oleh pemerintah.serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif, baik dengan instansi induk yaitu DLHK dengan para Penyuluh Kehutanan pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. 2) Melaksanakan upaya perencanaan pengadaan penyuluh kehutanan dan perencanaan proses impasing penyuluh kehutanan serta optimalisasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										tombak keberhasilan pembangunan kehutanan di Provinsi Banten dari tahun ketahun semakin berkurang jumlahnya, seiring dengan banyaknya ASN penyuluh kehutanan yang memasuki usia pensiun, dan terbatasnya penambahan formasi penyuluh kehutanan, sampai dengan tahun 2020 jumlah penyuluh kehutanan ASN di Provinsi Banten tinggal berjumlah 7 Orang di tiga wilayah kabupaten di Provinsi Banten (Kabupaten Lebak sebanyak 1 orang, Kabupaten Pandeglang 4 orang dan Kabupaten Serang 2 orang)	penyuluh kehutanan swadaya (pksm) di Provinsi Banten dalam rangka menunjang tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis Diluar Kawasan Hutan (DAK)	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis Diluar Kawasan Hutan (DAK) (satuan: paket)	1		0	Kegiatan tidak dikerjakan karena terkena refocusing berdasarkan SE Menkeu		
5	Energi dan Sumberdaya Mineral											
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkan nya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	13	13	100		
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	24	24	100		
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan kapasitas Aparatur (Satuan: Kegiatan)	2	2	100		
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (Satuan: Bulan)	12	12	100		
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terlaksananya Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (Kegiatan)	4	4	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan	- Terlaksananya Pembangunan Instalasi dan Sambungan Rumah (Satuan: SS)	10000	8235	82,35	Output tidak terealisasi seluruhnya karena terkendala di pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang penyediaanya adalah PT. PLN. Target 10.000 SS hanya terealisasi 8.235 SS dan tersisa 1.765 SS yang tidak terpasang untuk SR, sementara Instalasi Rumah (IR) untuk 10.000 RTS telah terpasang seluruhnya. Hal yang menjadi permasalahan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut : 1. Memasang Sambungan Rumah (SR) sendiri = 26 RTS 2. ID Calon Konsumen bermasalah dengan PT. PLN = 1.128 RTS 3. Penerapan	Menganggarkan 1.739 RTS dari RTS tidak terpasang di tahun 2020 dan masih dapat dipasang di tahun 2021 di APBD Provinsi Banten TA. 2021 agar IR terpasang tidak sia-sia, tidak membuat kekecewaan bagi masyarakat telah terpasang IR namun listrik tidak menyala, serta dalam rangka memenuhi target RPJMD di 2020 yang tidak terpenuhi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Daerah 3T, dimana wilayah 3T untuk Banten telah dicabut, sehingga calon konsumen di wilayah tersebut yang sebelumnya diprioritaskan untuk dilistriki walaupun tidak ada dalam data TNP2K, batal pasang = 611 RTS		
				3	Pengendalian pengembangan infrastruktur Energi	- Tersusunnya Dokumen Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi yang sesuai dengan ketentuan (Satuan: Dokumen)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	3. Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan							
					1 Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	29,92	54,17	181,05			
				Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan	- Tersusunnya Dokumen Laporan Pembinaan Teknis Usaha dan Konservasi Ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan (satuan : Dokumen)	1	1	100			
				Pengusahaan ketenagalistrikan	- Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Teknis Perijinan Pemanfaatan Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan yang berlaku (satuan : Dokumen)	40	142	355			
				Pengendalian ketenagalistrikan	- Tersusunnya Dokumen Laporan Pengendalian teknis usaha pemanfaatan ketenagalistrikan yang sesuai dengan ketentuan (Satuan: Dokumen)	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah							
					1 Prosentase pelayanan dan pengendalian geologi dan air tanah (Satuan: %)	55,44	49,53	89,34			
				1 Pengembangan geologi dan air tanah	- Tersusunnya Dok. Pemetaan, Penelitian, Pengembangan & Penyediaan Sumber Data Geologi dan Air Tanah yang akurat & dapat dipertanggungjawabkan (Satuan: Dokumen)	6	0	0	Tidak ada Output yang ada di kegiatan ini, anggaran yang terserap adalah anggaran persiapan pelaksanaan kegiatan sebelum Refocusing dilaksanakan		
				2 Pengusahaan air tanah	- Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan Air Tanah yang sesuai dengan peraturan yang berlak (satuan : Dokumen)	12	12	100			
				3 Pengendalian geologi dan air tanah	- Terlaksanannya Kegiatan Pengawasan, Pengendalian, dan Pemantauan Geologi dan Air Tanah dengan optimal (Satuan: Kegiatan)	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara							
					1 Prosentase pelayanan dan pengendalian mineral dan batubara (Satuan: %)	70,32	55,25	78,57			
				1	Eksplorasi mineral dan batubara	- Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Teknis Perijinan Eksplorasi Mineral dan Batubara yang sesuai dengan ketentuan (Satuan: Dokumen)	2	2	100		
				2	Operasi produksi mineral dan batubara	- Tersusunnya Dokumen Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Penyediaan Sumber Data Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Dokumen Rekomendasi, Dokumen pengawasan dan pengendalian (Satuan: Dokumen)	10	10	100		
				3	Reklamasi dan pasca tambang	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Reklamasi dan Pasca Tambang dan akurat & dapat dipertanggungjawabkan,	6	6	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Dokumen pengawasan dan dokumen rekomtek						
6	Perdagangan											
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
			Peningkatkan Efisiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis	1. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri								
					1	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5	0,13	3846,15			
					2	Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11	12
						3	Peningkatan Persentase Produk Lokal yang beredar pada Retail Modern (Satuan: %)	10	10	100			
						4	Jumlah Komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka (Satuan: Komoditi)	2	0	0	Pada masa Pandemi Covid 19, tidak ada penyelenggaraan Pasar Lelang.	dialokasikan kembali di tahun 2021	
				1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	-	Terwujudnya Kerjasama Perdagangan yang saling menguntungkan dan Berkembangnya Perdagangan Berjangka	4	3	75	Pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan di beberapa Kab/Kota dibatalkan karena daerah-daerah tersebut ditetapkan sebagai zona merah pada masa Pandemi Covid 19.	Kegiatan Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dengan membatasi Narasumber dan Peserta serta menerapkan protokol kesehatan.	
				2	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	-	Optimalnya Akses Distribusi Perdagangan dan Ketersediaan Bapok Melalui Rapat Koordinasi PDP Banten, Rapat Koordinasi Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Penyusunan Kajian Penyesuaian AMDAL PDP Serta FS PDR (Satuan: Kegiatan)	6	6	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Terkelolanya Pengembangan Stabilisasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang penting serta terkendalinya Inflasi Bahan Pokok dan Barang penting secara optimal (Satuan: Kegiatan)	8	8	100			
			Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten	2.	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri							
						1 Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Triliun)	3.274,72	951,97	29,07	Penurunan nilai ekspor disebabkan oleh penurunan ekspor barang migas dan nonmigas masing - masing sebesar 72.36% dan 19.19%	dialogasikan kembali di tahun 2021	
						2 Calon eksportir baru (Satuan: eksportir)	5	5	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 Akses informasi dan perluasan jaringan pasar ekspor (Satuan: jumlah)	6	6	100			
				1	Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah - Berkembangnya Produk Ekspor, Komoditi Unggulan Banten, Peningkatan Mutu Produk Ekspor, Analisa Pasar Serta Pelatihan Ekspor dan Calon Eksportir (Satuan: Kegiatan)	3	3	100			
				2	Pengembangan dan Pengendalian Impor daerah - Terkendalinya Impor Daerah (Rapat Koordinasi Pengendalian Impor di Provinsi Banten, Pembinaan terhadap Importir dan Calon Importir di Provinsi Banten, Monitoring dan Pelaporan Importir di Provinsi Banten) (Satuan: Kegiatan)	1	1	100			
				3	Peningkatan Promosi Perdagangan Luar Negeri - Meningkatnya Promosi Potensi Produk Ekspor melalui Partisipasi pada Pameran Potensi Ekspor Daerah dan Bimtek E-Commerce (Satuan: IKM)	15	15	100			
			Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	3.	Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						
					1 Cakupan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (Satuan: %)	30	100	333,33			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1	Peningkatan Pelayanan Mutu Barang	- Terlaksananya Pelayanan Mutu Barang (Satuan: Kegiatan)	2	2	100			
				2	Peningkatan Pelayanan Kalibrasi dan sertifikasi	- Terlaksananya Pelayanan Kalibrasi dan Sertifikasi sesuai SOP melalui penrapan KAN dan Diseminasi Kalibrasi dan Sertifikasi (Satuan: Alat)	200	296	148			
			Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri								
						1	Indeks Keberdayaan Konsumen (Satuan: %)	30	33,89	112,97		
						2	Persentase barang beredar diawasi yang sesuai ketentuan (Satuan: %)	1	0,87	87		
						3	Persentase penyelesaian sengketa konsumen (Satuan: %)	50	50	100	BPSK di wilayah Banten tidak menerima pengaduan sengketa pada tahun 2020.	
						4	Persentase Peningkatan Industri yang ber SNI (Satuan: %)	10	8,87	88,70		
				1	Pengawasan dan Pembinaan Standarisasi Mutu Produk Industri	- Terawasinya Produk SNI Wajib Sesuai SOP dan Edukasi dan Pembinaan Bagi Industri Menuju SNI Wajib	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						(Satuan:Kegiatan)						
				2	Peningkatan Perlindungan Konsumen	- Meningkatnya Kesadaran Konsumen akan Hak dan Kewajibannya sebagai Konsumen dan Optimalisasi BPSK (Satuan: Kegiatan)	2	2	100			
				3	Peningkatan Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga	- Meningkatnya pengawasan barang beredar/Jasa sesuai ketentuan SNI Wajib, kadaluarsa, serta kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L) serta legalitas pelaku usaha perdagangan sesuai SOP (Satuan: Kegiatan)	2	2	100			
7	Perindustrian											
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop)	1. Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pelayanan								
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	13	13	100		
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	26	26	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match (Satuan: Jumlah)	40	40	100		
					2	Persentase Pertumbuhan Produk Ekspor industri yang berbasis sumber daya alam dan atau Lokal (Satuan: %)	3	3	100		
					1	Perencanaan dan Pengembangan Perwilayahan Industri serta Rekomendasi Teknis Perijinan	15	27	180		
					2	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	240	240	100		
					3	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	2	2	100		
				Pengembangan kualitas produk industri	3.	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri					
					1	Cakupan Pelayanan Standarisasi dan Sertifikasi Industri Kecil Menengah (Satuan: Jumlah)	50	204	408		
					1	Pengembangan dan Peningkatan Produk industri	60	105	175		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Standarisasi dan sertifikasi Industri	Terlayannya Sertifikasi Pengujian/Kalibrasi - Industri/IKM dan Sertifikasi Halal Dari L-PPOM MUI (Satuan: Jumlah Produk)	46	154	334,78			

II.2.2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel 2.28
Capaian Pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administrasi Pemerintahan										
		Sekretariat DPRD									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD							
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
						perangkat daerah (Satuan: %)							
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Satuan: kegiatan)	12	12	100			
				2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	-	Tersedianya Prasarana dan Sarana Kantor (Satuan: kegiatan)	1	1	100			
				3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	-	Terpeliharanya Prasarana dan Sarana Kantor (Satuan: kegiatan)	12	12	100			
				4	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	-	Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran (Satuan: kegiatan)	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				5	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan: kegiatan)	50	50	100			
				6	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terkelolanya Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (Satuan: kegiatan)	12	12	100			
				7	Pengelolaan Administrasi Keuangan	- Terkelolanya Dokumen Administrasi Keuangan (Satuan: kegiatan)	4	4	100			
				8	Verifikasi dan Pembukuan Keuangan	- Verifikasi dan Pembukuan Keuangan (Satuan: kegiatan)	5	5	100			
			Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
						1	Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	100	99,18	99,18		
				1	Penyelenggaraan Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten	- Terselenggaranya Tata Kelola Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten (Satuan: kegiatan)	38	38	100			
				2	Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum	- Terlaksanannya Pengkajian, Penyusunan Produk Hukum (Satuan: kegiatan)	42	36	85,71	Penyusunan Naskah Akademis		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						kegiatan)				Terkendala Karena Masa Pandemi Covid-19		
				3	Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten	- Tersedianya Dokumen Rapat dan Risalah DPRD Provinsi Banten (Satuan: kegiatan)	14	14	100			
				4	Penyelenggaraan Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten	- Terselenggarannya Tata Kelola Administrasi Pimpinan DPRD dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten (Satuan: kegiatan)	51	51	100			
			Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3	Program Dukungan Layanan Aspirasi Masyarakat, Komunikasi dan Informasi DPRD							
						1 Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan Reses DPRD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Peliputan dan Protokol DPRD Provinsi Banten	- Terlaksananya Peliputan dan Protokol DPRD Provinsi Banten (Satuan: kegiatan)	37	37	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten	Tersusunnya Informasi, Publikasi dan Dokumentasi DPRD Provinsi Banten (Satuan: kegiatan)	49	49	100			
				3	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Satuan: kegiatan)	20	20	100			
		Biro Umum										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	4	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Umum							
						1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
						2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)						
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
				2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	- Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran (Satuan: Bulan)	12	12	100			
				3	Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda	- Tata Usaha Biro Umum dan Perpustakaan Setda (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				4	Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda	- Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda (Satuan: Bulan)	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				5	Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan dan Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Setda	Pelayanan Pembayaran Gaji/Tunjangan dan - Perjalanan Dinas Pegawai di Lingkungan Setda (Satuan: Bulan)	12	12	100			
				6	Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi Biro Umum	Pengelolaan Perbendaharaan dan - Verifikasi Biro Umum (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
			Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima	5 Program . Pelayanan Umum								
						1	Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Tersusunnya Dokumen Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang efektif dan Efisien (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Barang jasa Pengadaan sarana - Prasarana kantor yang berkualitas (Satuan: Kegiatan)	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Pemeliharaan dan Distribusi Sarana dan Prasarana Kantor	Terpelihara dan terdistribusikannya Sarana dan Prasarana - Kantor pendukung Kinerja Aparatur Setda yang berkualitas baik (Satuan: Bulan)	12	12	100			
		Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	6	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan							
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					1	Tata Usaha Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan - Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan Biro ARTP Tepat Waktu (dokumen)	23	23	100		
				Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan	7	Program Fasilitas dan Pelayanan Pimpinan					
					1	Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	85	85	100		
					2	Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	85	85	100		
					3	Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	85	85	100		
					1	Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pimpinan - Terselenggaranya Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten sesuai standar (bulan)	12	12	100		
					2	Tata Acara Pimpinan - Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Bidang	12	12	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Tata Acara						
				3	Pelayanan Tamu Pimpinan - Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Bidang Pelayanan Tamu Pimpinan	3	3	100			
				4	Peliputan dan Dokumentasi Pimpinan - Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Bidang Peliputan dan Dokumentasi (satuan: dokumen)	6	3	50	Terdapat kelalaian dalam merubah target pada perubahan anggaran. Pada perubahan anggaran seharusnya dirubah dari 5 Dokumen menjadi 2 Dokumen.		
				5	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan - Tersedianya pelayanan Kedinasan Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (satuan: bulan)	12	12	100			
				6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana - Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pimpinan Daerah (satuan: bulan)	12	12	100			
				7	Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur - Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pimpinan (satuan: bulan)	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8	Tata Usaha Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah (satuan: kegiatan)	3	2	66,67	Terdapat kelalaian dalam merubah target pada perubahan anggaran. Pada perubahan anggaran seharusnya dirubah dari 3 kegiatan menjadi 2 kegiatan.		
		Biro Administrasi Pembangunan Daerah										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	8	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Administrasi Pembangunan Daerah							
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)					
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100		
				1	Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Sarana Prasarana yang sesuai dengan parameter perencanaan (Satuan: Dokumen)	7	7	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	9 Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan							
					1 Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	85	85	100			
					2 Persentase Realisasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: %)	85	85	100			
					3 Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	85	85	100			
				1 Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan	- Tersusunnya Dokumen Analisa Data Kegiatan Pelaporan dan Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				2 Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penelitian dan Pengembangan administrasi	29	29	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				pembangunan	pembangunan(Satuan: Dokumen)						
				3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan - Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan (Satuan: Dokumen)	2	2	100			
				4	Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan - Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Perbantuan (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
				5	Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah - Tersusunnya Dokumen Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				6	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan - Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Yang Tepat Waktu (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				7	Pengadaan Barang dan Jasa - Tersusunnya Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (Satuan: Dokumen)	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8	Pengendalian Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Barang dan Jasa (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
		Biro Bina Perekonomian										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Bina Perekonomian								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Tata Usaha Biro Perekonomian	- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja dan Neraca Aset, Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah, dan Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan: Dokumen)	8	8	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	1 Program Perumusan Kebijakan 1 Perekonomian							
					1 Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Perekonomian (Satuan: Dokumen)	13	10	76,92			
					2 Jumlah Dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan (Satuan: Dokumen)	11	6	54,55	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen (output)	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya rpjmd	
					3 Jumlah Dokumen Kebijakan Produksi Daerah (Satuan: Dokumen)	15	9	60	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									(output)	rpjmd	
				1	Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	5	5	100			
				2	Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	5	5	100			
				3	Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang Optimal (Satuan: Dokumen)	1	1	100			
				4	Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	3	2	66,67	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									(output)	rpjmd	
				5	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	4	3	75	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen (output)	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya rpjmd	
				6	Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang Optimal (Satuan: Dokumen)	7	4	57,14	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen (output)	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya rpjmd	
				7	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan - Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8	Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Optimal (Satuan: Dokumen)	4	3	75	terjadi refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 sehingga sub-kegiatan berkurang yang berdampak berkurangnya dokumen (output)	kekurangan dokumen (output) dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dan target akan direalisasikan sampai berakhirnya rpjmd	
		Biro Kesejahteraan Rakyat										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Kesejahteraan Rakyat								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					1	Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	-	Meningkatnya Tata Usaha Biro Kesejahteraan rakyat (Satuan: Kegiatan)	7	7	100	
			Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	1 3 .	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					1	Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahtaraan Keluarga (Satuan: %)	100	100	100				
					2	Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Bidang Sosial dan Keagamaan (Satuan: %)	100	100	100				
					3	Cakupan Keselarasan Rumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Perumusan Kebijakan Kesehatan	-	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Kesehatan (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				2	Koordinasi Lembaga Agama	-	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keagamaan (Satuan: Kegiatan)	2	2	100			
				3	Perumusan Kebijakan Sosial	-	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Sosial (Satuan: Dokumen)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4	Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				6	Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dokumen Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Satuan: Dokumen)	6	6	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7	Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Catatan Sipil (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				8	Koordinasi Kehidupan Keagamaan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kehidupan Keagamaan dan Pemantapan, Koordinasi Kebijakan Penanganan Haji (Satuan: Dokumen)	3	3	100			
			Biro Organisasi									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	14	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Organisasi							
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						daerah (Satuan: %)						
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Tata Usaha Biro Organisasi	- Tersusunnya Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan, dan Pelayanan Perkantoran Pada Tata Usaha Biro Organisasi (Satuan: Kegiatan)	7	7	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	1 5 · Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan							
					1 persentase ketercapaian kebijakan penataan kelembagaan (Satuan: %)	100	100	100			
					2 Presentase ketercapaian kebijakan ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (Satuan: %)	100	100	100			
					3 Persentase Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemda (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Tatalaksana Organisasi	- Terwujudnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai (Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				2 Kebijakan Pelayanan Publik	- Tercapainya kualitas pelayanan publik (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
				3 Kelembagaan dan Perangkat Daerah	- Tercapainya Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah (Satuan: Dokumen)	2	2	100			
				4 Pembinaan dan Pengendalian	- Tercapainya Pembinaan dan Pengendalian	1	1	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Kelembagaan Kab/Kota	Kelembagaan Kab/Kota(Satuan: Dokumen)						
				5	Analisa Formasi Jabatan	Tersusunnya Analisa dan Formasi Jabatan - Perangkat Daerah(Satuan: Dokumen)	4	4	100			
				6	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Kinerja Instansi - Pemerintah Provinsi Banten(Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				7	Pembinaan Pegawai dan Peningkatan Reformasi Birokrasi	tercapainya pembinaan kepegawaian dilingkungan Setda dan peningkatan Reformasi Birokrasi(Satuan: Dokumen)	5	5	100			
				8	Peningkatan Budaya Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tecapainya koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi budaya kerja dan koordinasi pengembangan Sumber daya manusia(Satuan: Dokumen)	3	3	100			
		Biro Pemerintahan										

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1 6 · Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Pemerintahan							
					1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					1	Tata Usaha Pemerintahan	-	5	5	100		
			Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan							
					1	persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan (Satuan: %)	100	95	95			
					2	persentase realisasi kebijakan administrasi kewilayahan (Satuan: %)	100	75	75	kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan dari kabupaten/kota dan perangkat daerah lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan	Akan diadakan koordinasi lebih komprehensif dan akan melakukan pembinaan kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kewilayahan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
										belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga tidak dapat terlaksana secara optimal.		
					3	persentase realisasi kebijakan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah (Satuan: %)	100	83,33	83,33			
				1	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	Meningkatnya Penyelenggaraan - Kerjasama Luar Negeri yang optimal(Satuan: Dokumen)	3	2	66,67	Belum optimalnya data potensi provinsi Banten yang dapat dikerjasamakan dengan luar negeri	Perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan sinergitas perangkat daerah serta Kabupaten/Kota terkait hal-hal yang dapat dikerjasamakan dengan luar negeri	
				2	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan - Kerjasama Daerah yang optimal(Satuan: Dokumen)	5	5	100			
				3	Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah	Meningkatnya Penataan Wilayah Administrasi dan Batas Daerah yang optimal(Satuan: %)	4	3	75	Belum optimalnya data Kabupaten/Kota terkait penataan	Perlu dilakukan evaluasi data Kabupaten/Kota terkait penataan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Dokumen)				wilayah dan batas daerah	wilayah dan batas daerah	
				4	Penyusunan Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya Administrasi Rupabumi dan Kode Data Wilayah - Administrasi Pemerintahan yang optimal(Satuan: Dokumen)	3	3	100			
				5	Penataan Daerah Otonom	Meningkatnya pelayanan Penataan Daerah Otonom yang optimal(Satuan: Dokumen)	4	2	50	beberapa kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena melibatkan tim dari kabupaten/kota dan perangkat daerah lainnya. Adapun data-data yang dibutuhkan belum sepenuhnya terpenuhi.	Optimalisasi koordinasi melalui rapat online	
				6	Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Meningkatnya pelayanan Administrasi pemerintahan yang optimal(Satuan: Dokumen)	5	5	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				7	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan - Pemerintahan Daerah yang optimal(Satuan: Dokumen)	13	13	100			
				8	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan bagi masyarakat(Satuan: Dokumen)	5	5	100			
		Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	18	Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam							
						1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						daerah (Satuan: %)						
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Tata Usaha Biro Infrastruktur dan SDA	- Tersusunnya dokumen PEP, Dokumen Laporan Keuangan dan Neraca Aset, tersedianya Barang dan Jasa perkantoran, Meningkatnya Kapasitas Aparatur, Terlaksananya	6	6	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Koordinasi kedalam/keluar daerah, Tersedianya Data Pembangunan dan Pengelolaan PPID (satuan: kegiatan)						
			Peningkatan kualitas kebijakan infrastrukut bagi masyarakat	1 9 .	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur							
						1 Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Energi dan Sumber Daya Alam (Satuan: %)	20	20	100			
						2 Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Satuan: %)	47,06	47,06	100			
						3 Persentase Rumusan kebijakan di bidang infrastruktur Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Persandian (Satuan: %)	42,86	42,86	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	Perumusan Kebijakan ESDM	- Tersusunnya bahan kebijakan geologi dan air tanah, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan rapat koordinasi pelaksanaan di bidang ESDM (satuan; dokumen)	2	2	100		
				2	Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Tersusunnya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (satuan; dokumen)	6	6	100		
				3	Perumusan Kebijakan Pertanahan	- Terbitnya kebijakan tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Bidang Pertanahan (satuan; dokumen)	2	2	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4	Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Tersusunnya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (satuan; dokumen)	3	3	100			
				5	Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan	- Tersusunnya Rumusan Kebijakan Infrastruktur Perhubungan dan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Urusan Perhubungan (satuan; dokumen)	3	3	100			
				6	Perumusan Kebijakan bidang komunikasi informasi, statistik dan persandian	- Tersusunnya Rumusan Kebijakan Bidang Komunikasi Informasi, Stantistik dan Persandian dan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bidang Komunikasi, Informasi,	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Statistik dan Persandian (satuan; dokumen)						
		Biro Hukum										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	20 Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Hukum								
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						(Satuan: %)						
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Tata Usaha Biro Hukum	-	6	6	100			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan	2 1 . Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum								

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			Bantuan Hukum bagi Masyarakat		1	persentase realisasi target propemperda (Satuan: %)	100	87,50	87,50			
						2	Persentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	100	100	100		
						3	Persentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	100	100	100		
						4	persentase pelayanan bantuan hukum (Satuan: %)	100	88,89	88,89		
				1	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	-	Terselenggaranya Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi (Satuan: Dokumen)	3	3	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah	- Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Satuan:Dokumen)	4	3	75	Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, DPRD Provinsi Banten telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Atas hal tersebut bagaimana tindak lanjut proses pengundangan dan implementasinya ?	Telah dimohonkan penetapan pengundangan melalui Nota Dinas nomor 188.34/3794-Huk/2019 tanggal 6 November 2019 perihal tandatangan penetapan Raperda menjadi Perda	Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3	Peningkatan Perlindungan Hukum dan HAM - Tercapainya Perlindungan Hukum dan HAM bagi Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan(Satuan: Kegiatan)	3	2	66,67	Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah sosialisasi hukum dan HAM untuk SMA/SMK dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan	Sosialisasi terkait hukum dan HAM baik untuk pelajar,mahasiswa dan masyarakat dapat melalui media online	
				4	Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten - Tersusunnya Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Satuan: Dokumen)	9	9	100			
				5	Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota - Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Satuan: Dokumen)	16	16	100			
				6	Penanganan Sengketa Hukum - Terlaksananya Penanganan Sengketa Hukum baik Litigasi dan Non Litigasi yang sesuai dengan peraturan Perundang-	13	13	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Undangan(Satuan: Dokumen Perkara)						
				7	Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Satuan: Dokumen Perkara/ Kasus)	31	31	100			
				8	Sosialisasi Hukum	Terlaksananya Sosialisasi Hukum bagi masyarakat dan pelajar yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan(Satuan: Dokumen)	1	1	100			
		Badan Penghubu ng										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkanny a pada standar operasional dan	2 2 .	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Penghubung							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			prosedur (sop) pelayanan									
					1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Satuan: %)						
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset - Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang tepat waktu (Satuan: dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi Program Kegiatan - Sesuain Kaidah Perencanaan yang tepat waktu (Satuan: dokumen)	22	22	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur - Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Aparatur sesuai Standar Aturan ASN (Satuan: dokumen)	24	24	100			
				4	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran - Tersedianya Barang Jasa, Sarana Prasaran dan Terpeliharanya Sarana Prasarana Perkantoran (Satuan: dokumen)	12	12	100			
			Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan	2 Program 3 Pembangunan · Kemitraan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			urusan pemerintahan								
					1 Indeks Respon Positif Stakeholder Terhadap Informasi Pembangunan di Ibu Kota Negara (Satuan: indeks)	4	4	100			
					2 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan di Ibu Kota Negara dan di Wilayah Jabodetabek (Satuan: Indeks)	4	4	100			
					3 Persentase Respon Positif Pelayanan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Ibu Kota Negara (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang sesuai standar aturan/SOP (Satuan: Kegiatan)	12	12	100			
				2 Pelayanan Masyarakat	- Terlayannya Masyarakat Banten di Ibukota Negara sesuai standar aturan/SOP (Satuan: Kegiatan)	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan	Terselenggaranya Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan di Ibukota Negara (Satuan: Kegiatan)	20	17	85			
2	Pengawasan											
		Inspektora t										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan Inspektorat							
						1	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100		
						2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah	100	100	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						(Satuan: %)						
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Laporan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (Satuan: Dokumen)	18	18	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan: Kegiatan)	3	3	100			
				4	Peningkatan Pengelolaan	- Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Kearsipan	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	(Satuan: Bulan)						
					5 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan, dan - Pemeliharaan Sarpras Perkantoran (Satuan: bulan)	12	12	100			
				Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintah	2 Program Pembinaan dan Pengawasan . penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
						1 Capaian Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: %)	100	100	100			
						2 Capaian Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						3 Capaian Pengawasan Internal Bidang Barang- Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah (Satuan: %)	100	100	100			
						4 Capaian Pengawasan Internal Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kepegawaian Daerah	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
						(Satuan: %)								
					5	Persentase Capaian Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Satuan: %)	100	100	100					
					6	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI (Satuan: %)	100	100	100					
					7	Persentase Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: %)	100	100	100					
					8	Persentase Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: %)	100	100	100					
				1	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	-	Terlaksananya Pengawasan Internal Bidang Pendapatan (Satuan: Kegiatan)	17	17	100				
				2	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	-	Terlaksananya Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah (Satuan: Kegiatan)	15	15	100				
				3	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan	-	Terlaksananya Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	15	15	100				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Keuangan Daerah (Satuan: Kegiatan)						
				4	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah - Terlaksananya Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	20	20	100			
				5	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan - Tersusunnya Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan (Satuan: Dokumen)	1	1	100			
				6	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten - Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten (Satuan: Dokumen)	2	2	100			
				7	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian - Tersusunnya Dokumen Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian (Satuan: Dokumen)	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				8	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten (Satuan: Dokumen)	13	13	100			
3	Perencanaan											
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100				
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya Laporan kinerja keuangan dan Neraca aset (Satuan: Dokumen)	24	24	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya laporan perencanaan evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	16	16	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur (Satuan:	5	5	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Kegiatan)						
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Tersusunya pengelolaan kearsipan (Satuan: Dokumen)	24	24	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Terselenggaranya penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarpras perkantoran (Satuan: Dokumen)	12	12	100			
			Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan							
						1	Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100	100	100		
						2	Persentase kesesuaian pelaksanaan program Perencanaan terhadap kinerja Perangkat daerah (Satuan: %)	75	85,30	113,73		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3	Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (Satuan: Rupiah)	4.000.000.000	1648754000	412,19		
					1	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	- tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan (Satuan: Dokumen)	14	14	100	
					2	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	- tersusunya dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan (Satuan: Dokumen)	23	23	100	
					3	Kerjasama Pendanaan Pembangunan	- tersusunya dokumen Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2016 (Satuan: Dokumen)	2	2	100	
			Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	3	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi						
					1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80	100	125		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Satuan: %)						
					2 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian (Satuan: %)	75	100	133,33			
					1 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid ketahanan pangan (Satuan: Dokumen)	6	6	100		
					2 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid keuangan, investasi dan ketenagakerjaan (Satuan: Dokumen)	10	10	100		
					3 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid dunia usaha dan ekonomi kreatif (Satuan: Dokumen)	6	6	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	4 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan							
					1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	80	100	125			
					2 Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang Sosial dan Pemerintahan (Satuan: %)	75	100	133,33			
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid kesejahteraan sosial (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
				2 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid SDM dan Kebudayaan (Satuan: Dokumen)	6	6	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				3	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	- tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid tata pemerintahan (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
				4	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	- tersusunya dokumen pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah (Satuan: Dokumen)	2	2	100			
				5	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah							
			Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi									
				1	Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	80	100	125				
				2	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Mitra Bidang IPW (Satuan: %)	75	100	133,33				

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3 Persentase keselarasan Perencanaan tata ruang dengan Pemanfaatan ruang (%) (Satuan: %)	75	91,92	122,56			
				1	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral - tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
				2	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah - tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid penataan Infrastruktur wilayah (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
				3	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika - tersusunya dokumen perencanaan dan dokumen pengendalian mitra subid komunikasi dan informatika (Satuan: Dokumen)	6	6	100			
4	Keuangan										
		Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah									
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1 . Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
					1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					2 Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			
					3 Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
						fungsi SKPD (Satuan: %)						
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: Dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (satuan : dokumen)	30	30	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Meningkatnya Kapasitas Aparatur (satuan : dokumen)	3	0	0	Recofusing Anggaran untuk Penanganan Covid -19		
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (satuan : bulan)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	12	12	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	Prasarana Perkantoran (satuan : kegiatan)						
			Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan	2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
					1 Persentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	90	90	100			
				1 Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah	- Tersusunnya Dokumen Penatusahaan Realisasi Keuangan Daerah (satuan : dokumen)	12	12	100			
				2 Penatausahaan Kas Daerah	- Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Kas Daerah (satuan : dokumen)	38	38	100			
				3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Terlaksanannya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan : dokumen)	5	5	100			
				4 Penyusunan Pedoman Anggaran	- Tersusunnya Pedoman Penyusunan APBD (satuan : dokumen)	7	7	100			
				5 Verifikasi Dokumen	- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran	4	4	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan APBD	(satuan : dokumen)						
			Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan	3 . Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah							
					1 Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Pergub Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten	- Tersusunnya Raperda Pertanggungjawaban APBD (satuan : dokumen)	7	7	100			
				2 Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota dan RaperKDH Tentang APBD dan Perubahan APBD	- Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota (satuan : dokumen)	16	16	100			
				3 Penyediaan Informasi	- Tersusunnya Buku Statistik Keuangan	2	0	0	Recofusing Anggaran untuk		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Akuntansi, Statistik dan Laporan Keuangan	Daerah (satuan : buku)				Penanganan Covid -19	
				4	Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi	Terlaksanannya Pembinaan dan Pengembangan Akuntansi (satuan : dokumen)	6	6	100		
				5	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Interim Provinsi Banten	Tersusunnya Laporan Keuangan dan Interim Provinsi Banten (satuan : dokumen)	12	12	100		
				6	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota se Provinsi Banten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten	Terlaksannya Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota (satuan : dokumen)	8	8	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan	4 Program Penatausahaan Aset Daerah							
					1 Capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penatausahaan Aset Daerah	- Tersusunnya Neraca Aset Provinsi Banten (satuan : dokumen)	5	5	100			
				2 Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	- Terfasilitasinya Penggunaan Aset Daerah (satuan : dokumen)	11	11	100			
				3 Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah	- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Aset Daerah (satuan : dokumen)	3	3	100			
				4 Perencanaan Kebutuhan Barang	- Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (satuan : dokumen)	2	2	100			
				5 Penghapusan Barang Daerah	- Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah (satuan : dokumen)	8	8	100			
		Badan Pendapatan Daerah									

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4 Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100			
				1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	- Tersusunnya Dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (satuan : dokumen)	16	16	100			
				2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (satuan : kegiatan)	23	23	100			
				3 Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur (satuan : kegiatan)	7	7	100			
				4 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (satuan : bulan)	24	24	100			
				5 Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (satuan : kegiatan)	11	11	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				1 1	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (satuan : kegiatan)	11	11	100			
				1 2	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (satuan : kegiatan)	11	11	100			
				1 3	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (satuan : kegiatan)	11	11	100			
				1 4	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (satuan : kegiatan)	11	11	100			
				1 5	Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	- Terlaksananya Pelayanan Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (satuan : kegiatan)	11	11	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
						4	Persentase Penurunan Temuan SPI antar Tahun Anggaran (%) (Satuan: %)	50	50	100			
						5	Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Satuan: indeks)	2,80	2,80	100			
				1	Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	-	Terimplementasikannya Inovasi Pendapatan Daerah (satuan : dokumen)	3	3	100			
				2	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah	-	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pendapatan Daerah (satuan : bulan)	24	24	100			
				3	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	Terselenggaranya Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang handal (satuan : kegiatan)	5	5	100			
				4	Pengendalian Pendapatan Daerah	-	Terlaksananya Pengendalian Pendapatan Daerah (satuan : kegiatan)	5	5	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi	7 Program Peningkatan Pajak Daerah							
					1 Persentase Peningkatan Pajak Daerah (Satuan: %)	8	8	100			
					2 Persentase Potensi Tunggalan Pajak Daerah yang dapat diselesaikan (Satuan: %)	17,56	17,56	100			
					3 Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (Satuan: %)	9,72	9,72	100			
					4 Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (Satuan: %)	9,94	9,94	100			
					5 Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (Satuan: %)	9,75	9,75	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (Satuan: %)	9,72	9,72	100		
					7	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (Satuan: %)	9,86	9,86	100		
					8	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (Satuan: %)	9,67	9,67	100		
					9	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (Satuan: %)	9,76	9,76	100		
					10	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (Satuan: %)	9,74	9,74	100		
					11	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (Satuan: %)	9,73	9,73	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1 2	Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (Satuan: %)	9,71	9,71	100		
					1 3	Persentase Peningkatan Pajak Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (Satuan: %)	9,71	9,71	100		
				1	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	- UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	- UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				3	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah	- UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (satuan : kegiatan)	3	3	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rangkasbitung							
				4	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				5	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				6	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				7	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (satuan : kegiatan)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				9	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				10	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				11	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (satuan : kegiatan)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikande (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				1 3 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilegon (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				1 4 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rangkasbitung (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				1 5 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serang (satuan : kegiatan)	3	3	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 6	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balaraja (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				1 7	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Cikokol (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				1 8	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciledug (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				1 9	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Ciputat (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2 0	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan	3	3	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping						
				2 1	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang	- UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandeglang (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2 2	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong	- UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Serpong (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2 3	Regulasi dan Kerjasama Pendapatan Daerah	- Pendapatan Daerah (satuan : dokumen)	6	6	100		
				2 4	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	- Pendapatan Daerah (satuan : kegiatan)	3	3	100		
				2 5	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah	- Pendapatan Daerah (satuan : kegiatan)	6	6	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2 6	Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua (satuan : kegiatan)	3	3	100			
				2 7	Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua	Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah - UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelapa Dua (satuan : kegiatan)	3	3	100			
			Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi	8	Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain							
						1 Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain (Satuan: %)	2,95	2,95	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran yang efektif dan efisien (satuan : kegiatan)	133	133	100			
			Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	2	Program Penatausahaan . Kepegawaian Daerah							
						1	Persentase ASN Provinsi Banten sesuai dengan kebutuhan (Satuan: %)	85	87,09	102,46		
				1	Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan	- Terlaksananya Penerimaan ASN Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan kebutuhan (satuan : dokumen)	3	3	100			
				2	Kepangkatan dan Penggajian	- Terlaksananya Kenaikan Pangkat PNS Provinsi, Kab/Kota dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Provinsi Banten yang tepat waktu (satuan : dokumen)	14	14	100			
				3	Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun	- Terlaksananya Mutasi PNS Kementerian/ Lembaga/ Provinsi / Kabupaten/ Kota/ Kota Lain/ SKPD dari dan ke Provinsi Banten serta	7	7	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1	Persentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	95	99,45	104,68		
					2	Persentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	95	98,49	103,67		
					3	Persentase kinerja pegawai dalam kategori baik (Satuan: %)	93	95,38	102,56		
				1	Disiplin Pegawai	- Terlaksananya Penegakan Disiplin dan Penanganan Kasus Kepegawaian bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang berintegritas (satuan : dokumen)	24	24	100		
				2	Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	- Terlaksananya Pengukuran Kinerja dan Pemberian Penghargaan Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan Capaian Kinerja Pegawai (satuan : dokumen)	14	14	100		
				3	Data dan Informasi Kepegawaian	- Terlaksananya Sistem Layanan Informasi dan Penataan Arsip Kepegawaian dilingkungan	24	24	100		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Pemerintah Provinsi Banten yang berbasis Elektronik (satuan : dokumen)						
6	Pendidikan dan Pelatihan											
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah										
			Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	1	Program Tata Kelola Pemerintahan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah							
						1 Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
					2	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100	100	100				
					3	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
					4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100				
				1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	-	Tersusunnya dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset (Satuan: dokumen)	13	13	100			
				2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, evaluasi dan pelaporan (Satuan: Dokumen)	14	14	100			
				3	Peningkatan Kapasitas Aparatur	-	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur (Satuan:	18	18	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						Dokumen)						
				4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	- Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (Satuan: bulan)	12	12	100			
				5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	- Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran (Satuan: kegiatan)	5	5	100			
			Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur	2	Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur							
						1 Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	100	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1	Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama - Terlaksananya Sertifikasi/ uji Kompetensi dan Kerjasama (Satuan: Orang/Dokumen)	80	0	0	Pengurangan Anggaran dari Rp. 512.071.000 menjadi Rp. 182.571.000, sehingga pengurangan anggaran tersebut mengakibatkan tidak dapat terlaksanannya Sertifikasi/ Uji Kompetensi ASN	Pada Tahun 2021 dianggarkan uji kompetensi/ sertifikasi bagi 160 orang	
				2	Pengendalian Mutu Diklat - Tersusun dan Terlaksananya Pengendalian mutu Diklat (Satuan: dokumen/paket)	6	5	83,33	Tidak dianggarkan karena tidak terdapat alumni Diklat PKA dan PKP Tahun 2019	Pameran inovasi diselenggarakan jika terdapat alumni Diklat PKP dan PKA disertai oleh kesediaan Kab/ Kota dalam pengiriman pesertanya	
				3	Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran - Terlaksananya Tersedianya kurikulum dan teknologi pembelajaran (Satuan: dokumen)	2	2	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur	3 Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional							
					1 Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	90	99,28	110,31			
				1 Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	- Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Umum (Satuan: Kegiatan)	7	5	71,43	Terjadi pengurangan Anggaran dari Rp.733.338.000 menjadi Rp. 376.428.000. Sehingga hanya memungkinkan menyelenggarakan 3 kegiatan Diklat.	Dilaksanakan 2 webinar yaitu: Strategi Kegiatan Pembelajaran Yang Efektif Saat Belajar Dari Rumah (36 peserta) dan Strategi Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh Saat Pandemi Covid 19 (48 peserta).	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2	Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif - Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif (Satuan: Kegiatan)	7	4	57,14	Terjadi pengurangan Anggaran dari Rp. 1.131.096.000 menjadi Rp. 386.452.000. Sehingga hanya memungkinkan menyelenggarakan 1 kegiatan Diklat	Diselenggarakan 3 webinar dengan topik: Innovation Project Mandatory (171 peserta), Membangun Ekosistem Pembelajaran (27), dan Nyalakan Tombol On Semangat Pengabdian ASN (23 orang)	
				3	Pengembangan Kompetensi Fungsional - Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional (Satuan: Kegiatan)	7	0	0	Terjadi pengurangan Anggaran dari Rp. 490.348.000 menjadi Rp. 0. Sehingga Tidak menyelenggarakan Diklat fungsional	Dianggarkan kegiatan Diklat Tahun 2021	
				4	Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan						

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			kompetensi Aparatur									
					1	Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	90	98,21	109,12			
				1	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	-	Terlaksananya Diklat pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan (Satuan: Kegiatan)	10	4	40	Dilaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4 angkatan (154 orang). 150 orang lulus kategori baik. Dan Dianggarkan, namun tidak diselenggarakan, karena s.d berakhirnya tahun anggaran belum ada penetapan SK CPNS	Diselenggarakan Pada Tahun Anggaran 2021

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				2	Pengembangan Kompetensi Manajemen	- Terlaksanannya Diklat Pengembangan Kompetensi Manajemen (Satuan: Kegiatan)	7	3	42,86	Terjadi pengurangan Anggaran dari Rp. 1.068.098.000 menjadi Rp. 118.098.000. Sehingga hanya memungkinkan menyelenggarakan 1 kegiatan Diklat	Diselenggarakan 2 webinar dengan toipk: Manajemen Puskesmas Era Pandemi Covid 19 (316 peserta) dan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMK3) Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (22 peserta)	
				3	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan	- Terlaksanannya Diklat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan (Satuan: Kegiatan)	7	4	57,14	Terjadi pengurangan Anggaran dari Rp. 1.400.000.000 menjadi Rp. 161.902.000. Sehingga hanya memungkinkan menyelenggarakan 1 kegiatan Diklat	Diselenggarakan 3 webinar dengan topik: Penyusunan Telahaan Staff (50 peserta) dan Penyusunan KTI Untuk Pejabat Fungsional Angkatan I dan II (40 peserta)	
7	Penelitian dan Pengembangan											

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan	1 Program Penelitian dan Pengembangan							
					1 Meningkatnya hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	75	75	100			
					2 Meningkatnya inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	75	75	100			
				1 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	- tersusunya dokumen penelitian, pengkajian dan analisis kebijakan strategi daerah (Satuan: Dokumen)	7	7	100			
				2 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	- tersusunya dokumen pengembangan dan inovasi kebijakan strategi daerah (Satuan: Dokumen)	4	4	100			

2.2.2 Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tujuan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 periode tahun ketiga atau tahun 2020 untuk melihat sejauhmana capaian pembangunan di Provinsi Banten sesuai dengan perencanaan yang tepat sehingga berdampak hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Banten, selain itu juga berkenaan dengan adanya dampak yang sistemik dari pandemi Covid-19 untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap target indikator kinerja, upaya tersebut menjamin agar target pembangunan daerah yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai kemampuan daerah yang ada saat ini serta mendapatkan input kebijakan guna pencapaian target kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Provinsi Banten di Tahun 2022.

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 meliputi:

- a. Mengetahui capaian dari indikator-indikator kinerja pembangunan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, 2019 dikomparasikan dengan target indikator pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- b. Mengidentifikasi sasaran dan program yang capaian kinerjanya rendah serta yang capaian kinerjanya tinggi
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan percepatan implementasi sasaran dan program pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi

Selama tiga tahun efektif, telah dilaksanakan berbagai sasaran, program dan kegiatan untuk mencapai target Indikator Makro dalam RPJMD yang telah ditetapkan walaupun banyak variable lain yang berkontribusi terhadap pencapaian indikator makro tersebut. Mencermati realisasi kinerja di atas, pencapaian indikator makro khususnya pada tahun 2019 memenuhi target hanya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang tidak memenuhi target akan tetapi melampaui di atas capaian nasional. Menjadi catatan penting di tahun 2020, akibat adanya pandemi virus corona atau Covid-19 indikator makro terutama LPE, Kemiskinan dan TPT tidak akan tercapai bahkan terjadi kontraksi yang sangat dalam sampai minus pertumbuhannya, hal tersebut untuk menjadi koreksi bersama mengingat pandemi ini melanda secara global.

Evaluasi Capaian Indikator Pembangunan berdasarkan Misi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Sasaran

Misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)														3.5	SEKRETA RIS DAERAH
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Banten	Nilai	CC	B	BB	B	B	70.00	70.00			X	A	ASISTEN ADMINIS TRASI UMUM
		Meningkatnya Kepuasan Publik Pelayanan Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	97.31	100.00	97.31	X			100	BADAN PENGHU BUNG
		Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program- program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKP	%	100	100	100	98.33	96.78	98.33	96.78		X		100	SEKRETA RIAT DPRD
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	100.00	X			WTP	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
																ASET DAERAH
		Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3.02	3.00	151.00	100.00	X			4	INSPEKT ORAT
		Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65	70	65	91.67	100.00	130.96	X			80	BADAN PERENCA NAAN PEMBAN GUNAN DAERAH
		Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100.00	100.00	X			100	
		Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	17.3	29.84	173.00	198.93	X			30	BADAN PELATIH AN SUMBER DAYA MANUSIA
		Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	10	10	15	8.75	95	87.50	633.33	X			95	BADAN KEPEGA WAIAN DAERAH
		Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.68	65.06	104.01	107.32	X			64.44	BADAN PENDAPA TAN DAERAH

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75	75	75	75	100.00	100.00	X			85	SATPOL PP
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi IndonesiaProvinsi Banten	Nilai	68,46	70	74	70	73.78	100.00	99.70	X			80	BADAN KESBAN GPOL
			Angka Kriminalitas	Nilai	5002	4800	4500	4800	4500	100.00	100.00	X			4,500	
		Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	133	172.49	100.00	137.99	X			110	BADAN PENANG GULANG AN BENCAN A DAERAH
		Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Administrasi Kependudukan Tertib	%	50	80	80	72.07	77.51	90.09	96.89	X			80	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN, PERLIND UNGAN ANAK, KEPEND UDUKAN DAN KELUAR GA BERENC ANA

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	%	20	42.10	61.83	48.61	80.05	115.46	129.47	X			61,83	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	86.29	80.05	97.97	89.94		X		90	

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Program

Misi 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)														3.5	SEKRETARIS DAERAH

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Banten	Nilai	CC	B	BB	B	B	70.00	70.00			X	A	ASISTEN ADMINIS TRASI UMUM
		Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	97.31	100.00	97.31	X			100	BADAN PENGHU BUNG
		Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program- program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100	100	100	98.33	96.78	98.33	96.78		X		100	SEKRETA RIAT DPRD
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	100.00	X			WTP	BADAN PENGELO LA KEUANG AN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	2	2	3	3.02	3.00	151.00	100.00	X			4	INSPEKT ORAT
		Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	60,00	65	70	65	91.67	100.00	130.96	X			80	BADAN PERENCA NAAN PEMBAN GUNAN DAERAH

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	50	100	100	100	100	100.00	100.00	X			100	
		Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	10	10	15	17.3	29.84	173.00	198.93	X			30	BADAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	10	10	15	8.75	95	87.50	633.33	X			95	BADAN KEPEGAWAIAAN DAERAH
		Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	62.89	59.30	60.62	61.68	65.06	104.01	107.32	X			64.44	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	70,00	75	75	75	75	100.00	100.00	X			85	SATPOL PP
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi IndonesiaProvinsi Banten	Nilai	68,46	70	74	70	73.78	100.00	99.70	X			80	BADAN KESBAN GPOL
			Angka Kriminalitas	Nilai	5002	4800	4500	4800	4500	100.00	100.00	X			4,500	

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATU AN	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANG GUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAP AI	AKAN TERCA PAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	133	133	125	133	172.4 9	100.00	137.99	X			110	BADAN PENANG GULANG AN BENCAN A DAERAH
		Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	%	50	80	80	72.07	77.51	90.09	96.89	X			80	DINAS PEMBER DAYAAN PEREMP UAN, PERLIND UNGAN ANAK, KEPEND UDUKAN DAN KELUAR GA BERENC ANA
		Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi	Persentase Pelayanan e- Government Pemerintah Provinsi Banten	%	20	42.10	61.83	48.61	80.05	115.46	129.47	X			61,83	DINAS KOMUNI KASI INFORMA TIKA, STATISTI K DAN PERSAND IAN
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,08	88.08	89	86.29	80.05	97.97	89.94		X		90	

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJAKERAS		
		Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29	114.6	203.2	58.22	101.16	50.80	49.78			X	375.29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase Rumah Layak Huni	%	82.86	84.02	85.18	97.01	93.13	115.46	109.33	X			88.66	
			cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			X	80.00	
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	%	30,00	40.00	50.00	36.84	39.89	92.10	79.78			X	50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	0	10	20	10	20	100.00	100.00	X			20	DINAS PERHUBUNGAN

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	0	10	20	10	20	100.00	100.00	X			90	

Tabel 2.33
 Capaian Kinerja Program
 Misi 2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan												DPUPR	Misi 2
2	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	74,45	79.56	84.67	91.41	98.15	114.89	115.92	X			DPUPR	Misi 2
3	Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	26,60	27.20	28.99	27.20	37.40	100.00	129.01	X			DPUPR	Misi 2
4	Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	83,00	86.30	89.70	88.70	90.70	102.78	101.11	X			DPUPR	Misi 2
Program Pengembangan Jasa Konstruksi												DPUPR	Misi 2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggu ng Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
1	Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	0,00	10.00	20.00	9.07	13.87	90.70	69.35		X		DPUPR	Misi 2
Program Pembangunan Sumberdaya Air												DPUPR	Misi 2
1	Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Ha)	15.118,50	15332.98	16721.78	15312.06	15826.06	99.86	94.64		X		DPUPR	Misi 2
2	Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	46,21	51.59	56.97	46.21	97.19	89.57	170.60	X			DPUPR	Misi 2
3	Cakupan Pemulihan Pencegahan banjir (Satuan: %)	15,51	20.89	26.27	20.81	26.89	99.62	102.36	X			DPUPR	Misi 2
Program Penataan Ruang												DPUPR	Misi 2
1	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	25.00	37.50	20.00	20.00	80.00	53.33		X		DPUPR	Misi 2
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													Misi 2
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan												DPRKP	Misi 2
1	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	375,29	114.60	203.20	58.22	101.16	50.80	49.78		X		DPRKP	Misi 2
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	82,86	84.02	85.18	309.50	93.13	368.36	109.33	X			DPRKP	Misi 2
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan												DPRKP	Misi 2
1	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	0,00	28.00	69.00	28.00	62.56	100.00	90.67		X		DPRKP	Misi 2

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggu ng Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan												Dishub	Misi 2
1	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	0,00	100.00	100.00	42.86	37.66	42.86	37.66		X		Dishub	Misi 2
Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara												Dishub	Misi 2
1	Persentase pembangunan pelabuhan pengumpan regional (Satuan: %)	0,00	0.00	20.00	0.00	50.00		250.00	X			Dishub	Misi 2
Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi												Diskominf o	Misi 2
1	Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	12,41	30.26	48.38	34.32	48.38	113.4 2	100.00	X			Diskominf o	Misi 2

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Sasaran

Misi 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUA N	KONDI SI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGU NG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERC APAI	AKAN TERC APAI	PERLU KERJA KERAS		

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas														73,68	SERETARIS DAERAH
		Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	12.7	13	13.5	13	13.5	100.00	100.00	X			15	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Rata rata lama sekolah	Tahun	8.37	8.47	8.7	8.71	8.7	102.83	100.00	X			9.3	
		Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	91.39	91.67	91.95	86.12	91.67	93.95	99.70		X		92.79	
		Meningkatnya Akses dan dan Kulaitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	71.13	72.9	74.67	115.54	84.23	158.49	112.80	X			80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
			Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	57.21	58.77	60.33	105.53	62.02	179.56	102.80	X			65	
		Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	0.00	100	100	72.90	100	72.90	100.00	X			100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Terwujudnya pemuda wirausahaan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	0.00	10	20	10	20	100.00	100.00	X			45	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	0.00	10	20	10	20	100.00	100.00	X			45	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68.74	69.54	70.34	68.30	71.14	98.22	101.14	X			72.74	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Budaya Literasi	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	%	25.1	30	35	30	59.79	100.00	170.83	X			35.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
		Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	70	80	85	80	93	100.00	109.41	X			100	

Tabel 2.35

Capaian Kinerja Program

Misi 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
Pendidikan													Misi 3
Program Pendidikan Menengah												Dindikbud	Misi 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
2	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: %)	64,57	64.86	65.14	64.57	64.57	99.55	99.12	X			Dindikbud	Misi 3
3	Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	95,26	96.21	97.16	96.48	42.80	100.28	44.05	X			Dindikbud	Misi 3
4	Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	48,28	54.63	60.97	92.85	25.90	169.96	42.48	X	X		Dindikbud	Misi 3
Program Peningkatan Mutu Pembelajaran												Dindikbud	Misi 3
2	Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	10,00	20.00	30.00	27.50	85.00	137.50	283.33	X				Misi 3
Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera												DP3AKKB	Misi 3
1	Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50,00	50.00	55.00	38.12	76.47	76.24	139.04	X			DP3AKKB	Misi 3
2	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50,00	60.00	63.33	60.00	57.61	100.00	90.97		X		DP3AKKB	Misi 3
3	Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58,72	58.72	62.27	55.11	72.75	93.85	116.83	X			DP3AKKB	Misi 3
4	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70,00	75.00	75.00	71.37	100.00	95.16	133.33	X			DP3AKKB	Misi 3
5	Indek Ketahanan Keluarga (Satuan: %)	65,19	66.66	67.62	64.93	86.64	97.40	128.13	X			DP3AKKB	Misi 3
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak												DP3AKKB	Misi 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
1	Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	75,00	85.00	95.00	84.11	83.10	98.95	87.47		X		DP3AKKB	Misi 3
2	Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	75,00	85.00	95.00	81.38	81.38	95.74	85.66		X		DP3AKKB	Misi 3
3	Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	6,67	26.67	6.67	58.63	59.84	219.84	897.15	X			DP3AKKB	Misi 3
Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan												Dispora	Misi 3
1	Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: %)	70,00	75.00	80.00	75.00	79.67	100.00	99.59	X			Dispora	Misi 3
2	Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	0,00	75.00	80.00	75.00	79.71	100.00	99.64	X			Dispora	Misi 3
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga												Dispora	Misi 3
2	Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	50,00	70.00	75.00	70.00	71.43	100.00	95.24		X		Dispora	Misi 3
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga												Dispora	Misi 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
1	Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	50,00	75.00	80.00	75.00	80.00	100.00	100.00	X			Dispora	Misi 3
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga												Dispora	Misi 3
1	Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	60,00	75.00	80.00	66.00	79.46	88.00	99.33	X			Dispora	Misi 3
Program Pelestarian Kebudayaan												Dindikbud	Misi 3
2	Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	90.00	76.00	105.88	84.44		X		Dindikbud	Misi 3
3	Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	90.00	90.00	105.88	100.00	X			Dindikbud	Misi 3
4	Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	90.00	90.00	105.88	100.00	X			Dindikbud	Misi 3
5	Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	90.00	90.00	105.88	100.00	X			Dindikbud	Misi 3
Program Pengelolaan Keragaman Budaya												Dindikbud	Misi 3
1	Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	0,00	85.00	90.00	90.00	88.00	105.88	97.78		X		Dindikbud	Misi 3
2	Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	0,00	85.00	90.00	90.00	88.00	105.88	97.78		X		Dindikbud	Misi 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya												Dindikbud	Misi 3
1	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	90.00	87.00	105.88	96.67		X		Dindikbud	Misi 3
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan												DPKD	Misi 3
1	Cakupan pembinaan perpustakaan Umum, perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah (Satuan: %)	75,00	85.00	90.00	85.00	85.71	100.00	95.23		X		DPKD	Misi 3
Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan												DPKD	Misi 3
1	Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	70,00	75.00	80.00	75.00	80.00	100.00	100.00	X			DPKD	Misi 3
Kearsipan													Misi 3
Program Pengelolaan Sistem Kearsipan												DPKD	Misi 3
1	Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	70,00	80.00	85.00	80.00	85.00	100.00	100.00	X			DPKD	Misi 3
2	Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	70,00	80.00	85.00	80.00	85.00	100.00	100.00	X			DPKD	Misi 3

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
3	Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	70,00	85.00	90.00	85.00	93.00	100.00	103.33	X			DPKD	Misi 3

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Sasaran
Misi 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas														70.96	SEKRETARIS DAERAH
		Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	308	304	300	100	86.64	32.89	28.88	X			285	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	32	31	30	4.6	5.06	14.84	16.87	X			26	

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	75	90	100	91.5	94.23	101.67	94.23	X			100	DINAS KESEHATAN
		Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Angka Harapan Hidup	%	69,46	69.76	70.06	64.69	69.64	92.73	99.40	X			70,06	DINAS KESEHATAN / RSUD
			BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	0	60	65	44.98	58.18	74.97	89.51			X	75	
		Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Laju pertumbuhan penduduk	%	2.01	1.96	1.91	1.91	1.91	97.45	100.00	X			1.91	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Program
Misi 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat												Dinkes	Misi 4
1	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	45,00	65.00	81.00	84.35	83.39	129.77	102.95	X			Dinkes	Misi 4
2	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	50,00	55.00	60.00	55.00	100.00	100.00	166.67	X			Dinkes	Misi 4
3	Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			Dinkes	Misi 4
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan												Dinkes	Misi 4
1	Persentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	75,00	90.00	100.00	91.50	94.23	101.67	94.23	X			Dinkes	Misi 4
2	Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	45,00	65.00	81.00	75.21	90.00	115.71	111.11	X			Dinkes	Misi 4
3	Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	10,00	20.00	35.00	20.00	35.00	100.00	100.00	X			Dinkes	Misi 4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggun g Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
4	Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)	0,00	20.00	30.00	20.00	30.00	100.00	100.00	X			Dinkes	Misi 4
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Banten												Dinkes	Misi 4
2	Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)	88,00	88.00	88.00	70.00	65.18	79.55	74.07	X			Dinkes	Misi 4
3	Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %)	70,00	70.00	70.00	88.00	88.00	125.71	125.71	X			Dinkes	Misi 4
4	Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %)	70,00	70.00	75.00	69.00	75.00	98.57	100.00	X			Dinkes	Misi 4
Program Pencegahan Pengendalian Penyakit												Dinkes	Misi 4
1	Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	60,00	75.00	85.00	75.00	100.00	100.00	117.65	X			Dinkes	Misi 4
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian												Dinkes	Misi 4
1	Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: Orang)	0,00	70.00	170.00	70.00	126.00	100.00	74.12	X			Dinkes	Misi 4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Kerja Keras		
6	Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	30,00	40.00	50.00	17.99	58.18	44.98	116.36	X			Dinkes	Misi 4
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													Misi 4
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana												DP3AKKB	Misi 4
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15- 49 tahun) (Satuan: %)	2,40	2.33	2.29	2.30	2.21	98.71	96.51	X			DP3AKKB	Misi 4
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	59,00	60.90	61.00	73.17	69.88	120.15	114.56	X			DP3AKKB	Misi 4
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10,30	10.26	10.18	13.20	14.13	128.65	138.80	X			DP3AKKB	Misi 4
4	Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2,60	2.53	25.18	2.50	35.68	98.81	141.70	X			DP3AKKB	Misi 4

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Sasaran
Misi 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

NO	MISI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN /	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.26	6	6.2	5.82	5.53	97.00	89.19				7	SEKRETARIS DAERAH
		Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Nilai Investasi	Triliyun	52,30	54.40	60.80	56.52	48.73	103.90	80.15		X		60,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	82.16	85.09	85.22	83.62	88.45	98.27	103.79	X			85.97	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian	%	3.05	3.7	3.95	6.63	6.02	179.19	152.41	X			4.7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang	LPE Sektor Perdagangan	%	3.82	4.9	5.4	10.90	11.27	222.45	208.70	X			6.9	

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN /	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERC APAI	AKAN TERCAP AI	PERLU KERJA KERAS		
		terkendali														
			Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis	%	4,19	4.00	4.00	4.00	2.47	100.00	61.75		X		4,00	
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian	%	7,05	5.30	5.60	3.58	2.21	67.55	39.46			X	5,6	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	%	4,48	4.55	4.67	2.93	2.63	64.40	56.32			X	4,67	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	82.4	89.2	90.6	89.10	83.29	99.89	91.93		X		85.00	DINAS KETTAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	2.84	2.89	2.94	2.88	2.89	99.65	98.30		X		2.94	DINAS PARIWISATA
		Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	%	NA	6	6	5.67	6	94.50	100.00	X			12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU KERJA KERAS		
		Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	%	NA	1	1	1	1	100.00	100.00	X			2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	43.67	44.17	44.67	49.02	56.86	110.98	127.29	X			52.79	
		Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	30.6	31.21	31.71	32.41	39.53	103.84	124.66	X			33.21	
		Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Persentase Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral.	%	12	12.5	13	12.5	18.43	100.00	141.77	X			13	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58.06	59.01	60.01	60.27	60.39	102.14	100.63	X			5.74	DINAS KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa Mandiri	%	14	16.40	18.80	16.40	16.40	100.00	87.23		X		18.8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	MISI	SASARAN	NDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN /	SATUAN	KONDIS I AWAL	TARGET RPJMD		CAPAIAN TARGET RPJMD		TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD		PREDIKSI KETERCAPAIAN			KONDISI AKHIR 2022	PENANGGUNG JAWAB
					2016	2018	2019	2018	2019	2018	2019	TERC APAI	AKAN TERCAP AI	PERLU KERJA KERAS		
		Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	8.24	4.49	3.89	4.79	6.96	106.68	178.92	X			2.08	DINAS SOSIAL

Tabel 2.39
 Capaian Kinerja Program
 Misi 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Rehabilitasi Sosial												Dinsos	Misi 5
1	Cakupan PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (Satuan: %)	1.429,00	573.00	608.00	733.00	693.00	127.92	113.98	X			Dinsos	Misi 5
Program Pemberdayaan Sosial												Dinsos	Misi 5
1	Cakupan PSKS yang meningkat Partisipasi sosialnya (Satuan: Orang)	1.624,00	1505.00	1520.00	1730.00	1671.00	114.95	109.93	X			Dinsos	Misi 5
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial												Dinsos	Misi 5
1	Persentase Updating Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS (Satuan: (%))	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			Dinsos	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
2	Cakupan perlindungan dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar dan anak telantar di dalam panti (Satuan: %)	0,00	0.00	0.00								Dinsos	Misi 5
Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja												Disnakertra ns	Misi 5
1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,31	4.35	4.40	6.82	4.78	156.7 8	108.64	X			Disnakertra ns	Misi 5
Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan												Disnakertra ns	Misi 5
1	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	2,93	3.66	4.40	3.02	3.93	82.51	89.32	X			Disnakertra ns	Misi 5
2	Capaian Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10,00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.0 0	100.00	X			Disnakertra ns	Misi 5
3	Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9,49	9.51	9.53	10.00	10.00	105.1 5	104.93	X			Disnakertra ns	Misi 5
Program Pengawasan Ketenagakerjaan												Disnakertra ns	Misi 5
1	Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	2,92	2.98	3.04	0.93	1.18	31.21	38.82	X			Disnakertra ns	Misi 5
Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi												Disnakertra ns	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
1	Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	14,95	15.25	15.55	13.92	13.59	91.28	87.40	X			Disnakertrans	Misi 5
	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri											Disnakertrans	Misi 5
1	Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1,25	1.25	1.26	2.05	3.06	164.00	242.86	X			Disnakertrans	Misi 5
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan											Dinas Ketapang	Misi 5
1	Ketersediaan pangan (Satuan: %)	93,90	95.10	96.30	99.91	89.83	105.06	93.28		X		Dinas Ketapang	Misi 5
	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan											Dinas Ketapang	Misi 5
1	Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	80,09	82.50	85.50	82.50	82.19	100.00	96.13	X			Dinas Ketapang	Misi 5
	Program Perlindungan Konsumen Pangan											Dinas Ketapang	Misi 5
1	Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	73,21	90.00	90.00	90.00	77.84	100.00	86.49	X			Dinas Ketapang	Misi 5
	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup											DLHK	Misi 5
1	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok)	203,00	52.00	60.00	88.00	62.00	169.23	103.33	X			DLHK	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil												Dinas KUKM	Misi 5
1	Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain (Satuan: %)	1,00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0 0	100.00	X			Dinas KUKM	Misi 5
Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi												Dinas KUKM	Misi 5
1	Capaian Koperasi Aktif (Satuan: %)	6,00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.0 0	100.00	X			Dinas KUKM	Misi 5
Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi												Dinas KUKM	Misi 5
1	Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan: %)	0,00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.0 0	100.00	X			Dinas KUKM	Misi 5
Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM												Dinas KUKM	Misi 5
1	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)	0,00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.0 0	100.00	X			Dinas KUKM	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
2	Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	0,00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	X			Dinas KUKM	Misi 5
Penanaman Modal													Misi 5
Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi												DPMPTSP	Misi 5
1	Nilai Investasi PMDN (Satuan: Triliun)	12,40	13.40	13.80	18.63	20.71	139.03	150.07	X			DPMPTSP	Misi 5
2	Nilai Investasi PMA (Satuan: Triliun)	39,90	43.00	47.00	37.88	28.02	88.09	59.62			X	DPMPTSP	Misi 5
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal												DPMPTSP	Misi 5
1	Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	75,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			DPMPTSP	Misi 5
Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal												DPMPTSP	Misi 5
1	Persentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			DPMPTSP	Misi 5
Program Pengendalian Penanaman Modal												DPMPTSP	Misi 5
1	Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: Cakupan)	16,96	17.03	17.09	26.13	26.14	153.44	152.95	X			DPMPTSP	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap												DKP	Misi 5
1	Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	7,49	8.01	8.08	8.00	8.08	99.88	100.00	X			DKP	Misi 5
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan												DKP	Misi 5
1	Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	50,00	60.00	20.00	22.72	65.00	37.87	325.00	X			DKP	Misi 5
Program Peningkatan Daya Saing Perikanan												DKP	Misi 5
1	Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	50,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			DKP	Misi 5
Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil												DKP	Misi 5
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: Poin)	115,00	116.00	117.00	123.25	125.00	106.25	106.84	X			DKP	Misi 5
Pariwisata													Misi 5
Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Dispar	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
1	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Sentra)	2,00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0 0	100.00	X			Dispar	Misi 5
Program Pemasaran Produk Pariwisata												Dispar	Misi 5
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14705763,00	15146936.0 0	15601344. 00	13191096.0 0	14327432.0 0	87.09	91.83		X		Dispar	Misi 5
2	Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,33	1.36	1.39	1.36	1.31	100.0 0	94.24	X			Dispar	Misi 5
3	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3.634.490,00	3743525.00	3852216.0 0	2859840.00	3418582.00	76.39	88.74		X		Dispar	Misi 5
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif												Dispar	Misi 5
1	Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (Satuan: Orang)	200,00	300.00	300.00	300.00	400.00	100.0 0	133.33	X			Dispar	Misi 5
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata												Dispar	Misi 5
1	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %)	20,00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.0 0	100.00	X			Dispar	Misi 5
2	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata berbasis Sapta Pesona (Satuan: %)	0,00	0.00	0.00								Dispar	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan												Distan	Misi 5
1	Capaian Produktivitas Tanaman Padi (Satuan: Kw/Ha)	55,68	57.35	59.07	48.88	48.43	85.23	81.99		X		Distan	Misi 5
2	Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2396688,00	2408671.00	2420714.00	1603556.00	2183582.00	66.57	90.20		X		Distan	Misi 5
3	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	20551,00	21579.00	22657.00	210556.00	111274.00	975.74	491.12	X			Distan	Misi 5
4	Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	6801,00	7141.00	7498.00	14751.00	1427.00	206.57	19.03		X		Distan	Misi 5
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura												Distan	Misi 5
1	Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	7.498,00	8246.00	8970.00	10977.00	11444.00	133.12	127.58	X			Distan	Misi 5
2	Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	700,00	735.00	771.75	920.70	1497.00	125.27	193.97	X			Distan	Misi 5
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan												Distan	Misi 5
1	Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan: Ton)	3.184,00	3343.20	3510.36	2043.93	3047.00	61.14	86.80		X		Distan	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
	2	Peningkatan Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)	3.184,00	0.00	0.00								Distan	Misi 5
	3	Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1.694,00	1728.00	1762.00	4167.54	3063.00	241.1 8	173.84	X			Distan	Misi 5
	4	Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	43.116,00	43978.00	44858.00	44833.49	42743.00	101.9 5	95.29	X			Distan	Misi 5
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan													Distan	Misi 5
	1	Peningkatan Produksi Daging (Satuan: Ton)	33,52	33.52	34.18	23.47	21.14	70.02	61.85			X	Distan	Misi 5
Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian													Distan	Misi 5
	1	Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	80,00	85.00	87.00	85.00	87.00	100.0 0	100.00	X			Distan	Misi 5
Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner													Distan	Misi 5
	1	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.0 0	100.00	X			Distan	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan												DLHK	Misi 5
1	Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	38,00	10.00	10.00	11.28	11.58	112.80	115.80	X			DLHK	Misi 5
2	Luas Lahan kritis yang terehabilitasi (Satuan: Ha)	69.466,00	5000.00	5000.00	7990.00	7297.00	159.80	145.94	X			DLHK	Misi 5
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara												Dinas ESDM	Misi 5
1	Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	60,00	65.00	70.00	65.00	70.82	100.00	101.17	X			Dinas ESDM	Misi 5
2	Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	37,67	41.10	44.52	41.10	44.52	100.00	100.00	X			Dinas ESDM	Misi 5
Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan												Dinas ESDM	Misi 5
1	Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: ss)	10.000,00	10000.00	10000.00	10000.00	7965.00	100.00	79.65	X			Dinas ESDM	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan												Dinas ESDM	Misi 5
1	Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (Satuan: %)	9,92	16.17	22.83	16.17	39.83	100.00	174.46	X			Dinas ESDM	Misi 5
Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri												Disperindag	Misi 5
1	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5,00	5.00	5.00	5.00	0.29	100.00	5.80		X		Disperindag	Misi 5
2	Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	5,00	10.00	12.00	10.00	24.30	100.00	202.50	X			Disperindag	Misi 5
3	Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok (Satuan: %)	6,93	5.00	5.00	5.00	1.09	100.00	21.80		X		Disperindag	Misi 5
4	Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			Disperindag	Misi 5
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri												Disperindag	Misi 5
1	Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Triliun)	2.828,83	297027.00	311879.00	-849.97	3356.47	-0.29	1.08	X			Disperindag	Misi 5
Program Perlindungan dan Pengawasan Industri												Disperindag	Misi 5

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Target RPJMD		Capaian Target RPJMD		Tingkat Capaian Target RPJMD		Prediksi Ketercapaian			SKPD Penanggung Jawab	Misi
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	Terca pai	Akan Terca pai	Perlu Kerja Keras		
1	Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Indeks)	104,65	108.00	112.00	108.55	109.11	100.51	97.42	X			Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri	Misi 5
Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang												Disperindag	Misi 5
2	Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)	75,00	80.00	85.00	80.00	85.00	100.00	100.00	X			Disperindag	Misi 5
Perindustrian													Misi 5
Program Peningkatan Daya Saing Industri												Disperindag	Misi 5
1	Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	0,00	20.00	20.00	30.00	20.00	150.00	100.00	X			Disperindag	Misi 5
2	Persentase Kerjasama SDM Berkompentensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	0,00	20.00	20.00	24.00	20.00	120.00	100.00	X			Disperindag	Misi 5
3	Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: Rasio)	0,00	20.00	20.00	20.00	25.71	100.00	128.55	X			Disperindag	Misi 5
Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri												Disperindag	Misi 5
1	Jumlah produk industri kecil berstandar dan bersertifikasi (Satuan: Jumlah)	1.200,00	200.00	200.00	359.00	421.00	179.50	210.50	X			Disperindag	Misi 5

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok yang harus diperhatikan pada tahun perencanaan 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan :
 - Masih perlu adanya Peningkatan Sarpras Pendidikan dan Kesehatan
 - Masih tingginya angka Pengangguran lulusan Sekolah Kejuruan
 - Masih tingginya Pengangguran di Usia Muda
 - Pemenuhan Target RPJMD terkait USB dan RKB
 - Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (UHC)
 - Pemangsaan Infrastruktur Kesehatan sehubungan dengan diselesaikannya Pembangunan RSUD Banten
 - Belum adanya Penetapan RS Pendidikan di Prov Banten
 - Masih Tingginya PMKS
2. Kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan.
 - Masih perlunya peningkatan produktivitas tanaman Pajale, cabe dan bawang merah
 - Sarpras Kepelabuhan yang masih terbatas (Pengaman Laut, Pemecah Gelombang, Kolam Labuh, SPDN, Docking Kapal, sarana tambat labuh, kior Lapak penjual ikan
 - Belum optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kompetensi SDM Pariwisata;
 - Belum Optimalnya Sistem Logistik Daerah dan system informasi Bahan Pokok
 - Ketidakseimbangan antara Supply and Demand Pangan Pokok di Provinsi Banten.
 - Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan yang belum 100%
3. Integrasi Pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana
 - Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah
 - Belum terselesaikannya target jalan mantap

- Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai dengan meningkatkan kerusakan ekosistem teresterial dan pesisir laut serta meningkatnya pencemaran lingkungan hidup
 - Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang cakap dalam Mitigasi Bencana, dan Kurangnya Koordinasi antar sector baik dengan tingkat pusat maupun Kabupaten/Kota
 - Rendahnya Pemeliharaan Peralatan Mitigasi Bencana
 - Masih rendahnya tingkat keberagaman (diversifikasi) konsumsi pangan masyarakat
 - Masih Tingginya Pencemaran Lingkungan (terutama Air)
 - Perlu peningkatan kualitas perumahan di kawasan kumuh.
4. Masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi
- Pemanfaatan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Target Nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang belum tercapai
 - Tata Laksana dan manajemen birokrasi yang belum optimal
 - Perlunya mempertahankan opini WTP;
 - Capaian Nilai SAKIP belum sesuai dengan target RPJMD
 - Indeks Profesionalisme ASN
 - Belum adanya kerja sama Pemerintahan untuk penyelesaian permasalahan di Wilayah Perbatasan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan proyeksi tahun berjalan serta tahun mendatang yang antara lain mencakup indikator makro ekonomi seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Rasio dan Inflasi. Selain itu dijelaskan juga terkait sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Pandemik COVID-19 yang terjadi di akhirtahun 2019 dan melandaseluruh Negara di dunia memberikan pengaruh besar tidak sebatas pada bidang kesehatan namun memberikan dampak ikutan termasuk bidang Ekonomi dan social. Berbagai langkah antisipatif seperti kebijakan “*lockdown*” diambil oleh berbagai negara atau pun pembatasan aktivitas sosial untuk mencegah penyebaran lebih lanjut COVID-19, berdampak pada terhambatnya kegiatan pekonomian dan memberi tekanan pada pertumbuhan ekonomi dunia termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Angin segar terkait penanganan covid-19 mulai dirasakan setelah beberapa negara mensosialisasikan keberhasilannya dalam memproduksi vaksin. Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund(IMF) memprediksi bahwa pembatasan *Social Distancing* akan berlanjut hingga 2021 tetapi akan menurun seiring waktu karena cakupan vaksin yang meluas meskipun disisi lain masih terjadi transmisi lokal yang relatif rendah di berbagai wilayah pada akhir tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa Pandemi Covid-19 masih akan mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat di tahun 2021, sedangkan untuk tahun 2022 aktivitas perekonomian tergantungdari hasil distribusi dan efektivitas vaksin yang ada. Meskipun demikian, IMF memprediksi bahwa di tahun 2021 ekononomi dunia akan tumbuh sampai level 5,2% setelah sebelumnya yakni tahun 2020 diprediksi mengalami kontraksi sampai 4,4%. Optimisme IMF didasarkan pada beberapa pertimbangan dan asumsi yakni:

- Kebijakan dalam penanganan Pandemi Covid-19 di beberapa negara menunjukan hasil sehingga berimbas pada peningkatan PDB yang signifikan pada kuartal keempat dengan asumsi tidak ada gelombang dari pandemic ini atau dengan kata lain hal yang terburuk sudah dilalui.
- Adanya kebijakan pelaksanaan Social Distancing yang ketat serta peningkatan standar keamanan di tempat kerja. Proyeksi baseline mengasumsikan bahwa *Social Distancing* akan berlanjut hingga 2021 tetapi akan kemudian memudar seiring waktu karena cakupan vaksin meluas dan penanganan kesehatan membaik, dengan transmisi lokal dibawa ke tingkat yang rendah di mana-mana pada akhir tahun 2022. Dengan langkah ini diharapkan pada tahun 2021 tidak adalagi Negara yang mengeluarkan kebijakan *Lockdown*.
- Dampak yang ditimbulkan kejadian pandemi covid-19 di tahun 2020 akan mempengaruhi rantai pasokan industri. Meski demikian dampak yang terjadi sangat variatif tergantung pada level ekonominya.
- Dukungan kebijakan dan kondisi keuangan.
- Harga komoditas. Harga rata-rata minyak bumi per barel diproyeksikan dikisaran \$ 41 pada tahun 2020 dan \$ 43,8 di tahun 2021, lebih tinggi dari perkiraan bulan April dan Juni. Kurva minyak berjangka menunjukkan bahwa harga diharapkan meningkat setelah itu menjadi \$ 48, sekitar 25 persen di bawah rata-rata tahun 2019. Harga komoditas non migas diperkirakan akan naik lebih cepat dari yang diasumsikan di bulan April dan Juni.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut IMF memproyeksikan GDP di beberapa Negara sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi

Negara	Year On Year				Q4 to Q4			
	Realisasi		Proyeksi		Realisasi		Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Amerika Serikat	3,0	2,2	-4,3	3,1	2,5	2,3	-4,1	3,2
Jerman	1,3	0,6	-6,0	4,2	0,3	0,4	-5,2	4,6
Perancis	1.8	1.5	-9.8	6.0	1.4	0.8	-6.7	4.0
Spanyol	2.4	2.0	-12.8	7.2	2.1	1.8	-10.8	6.6
Inggris	1.3	1.5	-9.8	5.9	1.4	1.1	-6.4	3.7
Jepang	0.3	0.7	-5.3	2.3	-0.3	-0.7	-2.3	0.7
China	6.7	6.1	1.9	8.2	6.6	6.0	5.8	3.9
India	6.1	4.2	-10.3	8.8	5.5	3.1	-4.0	1.4
Dunia	3.5	2.8	-4.4	5.2	3.1	2.7	-2.6	3.7

Sumber: World Economic Outlook, IMF (Bulan Oktober 2020)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia (Global) mengalami kontraksi sampai dengan

4,4% atau mengalami pertumbuhan yang negatif dan hanya Negara China yang pertumbuhan positif di level 1,6%. Selain itu, adanya ketidakpastian kapan pandemic ini berakhir serta belum adanya obat dan vaksin yang terbukti efektif menyembuhkan dan mencegah penyebaran virus corona menyebabkan proyeksi IMF terhadap pertumbuhan ekonomi di Quartal 4 tahun 2020 terhadap Quartal 4 tahun 2019 (Q4 to Q4) masih negatif. Meskipun demikian, adanya trend peningkatan perekonomian yang terjadi mulai Quartal 3 membuat proyeksi Laju pertumbuhan ekonomi di seluruh negara dunia pada tahun 2021 bernilai positif.

Bulan Januari 2021 (tanggal 20 januari) IMF kembali merilis outlook perekonomian dunia berdasarkan asumsi kondisi terkini. Berdasarkan asumsi kondisi terkini seperti belum terkendalinya pandemi Covid-19, ditemukannya beberapa kasus karena varian baru virus corona di beberapa negara serta mulai dilakukan pemberian vaksin kepada masyarakat di beberapa negara asumsi laju pertumbuhan ekonomi (GDP) dunia tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi sampai 3,5% (atau -3,5%). Hal ini menunjukkan optimisme IMF terhadap keberhasilan proses vaksinasi yang mulai dilakukan. Di Indonesia, vaksinasi untuk penanganan covid-19 mulai dilakukan tanggal 13 januari 2020.

Meski proyeksi IMF atas kondisi perekonomian global mengalami koreksi perbaikan (peningkatan), namun tidak demikian halnya dengan proyeksi perekonomian negara-negara ASEAN. Berdasarkan laporan IMF (Bulan Oktober 2020) dalam lingkup regional ASEAN, dampak pandemi global Covid-19 diproyeksikan akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan negatif sebesar -3,4, namun hasil proyeksi bulan Januari nilai tersebut berubah menjadi -3,7. secara lengkap disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Negara Negara Dunia 2019 (Real), 2020 dan 2021 (Proyeksi)

Negara	Realisasi	Proyeksi Bulan Oktober*		Proyeksi Bulan Januari**		
	2019	2020	2021	2020	2021	2022
ASEAN-5	4.9	-3.4	6.2	-3,7	5,2	6,0
- Indonesia	5.0	-1.5	6.1	-1,9	4,8	6,0
-Thailand	2.4	-7.1	4.0	-6,6	2,7	4,6
- Malaysia	4.3	-6.0	7.8	-5,8	7,0	6,0
- Philippines	6.0	-8.3	7.4	-9,6	6,6	6,5
- Vietnam	7.0	1.6	6.7			

Sumber: *International Monetary Fund Oktober 2020
 *International Monetary Fund Januari 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa berdasarkan proyeksi bulan Oktober 2020 laju pertumbuhan negara negara di ASEAN pada tahun 2021

diproyeksikan mencapai 6,2% setelah sebelumnya di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,4% dan hanya negara Vietnam yang mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 1,6%. Nilai proyeksi positif pertumbuhan ekonomi negara Vietnam, tergambarkan juga dari realisasi Pertumbuhan ekonomi masing-masing kwartalnya. Dikutip dari <https://tradingeconomics.com>, laju pertumbuhan ekonomi negara vietnam pada Quartal I (3,82%), Q2(0,39%) dan Q3(2,62%).

Momentum pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan proyeksi nilai positif pada tahun 2021 yang dialami berbagai negara di belahan dunia sebagaimana telah disampaikan sebelumnya serta pertumbuhan ekonomi positif yang dialami negara Tiongkok dan Vietnam pada tahun 2020 harus dapat dimanfaatkan para pelaku ekonomi di wilayah Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, negara Tiongkok dan Vietnam merupakan dua negara yang termasuk dalam tujuan utama ekspor komoditas/produk yang berasal dari provinsi Banten.

Tabel 3.3 Ekspor Non Migas Menurut Negara Tujuan

Negara	Nilai FOB (Juta US\$)		Perubahan 2019 terhadap 2018 (%)	Peran terhadap Total Ekspor Non MigasTahun 2019 (%)
	2018	2019		
Amerika Serikat	1947,84	1942,59	-0,27	17,60
Tiongkok	15000,99	1478,85	-1,48	13,40
Jepang	967,42	861,59	-10,94	7,81
Filipina	728,31	740,58	1,69	6,71
Vietnam	547,50	578,26	5,62	5,24
Thailand	649,48	575,85	-11,34	5,22
India	487,37	543,85	11,59	4,93
Malaysia	537,17	537,16	000	4,87
Korea Selatan	681,17	490,30	-28,02	4,44
Singapura	310,05	280,05	-9,68	2,54
Australia	291,90	242,61	-16,88	2,20
Jerman	310,33	234,96	-24,29	2,13
Lainnya	1904,86	2530,33	-12,89	22,93
Total	11864,37	11036,99	-6,97	100

Sumber: BPS Provinsi Banten 2020

Berdasarkan tabel diatas, nilai eksport non migas provinsi Banten di tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan nilai ekspor tahun 2018. Nilai ekspor tahun 2018 mencapai US\$ 11.964,37 Juta, sementara tahun 2019 hanya mencapai US\$ 11.036,99 Juta. Meskipun pertumbuhan nilai ekspor secara agregat mengalami penurunan, namun untuk nilai eksport negara tujuan Vietnam, Filipina dan India menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi

diwilayah provinsi Banten harus mempertahankan tren positif permintaan barang atau pun komoditas yang masuk negara-negara tersebut.

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya antisipatif penyebaran covid-19 tentu saja berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

TW I		TW II		TW III		TW IV		LPE 2020
Q to Q	Y On Y	Q to Q	Y On Y	Q to Q	Y On Y	Qto Q	YOnY	C to C
-2,41	2,97	- 4,19	- 5,32	5,05	- 3,49	-0,49	-2,19	-2,07

Sumber: Berita Resmi Statistik

Tabel diatas memperlihatkan bahwa meskipun Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru dikeluarkan pada bulan April 2020 namun perekonomian nasional sudah mengalami dampak dari Pandemi Covid-19 mulai dari Triwulan I (Januari-Februari-Maret). Hal ini disebabkan karena diterapkannya kebijakan *Lockdown* secara ketat di beberapa negara tujuan eksport komoditas atau pun barang yang dihasilkan dari perusahaan di Indonesia. Selain Tiongkok sebagai negara tempat berasalnya penyebaran virus Corona beberapa negara lain seperti Amerika serikat, Jepang, Australia dan Korea Selatan menerapkan kebijakan Lockdown mulai periode triwulan I.

Selain berpengaruh pada eksport komoditas, diterapkannya kebijakan *Lockdown* juga berpengaruh pada kurangnya pasokan bahan baku industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pada pasokan import. Karena kurangnya bahan baku inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi kapasitas produksinya dan bahkan sebagian diantaranya menutup pabriknya. Dalam laporan Bank Dunia disebutkan Volume impor Indonesia menyusut sebesar 2,2 persen di Q1 tahun 2020, setelah turun sebesar 8,0 persen di Q4 tahun 2019 (Q1 tahun 2019: -7,5 persen). Perlambatan kontraksi impor ini terutama didorong oleh impor minyak dan gas yang lebih tinggi karena importer mengambil keuntungan dari jatuhnya harga minyak untuk meningkatkan persediaan. Selain itu, impor non migas mengalami kontraksi yang lebih kecil dari impor di Q4

tahun 2019, sebagian karena peningkatan pertumbuhan ekspor yang membutuhkan masukan bahan baku impor, yang mengimbangi laju impor bahan baku yang lebih lambat untuk konsumsi dalam negeri.

Kebijakan *Lockdown* yang diterapkan diberbagai Negara serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga mempengaruhi sector transportasi dan pariwisata karena adanya pembatasan penerbangan dari negara-negara asing, meningkatnya kehati-hatian para pelancong, dan penangguhan operasi dari banyak operator asing ke Indonesia. Kedatangan pengunjung manca negara turun 64,9 persen yoy pada bulan Maret dan 31,1 persen untuk triwulan tersebut.

Berbagai langkah antisipatif sebagai bentuk mitigasi fiskal coba digulirkan Pemerintah untuk meminimalisir keterpurukan yang mungkin timbul akibat Pandemi Covid-19 ini. Langkah tersebut anatara lain: :

- Layanan kesehatan: Rp 84,6 triliun (0,5 persen dari PDB) untuk pengadaan peralatan medis (tes cepat, peralatan laboratorium sekali pakai, alat pelindung diri(APD)), persiapan fasilitas kesehatan, kenaikan tunjangan bagi para pekerja layanan kesehatan, dan langkah-langkah pajak seperti keringanan pajak penghasilan yang bersifat sementara untuk para penyedia layanan kesehatan COVID, dan keringanan bea masuk dan PPN untuk barang-barang yang terkait dengan pengelolaan penyakit menular ini.
- Perlindungan sosial: Rp 139,7 triliun (0,9 persen dari PDB) untuk mendukung peluncuran program-program bantuan sosial yang baru, perluasan program-program bantuan sosial yang sudah ada, termasuk program kartu pra-kerja, dan subsidi tambahan seperti iuran BPJS-kesehatan dan pembebasan pembayaran tagihan listrik.
- Dukungan bagi UMKM: Rp 121,1 triliun (0,7 persen dari PDB) mencakup terutama subsidi bunga atas pinjaman UMKM selama 3 hingga 6 bulan, penempatan dana untuk memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang terlibat dalam restrukturisasi pinjaman UMKM dan dana jaminan untuk pinjaman modal kerja baru untuk UMKM.
- Dukungan bagi BUMN: Rp 136,2 triliun (0,8 persen dari PDB), termasuk bagian yang terbesar adalah tambahan kompensasi subsidi energi untuk PLN dan Pertamina(Rp 76 triliun), yang sebagian besar disebabkan oleh kompensasi subsidi yang belum dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya,

- suntikan modal 63 dan dana talangan (terutama untuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, pembiayaan dan transportasi).
- Keringanan pajak: Rp 123 triliun (0,8 persen dari PDB) Ini sebagian besar disebabkan oleh keringanan pajak yang bersifat sementara untuk pajak penghasilan pribadi (termasuk pajak penghasilan final yang dibayarkan oleh UMKM), pajak penghasilan badan, pajak penghasilan impor, percepatan pengembalian PPN danpersen.
 - Stimulus belanja lainnya: Rp 100,8 triliun (0,6 persen dari PDB) untuk Program *Cash for Work* di bawah kementerian/Lembaga, dukungan bagi industri padat karya dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi pinjaman, dana transfer (DAK Fisik danDID), dana hibah kepada Pemda akibat menurunnya pendapatan daerah sehubungan dengan perlambatan di sektor pariwisata (untuk memberi kompensasi kepada Pemda akibat menurunnya pendapatan pajak hotel dan restoran), subsidi energi terbarukan B30, insentif perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, dan cadangan stimulus fiskal lainnya.

Bank Dunia menyebutkan bahwa dengan berbagai langkah antisipatif Pemerintah serta kondisi Global yang membaik seiring dengan asumsi efektivitas vaksinasi yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan, proyeksi pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih selama dua tahun kedepan, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil. Konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investasi sector swasta. PDB riil diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta. PDB diperkirakan tumbuh 6,0 persen pada tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia			
Lembaga	2020	2021	2022
Bank Dunia	0,0	4,8	6,0
IMF	-1,5	6,1	6,0
Bappenas	-0,4 - 1	4,5 – 5,5	

Sumber: Bank Dunia, IMF, RKP 2021, Kick Off Meeting RKP 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan asumsi yang terjadi dalam lingkup global, IMF memberikan proyeksi yang lebih rendah

terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Berdasarkan proyeksi IMF yang dikeluarkan dalam laporan di Bulan Oktober, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih negative atau mengalami kontraksi 1,5% dan berdasarkan baseline tersebut IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1% ditahun 2021.

Berbeda dengan dua lembaga keuangan dunia, Bappenas (dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2021) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam rentang -0,4 – 1 di tahun 2020 dan mencapai 4,5% ditahun 2021. Meskipun demikian, berbagai proyeksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan dunia ataupun Bappenas bersifat dinamis. Berdasarkan laporan-laporan sebelumnya, angka proyeksi terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi selalu berubah disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Selain kesamaan dalam hal angka yang bersifat dinamis, lembaga-lembaga tersebut juga mengisyaratkan perlunya penanganan dampak akibat pandemi Covid-19 sampai dengan tahun mendatang. Untuk itu, dalam RKP 2021, disebutkan Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi dengan strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangansistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen,yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukanutamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentanbaru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission (OSS)*, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *after care service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positif investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke luar negeri yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Banten

1. Kondisi dan Proyeksi PDRB

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memberikan dampak langsung bagi perekonomian Banten terutama sektor transportasi dan industri pengolahan. Rilis BPS Provinsi Banten terkait pertumbuhan Ekonomi Banten triwulan I-2020 memberikan gambaran bahwa kondisi perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan global. Meski penerapan PSBB di provinsi Banten baru diterapkan pada pertengahan April 2020 namun karena kebijakan pengetaan di beberapa negara di dunia sudah dilakukan sejak bulan Februari, dampak terhadap perekonomian di Triwulan I sudah mulai terlihat. Ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 3,09 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,45 persen. Karena itu berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, target LPE provinsi Banten tahun 2020 sebesar 5,80 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017-2022 diperkirakan tidak akan tercapai.

Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) diwarnai faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,02 persen. Artinya angka pertumbuhan tersebut lebih disebabkan karena pada bulan Februari Maret beberapa komoditas pertanian memasuki masa panen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,78 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,16 persen; Jasa Perusahaan sebesar 1,15 persen; dan beberapa lapangan usaha lainnya. Namun, pertumbuhan lapangan usaha tersebut di atas tidak cukup menahan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan I-2020 (Q to Q) sebesar 3,01 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti: Industri Pengolahan (turun 2,3%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi;

Transportasi dan Pergudangan (turun 14,52%); Jasa Pendidikan (3,14); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran, kecuali komponen Total Net Ekspor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,19 persen; diikuti pengeluaran komponen PembentukanModal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,36 persen; konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar 3,14 persen; dan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 0,47 persen. Sedangkan komponen Total Net Ekspor berkontraksi hingga sebesar 5,01 persen.Berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I-2020 (y-on-y), Konsumsi Rumah Tangga masih sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,40 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,05 persen,; serta Konsumsi Lembaga Non Profit dan Konsumsi Pemerintah yang memiliki andil sama sebesar 0,02 persen.

Berbeda dengan kondisi Triwulan I tahun 2020, rilis BPS Provinsi Banten terkait perekonomian Provinsi Banten menunjukkan pengaruh besar pandemi Covid-19 di Provinsi ini sangat terasa signifikan. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten dibawah capaian laju ekonomi nasional.

Tabel 3.6. Realisasi LPE Triwulanan dan Tahunan Nasional dan Banten

Tahun	TW I		TW II		TW III		TW IV		BANTEN	NAS
	Banten	Nas	Banten	Nas	Banten	Nas	Banten	Nas		
2015	5,69	4,71	5,26	4,67	5,18	4,73	4,87	5,04	5,37	4,79
2016	5,15	4,92	5,16	5,18	5,35	5,02	5,53	4,94	5,26	5,02
2017	5,9	5,01	5,52	5,01	5,62	5,06	5,75	5,19	5,71	5,07
2018	5,95	5,06	5,59	5,27	5,89	5,17	5,98	5,18	5,81	5,17
2019	5,42	5,07	5,35	5,05	5,41	5,02	5,9	4,97	5,53	5,02
2020	3,09	2,97	-7,4	-5,32	-5,77	-3,49	-3,93	-2,19	-3,38	-2,07

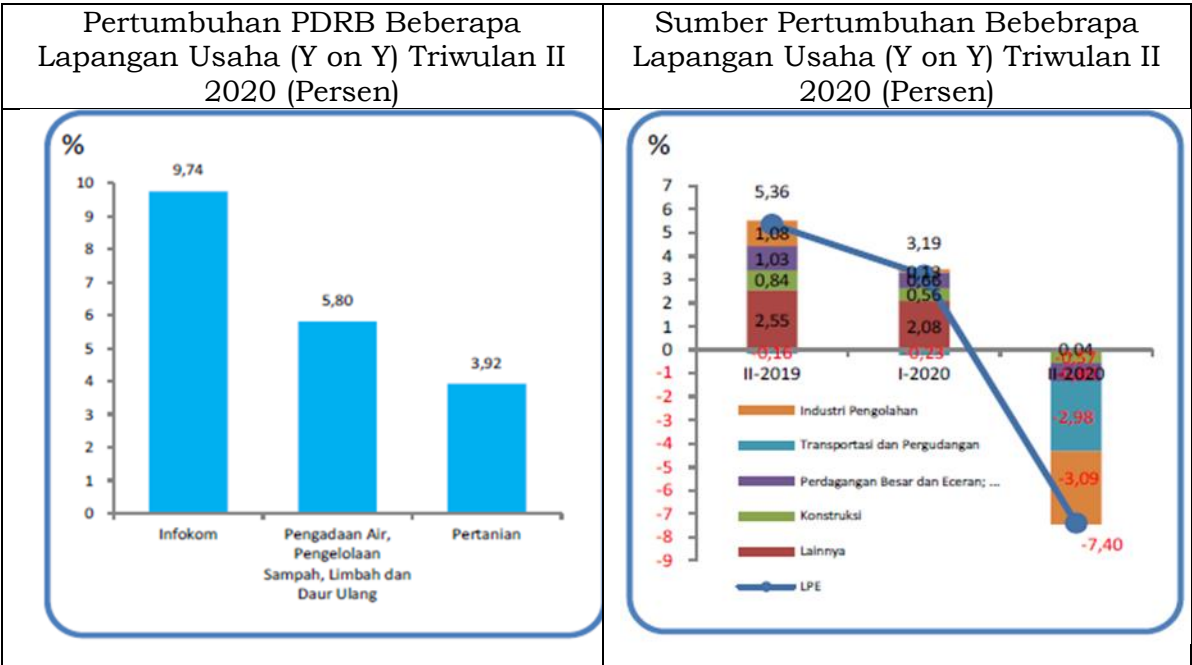
Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik BPS Pusat dan Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum kejadian Pandemi Covid-19, LPE tahunan provinsi Banten selalu berada diatas nilai LPE nasional atau dengan kata lain perkembangan perekonomian di wilayah provinsi Banten selalu lebih baik

dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong provinsi Banten menjadi magnet bagi para investor menanamkan investasi di wilayah ini (Pembahasan lebih mendetail tentang investasi akan disajikan pada bagian berikutnya). Selain data tahunan yang memperlihatkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, data LPE triwulanan juga menunjukkan hal yang serupa. Selama lima tahun terakhir, hanya data LPE triwulan IV tahun 2015 dan Triwulan II tahun 2016 yang menunjukkan capaian di bawah nasional. Meski demikian, capaian LPE provinsi Banten di kedua triwulan tersebut tidak tepaut jauh dimana LPE Triwulan IV tahun 2015 provinsi Banten sebesar 4,87 (nasional 5,07) dan Triwulan II tahun 2016 LPE Banten 5,16 sedangkan nasional 5,18.

Penurunan drastis terkait kondisi perekonomian tahun 2020 baik global, nasional termasuk provinsi Banten terjadi pada Triwulan kedua. Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, LPE provinsi Banten mengalami kontraksi sampai 7,4% dan berada di bawah nasional yang mengalami kontraksi 5,3%. Mulai diterapkannya PSBB dengan pada April membawa dampak berkurangnya aktifitas masyarakat yang menggunakan jasa transportasi serta adanya pembatasan aktivitas di sektor industri. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II-2020 (*y-on-y*), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,59 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,21 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,08 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,04 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tetapi karena sebagian besar lapangan usaha lainnya tumbuh negatif sehingga ekonomi Banten terkontraksi 7,40 persen. Penyumbang negatif terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar -3,09 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -2,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,80 persen dan Konstruksi sebesar -0,57 persen.

Gambar.3.1. Pertumbuhan PDRB per Lapangan usaha Tahun 2020 Tw II

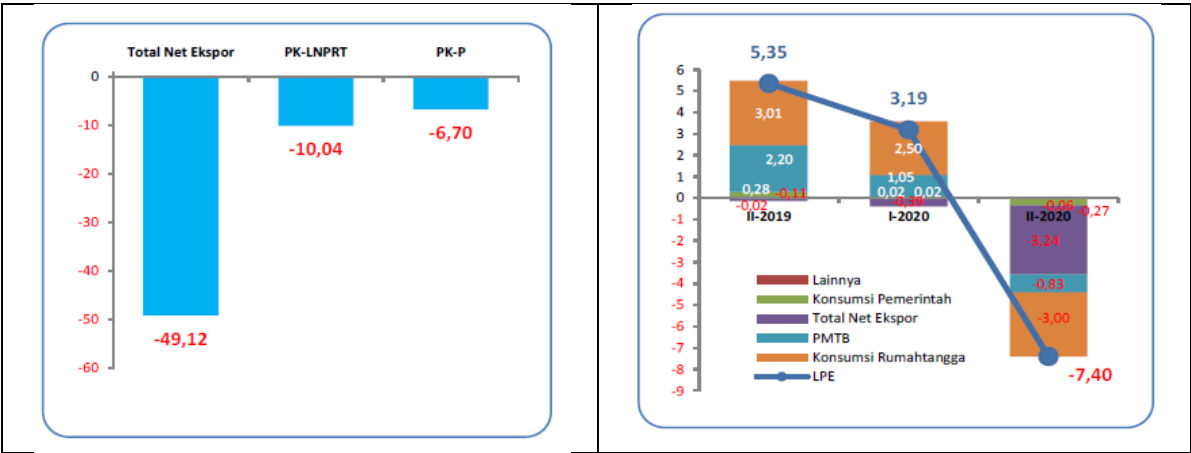


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Dilihat dari sisi konsumsi, pertumbuhan Ekonomi Banten triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 (*y-on-y*) mengalami kontraksi pada semua komponen pengeluaran. Penurunan tertinggi terjadi pada komponen Total Net Ekspor sebesar -49,12 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar -10,04 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (KP) sebesar -6,70 persen; komponen pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar -5,22 persen; serta komponen pengeluaran untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -2,63 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II-2020 (*y-on-y*), sumber pertumbuhan negatif terdalam berasal dari komponen Total Net Ekspor sebesar -3,24 persen; kemudian komponen konsumsi Rumah Tangga sebesar -3,00 persen dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar -0,83 persen.

Gambar 3.2. Pertumbuhan PDRB komponen Pengeluaran Tahun 2020 Tw II

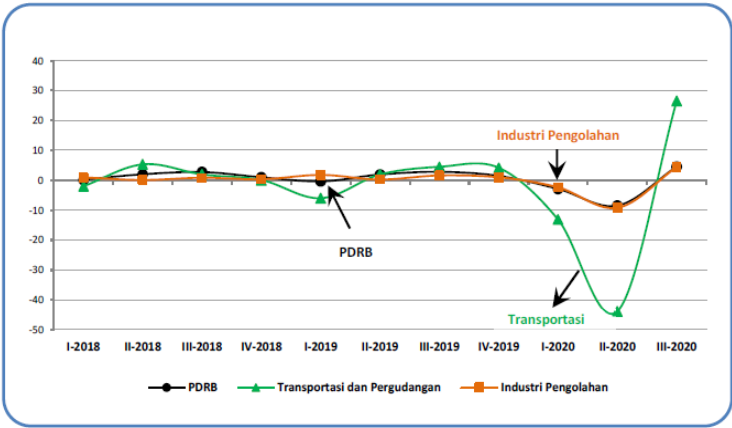
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Triwulan II-2020 (<i>y-on-y</i>) (persen)	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Y on Y) Triwulan II-2020 (<i>y-on-y</i>) (persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021

Rilis BPS Provinsi Banten terkait kondisi perekonomian di Triwulan III menunjukkan perbaikan. Meskipun secara Year on Year LPE Provinsi Banten masih mengalami kontraksi 5,77% namun dibandingkan dengan capaian Triwulan II (Q to Q) terjadi peningkatan sebesar 4,55%. Secara Q to Q Lapangan usaha yang tumbuh positif diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 26,53 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,15 persen; Konstruksi sebesar 8,17 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,50 persen dan Jasa Lainnya sebesar 5,33 persen. Beberapa lapangan usaha yang lain juga tumbuh positif kecuali Pertambangan dan Penggalan yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 15,40 persen.

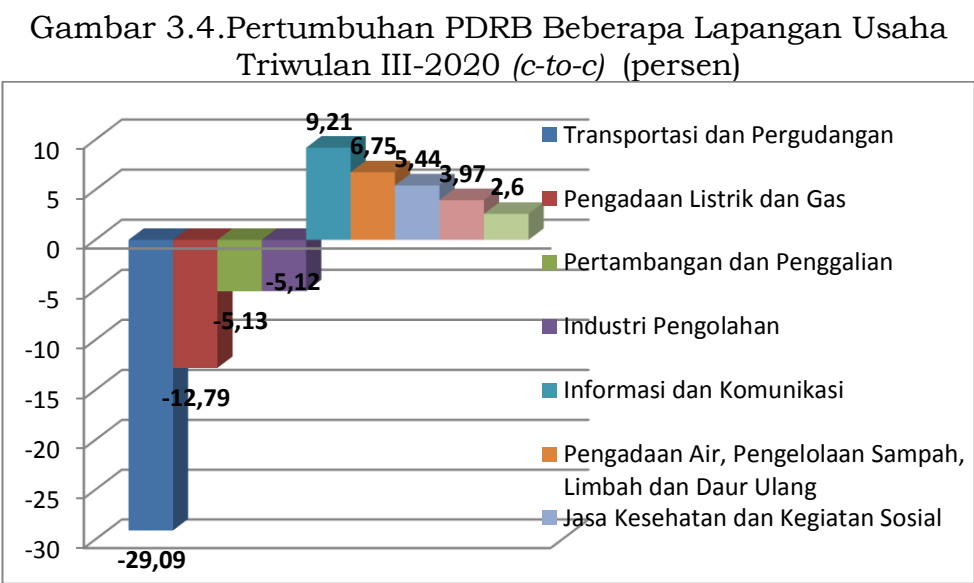
Gambar 3.3 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (Q to Q) Triwulan III Tahun 2020 (Persen)



Lebih baiknya kondisi perekonomian Triwulan III dibandingkan dengan Triwulan II seiring dengan mulai longgarnya penerapan PSBB di beberapa daerah serta dicabutnya kebijakan *Lockdown* di beberapa negara sehingga arus ekspor impor serta transportasi ke daerah atau pun negara tersebut mulai meningkat. Meski demikian, gambaran LPE negatif (kontraksi) serta

penerapan Protokol Kesehatan masih menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah mengingat dampak Pandemi Covid-19 berupa penurunan tingkat konsumsi masyarakat serta tersedianya vaksin yang secara klinis telah terbukti efektivitasnya belum memperlihatkan kondisi yang menggembirakan.

Fokus perhatian terhadap kondisi perekonomian Banten juga diperlukan mengingat sampai dengan triwulan III-2020 (*c-to-c*) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,36 persen. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 29,09 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,79 persen dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,13 persen. Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,12 persen. Sebaliknya beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, diantaranya Informasi dan Komunikasi sebesar 9,21 persen; diikuti Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,75 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,44 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,97 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,60 persen.



Sumber: BPS Provinsi Banten 2020 (diolah)

Dilihat dari aspek PDRB konsumsi, ekonomi Banten sampai dengan triwulan III-2020 terkontraksi sebesar 3,36 persen (*c-to-c*). Kontraksi pertumbuhan tertinggi sampai dengan triwulan III-2020 terjadi pada Komponen Total Net Ekspor sebesar 30,99 persen; diikuti PK-LNPRT sebesar

7,35 persen; PK-P sebesar 5,51 persen; PK-RT sebesar 1,26 persen; dan PMTB sebesar 0,49 persen.

Memperhatikan kondisi yang terjadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam dokumen perencanaan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini maka proyeksi LPE provinsi Banten diperkirakan dapat mencapai 5,0%-5,6% lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD Banten 2017-2022.

Tabel 3.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Banten

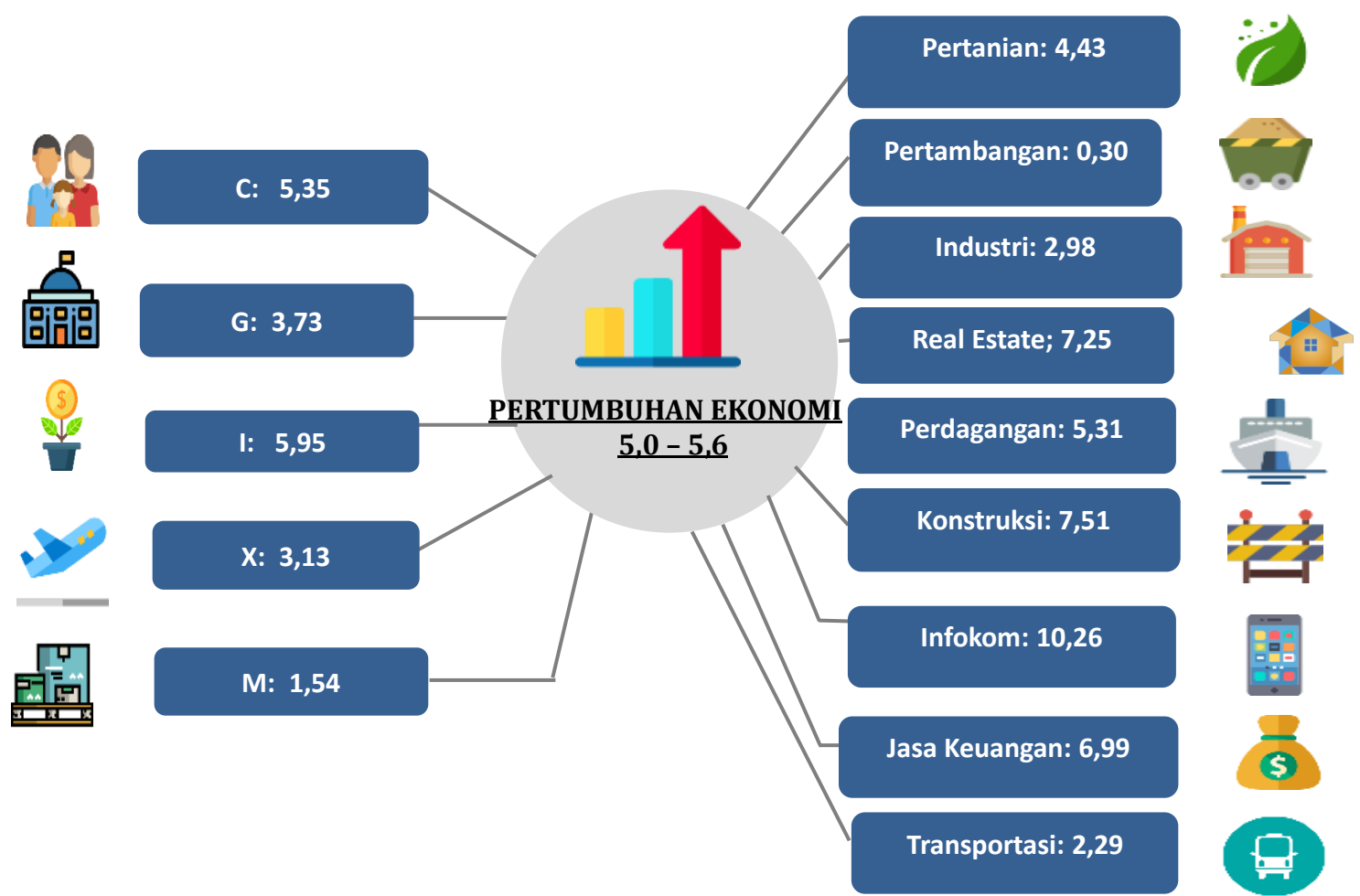
LPE	2020	2021	2022
Nasional	Realisasi Tahun 2020 = - 2,07		
RPJMN	5,3	5,4-5,7	5,7 – 6,0
RKP 2021	-0,4 –1,0	4,5-5,5	
Proyeksi IMF	-1,5	6,1	6,0
Proyeksi Bank Dunia	0,0	4,8	6,0
Banten	Realisasi Tahun 2020 = - 3,38		
RPJMD	5,80	5,95	6,10
RKPD 2021	3,92-4,76***	5,5	
Proyeksi RKPD 2022		5,5	5,0, - 5,6

Dari sisi konsumsi, proyeksi LPE 5,0 – 5,6 dapat terjadi ketika konsumsi rumah tangga selaku sektor yang mendominasi perekonomian Banten mengalami peningkatan. Asumsi ini didasarkan pada tren perbaikan konsumsi masyarakat yang mulai terjadi pada triwulan III tahun 2020 terus berlanjut seiring dengan keberhasilan distribusi dan pemberian vaksin penanggulangan covid-19 yang direncanakan mulai dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2021. Selain itu, sisi konsumsi juga ditunjang dengan meningkatkan konsumsi Pemerintah seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur dan wakil Gubernur periode 2017-2022.Berdasarkan beberapa asumsi tersebut beberapa kebijakan yang dapat diambil pemerintah daerah adalah dengan tetap berupaya melakukan peningkatan daya beli masyarakat dan efektifitas belanja pemerintah daerah termasuk Pemda Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong lain yang akan membangkitkan ekonomi di Provinsi Banten adanya penignatan investasi seiring berjalannya beberapa proyek Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang , pembangunan jalantol Serang- Balaraja dan pembangunan SPAM Karian-Serpong. Lainnya dengan melihat kinerja investasi oleh proyek reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan, Rangkas bitung-Pandeglang dan Pandeglang-

Labuan. Kedepan di tahun 2022 seiring dengan meredanya Covid diharapkan perbaikan kinerja ekspor dan industry pengolahan akan terus membaik yang didorong pula oleh beroperasinya pabrik Polyethylene baru. Selain itu membaiknya kinerja ekspor yang juga di dorong oleh pulihnya perekonomian Negara mitra dagang utama Banten (Singapura dan Amerika) akan memberi dorongan pemulihan ekonomi di Tahun 2022.

Gambar 3.5 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Share masing-masing Sektor Tahun 2022



Sumber: hasil Penghitungan Bappeda Provinsi Banten

Dari sisi produksi, LPE 5,0% - 5,6% dimungkinkan dengan kembali normalnya kondisi perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 diharapkan dapat memicu bangkitnya beberapa sektor seperti Industri Pengolahan Perdagangan, dan Transportasi yang pada tahun 2020 ini mengalami kontraksi. Dengan adanya kontraksi diharapkan sektor tersebut dapat *rebound* di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022. Adanya tren penurunan kontribusi sektor industri pengolahan harus diantisipasi dengan transformasi ekonomi sektor pertanian. Banyaknya komoditas pertanian asal provinsi Banten perlu dilakukan pendekatan upaya hilirisasi dan tidak lagi dijual dalam bentuk *raw material* sehingga selain dapat mendatangkan nilai tambah produk juga berimplikasi pada perluasan lapangan kerja. Keberadaan BUMD Agro menjadi alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan produktivitas pertanian di Provinsi Banten. Peningkatan daya saing para pelaku pertanian merupakan kunci dari keberhasilan transformasi pertanian di Provinsi Banten. Kualitas produk, *branding* dan *packaging* menjadi salah satu hal penting dalam persaingan *marketing* pada saat ini. Selain transformasi ekonomi di bidang pertanian, pilihan strategi pengembangan ekonomi digital merupakan langkah tepat yang perlu terus didukung para pemangku kepentingan, mengingat potensi demografi yang kita miliki dan upaya ekonomi kesektor jasa.

Faktor lainnya yang perlu diperhartikan Pemerintah Provinsi Banten adalah kerjasama perekonomian dengan wilayah sekitar dalam rangka memperluas pasar dari komoditas yang dihasilkan ataupun penyiapan kebutuhan bahan baku industri di Provinsi. Kekuatan ekonomi regional di wilayah Pulau Jawa harus dapat dioptimalkan menjadi bagian strategi pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Rilis BPS pada bulan Januari menunjukkan bahwa perekonomian Pulau Jawa menguasai sekitar 58,7% dari total PDB Indonesia. Berikut disajikan tabel pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 3. 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten dengan
Capaian Wilayah yang Setara

Provinsi	Tahun 2019	Tahun 2020
DKI Jakarta	5,89	-2,36
Jawa Barat	5,07	-2,44
Jawa Tengah	5,41	2,65
DI Yogyakarta	6,60	-2,69
Jawa Timur	5,52	-2,39
Banten	5,53	-3,38
Pulau Jawa	5,52	-2,51
Lampung	5,26	-1,67

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Berdasarkan data diatas terlihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi yang ada di wilayah Pulau pada tahun 2019 seluruhnya berada diatas 5%. Hal ini menunjukan potensi ekonomi yang cukup potensial untuk dapat dijadikan peluang bagi pengembangan ekonomi secara regional. Kerjasama regional juga perlu dilakukan dengan Provinsi tetangga lainnya yakni Lampung. Meskipun Provinsi Lampung berada di wilayah Pulau Sumatera, namun posisi strategis dan Provinsi yang berbatasan langsung membuat provinsi ini perlu dipertimbangkan sebagai wilayah pemasaran produk yang dihasilkan atau pun penyedia bahan baku indutri terutama yang bergerak di sector pertanian.

Tabel 3.9 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita

Provinsi	2019	2020	
	PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Juta Rupaiah)	LajuPertumbuhan PDRB Perkapita
DKI Jakarta	266,79	260,44	- 2,44
Jawa Barat	43,07	41.81	-2,9
Jawa Tengah	39,22	38,60	-1,58
Jawa Timur	56.54	59,09	-4,4
Lampung	42,23	41,62	-1,4
Banten	51,18	47,60	-7,52
Nasional	59,1	56,9	-3,7

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi dan Nasional

Tabel diatas menunjukan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan PDRB per kapita paling tinggi diantara provinsi lainnya yakni mencapai 266,79 juta rupiah/penduduk pada tahun 2019 dan menurun di tahun 2020 menjadi 260,44 juta/penduduk. Sebagaimana laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020, laju pertumbuhan PDRB perkapita menunjukan nilai negatif.

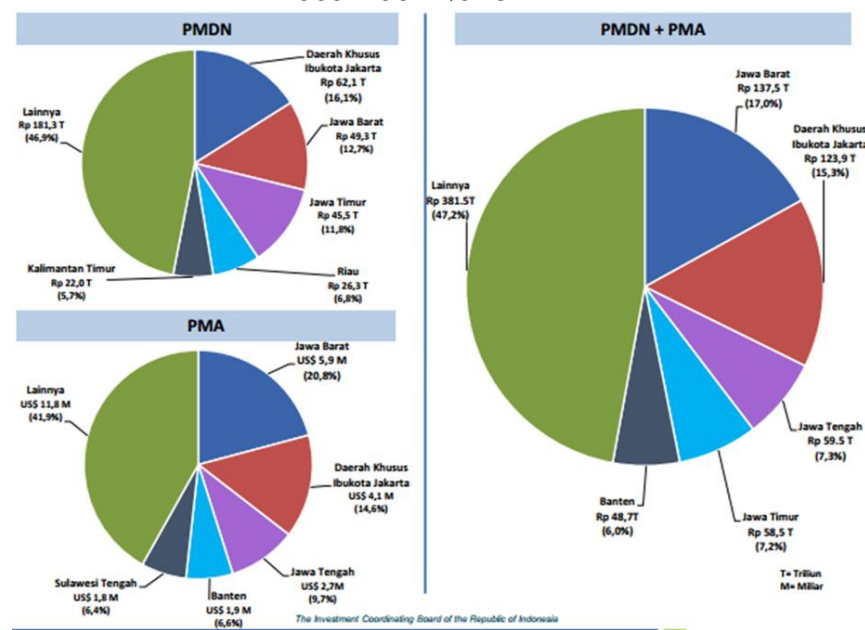
2. Investasi

Investasi memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah baik secara langsung sebagai salah satu komponen pembentuk

PDRB atau secara tidak langsung dalam penyediaan lapangan pekerjaan atau pun pengentasan kemiskinan.

Posisi letak geografis sebagai penyangga ibukota maupun sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera disertai dengan keuntungan dukungan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, akses tol maupun kawasan industry menjadikan provinsi ini sebagai pilihan para investor menanamkan investasinya.

Gambar 3.6. Realisasi investasi berdasarkan lokasi Januari – Desember 2019



Sumber: BKPM RI

Gambar diatas memperlihatkan pada tahun 2019 jumlah investasi yang masuk ke wilayah provinsi Banten menempati peringkat kelima dengan total investasi (PMA dan PMDN) sebesar 48,7 Triliun. Meskipun demikian nilai capaian realisasi investasi ditahun 2019 masih jauh dibawah target nasional yakni sebesar 75 Triliun atau pun target daerah 60,8 Triliun. Selain itu, dibandingkan dengan realisasi investasi ditahun sebelumnya, jumlah realisasi investasi tahun 2019 lebih rendah dibandingkan relasisasi investasi di tahun 2018 yang mencapai 56,52 Triliun.

Tabel 3.10 Realisasi Investasi di Provinsi Banten

Tahun	PMA	PMDN	Total
2015	34,32	10,71	45,03
2016	39,9	12,43	52,33
2017	40,68	15,14	55,82
2018	37,88	18,64	56,52
2019	28,02	20,7	48,72

Sumber: Dinas PTSP Provinsi Banten

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah adanya kecenderungan penurunan masuknya arus investasi akibat kejadian pandemi Covid 19. IMF memproyeksikan adanya pandemi covid-19 akan berpengaruh pada penurunan *ForeignDirect Investment*(FDI) sebesar 30-40%.

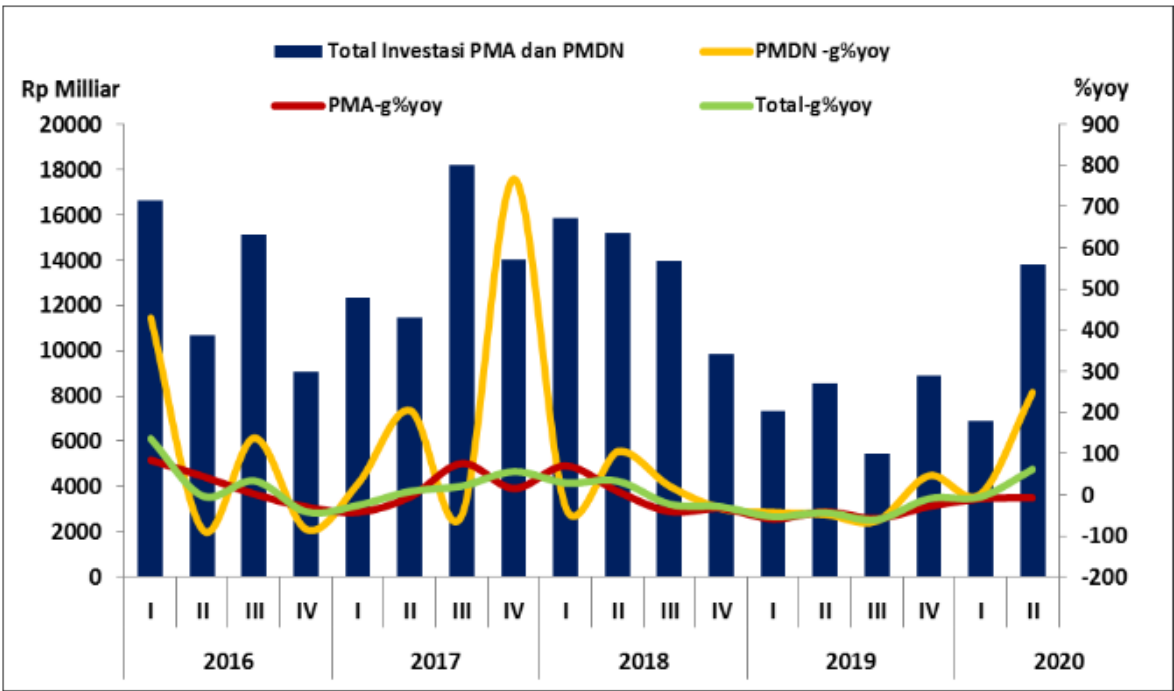
Proyeksi IMF terkait pengaruh pandemi Covid-19 terhadap investasi tercermin pada data realisasi investasi triwulan. Kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan PMTB di Provinsi Banten pada Triwulan II tahun 2020 tercatat tumbuh -2,63 (YoY) atau menurun dibandingkan dengan Triwulan I 2020 yang tercatat tumbuh sebesar 3,36% (YoY). Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Banten di Triwulan II juga menyumbang kontribusi negatif sebesar -0,87% (YoY). Investasi yang berlangsung di triwulan II 2020 antara lain didorong oleh sektor transportasi dan perdagangan, listrik gas dan air bersih serta real estate.

Dalam laporan Bank Indonesia Perwakilan Banten (Bulan Agustus) disebutkan bahwa data total penanaman modal yang tercatat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Provinsi Banten, pada triwulan II 2020 tercatat pertumbuhan sebesar 60,90% (YoY), membaik dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar -5,69% (YoY). Meningkatnya angka pertumbuhan investasi di Provinsi Banten terutama didorong oleh peningkatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 249,42% (YoY) dibandingkan triwulan I 2020 yang tumbuh 2,57% (YoY). Sementara itu penanaman Modal Asing (PMA) berkontraksi sebesar -7,95% (YoY), walaupun demikian pertumbuhan tersebut lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -10,27%.

Data realisasi penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada Triwulan II tahun 2020 Provinsi Banten menduduki peringkat empat tertinggi secara

nasional dalam hal PMDN dengan nominal 7,8 Trilyun. Peringkat tersebut meningkat dari periode sebelumnya yaitu berada di posisi keempat belas dengan nilai 2,27 Trilyun. Peringkat PMDN tertinggi ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 18,14 Trilyun, kedua Jawa Timur dengan nilai 12,13 trilyun dan Provinsi Jawa Barat di posisi ketiga dengan nilai 8,57 trilyun. Dari sisi penanaman modal asing pada triwulan II tahun 2020 menempati peringkat lima secara nasional dengan nilai nominal US\$ 412,22 juta, posisi tersebut meningkat dari triwulan sebelumnya yang berada di posisi sebelas. Untuk PMA, peringkat pertama ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai US\$ 847,57 juta dan posisi ketiga Jawa Timur dengan nilai US\$ 535,59 juta.

Gambar 3.7 Realisasi Investasi Triwulanan di Provinsi Banten

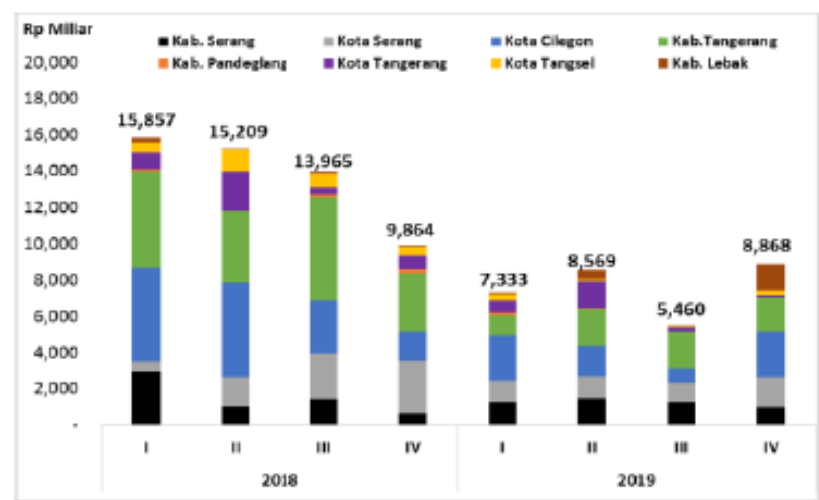


Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Banten (Laporan Bulan Agustus)

Berdasarkan distribusi spasial, sebaran investasi PMDN di wilayah Banten terbesar di Triwulan II tahun 2020 terdapat di Kota Cilegon dengan nilai mencapai 1.594,42 milyar (70% dari total PMDN) diikuti oleh Kabupaten Tangerang senilai 338,58 milyar (17%) dan Kota Tangerang Selatan senilai 144,70 milyar (6%). Dari sisi PMA, nominal investasi Triwulan II tahun 2020 terdapat di wilayah Kabupaten Tangerang dengan nilai mencapai US\$ 103,8 juta (32% dari total PMA triwulan II tahun 2020), diikuti oleh kabupaten Lebak dengan nilai US\$ 58,5 juta (18%) serta Kota

Serang dengan nilai US\$ 41,6% (13%). Secara lengkap, distribusi spasial realisasi investasi per triwulan disajikan gambar berikut ini:

Gambar 3.8 Distribusi spasial realisasi Investasi di Banten



Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Banten (Laporan Bulan Agustus)

Melihat gambar diatas, nampaknya permasalahan lainnya yang prlu mendapat perhatian adalah distribusi investasi di kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menangani urusan penanaman modal perlu membantu pemasaran daerah dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga dilirik investor. Selama ini investasi yang masuk ke wilayah Provinsi Banten lebih terkonstrasi di wilayah Banten Utara. Untuk itu, tersedianya jalan tol Serang-Panimbang yang memiliki peranan dalam peningkatan akses dan keterhubungan antara Banten Utara dan Selatan dapat dijadikan peluang agar investor mau menanamkan investasinya di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Upaya lebih intensif pemasaran daerah investasi di wilayah Lebak Pandeglang juga dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif adanya relokasi beberapa industri (terutama padat karya) dari wilayah Banten ke wilayah lainnya yang memiliki Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih rendah. Pada tahun 2020 Upah Minimum Kabupaten Lebak sebesar Rp2.710.654,00 dan Kabupaten Pandeglang Rp2.758.909,00. Nilai tersebut jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten Kota lainnya yang nilainya sudah diatas Rp4.000.000,00

Upaya ekstensifikasi investasi juga perlu dilakukan dengan lebih mengupayakan masuknya investor dalam bidang usaha yang selama ini

belum menjadi primadona investasi. Jika selama ini yang menjadi sasaran investasi di Provinsi Banten lebih mengarah pada sektor listrik, gas, dan air, transportasi, Pergudangan, dan telekomunikasi yang relatif sedikit penyerapan tenaga kerjanya. Peningkatan investasi pada sektor agribisnis merupakan alternatif bagi upaya percepatan penurunan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Berbagai Sub-sistem agribisnis mulai dari hulu (*up-streamagribusiness*), *on-farmagribusiness*, agribisnis hilir (*down-streamagribusiness*) serta Sub-sistem penyedia jasa agribisnis (*services foragribusiness*) jika direalisasikan akan banyak menyerap tenaga kerja. Untuk menarik investasi di sektor agribisnis, Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian berupa pembangunan sarana dan prasarana penunjang produksi (peningkatan penyediaan irigasi teknis), insentif pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha agribisnis, serta penyiapan SDM yang dibutuhkan pasar industri agribisnis.

Adanya penurunan nilai investasi pada tahun 2019 ke wilayah provinsi Banten tentu saja harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan berupaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan mempermudah perijinan. Program perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal melalui SIPEKA (Sistem Informasi Pelayanan Elektronik Terbuka) yang sudah terintegrasi dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) Sistem Informasi Geografis (SIG) Potensi Penanaman Modal diharapkan data perusahaan yang berada di database SIPEKA akan lebih memudahkan dalam pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Pengajuan izin secara daring, Asistensi/*chat online* antara petugas dan pemohon, serta unduh dokumen yang sudah ditandatangani secara elektronik dan mencetak secara mandiri merupakan keunggulan dari SIPEKA sebagai jawaban dari adanya Pandemi Covid-19 yang telah membatasi aktivitas manusia. Untuk itu, segala keunggulan dan kemudahan investasi karena SIPEKA harus terus disosialisasikan sehingga dapat lebih menarik minat investor karena meningkatkan *ease of doing business di Provinsi Banten*.

3. Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan

Adanya perlambatan ekonomi di triwulan I serta kontraksi di triwulan II (-7,40) dan berlanjut di Triwulan III (-5,77) berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Banten. Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, jumlah penduduk bekerja di Provinsi Banten pada periode februari 2020 mengalami penurunan sebanyak 54,6 ribu orang dibandingkan dengan periode Februari 2019 yaitu dari 5.676,2 ribu orang menjadi 5.621,6 ribu orang. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja sebanyak 31,2 ribu orang yaitu dari 6.142 ribu orang pada februari 2019 menjadi 6110,8 ribu orang. Pada bulan Februari 2020 jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 9.480 ribu orang sedangkan Februari 2019 tercatat sebanyak 9279,8 ribu orang atau mengalami peningkatan penduduk usia kerja sebanyak 200,3 ribu orang.

Peningkatan jumlah pengangguran di wilayah Provinsi Banten berlanjut pada data pengangguran bulan Agustus 2020. Menurut data BPS Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 10,64 persen atau sebanyak 661 ribu orang, yang berarti meningkat 2,53 persen poin atau bertambah sebanyak 171 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019. Peningkatan TPT tersebut seiring dengan menurunnya penduduk yang bekerja yakni sebanyak 5,55 juta orang, turun sebanyak 282 orang dari Agustus 2019. Adanya penurunan tersebut terutama Sektor Industri Pengolahan (3,35 persen poin), Administrasi Pemerintahan (0,88 persen poin), dan Jasa Pendidikan (0,35 persen poin) sementara untuk lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Perdagangan (1,81persen poin) dan Pertanian (1,77 persen poin).

Tabel 3.11. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Banten, Agustus 2018-Agustus 2020

Status KeadaanKetenagakerjaan	Agustus 2018 (juta orang)	Agustus 2019 (juta orang)	Agustus 2020 (juta orang)	Perubahan Ags 2018-Ags 2019		Perubahan Ags 2019-Ags 2020	
				(ribu orang)	(persen poin)	(ribu orang)	(persen poin)
PendudukUsiaK	9,28	9,46	9,63	179	1,93	170	1,80
Angkatan Kerja	5,84	6,04	6,21	196	3,36	170	2,83
Bekerja	5,35	5,55	5,55	201	1,03	-0,28	-
Pengangguran	0,49	0,48	0,66	-5	-0,15	171	1,69
Bukan Angkatan Kerja	3,44	3,42	3,42	-16	-0,88	-0,66	-
	persen	persen	persen		persen poin		persen poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,47	8,11	10,64		-0,36		2,53
Perkotaan	7,58	7,57	10,64		-0,01		3,06
Perdesaan	10,61	9,45	10,65		-1,16		1,19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,95	63,83	64,48		0,88		0,65
Laki-laki	80,85	81,73	81,70		0,88		-0,04
Perempuan	44,30	45,21	46,62		0,91		1,41

Sumber: BPS Provinsi Banten 2021

Data BPS Provinsi Banten sebagaimana disajikan pada tabel diatas juga memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam hal persentase pengangguran di wilayah perkotaan. Pada Agustus 2020 persentase pengangguran di wilayah perkotaan mencapai 10,64% atau meningkat sebesar 3,06% dibandingkan data Agustus 2019 yang mencapai 7,57. Hal ini menunjukkan bahwa akibat adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak penduduk yang kehilangan mata pencahariannya sehingga memaksa mereka untuk menjadi penganggur. Selain itu tingginya perubahan persentase pengangguran antara Agustus 2020 dengan Agustus 2019 di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaaan menunjukan bahwa pandemi Covid-19 lebih membawa dampak negatif di perkotaan.

Secara spesifik BPS Provinsi Banten (2020) menyebutkan bahwa pandemi covid-19 telah mengakibatkan 205,24 ribu penduduk Banten menjadi peganggur dengan rincaian165,39 ribu orang tersebar di wilayah perkotaan dan 39,85 ribu orang tersebar di wilayah perdesaan. Dalam surveynya, BPS Provinsi Banten membagi kelompok Penduduk usia kerja

yang terdampak Covid-19 menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Pada Tabel dibawah dapat dilihat bahwa dari penduduk usia kerja yang mencapai 9,63 juta, terdapat 1,84 juta orang yang terdampak Covid-19 atau 19,18 persen. Secara total, jumlah laki- laki yang terdampak Covid-19 lebih besar hampir 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Penduduk usia kerja yang terdampak di perkotaan sebesar 31,18 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan, yakni 6,74 persen.

Tabel 3.12. Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Banten, Agustus 2020

JenisKelamin			Daerah		Total (ribu orang)
Komponen	Laki-Laki (ribu orang)	Perempua n (ribu orang)	Perkotaa n (ribu orang)	Perdesaan (ribu orang)	
Pengangguran ² Karena Covid-	133,97	71,27	165,39	39,85	205,2
Bukan Angkatan Kerja (BAK) ³	9,12	19,47	22,77	5,82	28,59
Karena Covid-19					
SementaraTidakBekerja Karena Covid-19	74,24	29,31	82,63	20,92	103,55
PendudukBekerja yang MengalamiPengurangan Jam Kerja Karena Covid-19	1.004,66	506,18	1.258,81	252,03	1.510,83
Total	1.221,99	626,22	1.529,59	318,62	1.848,
PendudukUsiaKerja (PUK)	6.949,41	2.686,65	4.905,76	4.730,30	9.636,06
Persentaseterhadap PUK	17,58	23,31	31,18	6,74	19,18

Sumber: *Sumber: BPS Provinsi Banten 2020*

Keterangan:

1. Penghitungan dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS 2015
2. Pengangguran karena Covid-19 adalah pengangguran yang berhenti bekerja karena Covid selama bulan Februari-Agustus2020
3. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 selamabulan Februari-Agustus2020

Berdasarkan distribusi persentase pengangguran agustus 2020, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan pesentase pengangguran terbesar

yakni 13,06, kemudian kedua Kota Cilegon (12,69%) serta Kabupaten Serang dengan persentase TPT mencapai 12,22%. Secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Perbandingan Tingkat Pengangguran terbuka Banten dengan Capaian Wilayah yang Setara (persentase dan Jumlah)

Provinsi	2019		2020	
	persentase	jumlah	persentase	Jumlah
Banten	8,11	490.000 orang	10,64	661.000 orang
DKI Jakarta	6,2	339.402 orang	10,95	572.780 orang
Jawa Barat	8,04	1,93 juta jiwa	10,46	2,53 juta jiwa

Tingkat pengangguran Provinsi Banten pada wilayah setara menduduki peringkat tertinggi dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat. Persoalan ini menjadi kendala besar di Banten dalam mengatasi tingkat pengangguran Terbuka yang selalu tinggi.

Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen) Agustus 2018–Agustus 2020

Kab/Kota	Agustus 2018	Agustus 2019	Agustus 2020	Perubahan Ags 2018-Ags 2019	Perubahan Ags 2019-Ags 2020
Pandeglang	8,19	8,67	9,15	0,48	0,48
Lebak	7,57	7,96	9,63	0,39	1,67
Tangerang	9,63	8,92	13,06	-0,71	4,14
Serang	12,63	10,58	12,22	-2,04	1,64
Kota Tangerang	7,39	7,14	8,63	-0,25	1,50
Kota Cilegon	9,21	9,64	12,69	0,44	3,05
Kota Serang	8,10	8,07	9,26	-0,04	1,19
Kota Tangsel	4,67	4,78	8,48	0,10	3,70
Total	8,47	8,11	10,64	-0,36	2,53

Sumber: BPS 2020

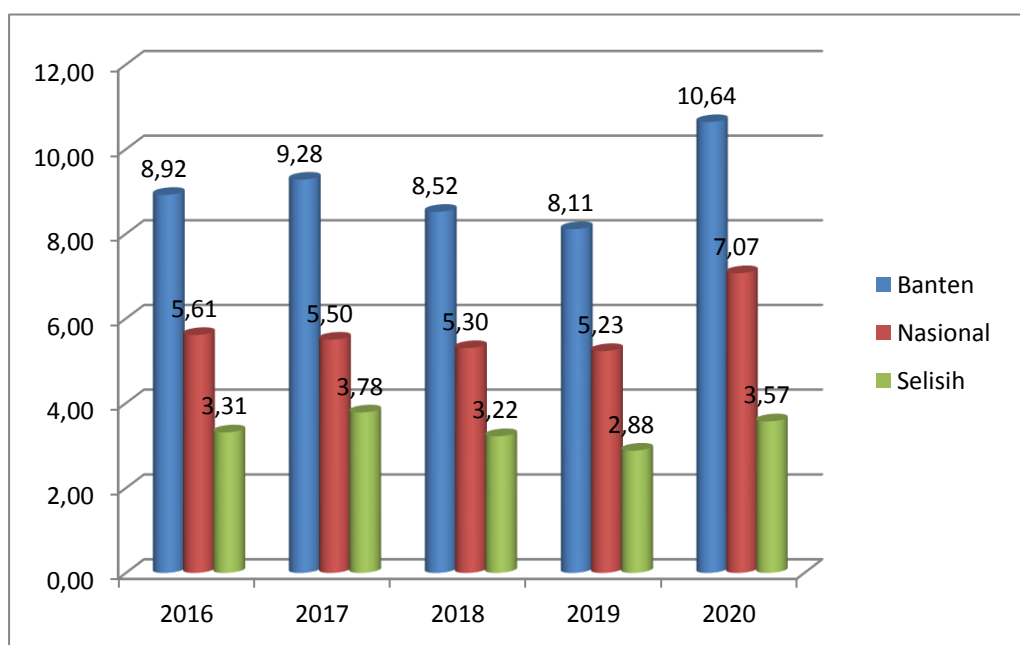
Tabel diatas juga memperlihatkan perubahan persentase pengangguran yang paling besar yakni 4,14 persen (YoY) terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, kedua dialami oleh Kota Tangsel (3,70) dan berikutnya Kota Cilegon senilai 3,05%. Gambaran tersebut menunjukan fokus penanganan pengangguran di wilayah provinsi Banten harus difokuskan pada upaya pemulihan pasca kebijakan perumahan atau pun pemutusan hubungan

kerja dari perusahaan industri atau pun jasa terutama yang berlokasi di wilayah Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Tangrang Selatan.

Pengentasan pengangguran dalam perencanaan pembangunan diarahkan pada upaya pencapaian indikator pembangunan baik lingkup nasional atau pun daerah. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024, target indikator TPT untuk Provinsi Banten ditetapkan sebesar 7,80% di tahun 2021 dan 7,70% di tahun 2022. Sementara itu dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten (revisi) target TPT ditetapkan sebesar 8,03% (tahun 2021) dan 7,84% (tahun 2022). Meski demikian penetapan target TPT dalam dua dokumen perencanaan tersebut ditetapkan sebelum adanya kejadian Pandemi Covid-19. Karena itu perlu penyesuaian proyeksi mengingat Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai bidang (tidak hanya kesehatan) termasuk bidang perekonomian yang berimplikasi pada peningkatan pengangguran.

Dalam laporan IMF (Agustus 2020) proyeksi TPT di Indonesia akibat merebaknya pandemi Covid-19 mencapai 8,0% di tahun 2020 dan menurun menjadi 6,8% di tahun 2021. Optimisme penurunan TPT di tahun 2021 dilandasi akan keyakinan Reboundnya kondisi perekonomian setelah terpuruk di tahun 2020. Kembali bergerakaknya sektor industri dan jasa diharapkan akan membawa dampak pada penyerapan angkatan kerja meskipun kondisinya sangat tergantung dari efektivitas dan distribusi vaksinasi. Proyeksi lainnya terkait angka TPT nasional tersaji dalam dokumen RKP 2021 yang menyebutkan bahwa outlook TPT tahun 2020 diperkirakan dalam rentang 8,1 – 9,2 (tahun 2020) dan proyeksi TPT tahun 2021 pada angka 7,7 – 9,1.

Gambar 3.9. Persentase TPT Bulan Agustus Provinsi Banten dan Nasional



Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa selama lima tahun terakhir TPT provinsi Banten selalu berada diatas nilai TPT nasional dengan selisih rata-rata mencapai 3,3%. Oleh karena itu, mengacu pada proyeksi IMF dan RKP 2021 maka untuk proyeksi TPT provinsi Banten di tahun 2021 mencapai 9,7-10,2 dan 9,2 – 9,7 di tahun 2022.

Tabel.3.15. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka 2022

Wilayah	Realisasi Agustus 2020	Outlook 2021			Proyeksi 2022
		IMF	RKP	RKPD	
Banten	10,64			9,7-10,2	9,7-9,2*
Nasional	7,07	6,8	7,7 – 9,1		

*hasil hitungan Bappeda dan arahan Bappenas pada Kick off meeting RKP 2022

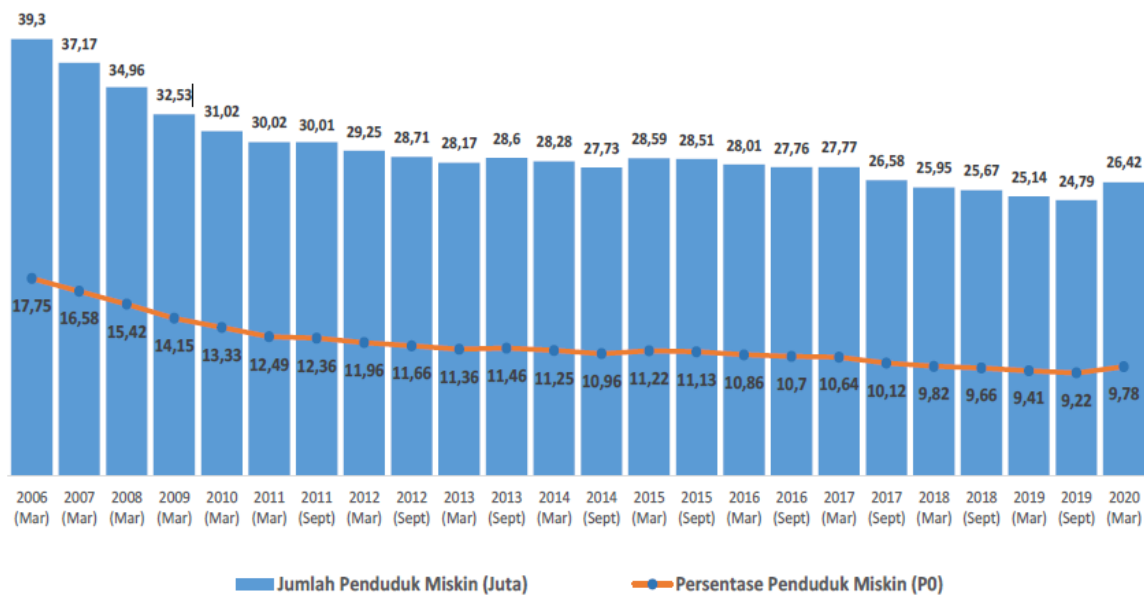
Besarnya tingkat pengangguran di wilayah provinsi Banten memerlukan perhatian semua pihak tidak sebatas Perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan atau pun urusan Perindustrian. Upaya pengentasan permasalahan pengangguran di provinsi Banten memerlukan koordinasi multistakeholder yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan masing masing Perangkat Daerah. Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya baik industri pengolahan maupun lainnya, perlu juga dilakukan upaya kegiatan program padat karya yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang tidak memerlukan spesifikasi keahlian khusus. Hal

lainnya yang perlu dilakukan adalah menumbuhkembangkan minat usaha dikalangan masyarakat sehingga jumlah dan kualitas usaha mikro dan kecil di wilayah provinsi Banten pasca pandemi Covid-19 bisa lebih meningkat.

4. Kondisi dan Proyeksi Kemiskinan

Pandemi Covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 juga turut mempengaruhi persentase kemiskinan baik ditingkat nasional maupun daerah. Badan pusat statistik menyebutkan bahwa data persentase kemiskinan beberapa tahun kebelakangmenunjukkan tren penurunan sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.10.Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Nasional
Periode Maret 2006–Maret 2020



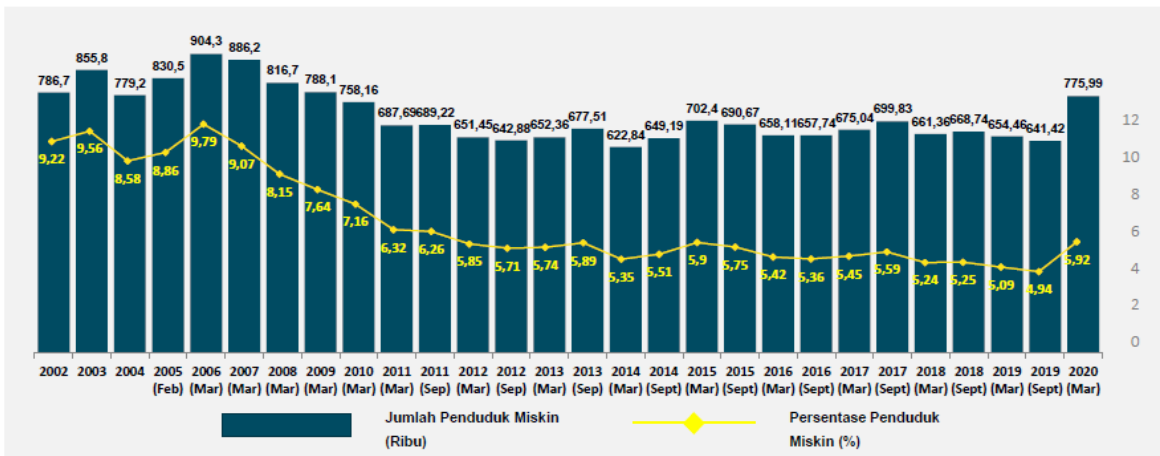
Sumber: BPS 2020

Gambar diatasmenunjukkan bahwa sejak Maret 2006 persentase kemiskinan selalu menunjukkan penurunan kecuali pada September 2013 (meningkat menjadi 11,46 dibandingkan Maret 2013 sebesar 11,36) dan Maret2015 (11,22 dari sebelumnya September 2014 sebesar 10,96). Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai dampak keaikan harga minyak dunia. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, kejadian Pandemi Covid-19 menyebabkan Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat 1,63 juta orang. Sementara jika dibandingkan

dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

Peningkatan persentase penduduk miskin akibat Pandemi Covid-19 juga terjadi di wilayah provinsi Banten. Menurut BPS Provinsi Banten, Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,98 poin (dari posisi 4,94 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 4,00 menjadi 5,03 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,31 pada September 2019 menjadi 8,18 pada Maret 2020. Sejalan dengan peningkatan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 134,60 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada bulan Maret 2020

Gambar 3.11. Jumlah dan Persentase Kemiskinan di Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten 2020

Melihat pebandingan data kemiskinan antara nasional dengan Provinsi Banten, secara persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Banten selalu lebih rendah. Meski demikian adanya peningkatan yang cukup besar setelah Pandemi Covid-19 tingat kemiskinan ini harus menjadi perhatian. Disisi lain membandingkan antara target tingkat kemiskinan sebagaimana tertuang pada dokumen perencanaan baik daerah maupun nasional dengan

data Maret 2020 nampaknya perlu upaya keras agar target pembangunan tersebut dapat tercapai.

Tabel.3.16.Perbandingan pertumbuhan penduduk miskin daerah dengan wilayah yang setara (persentase dan Jumlah)

Provinsi	2019		2020	
	jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Banten	641.420 ribu orang	4,94%	857.640 ribu	6,63%
DKI Jakarta	663.355 ribu orang	3,42%	680.401 ribu orang	4,53%
Jawa Barat	3.38 jutajiwa	6,82%	4,19 jutajiwa	8,43%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel diatas menggambarkan bahwa terjadi kenaikan di semua provinsi pada jumlah penduduk miskin akibat Covid

Tabel 3.17. Realisasi dan Proyeksi Persentase Kemiskinan Nasional dan Banten

Wilayah	2020		2021	2022	
		Realisasi Maret		RPJMD	Proyeksi
Nasional	9,7 –10,2	9,78	9,2 –9,7		
Banten	5,12	5,92	5,06	5	4,99 – 5,4

*Hasil Olahan Bappeda

Pada wilayah yang setara jika kita membandingkan dengan DKI Jakarta dan jawa Barat, kenaikan Penduduk miskin kita naik di kisaran 2%, sama dengan Jawa Barat jumlah penduduk miskinnya meningkat 2%. Hal ini tetap menjadi perhatian serius Provinsi Banten dalam menangani penduduk miskin baru akibat dampak ekonomi dari covid 19.

Melihat komoditas penyebab kemiskinan di Provinsi Banten, pada Maret 2020 beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan baik di perkotaan (17,57%) maupun di perdesaan (21,52%). Komoditi makanan lainnya penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah rokok kretek filter (15,23%), daging ayam ras (4,18%), telur ayam ras (4,13%), dan mie instan (2,39%). Sedangkan di daerah perdesaan, empat komoditi makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan secara berturut- turut adalah rokok kretek filter (16,64%), telur ayam ras (3,46%), roti (2,85%) serta daging ayam ras sebesar 2,49%.Sementara komoditi non

makanan pemberi sumbangan terbesar untuk Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan sama. Kelima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan di perkotaan adalah biaya perumahan (9,64%), bensin (4,38%), listrik (3,88%), pendidikan (1,59%) dan perlengkapan mandi (1,27%). Di perdesaan lima komoditi non makanan penyumbang Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (10,69%), bensin (2,24%), listrik (1,68%), biaya pendidikan (1,32%) dan perlengkapan mandi sebesar 1,13%.

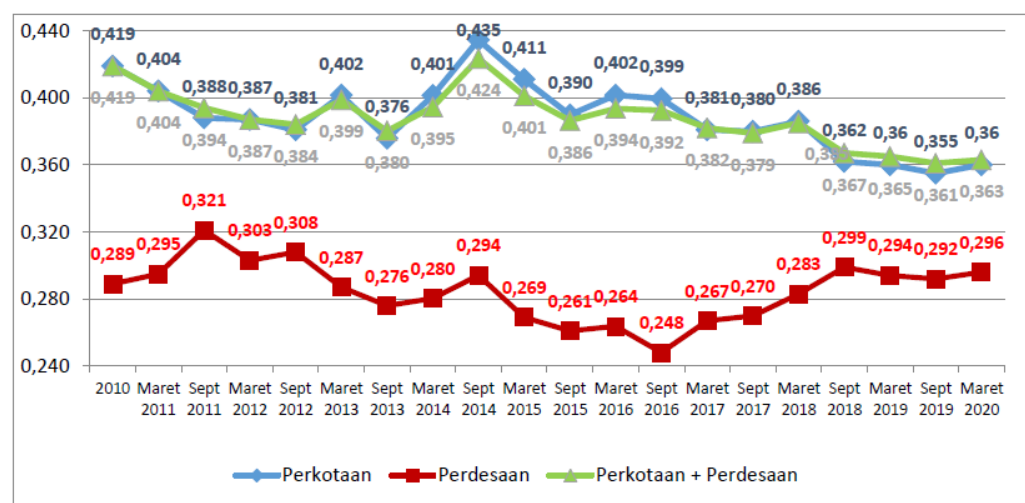
Upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan pendekatan penyediaan komoditas dapat dilakukan dengan penyediaan ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas penyebab kemiskinan baik di wilayah Perkotaan atau pun perdesaan. Melihat beberapa komoditas penyebab kemiskinan seperti halnya beras, daging ayam dan telur merupakan beberapa komoditas yang sangat dimungkinkan untuk dibudidayakan di lingkungan masyarakat. Untuk itu perlu keberpihakan pemerintah daerah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat menumbuhkembangkan minat masyarakat budidaya komoditas tersebut.

Kebijakan lainnya yang merupakan kelanjutan dari kebijakan ditahun sebelumnya berupa kehadiran BUMD agrobisnis untuk mendekatkan produsen kepada konsumen diharapkan dapat menjawab permasalahan tingginya harga yang disebabkan panjangnya rantai pasok komoditas tersebut. Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah peningkatan jumlah penerima Bansos Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) yang pelaksanaan dirasakan cukup efektif dalam pengentasan kemiskinan sebelum masa pandemi.

5. Kondisi dan Proyeksi Indek Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pengeluaran penduduk. Pada tahun 2010 GiniRatio Banten tercatat sebesar 0,419. Angka ini terus bergerak turun hingga September 2012 yaitu sebesar 0,384. Pada September 2014 nilai GiniRatio mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 0,424. Kemudian pada periode Maret 2015 - Maret 2020 nilai Gini Ratio menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai angka 0,363. Secara lengkap disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.12. Perkembangan Gini Rasio Provinsi Banten



Sumber: BPS Provinsi Banten

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa Gini Rasio di perkotaan di wilayah Provinsi Banten selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Gini Rasio di wilayah perdesaan. Meski demikian dalam hal tren yang ada, terlihat bahwa mulai tahun 2016 terjadi tren peningkatan gini rasio di wilayah perdesaan. Pada Bulan Sepetember 2016 gini rasio dilayah perdesaan hanya 0,248 meningkat menjadi 0,296 di Bulan Maret 2020. Hal ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan pendapatan antar penduduk yang ada diwilayah perdesaan. Untuk itu Pemerintah Provinsi Banten beserta pemerintah Kabupaten perlu memberikan rekomendasi kebijakan bagi proses pembangunan desa sehingga proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan Pemerintahan Desa dapat menekan terjadi *tren* peningkatan ketimpangan tersebut. Selain itu, kebijakan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang selama ini dilaksanakan perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penghasilan rendah. Skema padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur, revitalisasi fasilitas umum yang ada di desa ataupun objek wisata di desa merupakan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan untuk penurunan ketimpangan pendapatan di desa.

Selain tren peningkatan distribusi pendapatan di wilayah perdesaan, hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah peningkatan Gini Rasio pada bulan Maret 2020 dibandingkan September 2019. Menurut BPS Provinsi Banten, nilai Gini Ratio provinsi Banten pada bulan Maret 2020 sebesar 0,363 meningkat dibandingkan dengan bulan September 2019 yakni 0,361. Meskipun belum dapat dipastikan kenaikan tersebut ada

hubungannya dengan kejadian Pandemi Covid-19, namun adanya kebijakan PHK dari beberapa industri yang ada di wilayah provinsi Banten dapat mendorong peningkatan gini rasio di periode berikutnya.

Melihat dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, realisasi Gini rasio provinsi Banten pada Maret 2020 sebetulnya lebih rendah nilai gini rasio yang menjadi target di tahun 2020. Dalam dokumen RPJMD, nilai gini rasio ditetapkan sebesar 0,370 di tahun 2020 dan menurun menjadi 0,365 di tahun 2021.

Tabel.3.18 . Perbandingan Indeks gini dengan wilayah yang setara

Provinsi	2019	2020
Banten	0,365	0,363
DKI Jakarta	0,394	0,399
Jawa Barat	0,402	0,403
Nasional	0,382	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik

Melihat gambaran indeks gini Provinsi Banten dengan wilayah setara DKI Jakarta dan Jawa Barat, kondisi indeks gini Banten masih lebih baik dibanding dua provinsi lainnya. Kondisi ini harus bisa kita pertahankan dan perlu upaya untuk menurunkan kembali gini rasio terutama ketimpangan wilayah banten utara dan selatan

Tabel 3.19. Target dan Proyeksi Gini Rasio di Provinsi Banten

Index gini	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target RPJMD	0,40	0,390	0,390	0,390	0,370	0,365	0,360
Index Gini Banten	0,39	0,38	0,37	0,365	0,363	0,374*	0,370*

Sumber : BPS Banten

*angka proyeksi Bappeda Banten

Berdasarkan tabel di atas, gini rasio provinsi Banten di proyeksikan dapat mencapai 0,374 ditahun 2021 dan menurun menjadi 0,370 ditahun 2022. Untuk itu diperlukan kebijakan perencanaan penganggaran dengan sasaran kelompok pendapatan yang rendah. Mengingat gambaran peningkatan gini rasio seiring dengan peningkatan tingkat kemiskinan maka pendekatan kebijakan yang dapat dilakukan berupa kelanjutan program Bansos Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu), kelanjutan program bantuan langsung tunai akibat Pandemi Covid-19 serta pemberian stimulan bagi usaha mikro di masyarakat disertai peningkatan efektivitas

kelompok sasaran penerimanya merupakan jawaban untuk meminimalisasi tren peningkatan ketimpangan yang ada.

6. Kondisi dan Proyeksi Inflasi

Inflasi di Provinsi Banten dipantau di 3 Kota Besar yaitu Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Serang. Berdasarkan Rilis BPS pada November 2020 terjadi inflasi Oktober sebesar 0,11 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,23.

Tabel 3.20. Angka IHK dan Tingkat Inflasi Provinsi Banten

IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 3 Kota IHK Provinsi Banten Oktober 2020, Tahun Kalender 2020, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Oktober 2019	IHK Desember 2019	IHK Oktober 2020	Tingkat Inflasi Oktober 2020 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi Oktober 2020 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	103,60	104,10	105,23	0,11	1,09	1,57	0,11
Makanan, Minuman, dan Tembakau	102,63	104,10	104,99	0,29	0,85	2,30	0,08
Pakaian dan Alas Kaki	102,84	103,00	105,05	0,24	1,99	2,15	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	104,74	105,02	105,14	-0,04	0,11	0,38	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	106,23	106,66	108,57	0,13	1,79	2,20	0,01
Kesehatan	104,59	103,56	104,39	0,51	0,80	-0,19	0,01
Transportasi	103,80	103,98	103,19	-0,04	-0,76	-0,59	0,00
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	93,61	92,58	92,00	0,02	-0,63	-1,71	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,17	106,26	107,12	-0,52	0,81	2,83	-0,01
Pendidikan	106,37	106,37	107,05	0,05	0,65	0,65	0,00
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	103,65	103,70	105,42	0,24	1,66	1,71	0,02
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	106,74	107,18	118,13	-0,02	10,21	10,67	0,00

¹⁾ Persentase perubahan IHK Oktober 2020 terhadap IHK September 2020.

²⁾ Persentase perubahan IHK Oktober 2020 terhadap IHK Desember 2019.

³⁾ Persentase perubahan IHK Oktober 2020 terhadap IHK Oktober 2019.

Sumber: BPS Provinsi Banten rilis November 2020

Menurut tabel diatas sumbangan inflasi terbesar ada pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi, yaitu: kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,01 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar kurang dari 0,01 persen. Tingkat inflasi tahun

kalender Oktober 2020 sebesar 1,09 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2020 terhadap Oktober 2019) sebesar 1,57 persen. Kondisi inflasi pada tahun 2020 ini banyak disebabkan oleh situasi pandemic sehingga nilai inflasi Bulan Oktober 2020 lebih kecil dibandingkan Oktober 2019. Jika kita analisa lebih jauh sebenarnya inflasi menunjukkan adanya permintaan konsumen terhadap barang yang diproduksi, sehingga dengan pandemic ini banyak masyarakat menahan uang dan menahan belanja barang dan jasa yang berhubungan dengan aktivitas luar ruangan dilihat dari kelompok yang mengalami deflasi seperti transportasi, rekreasi dan perumahan.

Di tingkat provinsi terdapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang beranggotakan lembaga-lembaga pemangku kepentingan yaitu Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya. Firdausy (2016) membagi fungsi TPID dalam mengendalikan inflasi. Tantangan yang akandirasakan di Tahun 2022 adalah bagaimana mengembalikan permintaant dan daya beli masyarakat akan sektor yang mengalami deflasi setelah berlalunya wabah Covid 19. Untuk Barang yang mengalami Inflasi seperti bahan makanan, minuman dan tembakau perlu di kendalikan agar terjaga pasokannya. Salah satu kunci dalam menjaga inflasi adalah keberimbangan pasar menjaga keberimbangan dan kelancaran mekanisme pertemuan demand (daya beli masyarakat) dan supply (pasokan)

Tabel.3.21.Target dan Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2020-2022 (%)

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
Nasional	3,13	2,72			
Target RPJMD	3,7	4,2	3.7	3.7	3.7
Banten	3,42	3,3	2.85-3.2*	2.85-3.8*	3.4-4*

Keterangan:
 Sumber, BPS Provinsi Banten
 *adalah angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten

Proyeksi kondisi ekonomi khususnya inflasi di Provinsi Banten pada Tahun 2022 menunjukkan kondisi optimis dimana setelah pandemic sektor yang tadinya deflasi seperti transportasi, Perumahan, rekreasi dan olahraga

akan menunjukkan nilai positif kembali dengan banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan kembali.

7. Kondisi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten secara konsisten mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir yang kita bisa lihat dari grafik dibawah ini.

Gambar.3.13.Capaian IPM Provinsi Banten



Sumber :BPS Provinsi Banten

Namun pertumbuhan IPM belum mencapai angka yang diharapkan pada target RPJMD IPM 2020 72,75 sedangkan rilis BPS IPM ditahun 2020 72,45. Pandemi covid memukul Komponen IPM pada Pengeluaran perkapita sehingga target RPJMD menjadi tidak tercapai. Hal tersebut bisa kita rinci lagi dari 8 kabupaten/Kota di Provinsi Banten ada dua daerah yang mengalami pelambatan pertumbuhan yaitu Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, juga Kota Cilegon yang tidak mengalami pertumbuhan alias stagnan.bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.22. Rata-Rata Pertumbuhan IPM Kab/Kota Di Provinsi Banten

Kab/Kota	IPM	pertumbuhan

	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pandeglang	64.34	64.91	65.00	0.81	0.89	0.14
Lebak	63.37	63.88	63.91	0.67	0.8	0.05
Kab.Tangerang	71.59	71.93	71.92	0.87	0.47	-0.01
Kab.serang	65.93	66.38	66.70	0.50	0.68	0.48
Kota Tangerang	78.25	78.43	78.25	1.18	0.65	-0,23
Kota Cilegon	77.92	73.01	73.05	0.50	0.5	0.05
Kota Serang	72.65	72.10	72.16	0.52	0.59	0.08
Kota Tangsel	71,68	81.4	81.36	0.41	0.38	-0.15
Provinsi Banten	71,.95	72.44	72.45	0,74	0,68	0,014

Sumber : BPS Banten (Publikasi IPM, 2021)

Dari gambaran tersebut tantangan untuk menaikkan IPM yang bisa kita tangkap adalah dengan meningkatkan HLS (Harapan Lama sekolah), karena jika HLS tinggi maka capaian RLS akan turut pula meningkat. Pertumbuhan pada tahun 2020 kurang begitu baik akibat pandemi Covid, beberapa minus pertumbuhannya dan beberapa kenaikannya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.23. Capaian dan Target IPM Provinsi Banten
Tahun 2018-2021

INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022*
Nasional	71,39	71,92	72,51	73,19 – 73,26	
Target RPJMD	71,77	72,20	72,75	73,21	73,68
Angka Proyeksi Banten	71,95	72,44	72,80*	73,30*	72,60-73,68*

*Hasil olahan Bappeda
Sumber : BPS Provinsi Banten

Tabel.3.24. Capaian dan target Indikator IPM per komponen (AHH, RLS, HLS)
Provinsi Banten

Indikator IPM	2019	2020	2021*	2022*

AHH	69,84	69,96	69,98	70,01
HLS	12,88	12,89	12,92	12,94
RLS	8,74	8,89	8,91	9,01
PengeluaranPerkapita	12,267	11,964	11,984	12,2

Sumber: data BPS Provinsi Banten
*Hasil Olahan Bappeda

Tabel.3.25 Perbandingan dengan wilayah setara dan Nasional

Indikator IPM	AHH		HLS		RLS		PengeluaranPerkapita (ribu rupiah)		Pertumbuhan (%)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
Nasional	71,34	7,47	12,95	12,98	8,34	8,48	11.299	11.013	0,03
Banten	69,84	69,96	12,88	12,89	8,74	8,89	12,267	11,964	0,01
Jakarta	72,79	72,91	12,97	12,98	11,06	11,13	18,527	18,227	0,01
Jawa Barat	72,85	73,04	12,48	12,50	8,37	8,55	11.152	10.845	0,08

Sumber: Data BPS tahun 2020

Tabel target proyeksi IPM tahun 2022 sebesar 72,60-73,68 dikarenakan telah selesainya target Program dalam rangka penambahan Ruang kelas baru dan Unit sekolah Baru yang diharapkan mampu mengakselerasi tingka IPM dimana Pemerintah Provinsi Banten berharap kemudahan akses sekolah bisa mempercepat kenaikan HLS dan RLS, namun tantangan tahun 2022 juga ada pada angka harapan hidup dimana wabah Covid19 memperburuk jumlah angka kematian.

3.1.4. Prospek Dan Arah Kebijakan Perekonomian Provinsi Banten

Berdasarkan indicator makro ekonomi yang ada dengan beberapa prospek dan tantangan yang terjadi pada kondisi ekonomi saat ini, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Banten dari sisi Konsumsi dan Produksi sebagai berikut;

Arah kebijakan untuk mencapai LPE dari sisi Konsumsi:

- Mendorong tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat pasca pandemic covid harus di dorong untuk pemulihan ekonomi, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan langkah langkah:
 - Melanjutkan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan social
 - Mempercepat bantuan UMKM untuk keberlangsungan usaha

- Peningkatan efektivitas penyaluran Dana Desa dari Provinsi
Serta Dana Desa yang bersumber dari APBN
2. Optimalisasi belanja pemerintah, belanja pemerintah di optimalkan dengan mendukung program prioritas Daerah dan Program Prioritas Nasional yang langsung berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.
 4. Menjaga kelancaran proyek investasi agar berjalan sesuai rencana dan menjaga hubungan baik dengan investor.
 5. Penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan hubungan industrial antara pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat.
 6. Peningkatan Investasi melalui ekstensifikasi kawasan Industri baru di jalan Tol Serang-Panimbang
 7. Inovasi teknologi untuk peningkatan nilai tambah komoditas yang dihasilkan masyarakat.

Arah kebijakan untuk mencapai LPE dari sisi Produksi:

1. Melakukan pengembangan potensi ekonomi di sekitar Proyek Strategis Nasional di Banten
2. Penciptaan dan Pengembangan UMKM Go Digital melalui Link and Match antara pelaku UMKM dan E-Commerce
3. Mendorong sector ekonomi utama di Banten untuk menaikkan angka produksinya(Industri, Pertanian, konstruksi, Perdagangan)
4. Pengembangan kawasan strategis pariwisata Banten sebagai alternatif mengurangi pengangguran
5. Pengembangan perdagangan melalui sentra logistic dan distribusi untuk pengendalian inflasi daerah.
6. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi, kedelai, cabe dan bawang merah;
7. Optimalisasi BUMD Agro dan Pembangunan Food estate dengan pendekatan corporate farming dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbasis produk pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor unggulan Banten;
8. Revitalisasi pelabuhan dan Pembangunan Fish estate dalam rangka Peningkatan sector Perikanan
9. Mendorong ekonomi kreatif dan ekowisata dalam rangka pemulihan ekonomi

III. 2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk Mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD yang dijadi-kandasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Selanjutnya arah kebijakanPengelolaan Daerah. Pnerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebutdalamStruktur APBD meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui Sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandiakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerahdalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- 1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi meliputi pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing
- 2) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- 3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerjasama daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) pendapatanbunga;
 - g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h) penerimaankomisi, potongan, ataubentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) pendapatan denda pajak daerah;
 - l) pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) pendapatan dari pengembalian;

- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Banten berasal dari transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

1) dana perimbangan berupa transfer umum dan transfer khusus.

a) Transfer Umum

Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil.

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Dana bagi hasil (DBH) berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

b) Transfer Khusus

Transfer Khusus berupa Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik).

2) dana insentif daerah

Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Banten meliputi:

1) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TA 2022

NO	JENIS PAJAK	PERDA APBD 2021	RPJMD 2022	Rancangan target pendapatan 2022
1	2			3
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.246.729.223.619	8.295.983.510.000	7.149.004.025.006
1	Pajak Daerah	6.746.237.282.55	7.983.429.510.000	6.823.338.000.000
1a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			3.391.550.000.000
1b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)			1.934.126.000.000
1c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)			760.120.000.000
1d	Pajak Air Permukaan			37.349.000.000
1e	Pajak Rokok			700.193.000.000
2	Retribusi Daerah	12.036.262.100	21.961.370.000	12.100.000.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	52.966.089.040	54.648.470.000	52.966.089.040
4	Lain-lain PAD Yang SAH	435.489.589.924	235.944.160.000	260.599.933.924
II	Pendapatan Transfer	4.380.202.717.000	4.491.359.850.000	4.231.050.154.000
III	Lain-lain pendapatan daerah yan SAH	6.2000.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000
	PENDAPATAN DAERAH	11.633.131.940.619	12.793.543.360.000	11.386.254.179.006

Sumber: hasil olahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten

Berdasarkan data pada tabel Proyeksi anggaran pendapatan diketahui bahwa target pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 7.149.004.025.006 (tujuh triliun seratus empat puluh sembilan milyar empat juta dua puluh lima ribu enam rupiah) hal ini tidak sesuai dengan target RPJMD 2017-2022 sebesar Rp 8.295.983.510.000,-(delapan triliun dua ratus Sembilan puluh lima milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 1.146.979.487.036-, (satu triliun seratus empat puluh enam milyar Sembilan ratus tujuh puluh

Sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga enam rupiah) yang terdiri dari komponen Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak air permukaan dan pajak rokok. Kendala-kendala yang dihadapi dari penurunan pendapatan ini adalah kejadian merebaknya Covid 19 sehingga pembayaran pajak daerah sangat tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, selain itu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekunder mengalami penurunan yang sangat drastic berakibat pada penurunan daya bayar, dikarenakan pendapatan masyarakat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya, sehingga tingkat transaksi pembelian kendaraan mengalami penurunan yang signifikan. Selain hal tersebut beberapa perusahaan mengalami kerugian sehingga banyak perusahaan yang menutup kegiatan operasional akibatnya perusahaan yang menyumbang penerimaan pajak air permukaan mengalami penurunan.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan daerah beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten :

1. Optimalisasi pungutan PAD melalui : a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah; b. Ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru; c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak; d. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (kemiskinan, pengangguran dan pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.
5. Inovasi pelayanan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah

6. Penghapusan Denda dan bebas biaya balik nama untuk kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan

3.2.2. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, dalam bentuk Program/Kegiatan Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Nomenklatur Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Klasifikasi Belanja Daerah menurut PP 12 Tahun 2019 pasal 55 terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

1. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

a. belanja pegawai;

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi tersebut diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Banten memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja barang dan jasa;

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja bunga;

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja hibah;

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2022 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, pondok pesantren, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan. Usulan belanja hibah secara rinci tertuang didalam rencana kerja perangkat daerah.

e. Belanja bantuan sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2022 yaitu perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Jamsos Ratu.

f. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD atau badan usaha milik Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau di masyarakat.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

3. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2019 dan tahun 2020 dikeluarkan untuk mengatasi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa seperti penanganan pandemic covid 19 di tahun 2020;

4. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

- a. Belanja Bagi Hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bantuan keuangan Provinsi Banten terdiri atas bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa.

Tabel 3.27.PENDAPATAN DAN BELANJA WAJIB,BELANJA MENGIKAT DAN MANDATORY SPENDING TA 2022

No	Uraian	RPJMD 2022	Pagu Indikatif RKPD 2022
1	Pendapatan	12.793.543.360.000	11.451.333.109.839
2	Belanja	13.305.715.000.000	11.845.833.109.839
	a. Belanja Operasi	7.892.315.230.250	4.706.105.680.789
	1) Belanja Pegawai	3.000.994.570.250	2.081.694.069.050
	2) Belanja Bunga		1.530.000.000
	3) Belanja Hibah (BOS)	2.280.418.830.000	2.327.906.960.000
	b. Belanja Transfer (BHPP)	3.549.399.769.750	2.638.596.400.000
	c. Belanja Tidak Terduga	64.000.000.000	90.000.000.000

SUMBER: hasil olahan BPKAD dan BAPENDA

Sesuai table diatas, untuk belanja operasi tidak sesuai dengan target belanja RPJMD, hal ini disebabkan tahun 2020 target dan realisasi pendapatan mengalami penurunan yang signifikan akibat adanya pandemic covid -19, sehingga proyeksi belanja tahun 2022 mengalami penyesuaian dengan target dan capaian pendapatan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah.

3.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan.Penerimaan Pembiayaan daerah Provinsi Banten bersumber dari SiLPA dan penerimaan Pinjaman Daerah.Selanjutnya Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok pinjaman (utang) yang jatuh tempo dan penyertaan modal daerah, serta pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman daerah dimana semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten melakukan kesepakatan dengan PT.SMI untuk Pinjaman daerah pada 15 September 2020 senilai 4,13 Triliun yang disalurkan selama dua tahun yaitu pada anggaran 2020 perubahan dan anggaran 2021 Murni, namun seiring kondisi sampai awal pertengahan tahun 2021, Pemerintah Provinsi banten masih belum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak pinjaman daerah tersebut karena adanya perubahan kebijakan dari Kementerian keuangan yang mengenakan bunga pinjaman. Pinjaman tersebut awalnya akan diarahkan pada pemulihan ekonomi dan pencapaian target RPJMD 2017-2022.

Proyeksi Pembiayaan Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.28
PROYEKSI ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022

KOD E	URAIAN	APBD 2021	PAGU INDIKATIF 2022
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	11.633.131.940.619	11.451.333.109.839
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.246.729.223.619	7.149.004.022.964
4.1.01	Pajak Daerah	6.746.237.282.555	6.823.338.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	12.036.262.100	12.100.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.966.089.040	52.966.089.040
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	435.489.589.924	260.599.933.924
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.380.202.717.000	4.296.129.086.875
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.380.202.717.000	4.296.129.086.875
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	573.403.728.000	701.553.882.875
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.105.866.293.000	1.105.866.293.000
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.655.966.811.000	2.488.708.911.000
	Dana Insentif Daerah (DID)	44.965.885.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.200.000.000	6.200.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.200.000.000	6.200.000.000
5	BELANJA	15.948.254.311.169	11.845.833.109.839
	Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	10.553.468.318.661	6.733.784.213.077
	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	434.263.924.572	407.972.281.000
	Urusan Pilihan	329.748.913.057	372.988.624.000
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	834.220.704.470	736.716.840.164
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	3.668.526.518.405	3.461.892.672.598
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	60.802.400.000	68.502.408.000
	Unsur Pemerintahan Umum	67.223.532.004	63.976.071.000
	Total Surplus/(Defisit)	(4.315.122.370.550)	(394.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	4.315.122.370.550	394.500.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4.380.122.370.550	450.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	237.111.623.100	450.000.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.143.010.747.450	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	65.000.000.000	55.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	65.000.000.000	20.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman	0	35.500.000.000
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0

Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBD 2021 dan Analisa Bapenda

Dalam rangka pemulihan ekonomi maka arah kebijakan belanja daerah Provinsi Banten tahun 2022 diarahkan pada :

1. Upaya pemulihan dan penguatan perekonomian utamanya pada sektor terdampak pandemic Covid 19 (Industri, Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;
2. Pemenuhan Penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memenuhi aturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
3. Peningkatan perlindungan sosial sebagai dampak dari pandemik Covid-19 termasuk pada sasaran kelompok miskin baru;
4. Pemenuhan biaya dalam rangka reformasi kesehatan untuk menjamin masyarakat tidak mampu dalam mengakses pelayanan kesehatan melalui skema BPJS.
5. Percepatan infrastruktur dalam rangka integrasi antar wilayah utara dan selatan Provinsi Banten dan mempercepat daya saing Provinsi Banten.
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan peningkatan kapasitas dan adaptasi terhadap New Normal utamanya pada aspek kesehatan masyarakat, transportasi, pariwisata, pendidikan, perdagangan, logistik dan pengelolaan bencana;
7. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan/strategis RPJMD 2017-2022.
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Tabel.3.29

Tabel Realisasi APBD 2018, 2019 dan 2020 serta Proyeksi APBD 2021 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI P-APBDA2018	REALISASI P-APBDA2019	TARGET APBD TA2020	Realisasi APBD 2020	TARGET APBD TA 2021	PROYEKSI APBD TA.2022
A	B	c	D	E		f	g
4	PENDAPATAN DAERAH	10.477.855.594.717	11.831.983.759.800	12.609.363.396.388	10.333.427.941.988	10.984.935.531.619	12.489.070.103.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.296.107.366.717	7.344.821.272.800	8.154.745.690.388	5.906.535.126.985	6.654.439.567.619	8.054.352.930.000
4.1.1	Pajak Daerah	5.942.765.440.000	6.967.729.412.400	7.748.115.000.000	5.659.646.555.009	6.334.237.282.555	7.750.902.440.000
4.1.2	Retribusi Daerah	19.826.483.520	18.569.771.200	20.700.708.000	8.728428.613	9.636.262.100	21.321.720.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	51.614.659.419	55.300.000.000	51.511.432.000	54.590.414.077	49.966.089.040	53.056.770.000
	Daerah Yang Dipisahkan						
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	281.900.783.778	303.222.089.200	334.418.550.388	183.569.729..286	260.599.933.924	229.072.000.000
4.2	Dana Perimbangan	4.176.078.228.000	4.481.092.487.000	4.404.115.987.000	4.374.503.853.580	4.324.295.964.000	4.428.517.173.000
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000	711.779.997.000	510.061.378.000	701.553..882.875	609.695.082.000	711.779.997.000
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000	1.140.003.353.000	1.159.302.397.000	1.042.968.771	1.049.158.451.000	1.256.853.696.000
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000	2.629.309.137.000	2.734.752.212.000	2.629.981.199	2.665.442.431.000	2.459.883.480.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.670.000.000	6.070.000.000	50.501.719.000	52.388.961.422	6.200.000.000	6.200.000.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.670.000.000	6.070.000.000	6.200.000.000	11.718.911.506	6.200.000.000	6.200.000.000

NO	URAIAN	REALISASI P-APBDA2018	REALISASI P-APBDA2019	TARGET APBD TA2020	Realisasi APBD 2020	TARGET APBD TA 2021	PROYEKSI APBD TA.2022
4.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			44.301.719.000,-	39.939.078.000		
5	BELANJA DAERAH	11.055.264.730.612	12.154.531.396.800	13.214.391.206.388	10.062.816.998.488	10.964.935.531.619	13.002.532.723.000
5.1	Belanja Tidak Langsung	6.904.550.820.612	7.626.033.770.600	8.243.712.852.778	6.885.850.621.053	7.032.110.531.619	8.463.638.453.000
5.1.1	Belanja Pegawai	1.849.085.000.000	2.218.718.430.000	2.503.911.304.150	52.723.000.885	1.972.647.212.745	2.595.032.413.000
5.1.2	Belanja Hibah	2.132.051.721.820	2.310.418.836.000	2.307.991.952.200	2.310.452.656.518	2.164.668.429.000	2.280.418.830.000

Sumber: RPJMD Provinsi Banten dan Dokumen LPPD

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi dan Misi RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

RKPD, sebagai penjabaran dari RPJMD, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah. Tahun 2022 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 ditujukan untuk mencapai Visi dan misi pembangunan dalam RPJMD. Visi pembangunan Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, adalah “*Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah*”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Visi dan Misi tersebut menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah, serta dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Sebagai pelaksanaan RPJMD, RKPD Tahun 2022 merupakan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD untuk tahun berkenaan. RKPD Tahun 2022 ini merupakan hasil penyempurnaan terhadap rancangan RKPD provinsi, berdasarkan rancangan Renja seluruh Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKP serta Program Strategis Nasional.

Dalam menyusun prioritas pembangunan, RKPD Tahun 2022 berpedoman pada Sasaran tahunan RPJMD untuk Tahun 2022. Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan. Selain itu, sasaran tahunan RKPD juga menjadi dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Provinsi Banten.

Hasil penelaahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Sasaran RPJMD, untuk Tahun 2022, dijabarkan dalam Tabel 4.1 berikut.

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3.5
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	A

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
				Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	A
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	A
			Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik	%	100
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4
				Capaian Kapabilitas APIP	Level	4
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	80
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	A
			Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	100
			Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik	Maturitas SIPD	%	80
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks	%	30

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
				Kompetensi ASN		
			Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	95
			Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	64.44
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	85
			Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Nilai	80
				Penanganan konflik masyarakat	%	100
			Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	Nilai	110
			Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	100
				Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	100
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi	%	100
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
			Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	100
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	%	42.42
				Luasan layanan irigasi	Ha	20.888,19
				Persentase penyediaan prasarana air baku	%	100
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	92.5
			Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	375.29
				Persentase Rumah Layak Huni	%	88.66
				Cakupan penyediaan pengelolaan sampah	%	80.00
			Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	100
			Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara	%	100
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	90
			Meningkatnya	Rasio elektrifikasi	%	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
			Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal			
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	4
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	100.00
3.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas	Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	%	73,68
				Index Gini / Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	%	0,360
				Kemiskinan	%	5,00
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,84
			Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Harapan lama sekolah	Tahun	15
				Rata rata lama sekolah	Tahun	9.3
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli	%	100
			Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	100
			Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	92.79
			Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	%	80
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	%	65
				Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan	%	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
				Pendidikan Khusus		
			Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	100
			Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	45
				Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	45
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72.74
			Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100
			Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Minat Baca Masyarakat	Nilai	50
			Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	%	2.08
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	5.74
4.	Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	%	70.96
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah	285
				Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup)	Jumlah	26
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	227
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	Jumlah	1,129
			Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
			Kesehatan			
			Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	%	80
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	%	75
			Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.26
5.	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasis Potensi Ekonomi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	7
				Tingkat Inflasi	%	4
			Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	6.4
			Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	3
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	5
			Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	%	100
			Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	53.90
				Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	85.97
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian	LPE Sektor Perindustrian	%	4.7

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
			yang optimal			
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan	%	6.9
				Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	4.00
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	6.2
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,93
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	85.00
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	3.09
			Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	18
			Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	3
			Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52.79
			Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33.21
			Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	100
			Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0.60
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	46.29

Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Banten untuk Tahun 2022 tersebut menjadi acuan Perangkat Daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta indikator kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2022.

4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Dalam menentukan prioritas pembangunan untuk periode berkenaan, penyusunan RKPD berpedoman pada Strategi RPJMD, yang merupakan prioritas pembangunan Daerah lima tahunan, yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, untuk Tahun 2022, adalah sebagaimana dituangkan dalam Tabel 4.2 berikut.

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan	
1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan	1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan	
1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD	1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan	1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan	
1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan	1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	
1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan	1.06 Peningkatan perencanaan dan	Peningkatan Akuntabilitas

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
penganggaran pembangunan daerah	penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi	Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian	1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan	
1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur	1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur	
1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur	1.09 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Aparatur	
	1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur	
1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah	1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi	
1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah	1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM	
1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan	1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan	
1.13 Meningkatkan keamanan dan stabiitas daerah	1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah	Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah
1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana	1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan	
1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan	1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan	
1.16 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan
1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan	

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
	daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat	
1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi	
1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah	1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima	
1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat	1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses ke lembaga keuangan
1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan	1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan	Peningkatan Pelayanan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD
1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan	
1.23 Meningkatkan Aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi	
1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan	1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan	
1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi	
1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi	1.27 peningkatan data dan informasi perencanaan pembangunan	
1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektor Sekara Elektronik	1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektor	
2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah	2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan	2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur	Pembangunan dan Pemeliharaan

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
Jembatan	Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis	infrastruktur Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis
2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi	2.03 Peningkatan Sumber Daya Badan Usaha Jasa Konstruksi	
2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir	Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir
2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku
2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi	2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ	Pembangunan Bendung, empang dan situ
	2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi
2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang	2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi	Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman	2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh	
2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu	2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional
2.10 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat	Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
2.11 Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan	2.12 Pembangunan TPST Regional	
2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi	2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi	Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi
2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas	2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi
2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengkapan	2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana	Pembangunan sarana dan

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
jalan	kelengkapan Jalan	Prasarana kelengkapan Jalan
2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi
2.16 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi
2.17 Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT	2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan	
2.18 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi	
2.19 Meningkatkan kualitas kebijakan Infrastruktut bagi masyarakat	2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktur bagi masyarakat	penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3.01 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	3.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus	Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan
3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan	3.02 Menciptakan dan mengembangkan wirausaha	
3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja	3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja	
3.04 Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan	3.04 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	
3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau	3.05 Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing	
	3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah	
3.07 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten	
3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam	3.08 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang	

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
	sistem informasi komoditas penting dan strategis	sistem informasi komoditas penting dan strategis
	5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar	
5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah	5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkatkan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten	
5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen	
5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian	5.14 Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)	Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)
5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan	5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan	
5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah	5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah	
5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinasi wisata	Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur
	5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
	5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata	Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata
	5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata	Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata
5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi	5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan	Kemudahan perizinan kelembagaan pembinaan dan pengawasan koperasi, untuk

Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022
informasi		mencapai jumlah Pertumbuhan koperasi aktif dan sehat
	5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi	Kemudahan akses inovasi produk, informasi teknologi dan pembiayaan bagi koperasi aktif
5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha	5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM	Peningkatan tumbuhnyawirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor Usaha Kecil melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan
5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup	5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah	Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah
5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai	5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai	Peningkatan Konservasi Daerah Aliran Sungai
5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung	5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan	Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan
5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat	5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat	
5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang geologi dan minerba
5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja	5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan meningkatkan layanan pencari kerja melalui pelatihan, pemagangan, kelembagaan dan akreditasi serta pembinaan produktifitas
5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan	5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal	

Strategi dan Arah Kebijakan tersebut ditujukan pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah

Provinsi Banten sesuai dengan tahapan yang direncanakan untuk setiap tahun.

4.1.4. Tema RKPD Tahun 2022

RKPD disusun melalui sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya, salah satunya melalui penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD mempedomani RKP, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan Daerah. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2022 dan tema RKP Tahun 2022, adalah “*Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*”. Keselarasan antara tema RKP Tahun 2022 dengan Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 disajikan dalam diagram berikut.



Tema pembangunan tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Isu Strategis Daerah Tahun 2022

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah, yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis Provinsi Banten untuk RKPD Tahun 2022 merupakan sintesis dari Permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022, dan arah kebijakan RKP Tahun 2022. Isu strategis Provinsi Banten Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19;
2. Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana; serta
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Tatakelola pemerintahan yang baik

Isu strategis tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19

Sebagaimana disajikan pada Bab-Bab sebelumnya, ekonomi Banten pada Triwulan IV-2020 secara *y on y* terkontraksi 3,92 persen. Kontraksi ini merupakan yang paling dalam di antara provinsi yang ada di Pulau Jawa, yang secara rata-rata terkontraksi 2,60 persen, dan lebih dalam dari rata-rata Nasional yang terkontraksi 2,19 persen.

Namun demikian, pemulihan ekonomi Banten setiap triwulan menunjukkan tren perbaikan. Kontraksi 3,92

persen pada Triwulan IV-2020 tersebut, secara *y on y*, lebih baik dari Triwulan III-2020 yang berkontraksi sebesar 5,32 persen, dan Triwulan II-2020, yang berkontraksi hingga mencapai 7,27 persen. Artinya, secara *q to q*, ekonomi Banten pada Triwulan IV-2020 mampu tumbuh 3,01 persen, meskipun lebih lambat dibandingkan Triwulan II-2020 yang tumbuh mencapai 4,73 persen.

Pada Tahun 2022, LPE Provinsi Banten diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,6 persen. Untuk dapat mencapai proyeksi tersebut, diperlukan upaya mengoptimalkan sisi *demand* dan sisi *supply*. Pada sisi *demand*, perlu memacu komponen permintaan domestik dan permintaan luar negeri. Untuk meningkatkan permintaan domestik, dapat dilakukan peningkatan permintaan atau konsumsi rumah tangga dan serapan pengeluaran pemerintah, serta peningkatan investasi swasta. Konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditopang oleh kenaikan pendapatan dan laju inflasi yang terjaga. Untuk permintaan luar negeri, perlu upaya memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan kinerja ekspor.

Pada sisi *supply*, lapangan usaha yang selama ini memberikan *share* besar terhadap struktur ekonomi Banten juga merupakan lapangan usaha yang memberikan sumbangan besar bagi kontraksi ekonomi Banten. Sebaliknya, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, meskipun *share* kecil, justru menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi, serta menjadi penahan dari semakin dalamnya kontraksi ekonomi Banten. Oleh karena itu, upaya

mendorong pemulihan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan, perlu diiringi dengan transformasi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selain dalam rangka mendatangkan nilai tambah ekonomi, juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan sebagai dampak pandemi Covid-19.

2. Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana
Ketidakseimbangan pertumbuhan antara Wilayah Banten Selatan dengan Wilayah Banten Utara, serta kebencanaan, merupakan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Ketidakseimbangan pertumbuhan menjadi salah satu penyebab posisi daya saing Provinsi Banten yang tidak stabil. Study terakhir mengenai Analisis Daya Saing Provinsi-Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh the Asia Competitiveness Institute (ACI) Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP), National University of Singapore (NUS), menempatkan Provinsi Banten pada peringkat ke-5 dari 6 provinsi di wilayah yang sama. Ketersediaan dan Keterjangkauan Sarana Umum merupakan salah satu dari 20% indikator terlemah yang dimiliki oleh Provinsi Banten. ACI merekomendasikan peningkatan kualitas infrastruktur fisik dan sarana umum untuk peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas infrastruktur fisik juga perlu untuk meningkatkan daya tarik investor. Selain kualitas infrastruktur fisik, ACI juga merekomendasikan peningkatan infrastruktur lunak seperti kualitas kesehatan dan Pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain ketidakseimbangan pertumbuhan, hasil-hasil

pembangunan juga menunjukkan adanya ketidakeimbangan yang tercermin dari capaian indikator-indikator makro pembangunan. Oleh karenanya, perlu integrasi pembangunan antar wilayah untuk meningkatkan daya saing Provinsi Banten secara keseluruhan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan salah satu isu strategis dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Sampai dengan Tahun 2020, pembangunan SDM, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu indeks komposit yang didasarkan pada empat indikator: angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*), harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean of years of schooling*), serta daya beli (*Purchasing Power Parity*) yang merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan daya beli, menunjukkan trend peningkatan. Capaian pembangunan manusia di Provinsi Banten juga memenuhi target RPJMD, dan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun demikian, dilihat dari akselerasinya, angka pertumbuhan IPM Provinsi Banten mengalami perlambatan. Pada tahun 2020, IPM Provinsi Banten hanya tumbuh 0,01 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,68 persen. Selain perlambatan akselerasi pertumbuhan, Provinsi Banten juga masih stagnan pada level atau kategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$), yang dicapai sejak tahun 2015. Perlambatan akselerasi dan stagnasi IPM mengindikasikan permasalahan pada pelaksanaan SPM, yang berdasarkan

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Arah Kebijakan RKP Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022
kewilayahan dan antar wilayah 4. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Provinsi Banten merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun manusia.	kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah 3. Masih Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM yang cakap dalam Mitigasi Bencana, dan Kurangnya Koordinasi antar sector baik dengan tingkat pusat maupun Kabupaten/Kota	Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis 4. Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan		
1. Implementasi SPM belum optimal 2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi 3. Pembangunan berwawasan kependudukan belum optimal	1. Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar belum optimal 2. Hasil pembangunan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat belum optimal: Angka Kemiskinan meningkat, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat, Pertumbuhan IPM mengalami perlambatan 3. Laju pertumbuhan dan Persebaran penduduk tidak merata	1. Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 3. Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan 4. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas	1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD tahun sebelumnya	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Arah Kebijakan RKP Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022
		Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan 5. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk		
Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum optimal	1. Target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi belum tercapai 2. Tata Laksana dan manajemen birokrasi yang belum optimal 3. Target kinerja RPJMD untuk implementasi SAKIP belum tercapai	1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan 2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi 3. Peningkatan koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Tatakelola pemerintahan yang baik

Dari hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022 dan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, Isu strategis pada tahun 2022 adalah 1). Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19; 2). Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana; 3). Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan 4). Tata kelola pemerintahan yang baik. Isu strategis

tersebut, selanjutnya menjadi bahan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah.

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan, prioritas pembangunan daerah untuk RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; serta
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pembangunan daerah tersebut menjadi dasar pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, termasuk pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah provinsi. Prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 menjadi acuan bagi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Oleh karenanya, sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan daerah merujuk pada permasalahan

pembangunan dalam RPJMD serta berpedoman pada sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahunan Daerah dalam RPJMD. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD, Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022, serta Isu Strategis Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.5 berikut:

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi daerah masih belum optimal	1. Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat 2. Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan	Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19	Pertumbuhan ekonomi inklusif
1. Peningkatan daya saing daerah belum optimal. Posisi strategis Provinsi Banten dengan segala keunggulan komparatifnya belum menjadi keunggulan kompetitif. 2. Kesenjangan antar	1. Peningkatan Keunggulan Kompetitif melalui Optimalisasi Potensi Daerah 2. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian	Integrasi pembangunan antar wilayah dan mitigasi bencana	Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
wilayah, ditunjukkan oleh capaian indikator kesejahteraan rakyat yang tidak merata 3. Kurangnya konektivitas infrastruktur kewilayahan dan antar wilayah 4. Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Provinsi Banten merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam, non alam maupun manusia.	Daerah 3. Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis 4. Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan		
1. Implementasi SPM belum optimal 2. Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi 3. Pembangunan berwawasan kependudukan belum optimal	1. Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing 2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 3. Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
	Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan 4. Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan 5. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk		
Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum optimal	1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan 2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan	Tatakelola pemerintahan yang baik	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2022	Isu Strategis Tahun 2022	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022
	teknologi informasi 3. Peningkatan koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan		

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai sasaran RPJMD. Sebagai pelaksanaan tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, atau berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 mencakup pula janji tahunan Kepala Daerah untuk Tahun 2022. Janji Kepala Daerah Tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam sasaran RPJMD untuk Tahun 2022, adalah menuntaskan ketersediaan infrastruktur daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain memuat janji tahunan Kepala Daerah untuk Tahun 2022, prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan pandangan dan pertimbangan DPRD. Pandangan dan pertimbangan DPRD menggambarkan permasalahan pembangunan Daerah untuk diselaraskan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah, yang

secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional. Pandangan dan pertimbangan tersebut berupa saran dan pendapat, yang berisi pokok-pokok pikiran DPRD, berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Masyarakat Kesulitan Air Bersih
2	Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Provinsi	Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi
3	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	belum terpenuhinya sarana dan prasarana olah raga bagi masyarakat
4	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	belum terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan masyarakat berupa pos pelayanan terpadu (posyandu yang representatif)
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Belum optimalnya penanganan darurat bencana
6	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	belum tersedianya / kurangnya alat pengangkut sampah (motor sampah) untuk tempat pembuangan sementara (TPSS) / bank sampah
				Kurangnya pengelolaan sampah rumah tangga
				pembangunan dan pengelolaan TPST Regional bojong menteng
7	Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	pembangunan Sarana prasarana wisata anyer
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	belum tersedianya / perbaikan sarana infrastruktur jalan berupa hotmix / aspal

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
				masih adanya jalan rusak
				Masih adanya jalan yang rusak
				pembangunan jalan pabuaran-baros untuk mengurangi kemacetan
				perbaikan / rehabilitasi sarana infrastruktur jalan yang mengalami cekungan / kerusakan
9	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan - sarpras (infocus, cctv, dll) - meubelair - laboratorium (komputer, bahasa inggris, tehnik industri, tehnik sipil, tehnik bangunan, dll) - jaringan komputer - perpustakaan - sistem informasi (akademik, keuangan, SDM, dll)
				belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) berupa ruang kelas baru (RKB)
				belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan berupa alat praktikum dan teknologi laboratorium medik
				belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan asrama santriwati/putri
				belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan agama yang representatif
				belum tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang representatif

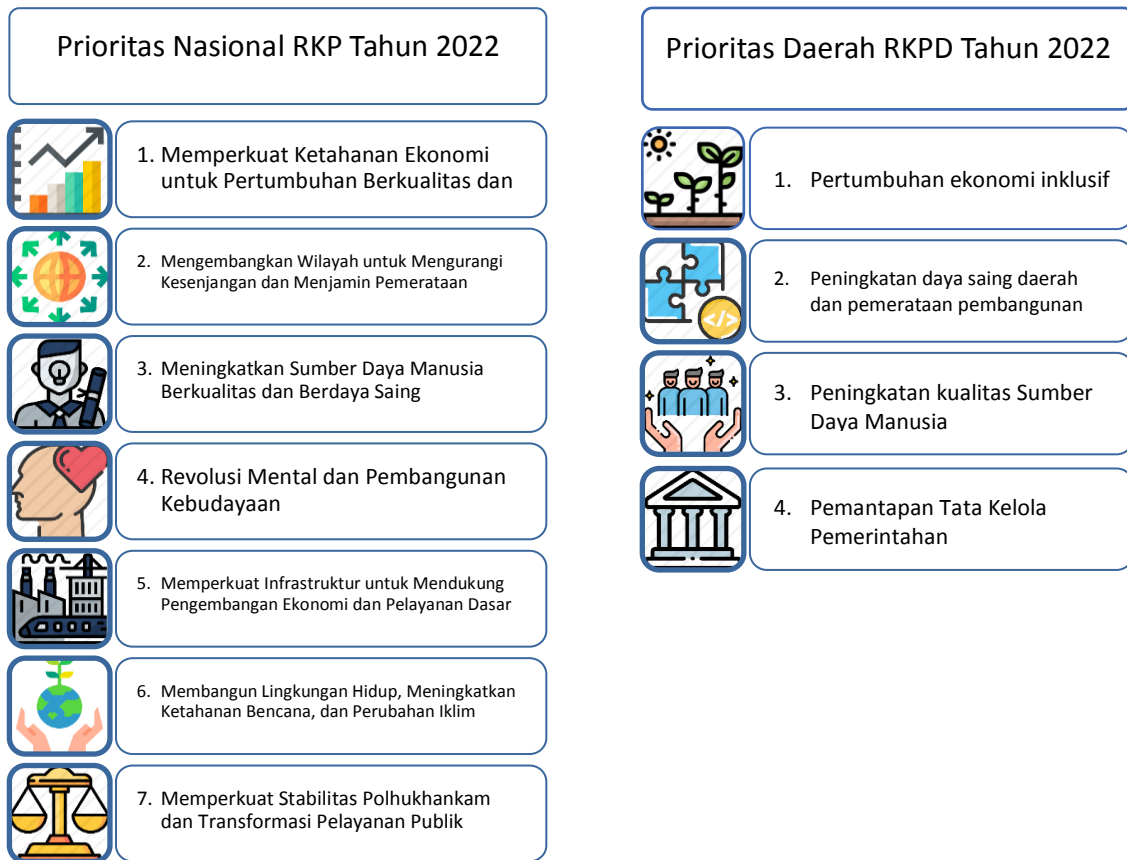
No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	belum terpenuhinya sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan masyarakat
				perbaikan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU) di lingkungan masyarakat
				PJU sangat minim
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum yang memadai di lingkungan masyarakat
12	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	pembangunan rutilahu yang tidak tepat sasaran
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani
			Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	belum tersedianya / perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan lingkungan yang baik
				belum tersedianya / perbaikan sarana dan prasarana sistem saluran air (drainase)
				belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi / mandi cuci kakus (MCK) yang baik
				Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman
				memaksimalkan program perbaikan drainase, irigasi, air bersih, sanitasi

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
				Penerangan Jalan yang masih kurang di Malam Hari
				perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan lingkungan melalui program paving block
				Perbaikan Drainase yang sudah rusak
13	Sosial	Dinas Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Perbaikan Drainase/Saluran Air mengingat apabila turun hujan air tidak mengalir dengan baik
				pemberdayaan Masyarakat dengan program pelatihan dan pemagangan kerja atau usaha Desa

4.3.1. Prioritas Nasional RKP 2022

Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu, dalam rangka menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan RKPD untuk mengacu pada RKP. Demikian halnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang menentukan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Keterkaitan antara Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2022, disajikan dalam diagram berikut:



Selain penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan nasional, mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD juga dilakukan melalui penyelarasan target pembangunan, dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

Hasil penyelarasan target pembangunan, antara sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022 dengan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD 2022, disajikan dalam diagram berikut:

			
 Pertumbuhan Ekonomi	5,4 – 6,0	6,10	5,0 – 5,6
 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5 – 6,2	7.84	9,7 – 9,2
 Kemiskinan	8,5 – 9,0	5	4,99 – 5,4
 Indeks Pembangunan Manusia	73,44 – 73,48	73,68	72,60-73,68
 Gini Ratio	0,376 – 0,378	0,360	0,370
 Tingkat Inflasi	2,0 – 4,0	3.7	3.4-4

 Target RPJMD untuk RKPD Tahun 2022
 Proyeksi RKPD Tahun 2022 hasil penyelarasan

Secara lebih rinci, keterkaitan antara indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan indikator sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2022, disajikan dalam Tabel 4.7. berikut:

Tabel 4.7. Keterkaitan antara Indikator Sasaran Prioritas
RKP Tahun 2020 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2020

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Luas minimal kawasan berfungsi lindung (juta ha)	60	Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	Rasio Cakupan Tutupan Hutan (%)	33,21
			Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi (%)	42,42
	Persentase luas sawah beririgasi (%)	55,50	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Luasan layanan irigasi (Ha)	20.888,19
	Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (kumulatif) (m3/detik)	35,00	Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air	Persentase penyediaan prasarana air baku (%)	100
Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92,80	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (%)	85,00
Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi	Pertumbuhan wirausaha UMKM (%)	3,00	Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil (%)	3
	Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,30	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi (%)	18
Peningkatan nilai tambah, lapangan			Meningkatnya Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor	6,4

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi			Ekonomi Sektor Unggulan	Unggulan	
	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	5,6-6,3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal	LPE Sektor Perindustrian (%)	4,7
	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,9-4,0	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal (%)	6,2
	Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)	5,2-5,7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	LPE Sektor Perdagangan (%)	6,9
	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	8,31	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan (%)	4,93
	Kontribusi PDB pariwisata (%)	4,3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata (%)	3,09
	Kontribusi tenaga kerja di sector industri terhadap total pekerja (%)	15	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase pekerja Penuh Waktu	46,29
			Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	5,74
	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,3-2,8	Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	100
	Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	968,4	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN) (Rp Triliun)	53,90

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	6,5-7,2	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor (%)	85.97
	Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha: a. jumlah prosedur b. waktu (hari)	51	Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah (%)	100
	Pertumbuhan PDB Pertambangan dan Penggalan	2,0-2,6	Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%)	0,60
Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Tingkat Inflasi (%)	2,0-4,0		Tingkat Inflasi (%)	4
	Inflasi pangan bergejolak (%)	2,0-4,0	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Tingkat Inflasi Bahan Pokok (%)	4.00
	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal	27,80	Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	Indeks Keuangan Inklusif	3
Pengembangan Kawasan Perkotaan	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai	52	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
	PKN/PKW		kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas	kawasan strategis Provinsi (%)	
Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status pembangunan desa a. Desa Mandiri b. Desa Berkembang c. Desa Tertinggal	59,65	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan (%)	25
Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (Kab/Kota)	409	Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	64,44
	Jumlah daerah dengan realisasi belanja berkualitas (Kab/Kota)	318	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
			Meningkatnya Kualitas SPIP	Capaian Maturitas SPIP	4
				Capaian Kapabilitas APIP	4
			Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (%)	80
				Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	A
			Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Maturitas SIPD (%)	80

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			secara elektronik		
			Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik	Maturitas Database Statistik Sektoral	100
			Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD (%)	100
	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	51	Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan (%)	100
			Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan (%)	100
	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)	82,85	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (%)	100
			Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten (%)	100
			Meningkatnya Administrasi	Persentase Realisasi	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			Pembangunan Daerah	Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah (%)	
			Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan (%)	100
			Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	92.5
Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,21	Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	2.26
	Persentase cakupan kepemilikan NIK (%)	99,00	Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi (%)	100
Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	87	Menurunnya PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS (%)	2.08
			Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	100
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Daya beli (%)	100
	Cakupan kepesertaan JKN (%)	87	Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan (%)	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
Terpenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	205	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 kelahiran hidup) (jumlah)	285
	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	18,60		Angka Kematian Bayi (Per 1000 kelahiran hidup) (jumlah)	26
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses	Penurunan Jumlah Kematian Ibu	227
				Penurunan Jumlah Kematian Bayi	1,129
	Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	95	Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	BOR (Bed Occupancy Ratio). RSUD Banten	80
				BOR (Bed Occupancy Ratio).RSUD Malingping	75
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,96	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	Rata rata lama sekolah (Tahun)	9.3
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,57		Harapan lama sekolah (Tahun)	15
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya a. SMA/SMK/MA/Sederajat	0,81	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	80
				Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah	65
Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	69,87	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			berkualitas	Anak (%)	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,30	Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)	Indeks pembangunan gender (IPG)	92.79
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57-76,63	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72.74
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,61	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Kepemudaan	45
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Peringkat Global Innovation Index	80-85	Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Cakupan Penelitian dan pengembangan (%)	100
	Peringkat pada Asian Games	12 besar	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi	Indeks Pembangunan Olahraga	45
Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	59,71	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (%)	100
Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,70	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Penanganan konflik masyarakat (%)	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (%)	85
Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Nilai Budaya Literasi	65,70	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Minat Baca Masyarakat	50
Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	65,10	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	375.29
				Persentase Rumah Layak Huni (%)	88.66
				Cakupan penyediaan pengelolaan sampah (%)	80.00
	Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)		Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	110
Meningkatnya konektivitas wilayah	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,90	Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara (%)	100
			Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi (%)	90

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			transportasi yang lebih baik		
	Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	72	Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100
				Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	100
			Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur (%)	90
			Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan) (%)	100
Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Rasio Elektrifikasi (%)	~100	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Rasio elektrifikasi (%)	100
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	69,22	Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.79
Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	26,87	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Emisi Rumah Kaca	100
Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	77,72	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	80

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
			Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI		
Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Pembangunan Hukum	0,69	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi (%)	100
			Meningkatnya Daya Saing Daerah	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	5
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ Baik Provinsi (%)		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	A
			Meningkatnya Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif	Persentase Manajemen Reformasi Birokrasi (%)	100
	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori $\geq$ Baik Provinsi (%)	61,00	Terwujudnya Profesionalisme aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (%)	95
			Terwujudnya Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN (%)	30
	Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)	150/587	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung	Capaian Pelayanan Publik (%)	100
			Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima (%)	100

RKP Tahun 2022			RKPD Tahun 2022		
Sasaran	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target
	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik Provinsi (%)	60	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4
			Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90
				Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	100
	Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP Provinsi (%)	93	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip $\geq$ B (%)	100	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	A
				Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	A

Sumber: RKP Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

4.3.2. Program Prioritas Daerah Tahun 2022

Untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, dilakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah meliputi, salah satunya, pengendalian

dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 183 huruf a, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah mencakup kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 218 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD provinsi. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 218 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 222 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas dilakukan, salah satunya, dalam rangka menjamin pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional.

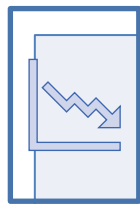
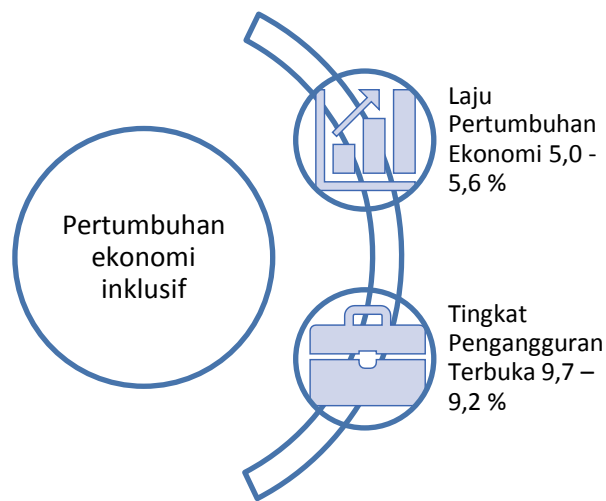
Dalam rangka menjamin pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 selanjutnya dijabarkan menjadi Program Prioritas, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif, program prioritas diarahkan pada:
 - a. Pengendalian inflasi daerah

- b. Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan
 - c. Revitalisasi Industri dan Perdagangan
 - d. Peningkatan investasi daerah
 - e. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
 - f. Pengembangan pariwisata
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta
 - h. Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi
2. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan, program prioritas diarahkan pada:
- a. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar
 - b. Pembangunan infrastruktur ekonomi
 - c. Pengembangan kawasan
 - d. Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana, serta
 - e. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan
3. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, program prioritas ditujukan pada:
- a. Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan
 - c. Pengentasan kemiskinan
 - d. Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda
 - e. Pembudayaan olahraga
 - f. Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat, serta

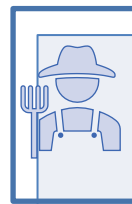
- g. Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah
- 4. Dalam rangka memantapan tata kelola pemerintahan, program prioritas ditujukan pada:
 - a. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 - c. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur
 - d. Peningkatan tata kelola keuangan dan aset
 - e. Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - f. Peningkatan riset dan inovasi daerah, serta
 - g. Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan

Perumusan program prioritas, lokasi prioritas, dan kegiatan prioritas Daerah, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKPD, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Rencana program prioritas dalam RKPD provinsi adalah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah provinsi untuk tahun yang berkenaan. Untuk itu, keterkaitan antara indikator sasaran prioritas pembangunan daerah dengan indikator kinerja program prioritas, mengacu pada indikator dan target kinerja RPJMD Provinsi Banten untuk tahun 2022, disajikan dalam diagram berikut:



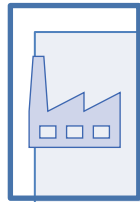
Pengendalian inflasi daerah

- Tingkat Inflasi 3.4-4%
- Tingkat Inflasi Bahan Pokok 4%



Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan 6.40%
- Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian 6.20%
- Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan 4.93%
- Indeks Ketahanan Pangan Daerah 85%



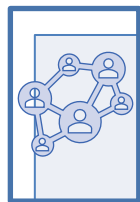
Revitalisasi Industri dan Perdagangan

- LPE Sektor Perindustrian 4.70%
- LPE Sektor Perdagangan 6.90%



Peningkatan investasi daerah

- Realisasi Investasi (PMA + PMDN) 53.9 T



Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif

- Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil 1%



Pengembangan pariwisata

- Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata 3.09%



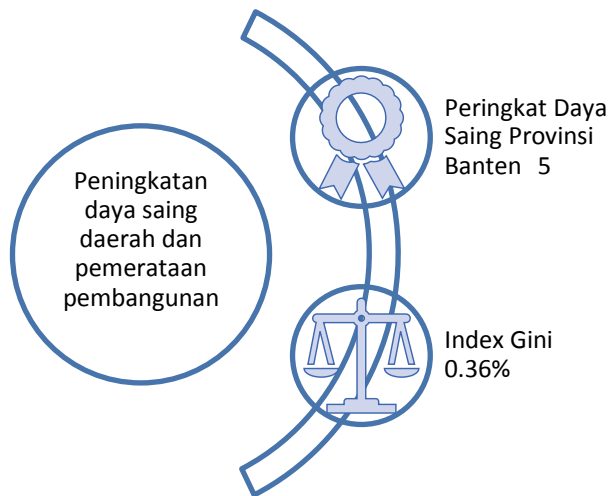
Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja

- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 5.74%
- Persentase pekerja penuh waktu 46.29%
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 100.00%



Adopsi dan Inovasi IPTEK untuk memberikan nilai tambah ekonomi

- Cakupan Penelitian dan pengembangan 100%



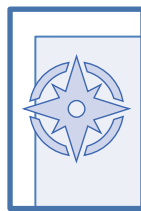
Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar

- Capaian kinerja infrastruktur daerah 100%



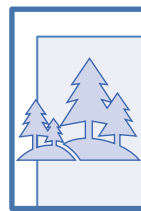
Pembangunan infrastruktur ekonomi

- Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur 90%



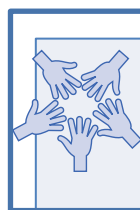
Pengembangan kawasan

- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 92.50%
- Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap 100%
- Persentase Jembatan Provinsi dalam Kondisi Mantap 100%
- Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi 100%
- Persentase peningkatan pelayanan perhubungan darat, laut dan udara 100%



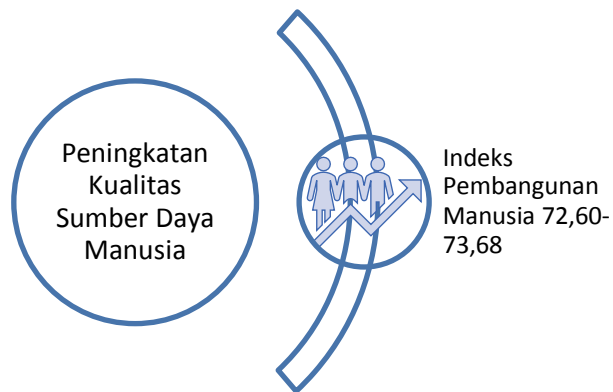
Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 52.79
- Rasio Cakupan Tutupan Hutan 33.21%
- Indeks Resiko Bencana 110



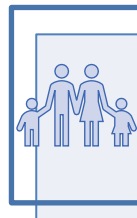
Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan

- Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan 100%



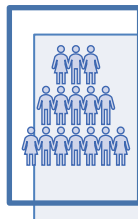
Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial

- Harapan lama sekolah 15 Tahun
- Rata rata lama sekolah 9.3 Tahun
- Daya beli masyarakat 100%
- Angka Harapan Hidup 70.96 Tahun
- Persentase Penanganan Jumlah PMKS 2.08%



Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan

- Angka Kelahiran Total (TFR) 2.26%
- Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi 100%



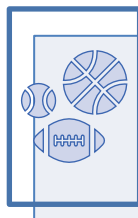
Pengentasan kemiskinan

- Tingkat kemiskinan 4,99 – 5,4%



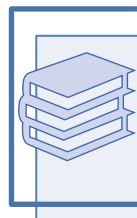
Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda

- Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 100%
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92.79
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 72.74
- Indeks Pembangunan Pemuda 45



Pembudayaan olahraga

- Indeks Pembangunan Olahraga 45



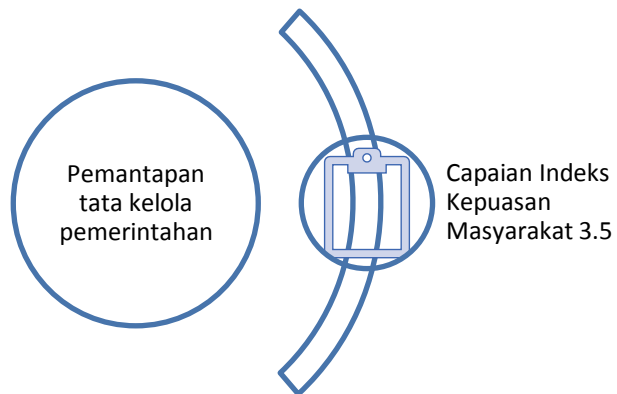
Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat

- Indeks Minat Baca Masyarakat 50



Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah

- Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah 100%



Berdasarkan diagram, program prioritas ditujukan dalam rangka mencapai prioritas pembangunan daerah. Indikator dan target kinerja program prioritas menunjang pencapaian indikator dan target kinerja sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah, program-program prioritas tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan prioritas dan lokasi prioritas, melalui pendekatan holistik-tematik, intergratif, dan spasial.

4.3.3. Pendekatan Holistik-Tematik, Intergratif, dan Spasial

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, dan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi. Hal ini diatur pada Bab mengenai Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Sedangkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan, sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan, yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif

dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas, dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Penerapan pendekatan tersebut, sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, telah ditetapkan empat prioritas pembangunan daerah, yaitu Pertumbuhan ekonomi inklusif; Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan; Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; serta Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan. Empat prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan menjadi program-program prioritas daerah, yang indikator dan target kinerjanya saling berkaitan, dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2022. Terhadap program-program prioritas tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas daerah. Penjabaran dari prioritas pembangunan daerah, menjadi program prioritas dan kegiatan prioritas, diuraikan sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
 - a. Program Prioritas Pengendalian inflasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penguatan peran TPID
 - Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi
 - Penguatan sistem logistik provinsi

- Diversifikasi pangan untuk mengendalikan volatilitas harga
- b. Program Prioritas Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya
 - Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung di KPPN Pandeglang (PN)
 - Penguatan koordinasi stakeholder sektor unggulan daerah
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
- c. Program Prioritas Revitalisasi Industri dan Perdagangan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Peningkatan hubungan industrial antara pekerja, pemerintah dan pengusaha
 - Dukungan infrastruktur dan pasokan bahan baku
 - Dukungan SDM tenaga kerja terampil
 - Peningkatan stabilitas kamtibmas
- d. Program Prioritas Peningkatan investasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penyediaan data dan informasi peluang investasi
 - Penyederhanaan dan percepatan perizinan
 - Peningkatan ketersediaan infrastruktur investasi
 - Keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah
 - Kemudahan akses pemasaran hasil produksi
 - Kemudahan akses pasokan bahan baku
 - Kemudahan akses tenaga kerja terampil

- Fasilitasi promosi
 - Peningkatan stabilitas kamtibmas
 - Peningkatan dukungan kebijakan investasi
- e. Program Prioritas Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Skema pembiayaan dan akses permodalan
 - Fasilitasi start-up dan inkubasi
 - Peningkatan informasi, promosi dan pemasaran
 - Peningkatan standar kualitas: perijinan dan sertifikasi
 - Penjaminan supply and demand
 - Kemitraan dan Link and match dengan e-commerce
 - Inovasi, teknologi dan branding
 - Revitalisasi PLUT Banten untuk SDM UMKM
 - Pengembangan kewirausahaan perempuan
 - Pengembangan kewirausahaan pemuda
- f. Program Prioritas Pengembangan pariwisata, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pengembangan destinasi wisata
 - Peningkatan dukungan infrastruktur destinasi wisata
 - Peningkatan promosi dan pemasaran
 - Peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata
 - Peningkatan jaminan keamanan dan 3K pada destinasi wisata
- g. Program Prioritas Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Revitalisasi SMK, terutama pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan

agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan

- Revitalisasi BLKI, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas
- Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Peningkatan kerjasama dengan BBLKI
- Kerjasama pemagangan dengan negara/daerah lain

h. Program Prioritas Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi, kegiatan prioritas diarahkan pada:

- Akselerasi Peran Iptek dalam diversifikasi Produk Olahan hasil Pertanian dan Perikanan
- Kolaborasi Akademisi, Bisnis dan Government dalam perwujudan Ekonomi Digital
- Penerapan Inovasi dan Iptek

2. Prioritas Daerah Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan

a. Program Prioritas Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, kegiatan prioritas diarahkan pada:

- Penuntasan pembangunan USB dan RKB
- Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumah Sakit Cibaliung dan Ciligrang)
- Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Pengelolaan sampah dan limbah

- Dukungan pemulihan infrastruktur pasca bencana (Kawasan Pesisir Selat Sunda dan bencana lainnya)
 - Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan
- b. Program Prioritas Pembangunan infrastruktur ekonomi, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata
 - Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani)
 - Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang
 - Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional
 - Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan
 - Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area)
- c. Program Prioritas Pengembangan kawasan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
 - Pengembangan pusat industri manufaktur, sektor industri kreatif dan jasa di KEK Tanjung Lesung (PN)
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah entas: Pandeglang dan Lebak (PN)
 - Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Kabupaten Pandeglang (PN)
 - Pengembangan kawasan Serang metropolitan area
 - Dukungan pembangunan Kota Baru Maja

d. Program Prioritas Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana, kegiatan prioritas diarahkan pada:

- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- Pengelolaan dan konservasi hutan
- Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana
- Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana
- Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi
- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu
- Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebencanaan
- Pemenuhan logistik kebencanaan
- Peningkatan koordinasi antar stakeholder lingkungan hidup

e. Program Prioritas Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan, kegiatan prioritas diarahkan pada:

- Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas
- Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya
- Penguatan kerjasama dengan provinsi/daerah lain
- Penguatan kerjasama dengan negara asing
- Penguatan kerjasama dengan forum tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan

- Penguatan kerjasama dengan komunitas
 - Penguatan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil
3. Prioritas Daerah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- a. Program Prioritas Pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, air minum, trantibum)
 - Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas
 - Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta
 - Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
 - Penanganan anak tidak sekolah
 - Penanganan stunting
- b. Program Prioritas Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan
 - Peningkatan kolaborasi stakeholder kependudukan
 - Dukungan perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (PN)

- Dukungan perluasan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (PN)
- c. Program Prioritas Pengentasan kemiskinan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan basis data untuk integrasi bantuan sosial
 - Revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan
 - Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan (penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan hutan, penguatan wirausaha pemuda)
 - Perluasan jenis dan penerima manfaat bantuan sosial
 - Perluasan penerima manfaat Jamsosratu
- d. Program Prioritas Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan sistem informasi data gender dan anak
 - Penguatan perlindungan perempuan dan anak
 - Pengembangan Provinsi Layak Anak
 - Penguatan PUG-PPRG
 - Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
- e. Program Prioritas Pembudayaan olahraga, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar
 - Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga

- Optimalisasi fasilitas dan sarana olah raga milik Pemprov Banten
- f. Program Prioritas Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Peningkatan budaya literasi sekolah
 - Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa
 - Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat
 - Fasilitasi pelayanan hak atas kekayaan intelektual
- g. Program Prioritas Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Penguatan Pendidikan karakter
 - Penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara
 - Penguatan kualitas dan peran keluarga dalam pembentukan karakter
 - Peningkatan pelayanan kepemudaan
 - Optimalisasi fungsi museum
 - Pengelolaan cagar budaya
 - Pembinaan lembaga adat
 - Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan
 - Pelestarian sejarah, tradisi dan budaya
- 4. Prioritas Daerah Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Program Prioritas Penguatan kelembagaan dan tatalaksana, kegiatan prioritas diarahkan pada:
 - Finalisasi penyederhanaan birokrasi
 - Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi
 - Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Peningkatan keterbukaan informasi publik

- Pengembangan proses bisnis instansi dan unit
 - Peningkatan kualitas budaya kerja
 - Peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah
 - Peningkatan kualitas produk hukum daerah
- b. Program Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan
 - Peningkatan kompetensi dan perilaku SDM pelayanan
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
 - Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi
 - Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah
- c. Program Prioritas Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN
 - Penataan Anjab, ABK, Standar Kompetensi
 - Implementasi manajemen talenta (talent pool)
 - Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan HCDP
- d. Program Prioritas Peningkatan tata kelola keuangan dan aset, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah
 - Peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD

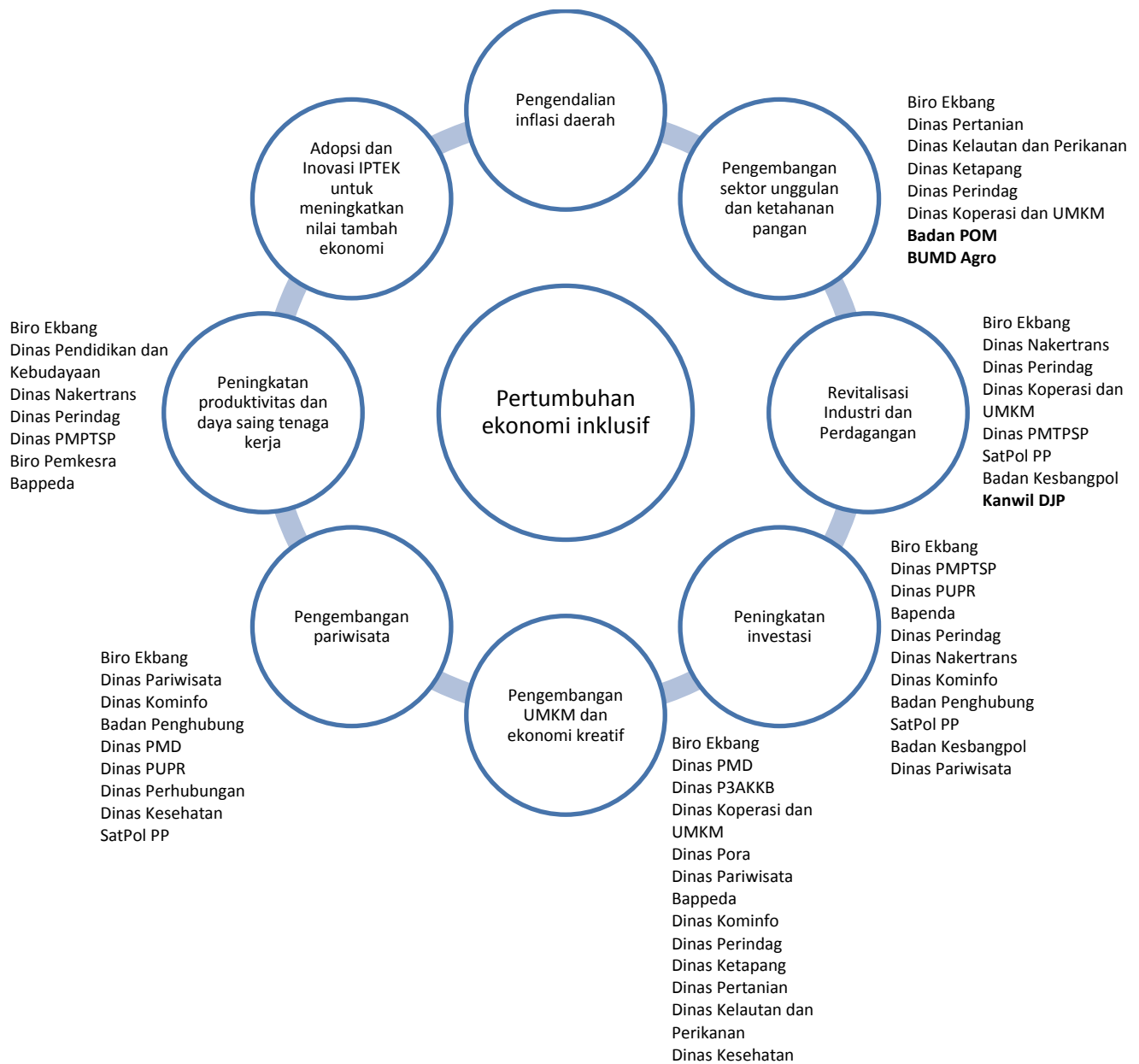
- Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
 - Peningkatan pendapatan asli daerah
 - Peningkatan kualitas penatausahaan kekayaan dan kewajiban daerah
- e. Program Prioritas Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan *cross-cutting* program dan kegiatan
 - Peningkatan kualitas pengukuran kinerja
 - Peningkatan kualitas pelaporan kinerja
 - Peningkatan kualitas evaluasi kinerja
 - Peningkatan kualitas capaian kinerja
- f. Program Prioritas Peningkatan riset dan inovasi daerah, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Penguatan basis data pemerintahan daerah
 - Optimalisasi hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - Peningkatan inovasi daerah
 - Peningkatan kolaborasi stakeholder kelitbangan
- g. Program Prioritas Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, kegiatan prioritas diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat
 - Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

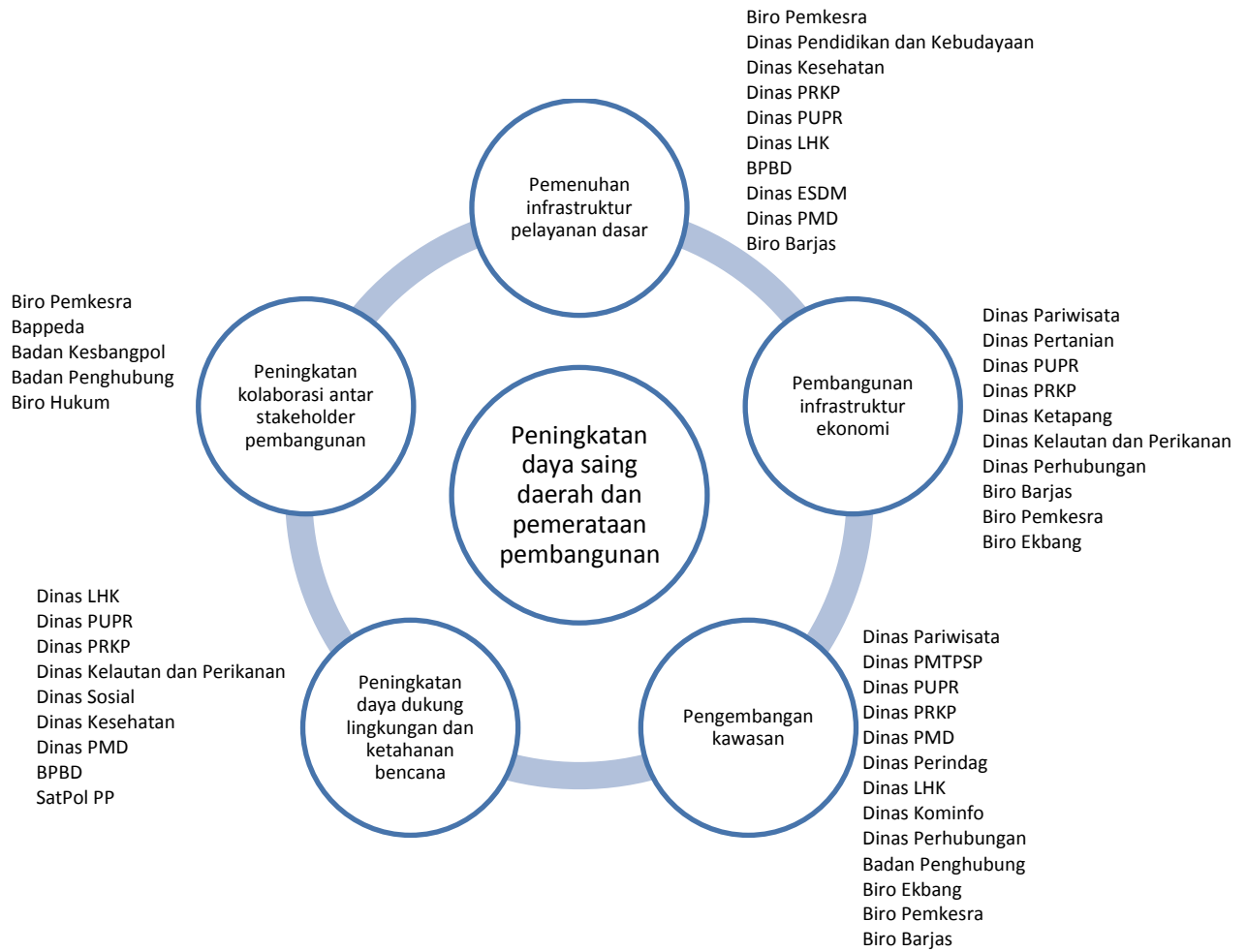
- Peningkatan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota
- Peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan

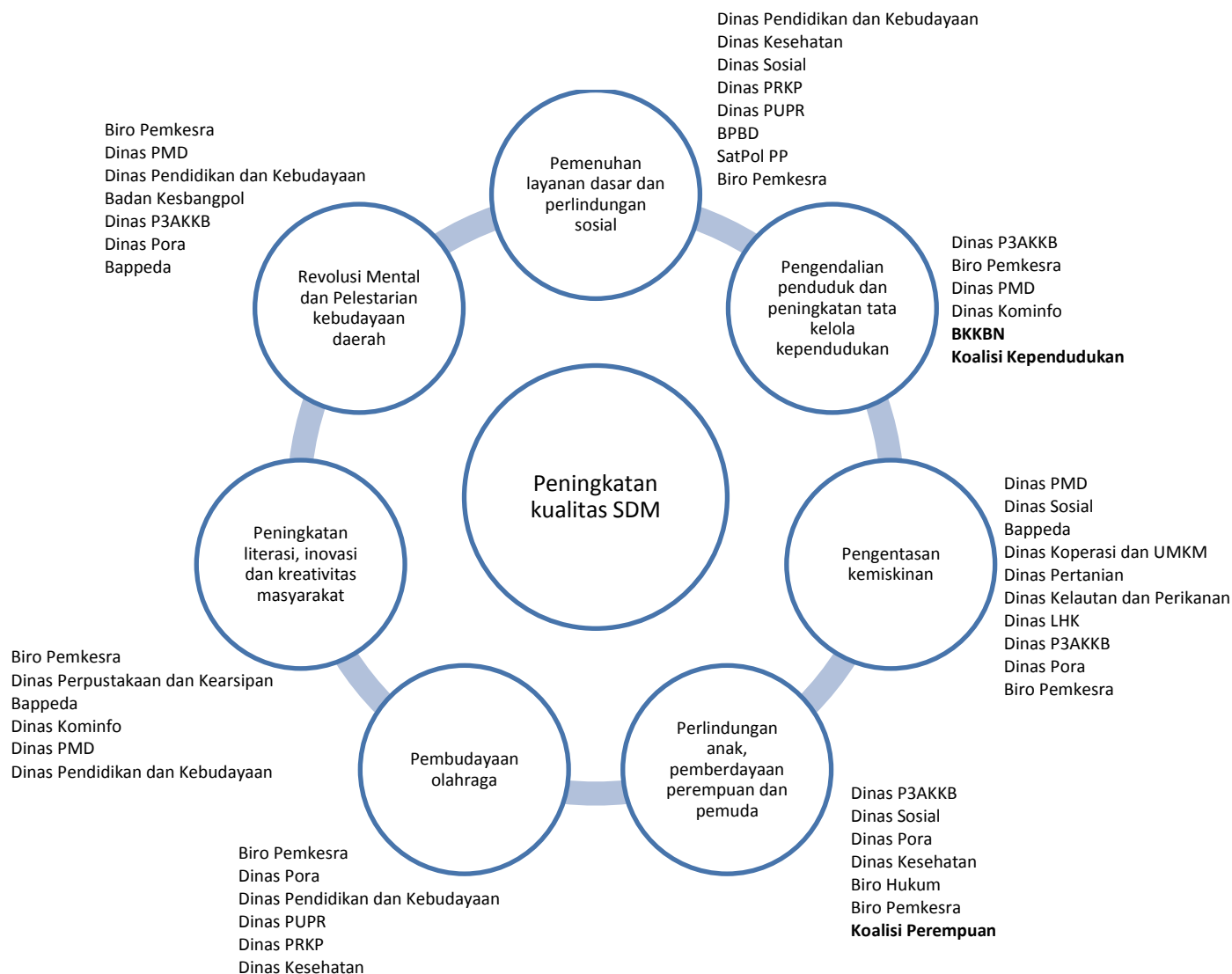
Dalam pendekatan HTIS, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, pendekatan integratif diselenggarakan dengan mengintegrasikan beberapa kewenangan, ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas. Untuk mencapai indikator dan target kinerja pada setiap program prioritas, dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja prioritas pembangunan daerah, dilakukan integrasi beberapa perangkat daerah dan institusi di luar perangkat daerah Provinsi Banten, sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan prioritas, sebagai berikut:

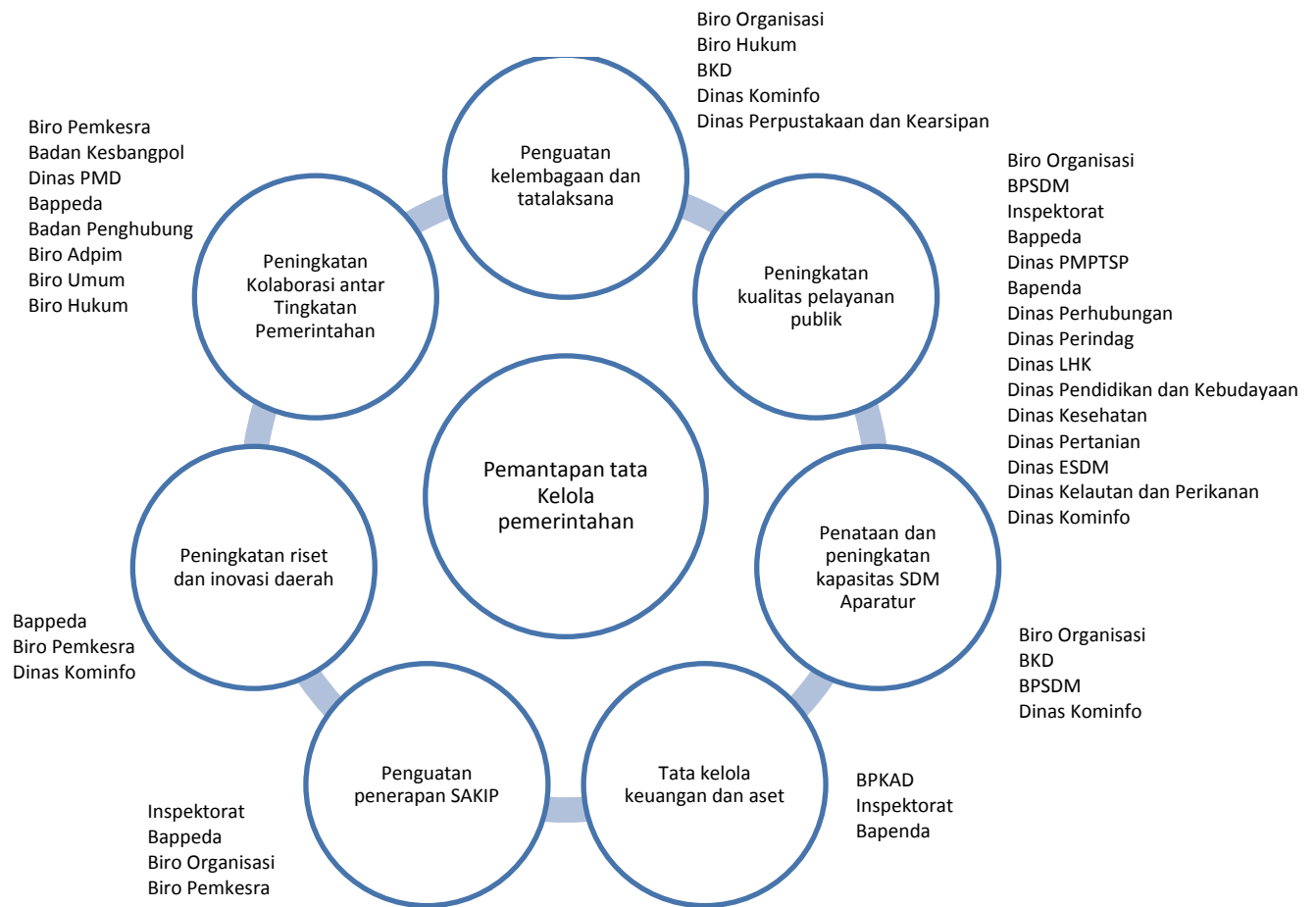
Dinas Pertanian
Dinas Kelautan dan
Perikanan
Bappeda
Dinas Ketapang
Biro Ekbang
Dinas Koperasi dan UMKM
Dinas PMD
Dinas Perindag
Dinas Pariwisata

Bank Indonesia
Badan Pusat Statistik
Dinas Perindag
Dinas Ketapang
Biro Ekbang









Selain mengintegrasikan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu, beberapa kegiatan prioritas dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 adalah berbasis lokasi spasial tertentu, seperti:

- Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang
- Untuk mendukung Prioritas Nasional, pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung akan dipusatkan di KPPN Pandeglang.
- Dalam rangka menunjang investasi daerah, maka peningkatan ketersediaan infrastruktur, berupa pemenuhan jalan Provinsi sesuai standar teknis dan

dan ketersediaan pangan akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang

- Untuk mendukung Jalan Tol Serang–Panimbang, maka Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan pembangunan jalan akses Cikeusal-Boru di Kabupaten Serang dan Kota Serang
- Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional akan dipusatkan di Kabupaten Serang
- Lokasi prioritas untuk peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan adalah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- Untuk mendukung penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area), akan dilaksanakan di Kota Serang dan Kabupaten Serang
- Dalam rangka pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, akan dilaksanakan di Kabupaten Lebak
- Untuk mendukung pengembangan Kawasan Perdesaan di daerah yang menjadi Prioritas Nasional akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
- Pengelolaan dan konservasi hutan akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
- Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana akan dilaksanakan di daerah-daerah rawan bencana, di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang

- Dalam rangka mendukung perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK), lokasi prioritas adalah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
- Untuk mendukung perluasan kepemilikan akta kelahiran, lokasi prioritas adalah di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang.
- Dalam rangka peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa, layanan perpustakaan keliling akan diarahkan pada 15 desa tertinggal di Provinsi Banten.

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menentukan bahwa penyusunan RKPD provinsi adalah sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi. Sehubungan dengan itu, terhadap prioritas daerah dilakukan penyelarasan antara indikasi program prioritas dengan program dalam RPJMD, serta program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Penyelarasan tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9 Penyelarasan program prioritas dengan program dalam RPJMD, serta program dalam Kepmendagri 050-3708/2020

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
1	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif					
		a	Pengendalian inflasi daerah	Penguatan peran TPID	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting
				Menjamin kelancaran pasokan dan distribusi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan pokok dan Barang Penting
				Penguatan sistem logistik provinsi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
				Diversifikasi pangan untuk mengendalikan volatilitas harga	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		b	Pengembangan sektor unggulan dan peningkatan ketahanan pangan	Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
					Program Pembangunan Sumber Daya Air	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
					Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
				Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan jagung di KPPN Pandeglang (PN)	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
			Penguatan koordinasi stakeholder sektor unggulan daerah	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	
			Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Program Keterjangkauan Pangan, Program Peningkatan Ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	

No	Prioritas Daerah		Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		c	Revitalisasi Industri dan Perdagangan	Peningkatan hubungan industrial antara pekerja, pemerintah dan pengusaha	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial
					Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program pengendalian izin usaha industri
				Dukungan infrastruktur dan pasokan bahan baku	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program hubungan industrial
					Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
				Dukungan SDM tenaga kerja terampil	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
					Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program pengembangan kurikulum
				Peningkatan stabilitas kamtibmas	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Program pengwaasan ketenagakerjaan
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Industri	Program standardisasi dan perlindungan konsumen
		d	Peningkatan investasi daerah	Penyediaan data dan informasi peluang investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
			Penyederhanaan dan percepatan perizinan	Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Program pelayanan penanaman modal
				Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
			Peningkatan ketersediaan infrastruktur investasi	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program pengembangan permukiman
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program penyelenggaraan jalan
				Program Keciaptakaryaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
			Keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal
				Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Program perencanaan dan pembangunan industri
			Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
			Kemudahan akses pasokan bahan baku	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Kemudahan akses tenaga kerja terampil	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program penempatan tenaga kerja
				Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program pengembangan kurikulum
			Fasilitasi promosi	Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Program promosi penanaman modal

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Inovasi, teknologi dan branding	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
					Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				Revitalisasi PLUT Banten untuk SDM UMKM	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
				Pengembangan kewirausahaan perempuan	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
					Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Pengembangan kewirausahaan pemuda	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas DayaSaing Kepemudaan
		f	Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				Peningkatan dukungan infrastruktur destinasi wisata	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				Peningkatan promosi dan pemasaran	Program Pemasaran Produk Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Peningkatan SDM dan kelembagaan pariwisata	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
				Peningkatan jaminan keamanan dan 3K pada destinasi wisata	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		g	Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Revitalisasi SMK, terutama pengembangan SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, serta energi dan pertambangan	Program Pendidikan Menengah	Program Pengelolaan Pendidikan
					Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Program Pengembangan Kurikulum
					Program Pendidikan Menengah	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
				Revitalisasi BLKI, yang mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial
				Peningkatan kerjasama dengan BBLKI	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Kerjasama pemagangan dengan negara/daerah lain	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Progarm dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		h	Adopsi dan Inovasi IPTEK, untuk memberikan nilai tambah ekonomi	Akselerasi Peran Iptek dalam diversifikasi Produk Olahan hasil Pertanian dan Perikanan	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Kolaborasi Akademisi, Bisnis dan Government dalam perwujudan Ekonomi Digital	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Penerapan Inovasi dan Iptek	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan					
		a	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar	Penuntasan pembangunan USB dan RKB	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program Pengelolaan Pendidikan
				Pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Provinsi (pembangunan Rumah Sakit Cibaliung dan Ciligrang)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Perluasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Keciptakaryaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Pengelolaan sampah dan limbah	Program Keciptakaryaan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Dukungan pemulihan infrastruktur pasca bencana (Kawasan Pesisir Selat Sunda dan bencana lainnya)	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan
				Penyediaan sarana tenaga listrik di perdesaan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
		b	Pembangunan infrastruktur ekonomi	Dukungan pembangunan infrastruktur pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
				Optimalisasi infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan usaha tani)		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
					Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Dukungan Pembangunan Jalan Tol Serang –Panimbang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Pengembangan pusat logistik pangan provinsi dan regional	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
				Peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
				Dukungan penyelenggaraan SAUM SMA (Sistem Angkutan Umum Masal Serang metropolitan Area)	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		c	Pengembangan kawasan	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
				Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana	Program Pembangunan Sumberdaya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dan zonasi	Program Penatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penatan Ruang
				Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
				Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Pemenuhan logistik kebencanaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Peningkatan koordinasi antar stakeholder lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		e	Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan	Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi dengan universitas	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Penguatan Provinsi Banten di forum kerjasama Jabodetabekjur dan wilayah perbatasan lainnya	Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Penanganan anak tidak sekolah	Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Khusus	Program pengelolaan pendidikan
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Program Rehabilitasi Sosial
				Penanganan stunting	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
					Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		b	Pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, kegiatan prioritas diarahkan pada:	Penerapan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
			Peningkatan kolaborasi stakeholder kependudukan	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pendaftaran penduduk
			Dukungan perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
			Dukungan perluasan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang (PN)	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Program pencatatan sipil
		c	Pengentasan kemiskinan	Penguatan basis data untuk integrasi bantuan sosial	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan
			Revitalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Fakir Miskin	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
			Peningkatan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan (penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat pesisir dan hutan, penguatan wirausaha pemuda)	Program Pengendalian DAS dan Konservasi Hutan	Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa/Kelurahan	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
					Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
				Perluasan jenis dan penerima manfaat bantuan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
				Perluasan penerima manfaat Jamsosratu	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial
		d	Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda	Penguatan sistem informasi data gender dan anak	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengelolaan sistem data gender dan anak
				Penguatan perlindungan perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan perempuan
					Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
				Pengembangan Provinsi Layak Anak	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program perlindungan khusus anak
		e	Pembudayaan olahraga	Penguatan PUG-PPRG	Program Pemberdayaan Perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
				Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
				Pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pelajar	Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
				Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Optimalisasi fasilitas dan sarana olah raga milik Pemprov Banten	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga	Program pengembangan daya saing keolahragaan
		f	Peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat	Peningkatan budaya literasi sekolah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
				Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program pembinaan perpustakaan
				Lomba kreativitas dan inovasi masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
				Fasilitasi pelayanan hak atas kekayaan intelektual	Program Penelitian dan Pengembangan	Program penelitian dan pengembangan daerah
		g	Revolusi Mental dan Pelestarian kebudayaan daerah	Penguatan kualitas dan peran keluarga dalam pembentukan karakter	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Program peningkatan kualitas keluarga
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
				Peningkatan pelayanan kepemudaan	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
				Optimalisasi fungsi museum	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengelolaan permuseuman
				Pengelolaan cagar budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
				Pembinaan lembaga adat	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Peningkatan kapasitas SDM Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan
				Pelestarian sejarah, tradisi dan budaya	Program Pelestarian Kebudayaan	Program pembinaan sejarah
4	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan					

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		a	Penguatan kelembagaan dan tatalaksana	Finalisasi penyederhanaan birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Peningkatan keterbukaan informasi publik	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
				Pengembangan proses bisnis instansi dan unit	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Peningkatan kualitas budaya kerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan
				Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum
		b	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan	Program Penataan Organisasi

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
				Peningkatan kompetensi dan perilaku SDM pelayanan	Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Teknis dan Fungsional Program Pengembangan SDM Aparatur Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan	Program tata kelola pemerintahan (seluruh OPD)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
				Peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
					Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
				Peningkatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		c	Penataan dan peningkatan kapasitas Aparatur SDM	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
				Penataan Anjab, ABK, Standar Kompetensi	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah
				Implementasi manajemen talenta (talent pool)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah
				Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan HCDP	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Kepegawaian Daerah

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		d	Peningkatan tata kelola keuangan dan aset	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan pengawasan pelaksanaan APBD	Program Penatausahaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
			Peningkatan pendapatan asli daerah	Program Peningkatan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	
		e	Penguatan penerapan SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas penatausahaan kekayaan dan kewajiban daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
				Penguatan <i>cross-cutting</i> program dan kegiatan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
				Peningkatan kualitas pengukuran kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Peningkatan kualitas pelaporan kinerja	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
				Peningkatan kualitas evaluasi kinerja	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Peningkatan kualitas capaian kinerja	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Peningkatan kualitas capaian kinerja	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
				Peningkatan kualitas capaian kinerja	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
		f	Peningkatan riset dan inovasi daerah	Penguatan basis data pemerintahan daerah	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Optimalisasi hasil kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan
				Peningkatan inovasi daerah	Program Penelitian dan Pengembangan
				Peningkatan kolaborasi stakeholder kelitbangan	Program Penelitian dan Pengembangan
		g	Peningkatan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan	Peningkatan kualitas monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Peningkatan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan fasilitasi kerja sama antar Kabupaten/Kota	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Peningkatan stabilitas politik, hukum dan keamanan	Program Penataan Desa
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
					Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
					Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
					Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
					Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

No	Prioritas Daerah	Program Prioritas		Kegiatan Prioritas	Program dalam RPJMD	Program Nomenklatur (Kepmendagri 050-3708/2020)
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah perlu dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan tersebut merupakan bagian dari pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota, sebagai pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek dari Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah yang mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Daerah provinsi tersebut.

Dalam rangka pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Provinsi Banten, RKPD ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota melakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi pada tahun 2022. Sebagai pedoman bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota, maka arahan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk tahun 2022, dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut:

5.1.1. Kabupaten Pandeglang

Arah kebijakan Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2022 meliputi:

- a. Optimalisasi Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terpadu
- b. Pengembangan pertanian komoditas unggulan dan pusat agrobisnis, serta distribusi agro skala Kabupaten/Provinsi,
- c. Penguatan organisasi pusat pelayanan petani dan nelayan (call centre/SMS Centre),
- d. Pengembangan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan dukungan pengembangan lahan maritim industri,
- e. Penguatan Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait untuk reaktivasi jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan, dan
- f. Peningkatan kualitas kawasan/destinasi wisata.

Adapun Isu Strategisnya adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting
- 3) Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan sebagai Daerah Tertinggal Entas
- 4) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada khususnya terkait jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang layanan dasar lainnya.
- 5) Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19
- 6) Penataan ruang dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Pandeglang masih belum optimal
- 7) Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah
- 8) Meningkatnya tingkat pengangguran khususnya berkaitan dengan hilangnya sebagian mata pencaharian (*livelihood systems*) masyarakat pesisir yang terdampak bencana tsunami
- 9) Meningkatnya rumah tangga rentan miskin khususnya yang disebabkan oleh faktor bencana alam

- 10) Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan khususnya terkait dengan masih kurangnya dukungan SDM ASN dalam Jabatan Fungsional Tertentu pada beberapa OPD yang diindikasikan dengan belum tersedianya formasi jabatan fungsional tertentu untuk beberapa perangkat daerah.

Sasaran Strategis

- 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang ada khususnya terkait jalan dan jembatan serta infrastruktur penunjang layanan dasar lainnya.
- 2) Menurunnya tingkat pengangguran seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian iklim kemudahan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- 3) Menurunnya rumah tangga rentan miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang diindikasikan dengan meningkatnya jumlah SDM ASN dalam jabatan fungsional tertentu secara profesional dan terimplementasikannya sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Gov) secara efisien dan efektif.

Prioritas Pembangunan

- 1) Program yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur meliputi Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik.
- 2) Program yang berkaitan dengan penurunan tingkat pengangguran yaitu Program Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- 3) Pengembangan kewirausahaan perempuan, pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM
- 4) Program yang berkaitan dengan penurunan rumah tangga rentan miskin diantaranya Program Penanggulangan Kemiskinan dan Program Pengentasan Desa Tertinggal.

- 5) Program yang berkaitan dengan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yaitu Program Penataan Daerah dan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
- 6) Program yang berkaitan dengan Reformasi Kesehatan
- 7) Program yang berkaitan dengan sentra produksi padi yang mendukung pengembangan sarana prasarana pertanian (irigasi primer, sekunder, tersier)
- 8) Program yang berkaitan dengan sentra produksi padi dan jagung (dukungan program nasional di KPPN Pandeglang)
- 9) Pengembangan produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan dukungan pengembangan lahan maritim industri,
- 10) Peningkatan layanan kependudukan berupa perluasan cakupan NIK

5.1.2 Kabupaten Lebak

Arah kebijakan Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang mendukung terwujudnya destinasi wisata yang memiliki daya tarik tinggi. Infrastruktur tersebut difokuskan pada infrastruktur transportasi, komunikasi dan informasi, dan sumber daya energi.

a. Isu Strategis

- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting
- 3) Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk menjaga dan meningkatkan kesinambungan pembangunan sebagai Daerah Tertinggal Entas
- 4) Potensi pariwisata alam, sejarah, dan budaya yang beragam.
- 5) Potensi lebak sebagai daerah lumbung pangan Regional/Nasional;
- 6) Kawasan kota publik maha sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat;

- 7) Potensi waduk karian pasca operasi: perikanan, sumber air baku, irigasi, dan pariwisata.
- 8) Infrastruktur wilayah yang relatif belum memadai seperti RTLH, alih fungsi lahan, lahan kritis, interkoneksi moda transportasi
- 9) Ancaman terhadap kelestarian LH sebagai dampak eksploitasi SDA secara illegal dan/ berlebihan

b. Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Pengembangan kewirausahaan perempuan, pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM
3. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
5. Pengembangan Rumah Sakit Provinsi
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan
9. Dukungan dalam pengembangan Kota Baru Maja
10. Program yang berkaitan dengan Reformasi Kesehatan
11. Program yang berkaitan dengan pengembangan pelabuhan perikanan
12. Dukungan terhadap pengembangan KSPP di wilayah Lebak
13. Peningkatan layanan kependudukan berupa perluasan cakupan NIK dan kepemilikan Akte Kelahiran

5.1.3 Kabupaten Tangerang

Arah kebijakan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2022 adalah

1. Menerapkan Ekstrakurikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
2. Mengoptimalkan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan

a. Isu Strategis

- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting
- 3) Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19
- 4) Pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal khususnya penduduk local
- 5) Kinerja Sektor pertanian fluktuatif (pertanian minim inovasi, serta terjadinya alih fungsi lahan)
- 6) Kebutuhan transportasi massal
- 7) Kebutuhan perumahan

b. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
2. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
3. Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif
5. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi

c. Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial,
2. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran,
3. Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
4. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
5. Pengelolaan persampahan dan lingkungan,
6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

7. Peningkatan layanan kependudukan berupa perluasan cakupan NIK
8. Meningkatkan Pengembangan Produk Lokal dan Unggulan Daerah
9. Meningkatkan peran BUMD dan BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi daerah
10. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga
11. Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang terintegrasi
12. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro

5.1.4 Kabupaten Serang

Arah kebijakan Kabupaten Serang pada Tahun 2022 adalah Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Isu Strategis

- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting
- 3) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 4) Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Pendidikan
- 5) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
- 6) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- 7) Peningkatan Infrastruktur, Sarpras Pendidikan dan Kesehatan
- 8) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Perumahan
- 9) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10) Peningkatan Daya Dukung dan Daya Saing Sdm Serta Kawasan Strategis
- 11) Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Ikm dan Ukm

- 12) Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19

Prioritas Pembangunan

- 1) Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan Kesejahteraan Sosial;
- 2) Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlakul Karimah;
- 3) Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan dasar di semua Wilayah;
- 4) Peningkatan, Pemerataan dan kualitas daya saing Perekonomian;
- 5) Peningkatan kualitas Penataan ruang, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta penanggulangan bencana;
- 6) Pengembangan Daya Dukung dan daya Saing Kawasan Strategis;
- 7) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima.
- 8) Dukungan terhadap SAUM Serang Metropolitan Area
- 9) Peningkatan layanan kependudukan berupa perluasan kepemilikan Akte Kelahiran

5.1.5 Kota Tangerang

Arah kebijakan Kota Tangerang pada Tahun 2022 adalah Peningkatan Daya Saing Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah

a. Isu Strategis

- 1) Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 2) Masih tingginya prevalensi stunting
- 3) Daya Saing Sumber Daya Manusia, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Publik

- 4) Daya Saing Infrastruktur Kota, meliputi Kemacetan, Permukiman Kumuh, Banjir Dan Genangan, Persampahan, Air Bersih, Pencemaran Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka
- 5) Daya Saing Perekonomian, meliputi Investasi, Ekonomi Lokal (UKM), Ketahanan Pangan
- 6) Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19

b. Prioritas Pembangunan

- 1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing (Pendidikan dan Kesehatan);
- 2) Penanggulangan Kemiskinan ,Pengangguran dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan;
- 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan
- 5) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Terintegrasi;
- 6) Peningkatan Investasi dan Peran Ekonomi Lokal
- 7) Dukungan terhadap RITJ

5.1.6 Kota Cilegon

Arah kebijakan Kota Cilegon pada Tahun 2022 adalah Mewujudkan Pembangunan Yang Inklusif Berbasis Kewilayahan.

a. Isu Strategis

1. Pelaksanaan pelayanan dasar yang belum optimal dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian
3. Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
5. Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19

6. Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas Perkotaan
7. Kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta kualitas ketentraman, ketertiban, demokrasi dan hukum

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan jalan melalui pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Tersedianya sistem angkutan umum massal yang sesuai standar layanan.
4. Meningkatnya kualitas drainase.
5. Meningkatnya ketersediaan RTH publik yang representatif
6. Terbentuknya destinasi wisata artificial yang dikelola secara terpadu.
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.

c. Prioritas Pembangunan

1. Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan fasilitas Perkotaan
2. Kualitas sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial
3. Penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Peningkatan kemandirian perekonomian lokal
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*good governance*)
6. Pengembangan sektor UMKM

5.1.7 Kota Serang

a. Isu Strategis

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pendidikan
2. Infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana
3. Pengembangan destinasi wisata, perdagangan, jasa dan pertanian
4. Pemantapan ketahanan pangan

5. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
 6. Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19
 7. Reformasi birokrasi
- b. Sasaran Strategis
1. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan
 2. Pendidikan dasar
 3. Pengarusutamaan gender
 4. Perlindungan anak
 5. Pelestarian nilai-nilai budaya lokal peningkatan pembangunan infrastruktur
 6. Konektivitas wilayah
- c. Prioritas Pembangunan
1. Pengembangan Rumah Sakit Provinsi
 2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan, pendidikan dasar, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal
 3. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar permukiman
 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang, dan mitigasi bencana
 5. Peningkatan daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor potensial
 6. Fasilitasi promosi pariwisata Provinsi Banten
 7. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial
 8. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
 9. Dukungan terhadap SAUM Serang Metropolitan Area
 10. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan Serang sebagai etalase ibukota Provinsi

5.1.8 Kota Tangerang Selatan

Arah kebijakan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022 adalah Penguatan Ekonomi Kota Berbasis Jasa dan Perdagangan menuju Tangerang Selatan yang Sejahtera dan Berkeadilan

a. Isu Strategis

1. Kualitas sumber daya manusia
2. Pertumbuhan penduduk
3. Sarana dan prasarana wilayah
4. Perekonomian Daerah
5. Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial
6. Tingkat daya beli masyarakat yang menurun sebagai akibat dampak ekonomi yang timbul pada masa pandemic Covid 19

b. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatnya investasi
7. Meningkatnya perekonomian perkotaan
8. Meningkatnya produk unggulan daerah
9. Meningkatnya pelayanan publik
10. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah

c. Prioritas Pembangunan

1. Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Pengembangan Kualitas Infrastruktur (RTH, saluran drainase dan gorong-gorong)
3. Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
4. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
5. Peningkatan layanan kependudukan berupa perluasan cakupan NIK
6. Peningkatan transportasi massal
7. Pengembangan ekonomi kreatif

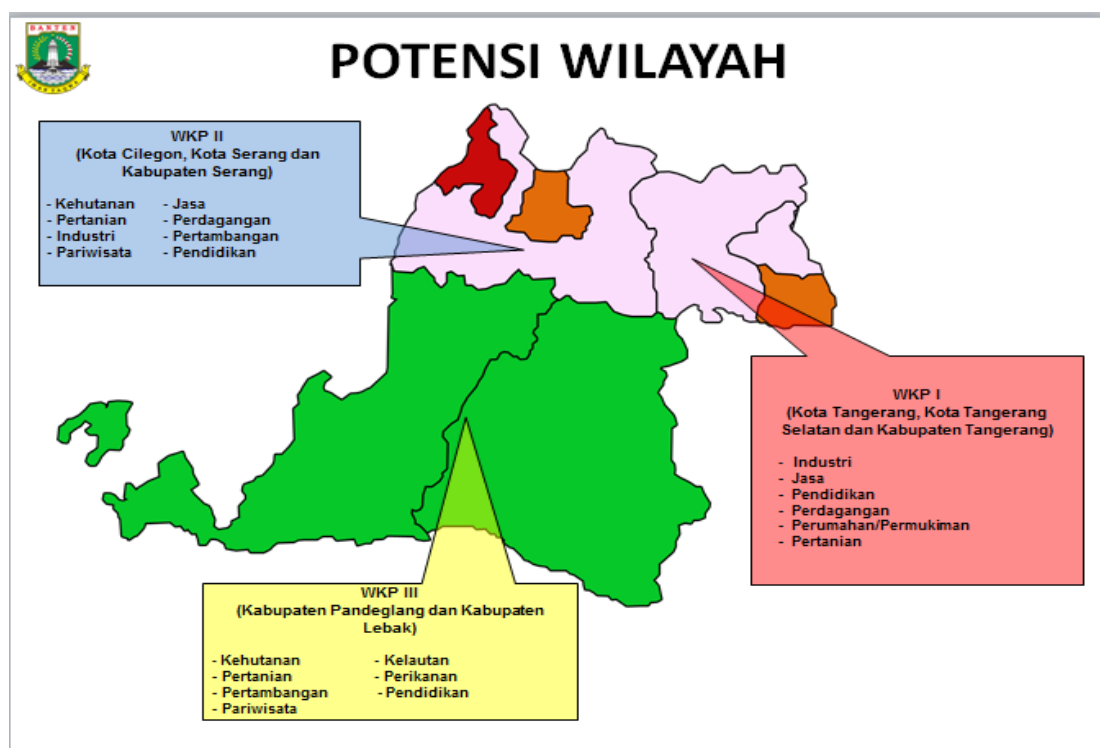
5.2 Rencana Program Kegiatan di Wilayah Kerja Pembangunan (WKP)

Lingkup Wilayah Provinsi Banten merupakan wilayah Daerah seluas 966.292 (sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar yang terdiri atas :

- a. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) I meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- b. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) II meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon; dan
- c. Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) III meliputi Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Adapun arahan fungsi dan peranan Wilayah Kerja Pembangunan (WKP) meliputi:

- a. WKP I diarahkan untuk pengembangan kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertanian, permukiman atau perumahan, dan pendidikan;
- b. WKP II diarahkan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan, pendidikan, kehutanan, pertanian, industri, pariwisata, jasa, perdagangan, dan pertambangan; dan
- c. WKP III diarahkan untuk pengembangan kegiatan kehutanan, pertanian, pertambangan, pariwisata, kelautan, perikanan, industri, perkebunan dan pendidikan.



Gambar 5.1 Wilayah Kerja Pembangunan di Provinsi Banten

Kebijakan Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang, kebijakan pengembangan pola ruang, serta kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten.

Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022 mengacu kepada Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 dengan lebih berfokus kepada rencana struktur ruang. Adapun rencana struktur ruang pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi (Perkotaan Kota Tangerang, Perkotaan Kota Tangerang Selatan, dan Perkotaan Kabupaten Tangerang)
2. Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan melalui peningkatan fungsi (Kawasan Perkotaan Serang (Kota Serang dan Kabupaten Serang), Kawasan Perkotaan Cilegon)
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan provinsi (Kawasan Perkotaan Rangkasbitung, Kawasan Perkotaan Pandeglang)
4. Rencana pembangunan jalan dari Gerbang Tol Serang Timur – Kawasan Pusat Pemerintahan (Kota Serang)
5. Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di seluruh wilayah Provinsi Banten (seluruh wilayah Provinsi Banten)
6. Jaringan jalan provinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara PKN dengan PKW dan antar PKW
7. Rencana pembangunan akses tol/interchange, jalan lingkar, simpang sebidang, underpass, flyover, frontage yang berada di jalan kewenangan provinsi (seluruh wilayah Provinsi Banten)
8. Pembangunan, peningkatan dan penetapan status untuk menjadi jalan provinsi (seluruh wilayah Provinsi Banten)
9. Pengembangan terminal penumpang tipe B untuk melayani angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota/pedesaan (Terminal Pasar Badak Pandeglang di Kabupaten Pandeglang,

- Terminal Bayah di Kabupaten Lebak, Terminal Ciputat di Kota Tangerang Selatan, Terminal Cadas, Jatiuwung di Kota Tangerang, Terminal Ciledug di Kota Tangerang, Terminal Cibeber/Seruni di Kota Cilegon, Terminal Tanara di Kabupaten Serang)
10. Rencana pembangunan terminal tipe B (Palima Kota Serang)
 11. Rencana Pengembangan pelayanan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan penyeberangan perintis yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 12. Rencana pembangunan pelabuhan regional multifungsi (Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak dan Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)
 13. Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik PLTU, PLTM, PLTGU, PLTD, PLTP, EBT, PLTSa dan PLTS (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 14. Rencana pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 15. Pembangunan serat optik antar kabupaten/kota (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 16. Pengembangan transmisi penyiaran (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 17. Pengembangan, pengendalian dan pembangunan menara Base Transceiver Station untuk keterpaduan penggunaan tower bersama (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 18. Rencana pengembangan dan Pembangunan sistem jaringan sumber daya air Bendungan, CAT, Situ, Waduk, Danau, Rawa dan Kolam Penyimpanan (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 19. Peningkatan Dan Pemeliharaan Pengelolaan Daerah Irigasi (DI) (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 20. Pembangunan atau peningkatan jaringan Irigasi (seluruh wilayah Provinsi Banten)
 21. Peningkatan dan Pemeliharaan Rehabilitasi jaringan Irigasi Eks Teluk Lada (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang)
 22. Rehabilitasi Daerah Irigasi (Ciujung, Cisadane, Cidurian)
 23. Pembangunan Irigasi (Ciseukeut, Cikaduan, Cipatujah, Caringin)

24. Pengelolaan Wilayah Sungai (WS Cidanau – Ciujung – Cidurian, WS Ciliwung – Cisadane, WS Ciliman – Cibungur, WS Cibaliung – Cisawarna)
25. Pengembangan TPST Regional (Kabupaten Tangerang untuk melayani WKP I, Kabupaten Serang untuk melayani WKP II, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk melayani WKP III)
26. Pembangunan infrastruktur energi asal sampah (di seluruh kabupaten/kota)
27. Mendorong Pengembangan Kota-Kota sentra produksi
28. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
29. Rencana pembangunan terminal Pusat Distribusi Provinsi/Regional
30. Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan

5.2.1 Rencana Pembangunan di WKP I (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)

Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, WKP I telah disusun rencana pembangunan berupa:

1. Pembangunan ruang kelas baru dan laboratorium SMA;
2. Pengadaan media pembelajaran SMA;
3. Pembangunan ruang kelas baru dan praktek siswa SMK;
4. Pemenuhan jalan sesuai standar teknis;
5. Pemeliharaan jalan dan jembatan kewenangan provinsi;
6. Penanganan banjir di kawasan jabodetabekpunjur;
7. Pembangunan IPAL Komunal;
8. Pembangunan sentra pemasaran produk UMKM;
9. Peningkatan pengelolaan pelayaran;
10. Peningkatan keselamatan lalu lintas jalan;
11. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
12. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

5.2.2 Rencana Pembangunan di WKP II (Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon)

Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, WKP II telah disusun rencana pembangunan berupa:

1. Fasilitasi promosi pariwisata dipusatkan di Kota Serang
2. Penataan Kawasan Banten Lama;
3. Penataan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten;
4. Pembangunan Sport Center Tahap II;
5. Pembangunan SPAM Regional Sindang Heula;
6. Pembangunan Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api;
7. Peningkatan Keselamatan Lalulintas Jalan;
8. Pembangunan ruas jalan baru sepanjang 3 KM (Jalan akses Cikeusal – Boru);
9. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Serang dan Cilegon;
10. Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada ruas Jalan Provinsi;
11. Pembangunan IPAL Komunal;
12. Pengembangan pusat logistik pangan provinsi ;
13. Pengembangan RS Rujukan (RS Banten)
14. Pembangunan Ruang Kelas Baru (SMA dan SMK);
15. Pengadaan Media Pembelajaran SMA.
16. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
17. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

5.3.3 Rencana Pembangunan di WKP III (Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak)

Pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2022, WKP III telah disusun rencana pembangunan berupa:

1. Pembangunan RS Tingkat Pratama di Ciligrang (Kab. Lebak);
2. Pembangunan RS Tingkat Pratama di Cibaliung (Kab. Pandeglang);
3. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
4. Pemasangan Penerangan Jalan Umum pada ruas Jalan Provinsi;
5. Pembangunan Zona Selamat Sekolah;
6. Peningkatan Pengelolaan Pelayaran;

7. Peningkatan Keselamatan Lalulintas Jalan;
8. Pembangunan infrastruktur pertanian untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah dan ketersediaan pangan berupa rehabilitasi irigasi;
9. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan permukiman
10. Pengembangan destinasi wisata, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur, promosi dan pemasaran, serta jaminan keamanan dan 3K, akan dipusatkan di Kabupaten Lebak.;
11. Pembangunan Pengaman Pantai;
12. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Lebak (18,1 km);
13. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang (174 km);
14. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
15. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
16. Pemulihan infrastruktur pasca bencana berupa pembangunan rumah bagi korban bencana
17. Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis.
18. Pengembangan komoditas unggulan daerah dan perikanan budidaya akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang
19. Lokasi untuk peningkatan kapasitas pelabuhan perikanan
20. Pembangunan sentra produksi pertanian berupa Sentra Produksi Padi dan Jagung di KPPN Pandeglang dan RMU (Rice Mill Unit) di Pandeglang
21. Pengembangan kewirausahaan perempuan, pengembangan kewirausahaan pemuda diarahkan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan UMKM, sehingga akan dipusatkan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
22. Peningkatan budaya literasi masyarakat dan desa melalui layanan perpustakaan keliling pada desa tertinggal.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Kerja dan Program Prioritas Tahun 2022

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi 2020 dan sebagian pencapaian kinerja Tahun 2021, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2022 serta pagu indikatifnya. Rencana Kerja dan Pembangunan Tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Tahun 2022.

Menyusun Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud secara umum berkaitan dengan :

1. Pengelolaan Pendidikan Khusus
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
4. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
5. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
6. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
8. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
9. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
10. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
12. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
13. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
14. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
15. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

Usulan Program kegiatan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Provinsi untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.

Disamping itu dengan diterapkannya Permendagri 90 tahun 2019 maka Nomenklatur Program dan Kegiatan telah mengacu pada regulasi tersebut dengan mengacu indikator pada RPJMD 2017-2022.

Untuk Tahapan RKPD disajikan penyandingan Prioritas Daerah dengan Program Prioritas dan Program dalam Nomenklatur di dalam SIPD beserta OPD Pengampu. Tahapan selanjutnya dalam penyusunan RKPD dilakukan sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi setelah penyelenggaraan Musrenbangnas RKP 2022 oleh Bappenas beserta lokasi dan pagu indikatifnya.

Berikut tabel sinkronisasi Prioritas Provinsi 2022 dengan Program Prioritas, sebagai berikut:

Tabel 6.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan	Dinas Pariwisata

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Program Hubungan Industrial	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan	Penyediaan Air Minum	Permukiman
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Dan Ekosistemnya	
		Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Dinas Kesehatan
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Satuan Polisi Pamong Praja
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Dinas Sosial
			Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
			Dinas Ketahanan Pangan
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Dinas Perhubungan
			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Dinas Kelautan dan Perikanan
			Dinas Pariwisata
			Dinas Pertanian

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Pengamanan Informasi	dan Persandian
		Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Program Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
		Program Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Sekretariat Daerah
		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 6.2 Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.408.800.000	0,02
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000	0,00
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	350.000.000	0,00
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	450.000.000	0,01
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.885.679.000	0,02
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.651.363.000	0,02
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.564.944.000	0,05
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	900.000.000	0,01
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.500.000.000	0,02
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000	0,01
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.100.000.000	0,01
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	250.000.000	0,00
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.121.800.000	0,01
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.873.781.700	0,47
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.926.400.000	0,02
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	422.040.000	0,00
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.047.019.000	0,01
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.303.424.000	0,20
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.844.600.000	0,07

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000	0,01
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.583.580.000	0,02
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.647.757.200	0,09
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.088.802.500	0,02
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.762.124.038	0,02
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000.000	0,01
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	400.000.000	0,00
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.000.000.000	0,06
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000	0,00
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	0,01
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.200.000.000	0,01
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.300.000.000	0,01
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.700.000.000	0,03
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	380.000.000	0,00
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.200.000.000	0,04
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	0,00
		SUB JUMLAH	115.062.114.438	1,29
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.100.000.000	0,05
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	79.750.000.000	0,89
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	650.000.000	0,01

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.805.000.000	0,09
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.000.000	0,01
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	200.000.000	0,00
	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	18.965.000.000	0,21
		SUB JUMLAH	112.470.000.000	1,26
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.517.849.057.496	39,30
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	720.954.331.049	8,05
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	38.284.528.000	0,43
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	435.994.000	0,00
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.445.337.500	0,03
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.599.250.000	0,02
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000	0,00
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.620.590.000	0,10
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	56.688.786.500	0,63
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	842.240.000	0,01
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350.500.000	0,00
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.806.886.600	0,05
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	701.100.000	0,01
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.084.370.000	0,02
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	875.224.000	0,01
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	513.278.000	0,01
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	489.794.000	0,01
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	296.472.000	0,00

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.250.000	0,00
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.068.000	0,00
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202.138.000	0,00
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	725.000.000	0,01
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.695.396.000	0,03
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	200.000.000	0,00
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	175.000.000	0,00
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	175.000.000	0,00
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.000.000.000	0,08
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.384.552.404	0,28
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.000.000.000	0,01
		SUB JUMLAH	4.395.718.143.549	49,11
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	500.000.000	0,01
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81.825.000.000	0,91
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	141.552.000	0,00
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000	0,00
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.779.030.000	0,02
		SUB JUMLAH	84.395.582.000	0,94
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	72.232.500.000	0,81
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.200.000.000	0,24
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100.000.000	0,00
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.600.000.000	0,02
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	204.394.401.686	2,28

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	26.475.000.000	0,30
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	436.399.523.439	4,88
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.300.000.000	0,04
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.500.000.000	0,03
		SUB JUMLAH	768.201.425.125	8,58
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.665.875.000	0,09
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.238.450.000	0,01
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	890.000.000	0,01
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000	0,00
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	0,00
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	0,00
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	860.000.000	0,01
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.436.300.000	0,04
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	920.000.000	0,01
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	200.000.000	0,00
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	270.000.000	0,00
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.300.000.000	0,03
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	608.082.000	0,01
		SUB JUMLAH	19.018.707.000	0,21
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.244.654.000	0,05
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	200.000.000	0,00

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000	0,00
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	113.278.000	0,00
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.000.000	0,00
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.195.000.000	0,08
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	14.855.292.000	0,17
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	836.580.000	0,01
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	600.000.000	0,01
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	600.000.000	0,01
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	200.000.000	0,00
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.151.446.000	0,04
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.785.000.000	0,03
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	211.207.870.000	2,36
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.350.000.000	0,04
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.032.989.200	0,01
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.378.538.000	0,06
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.531.036.000	0,02
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	149.044.804.700	1,67
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.023.930.000	0,08
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.319.254.000	0,03
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.927.783.499.498	32,71
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.056.570.000	0,10
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.776.947.200	0,23
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.248.400.000	0,09
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.232.682.500	0,15

PRIORITAS NASIONAL	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.078.004.000	0,03
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.141.331.080	0,01
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.549.814.750	0,10
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.246.165.250	0,01
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.346.250.000	0,03
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.238.449.000	0,24
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	550.000.000	0,01
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.150.000.000	0,01
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	22.050.000.000	0,25
		SUB JUMLAH	3.456.367.785.178	38,61
		JUMLAH	8.951.233.757.290	100,00

Tabel 6.3 Alokasi Anggaran berdasarkan Prioritas Prioritas Daerah

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	- Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,2% Tingkat	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.408.800.000	0,02
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000	0,00
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	350.000.000	0,00

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
	- Pengangguran Terbuka 9,7 – 9,2%	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	450.000.000	0,01
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.885.679.000	0,02
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.651.363.000	0,02
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.564.944.000	0,05
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	900.000.000	0,01
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.500.000.000	0,02
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000	0,01
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.100.000.000	0,01
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	250.000.000	0,00
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.121.800.000	0,01
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.873.781.700	0,47
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.926.400.000	0,02
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	422.040.000	0,00
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.047.019.000	0,01
		3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.303.424.000	0,20
		3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.844.600.000	0,07
		3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000	0,01
		3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.583.580.000	0,02
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.647.757.200	0,09
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	2.088.802.500	0,02

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
			PERTANIAN		
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.762.124.038	0,02
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000.000	0,01
		3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	400.000.000	0,00
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.000.000.000	0,06
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000	0,00
		3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000	0,01
		3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.200.000.000	0,01
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.300.000.000	0,01
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.700.000.000	0,03
		3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	380.000.000	0,00
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.200.000.000	0,04
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	0,00
			SUB JUMLAH	115.062.114.438	1,29
2. Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	- Peringkat Daya Saing Provinsi Banten 5 - Index Gini 0.36%	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	72.232.500.000	0,81
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.200.000.000	0,24
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100.000.000	0,00
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.600.000.000	0,02
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	204.394.401.686	2,28
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	26.475.000.000	0,30
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	436.399.523.439	4,88

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.300.000.000	0,04
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.500.000.000	0,03
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.100.000.000	0,05
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	79.750.000.000	0,89
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	650.000.000	0,01
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.665.875.000	0,09
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.238.450.000	0,01
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	890.000.000	0,01
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000	0,00
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000	0,00
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000	0,00
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	860.000.000	0,01
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.805.000.000	0,09
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.000.000	0,01
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	200.000.000	0,00
		3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.436.300.000	0,04
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	920.000.000	0,01
		3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	200.000.000	0,00
		3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	270.000.000	0,00
		3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.300.000.000	0,03

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.250.000	0,00
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.068.000	0,00
		2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202.138.000	0,00
		2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	725.000.000	0,01
		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.695.396.000	0,03
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	200.000.000	0,00
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	175.000.000	0,00
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	175.000.000	0,00
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.000.000.000	0,08
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.384.552.404	0,28
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	141.552.000	0,00
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000	0,00
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.779.030.000	0,02
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.000.000.000	0,01
			SUB JUMLAH	4.480.113.725.549	50,05
4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 3.5	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.244.654.000	0,05
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	200.000.000	0,00
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000	0,00
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	113.278.000	0,00
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.000.000	0,00
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.195.000.000	0,08
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	14.855.292.000	0,17
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	836.580.000	0,01

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	600.000.000	0,01
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	600.000.000	0,01
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	200.000.000	0,00
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	3.151.446.000	0,04
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.785.000.000	0,03
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	211.207.870.000	2,36
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.350.000.000	0,04
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.032.989.200	0,01
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.378.538.000	0,06
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.531.036.000	0,02
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	149.044.804.700	1,67
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.023.930.000	0,08
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.319.254.000	0,03
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.927.783.499.498	32,71
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.056.570.000	0,10
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.776.947.200	0,23
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.248.400.000	0,09
		5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.232.682.500	0,15
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.078.004.000	0,03
		5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.141.331.080	0,01
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	8.549.814.750	0,10
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.246.165.250	0,01
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.346.250.000	0,03

PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR TUJUAN	KODE	PROGRAM	PAGU INDIKATIF	%
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.238.449.000	0,24
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	550.000.000	0,01
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.150.000.000	0,01
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	22.050.000.000	0,25
			SUB JUMLAH	3.456.367.785.178	38,61
			JUMLAH	8.951.233.757.290	100,00

Program di atas merupakan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan masyarakat, sedangkan program rutin seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada setiap Perangkat Daerah dijabarkan dalam lampiran.

6.2. Rencana Kerja dan Pendanaan

6.2.1 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk memastikan dukungan masing-masing dalam pencapaian target pembangunan nasional, melalui koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 258 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Koordinasi teknis merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional yang hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Pemerintah Provinsi Banten menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana kegiatan tersebut diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas melalui Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan (RAKORTEKRENBANG), Rapat Koordinasi Gubernur (RAKORGUB) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS). Pada tabel tersebut disajikan program dan kegiatan Tahun 2022 yang bersumber dari APBN (beberapa kementerian). Hal ini merupakan bentuk kolaborasi pendanaan pembangunan antara pemerintah Pusat dan Daerah.

Tabel 6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang di Danai oleh APBN untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEMENTERIAN	USULAN DAERAH	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KESIAPAN DAERAH
01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	03 - Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	03 - Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	0350 - Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi)	1000	hektar	36- Provinsi Banten	Pengadaan Saprodi, Pembinaan dan Pengawasan
		04 - Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	01 - Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	0358 - Pengelolaan Air Irigasi Pertanian	15	unit	36- Provinsi Banten	Pengadaan Saprodi, Pembinaan dan Pengawasan
		05 - Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	02 - Penanganan Rawan Pangan	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	0351 - Sarana Produksi Tanaman Pangan	80	ha	36- Provinsi Banten	Pengadaan Saprodi, Pembinaan dan Pengawasan
					0361 - Bantuan Benih Padi Inbrida	31500	hektar	36- Provinsi Banten	Pengadaan Saprodi, Pembinaan dan Pengawasan
	04 - Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	03 - Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	01 - Peningkatan Produksi Perikanan	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	0353 - Kluster Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya yang dikembangkan (Benih Ikan)	2	juta ekor	36- Provinsi Banten	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEMENTERIAN	USULAN DAERAH	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KESIAPAN DAERAH
					0363 - Perbaikan Jalur Transportasi Nelayan	1	paket	3673-Kota Serang	Lahan, DED Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan di Kali Sultan tahap 1 dan 2
	06 - Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	03 - Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	02 - Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	040 - KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0362 - Pengembangan Kawasan Wisata Kali Sultan	1	paket	3673-Kota Serang	Lahan, DED Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan di Kali Sultan tahap 1 dan 2
02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	02 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	01 - Pengembangan Kawasan Strategis	07 - Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	0330 - Penertiban Lahan Jalur KA lintas Rangkasbitung - Labuan	17	km	36- Provinsi Banten	Lahan sudah dibebaskan, Menggunakan jalur yang lama
					0331 - Pembangunan Jalur Ganda KA Rangkasbitung-Merak	20	km	36- Provinsi Banten	Lahan sudah disiapkan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEMENTERIAN	USULAN DAERAH	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KESIAPAN DAERAH
03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	01 - Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	0343 - Peserta yang magang di Perusahaan Dalam Negeri	200	orang	36- Provinsi Banten	Peningkatan Produktivitas dan daya saing
			05 - Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0344 - Sertifikasi Siswa SMK/Lembaga	50	lembaga	36- Provinsi Banten	Melakukan Evaluasi Pasar Kerja mengenai efektivitas MoU SMK/Vokasi dengan Dunia Usaha/Dunia Industri
05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar	02 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	01 - Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0342 - Pembangunan SPAM Karian Timur	0	liter/detik	36- Provinsi Banten	Dukungan RTRW Provinsi Banten
		03 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	01 - Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0336 - Pembangunan Saluran Pembawa Air Baku Karian (KSCS)	0	km	36- Provinsi Banten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
		05 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	02 - Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Ketahanan Bencana	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0352 - Pengerukan Kali Sultan PPN Karangantu	2	km	3673-Kota Serang	Lahan, DED Penanganan Kawasan Kumuh Skala Kawasan di Kali Sultan tahap 1 dan 2

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	KEMENTERIAN	USULAN DAERAH	VOLUME	SATUAN	LOKASI	KESIAPAN DAERAH
	02 - Infrastruktur Ekonomi	01 - Konektivitas Jalan	01 - Pembangunan Jalan Strategis	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0329 - Pembangunan Jalan Strategis Ir. Soetami (Rangkasbitung-Cikande)	10	km	3602-Kab. Lebak	Peningkatan Kualitas Jalan bersumber dari APBD dan DAK masih belum mencukupi kebutuhan
			02 - Pembangunan Jalan Tol	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0360 - Pelebaran Jalan Akses Tol Cilegon Timur	1	km	3672-Kota Cilegon	Rekonstruksi Jalan
	03 - Infrastruktur Perkotaan	01 - Transportasi Perkotaan	05 - Pembangunan Jalan Perkotaan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0348 - Peningkatan Kualitas Jalan Soekarno Hatta (By Pass)	3,88	km	3602-Kab. Lebak	Peningkatan Kualitas Jalan bersumber dari APBD dan DAK masih belum mencukupi kebutuhan
					0356 - Pembangunan Underpass Bitung	1	paket	3603-Kab. Tangerang	Pengadaan Lahan
					0357 - Pembangunan Flyover Cisauk	1	paket	3603-Kab. Tangerang	Lahan sudah siap, DED sudah ada, sudah bersurat kepada KemenPUPR Agustus
					0359 - Pembangunan Fly Over Perlintasan Kereta Cilegon	3	km	3672-Kota Cilegon	Jalan Nasional

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Tahun 2021, Provinsi Banten (<https://bantenprov.krisna.systems/selaras/2022>)

6.2.2 Rencana Program Kegiatan Pembangunan Sumber Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Tingginya potensi ekonomi daerah disertai adanya pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten tentunya dapat meningkatkan target kinerja perekonomian terutama di sektor infrastruktur dengan banyaknya proyek pembangunan berskala besar dengan besarnya anggaran yang dibelanjakan. Dampak positif dari pembangunan tersebut haruslah bersifat effect multiplier (efek pengganda).

Bentuk pelibatan dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL / Corporate Social Responsibility (CSR). Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema tersebut hanya belum dapat diklaim mengingat belum tertuang didalam RPJMD. Namun demikian, sinergi antara kegiatan TJSKBL dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat perlu dioptimalisasi baik dari sisi koorporate maupun Pemerintah Provinsi Banten didalam pengelolaannya.

Dengan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dengan sasaran Program Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, pada Indikator RPJMD

Tabel 6.5 Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non-APBD (rupiah)

INDIKATOR	TARGET		
	TAHUN 2020 (Juta Rupiah)	TAHUN 2021 (Juta Rupiah)	TAHUN 2022 (Juta Rupiah)
Tingkat Ketersediaan Pembiayaan Non APBD (Rupiah)	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana TJSKBL Perusahaan meliputi :

- a. Sosial, yang di fokuskan pada pelayanan dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial;
- b. Pendidikan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), penambahan sarana dan prasarana, beasiswa, dan pelatihan kemitraan dengan perusahaan;
- c. Kebudayaan, yang difokuskan pada perkembangan seni dan budaya serta pariwisata;

- d. Kesehatan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e. Keagamaan, yang difokuskan pada pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah;
- f. Pemberdayaan Masyarakat, yang difokuskan pemberdayaan UMKM/IKM;
- g. Infrastruktur, yang difokuskan pada pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan, sarana dan prasarana sanitasi serta air bersih;
- h. Lingkungan, yang difokuskan pada bantuan bibit pohon, pembangunan tempat pembuangan sampah.

6.2.3 Rencana Program dan Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun 2022

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2022 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan telah ditetapkan Program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.6 Alokasi Anggaran berdasarkan Urusan

KODE_BU	URUSAN/BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.731.713.631.077
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.463.559.005.496
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.128.798.442.506
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	868.416.699.075
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.568.000.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	65.551.522.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	96.819.962.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	405.216.563.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	68.377.615.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.915.000.000

KODE_BU	URUSAN/BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.830.409.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	48.016.002.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	563.278.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.616.935.000
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	550.000.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.126.035.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.814.093.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.793.329.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	24.897.394.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	56.107.505.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	836.580.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	600.000.000
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.070.582.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.301.806.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	800.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	377.814.924.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.796.264.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.337.300.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	92.013.113.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.826.300.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	49.200.909.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.480.000.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	89.161.038.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	736.716.840.164
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	433.699.868.970
4.02	SEKRETARIAT DPRD	303.016.971.194
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3.461.892.672.598
5.01	PERENCANAAN	49.325.213.000
5.02	KEUANGAN	3.298.805.750.498
5.03	KEPEGAWAIAN	45.025.910.000
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	56.163.486.100
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.078.004.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.494.309.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	68.502.408.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	68.502.408.000
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	63.976.071.000
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	63.976.071.000
	JUMLAH	11.845.833.109.839

Tabel 6.7 Alokasi Anggaran berdasarkan Perangkat Daerah

KODE_PD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.465.629.587.496
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	1.128.798.442.506
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	614.647.297.389
1.04.1.03.0.00.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	362.337.401.686

1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	38.370.806.000
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.180.716.000
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	96.819.962.000
2.07.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	68.377.615.000
2.08.2.12.2.14.02.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	24.028.278.000
2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	20.830.409.000
2.11.3.28.0.00.02.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.842.302.000
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.616.935.000
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	47.126.035.000
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44.250.673.000
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.793.329.000
2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.897.394.000
2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.107.505.000
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.101.806.000
3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.796.264.000
3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	48.337.300.000
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian	92.013.113.000
3.29.0.00.0.00.01.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	49.200.909.000
3.31.3.30.0.00.02.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.641.038.000
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	433.699.868.970
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	303.016.971.194
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.403.217.000
5.02.0.00.0.00.02.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.974.412.329.498
5.02.0.00.0.00.03.00	Badan Pendapatan Daerah	324.393.421.000
5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian Daerah	45.025.910.000
5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.163.486.100
5.06.5.07.0.00.01.00	Badan Penghubung	9.494.309.000
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	68.502.408.000
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63.976.071.000
Grand Total		11.845.833.109.839

Tabel 6.8 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.465.629.587.496
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.463.559.005.496
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4.463.559.005.496
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	863.384.948.000
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	630.000.000
1.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
1.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	70.000.000
1.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	70.000.000
1.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	70.000.000
1.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	90.000.000
1.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	180.000.000
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	833.495.000.000
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	527.879.792.000
1.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	305.603.208.000
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000
1.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000
1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
1.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000
1.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000
1.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	300.000.000
1.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
1.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000
1.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
1.01.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.871.460.000
1.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	69.260.000
1.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52.200.000
1.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000
1.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.650.000.000
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.249.437.000
1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	524.836.000
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.600.000
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	760.001.000
1.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000
1.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.000.000
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.092.063.000
1.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	462.063.000
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000
1.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
1.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	350.000.000
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.729.174.000
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.804.450.000
1.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	988.263.000
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.916.461.000
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.017.814.000
1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	673.956.000
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1.343.858.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	atau Lapangan	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000
1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.700.000.000
1.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.517.849.057.496
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	2.799.704.959.874
1.01.02.1.01.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	243.407.567.187
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	58.151.567.500
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	898.739.000
1.01.02.1.01.04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	1.425.000.000
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	1.900.000.000
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	2.375.000.000
1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.811.568.000
1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	500.000.000
1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	500.000.000
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.000.000.000
1.01.02.1.01.17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	772.266.000
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.870.000.000
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	34.491.744.690
1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	27.998.226.000
1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	258.708.801.497
1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	250.000.000
1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	250.000.000
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.050.000.000
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	250.000.000
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2.144.994.480.000
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	100.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	633.052.162.899
1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	198.255.210.497
1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	48.726.088.500
1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	120.000.000
1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	8.000.000.000
1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	10.000.000.000
1.01.02.1.02.06	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	531.552.000
1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.209.600.000
1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	100.000.000
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.000.000.000
1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	100.000.000
1.01.02.1.02.13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	100.000.000
1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	3.538.080.000
1.01.02.1.02.17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	1.638.000.000
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	30.040.000.000
1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.520.000.000
1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	167.077.631.902
1.01.02.1.02.38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	15.000.000.000
1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100.000.000
1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	100.000.000
1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.550.000.000
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000
1.01.02.1.02.44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	100.000.000
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	140.896.000.000
1.01.02.1.02.47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100.000.000
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	85.091.934.723
1.01.02.1.03.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	59.164.517.997

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.01.02.1.03.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	5.296.000.000
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.146.690.000
1.01.02.1.03.13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	466.800.000
1.01.02.1.03.14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	233.400.000
1.01.02.1.03.15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	233.400.000
1.01.02.1.03.16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	233.400.000
1.01.02.1.03.17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	457.690.000
1.01.02.1.03.18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.065.000.000
1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	3.000.000.000
1.01.02.1.03.37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	90.000.000
1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	10.139.036.726
1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.000.000
1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	50.000.000
1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	750.000.000
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	250.000.000
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	2.416.000.000
1.01.02.1.03.53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	50.000.000
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	500.000.000
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	500.000.000
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	150.000.000
1.01.03.1.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	350.000.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81.825.000.000
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	81.825.000.000
1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	650.000.000
1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	81.175.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.070.582.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.070.582.000
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	141.552.000
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	141.552.000
2.22.02.1.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	141.552.000
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	150.000.000
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
2.22.03.1.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.779.030.000
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	1.779.030.000
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1.699.030.000
2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	20.000.000
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20.000.000
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	20.000.000
2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	1.128.798.442.506
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.128.798.442.506
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.128.798.442.506
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	366.678.251.957
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	596.213.000
1.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.023.000
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.646.500
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.646.500
1.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.046.500
1.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.046.500
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.164.000
1.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.640.000
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.196.286.917

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	125.495.465.717
1.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.389.644.000
1.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.550.000
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	254.447.200
1.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	31.915.000
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.125.000
1.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.140.000
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.223.000
1.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	151.300.000
1.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.390.000
1.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	130.533.000
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.688.827.500
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	209.772.000
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	757.017.500
1.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	351.027.000
1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	889.230.000
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	834.474.000
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.601.300.000
1.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	46.007.000
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.368.304.060
1.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.496.003.000
1.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.759.520.060
1.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	932.781.000
1.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.334.227.000
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.936.800.000
1.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.920.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.389.507.000
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.199.170.480
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	653.640.000
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.209.400.000
1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.004.671.000
1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.277.959.480
1.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	517.500.000
1.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	536.000.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.000.000.000
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.000.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	720.954.331.049
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	409.743.672.149
1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	313.464.632.724
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-
1.02.02.1.01.04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.145.500.000
1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	10.320.000.000
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.072.890.000
1.02.02.1.01.12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	1.460.329.000
1.02.02.1.01.13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	17.028.000
1.02.02.1.01.14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	7.512.294.425
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	3.570.397.000
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	35.828.034.000
1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.800.000.000
1.02.02.1.01.22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	29.552.567.000
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	309.784.715.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	550.000.000
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	110.000.000
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	850.030.000
1.02.02.1.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	59.500.000
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.251.550.000
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	800.000.000
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.406.500.000
1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	191.862.000
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.540.195.000
1.02.02.1.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	120.000.000
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.300.000.000
1.02.02.1.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	1.200.000.000
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	291.451.105.000
1.02.02.1.02.19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	909.501.000
1.02.02.1.02.20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	302.901.000
1.02.02.1.02.21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1.500.000.000
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	365.807.000
1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	110.151.000
1.02.02.1.02.28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	765.613.000
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	60.000.000
1.02.02.1.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	10.000.000
1.02.02.1.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-
1.02.02.1.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	50.000.000
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.365.943.900
1.02.02.1.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	337.768.500
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.028.175.400

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	38.284.528.000
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	35.397.178.000
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	34.806.668.000
1.02.03.1.01.02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	590.510.000
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.887.350.000
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.387.350.000
1.02.03.1.02.02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	435.994.000
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	365.105.000
1.02.04.1.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	365.105.000
1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	70.889.000
1.02.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	70.889.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.445.337.500
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.614.337.500
1.02.05.1.01.01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.614.337.500
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	831.000.000
1.02.05.1.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	831.000.000
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	614.647.297.389
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	614.647.297.389
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	614.647.297.389
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.215.273.950
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	710.000.000
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000.000
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000
1.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000
1.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000
1.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.000.000
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.754.273.950
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.019.273.950
1.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.500.000.000
1.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.000.000
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000
1.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.000.000
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.000.000
1.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000
1.03.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	506.468.000
1.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	406.468.000
1.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.434.789.200
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	109.199.800
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.186.000
1.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.000.000
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.069.433.000
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	316.164.400
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000
1.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	214.400.000
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.360.406.000
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.022.500.000
1.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.049.000.000
1.03.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	-

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	50.000.000
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	559.500.000
1.03.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000
1.03.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
1.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.010.000.000
1.03.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	254.000.000
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.127.545.100
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.944.585.100
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	918.720.000
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.264.240.000
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.609.697.700
1.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.150.000.000
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.546.014.700
1.03.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	6.353.200.000
1.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.457.425.000
1.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	86.140.000
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.553.198.000
1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
1.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	313.720.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	72.232.500.000
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.132.500.000
1.03.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-
1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	200.000.000
1.03.02.1.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	600.000.000
1.03.02.1.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	-
1.03.02.1.01.05	Pembangunan Bendungan	3.200.000.000
1.03.02.1.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.000.000.000
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-
1.03.02.1.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	7.000.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.03.02.1.01.37	Peningkatan Kanal Banjir	-
1.03.02.1.01.43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	8.000.000.000
1.03.02.1.01.49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.300.000.000
1.03.02.1.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	400.000.000
1.03.02.1.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	200.000.000
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	2.232.500.000
1.03.02.1.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	-
1.03.02.1.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	-
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45.100.000.000
1.03.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	3.400.000.000
1.03.02.1.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	32.100.000.000
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	700.000.000
1.03.02.1.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	2.039.720.000
1.03.02.1.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	6.360.280.000
1.03.02.1.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	500.000.000
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	436.399.523.439
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	436.399.523.439
1.03.10.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.600.000.000
1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	163.083.023.439
1.03.10.1.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	3.062.160.000
1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	89.100.000.000
1.03.10.1.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	53.200.000.000
1.03.10.1.01.07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	-
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	-
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	39.200.000.000
1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	3.280.000.000
1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	44.663.240.000
1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	20.100.000.000
1.03.10.1.01.17	Pelebaran Jembatan	850.000.000
1.03.10.1.01.18	Rehabilitasi Jembatan	7.750.000.000
1.03.10.1.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.471.100.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.03.10.1.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1.500.000.000
1.03.10.1.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.050.000.000
1.03.10.1.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.490.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.300.000.000
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	700.000.000
1.03.11.1.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	50.000.000
1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	250.000.000
1.03.11.1.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	100.000.000
1.03.11.1.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	200.000.000
1.03.11.1.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	100.000.000
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	2.200.000.000
1.03.11.1.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1.000.000.000
1.03.11.1.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	900.000.000
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	300.000.000
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	400.000.000
1.03.11.1.03.01	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000
1.03.11.1.03.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota	350.000.000
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.500.000.000
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.350.000.000
1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.350.000.000
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	150.000.000
1.03.12.1.02.04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	150.000.000
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	700.000.000
1.03.12.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	500.000.000
1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	200.000.000
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	300.000.000
1.03.12.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200.000.000
1.03.12.1.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000
1.04.1.03.0.00.01.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	362.337.401.686
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	362.337.401.686
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	253.769.401.686

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.200.000.000
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	21.200.000.000
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000
1.03.03.1.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	1.000.000.000
1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	20.000.000.000
1.03.03.1.01.12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	100.000.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100.000.000
1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000
1.03.04.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	100.000.000
1.03.04.1.01.06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.600.000.000
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.600.000.000
1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000
1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1.500.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	204.394.401.686
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	204.394.401.686
1.03.08.1.01.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	187.687.500.000
1.03.08.1.01.03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	16.706.901.686
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	26.475.000.000
1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	26.475.000.000
1.03.09.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
1.03.09.1.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100.000.000
1.03.09.1.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	17.275.000.000
1.03.09.1.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	9.000.000.000
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.568.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.068.000.000
1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000.000
1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.000.000
1.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.500.000
1.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000
1.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.500.000
1.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000
1.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.000.000
1.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.713.000.000
1.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.075.000.000
1.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000.000
1.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.000.000
1.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
1.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
1.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000
1.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.000.000
1.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000
1.04.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
1.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.000.000
1.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000
1.04.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000
1.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000
1.04.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000
1.04.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	55.000.000
1.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
1.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000
1.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.651.000.000
1.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	533.000.000
1.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.000.000
1.04.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.000.000
1.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.000.000
1.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
1.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000
1.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	90.000.000
1.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000
1.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000
1.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	454.000.000
1.04.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154.000.000
1.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000
1.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.000.000
1.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000.000
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.450.000.000
1.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
1.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000
1.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000
1.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
1.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.100.000.000
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.200.000.000
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000
1.04.02.1.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	250.000.000
1.04.02.1.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000
1.04.02.1.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000
1.04.02.1.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	250.000.000
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	250.000.000
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-
1.04.02.1.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.800.000.000
1.04.02.1.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2.650.000.000
1.04.02.1.03.03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	-
1.04.02.1.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000
1.04.02.1.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100.000.000
1.04.02.1.04.02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	100.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	79.750.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	500.000.000
1.04.03.1.01.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	100.000.000
1.04.03.1.01.05	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	100.000.000
1.04.03.1.01.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	100.000.000
1.04.03.1.01.09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	79.250.000.000
1.04.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	600.000.000
1.04.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.000.000.000
1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.500.000.000
1.04.03.1.02.07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	74.150.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	650.000.000
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	650.000.000
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	100.000.000
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	450.000.000
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	100.000.000
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	38.370.806.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	38.370.806.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.370.806.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.887.702.000
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.494.000
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.030.000
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.030.000
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.030.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.030.000
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	86.866.000
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.520.000
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.238.890.444
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.675.894.444
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	516.360.000
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.684.000
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.832.000
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.040.000
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.040.000
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.040.000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.218.000
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.218.000
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.839.000
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	86.889.000
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150.000.000
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	791.950.000
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	950.000.000
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	950.000.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.734.082.000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.734.082.000
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.531.672.556
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.258.910.000
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.762.556
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.244.654.000
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.700.000.000
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	550.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.333.160.000
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	166.840.000
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.000.000
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	200.000.000
1.05.02.1.01.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.250.000.000
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500.000.000
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	500.000.000
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	250.000.000
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	294.654.000
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	200.000.000
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditepat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	94.654.000
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.238.450.000
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	838.450.000
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	88.450.000
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000
1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	50.000.000
1.05.04.1.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	300.000.000
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	200.000.000
1.05.04.1.01.11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	100.000.000
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	400.000.000
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000
1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.180.716.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.180.716.000
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27.180.716.000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.514.841.000
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.000.000
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000
1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.788.700.000
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.362.000.000
1.05.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420.000.000
1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.400.000
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.400.000
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.500.000
1.05.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.100.000
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.000.000
1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.600.000
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.500.000
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	554.462.000
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554.462.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.05.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.152.849.000
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	586.860.000
1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.545.989.000
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.262.730.000
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669.730.000
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.000.000
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.000.000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	7.665.875.000
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	428.250.000
1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	100.000.000
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	328.250.000
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	5.299.290.000
1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	300.000.000
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	300.000.000
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.980.130.000
1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	300.000.000
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	600.000.000
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pascabencana Provinsi	376.000.000
1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	82.000.000
1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.000.000
1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000
1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	61.160.000
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.130.000.000
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	280.000.000
1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	250.000.000
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600.000.000
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	808.335.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	250.000.000
1.05.03.1.04.03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	300.000.000
1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	8.335.000
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	250.000.000
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	96.819.962.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.819.962.000
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	96.819.962.000
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.643.595.500
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	436.150.500
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	305.820.500
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.400.000
1.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.400.000
1.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.400.000
1.06.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.400.000
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.630.000
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.100.000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.454.000.000
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.629.700.000
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	754.480.000
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.920.000
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000
1.06.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000
1.06.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	900.000
1.06.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.000.000
1.06.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.000.000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.030.000
1.06.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.040.000
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.990.000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	866.711.450
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.945.000
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.432.200
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.707.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.06.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	384.555.000
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.782.250
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171.010.000
1.06.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.280.000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	392.317.250
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.317.250
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.202.677.800
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	592.662.800
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.065.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.562.950.000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.270.708.500
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.820.000
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.064.500
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.440.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	843.200.000
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.184.000
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.599.250.000
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	220.000.000
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	220.000.000
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.379.250.000
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	741.501.000
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	341.000.000
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	50.879.000
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	245.870.000
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	75.000.000
1.06.03.1.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	75.000.000
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.620.590.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.137.706.000
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	1.129.296.000
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	70.000.000
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	157.300.000
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	21.000.000
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	510.988.000
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	209.622.000
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	39.500.000
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1.665.108.000
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	993.011.000
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	33.012.000
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	30.695.500
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	317.218.000
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	1.391.500
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	147.536.000
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.244.000
1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	65.000.000
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	60.000.000
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.182.662.000
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	2.561.350.000
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	168.949.000
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	2.275.000
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	78.010.000
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	221.862.000
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27.216.000
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	63.000.000
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	60.000.000
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	808.500.000
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	124.260.000
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	169.342.500

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	7.200.000
1.06.04.1.04.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	22.700.000
1.06.04.1.04.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	432.147.500
1.06.04.1.04.08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5.000.000
1.06.04.1.04.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.500.000
1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	19.950.000
1.06.04.1.04.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	23.400.000
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	826.614.000
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	250.000.000
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	421.939.000
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	124.675.000
1.06.04.1.05.11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	30.000.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	56.688.786.500
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	25.000.000
1.06.05.1.01.02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	25.000.000
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	56.638.786.500
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	53.761.282.500
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200.598.000
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.676.906.000
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	842.240.000
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	842.240.000
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	190.000.000
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	145.900.000
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	127.500.000
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	261.450.000
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	117.390.000
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	350.500.000
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	350.500.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	125.000.000
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	125.000.000
1.06.07.1.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.500.000
2.07.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	68.377.615.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	68.377.615.000
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	68.377.615.000
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.910.034.400
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000
2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.890.000
2.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000
2.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000
2.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000
2.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.110.000
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.263.246.000
2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.439.728.000
2.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	787.950.000
2.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.200.000
2.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.026.000
2.07.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	342.000
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.071.400
2.07.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61.571.400
2.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.500.000
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.379.499.000
2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.642.000
2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.248.059.000
2.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	156.956.000
2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.685.000
2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	212.184.000
2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.912.000
2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.061.000
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.424.314.000
2.07.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.07.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	446.700.000
2.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.070.547.000
2.07.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	323.299.000
2.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	183.768.000
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.984.918.000
2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.852.000
2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.808.040.000
2.07.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	395.765.000
2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.756.261.000
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.467.986.000
2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.218.000
2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	366.553.000
2.07.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	15.247.000
2.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.007.000
2.07.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	99.750.000
2.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	661.731.000
2.07.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.480.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	4.806.886.600
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4.313.026.600
2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.742.026.600
2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	571.000.000
2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	210.000.000
2.07.03.1.02.01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	210.000.000
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	228.000.000
2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	228.000.000
2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	55.860.000
2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	55.860.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	701.100.000
2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	416.100.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	57.000.000
2.07.04.1.01.02	Pelayanan Antar Kerja	57.000.000
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	171.000.000
2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	131.100.000
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-
2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	256.500.000
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	142.500.000
2.07.04.1.04.04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	114.000.000
2.07.04.1.06	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.500.000
2.07.04.1.06.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	28.500.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.084.370.000
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	404.700.000
2.07.05.1.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	119.070.000
2.07.05.1.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	107.878.000
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	177.752.000
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	892.500.000
2.07.05.1.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	286.195.000
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	606.305.000
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	787.170.000
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	611.520.000
2.07.05.1.03.03	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	175.650.000
2.07.05.1.03.04	Penetapan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	-
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	875.224.000
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	875.224.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	484.204.000
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	125.400.000
2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	265.620.000
2.08.2.12.2.14.02.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	24.028.278.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.028.278.000
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.915.000.000
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.165.000.000
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	247.779.000
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.985.000
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.835.000
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.100.000
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.630.000
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.971.000
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.700.000
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.365.000.000
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.903.600.000
2.08.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	411.400.000
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.000.000
2.08.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.500.000
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.250.000
2.08.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.018.000
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33.500.000
2.08.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.732.000
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	331.336.500
2.08.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.207.500
2.08.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.377.000
2.08.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.752.000
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	231.000.000
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	818.016.000
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.894.000
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.196.400
2.08.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.253.227

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.08.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.500.000
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	206.731.373
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	54.615.000
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.577.000
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.929.000
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8.250.000
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	34.070.000
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	667.254.500
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
2.08.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	307.848.200
2.08.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	289.116.300
2.08.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	37.290.000
2.08.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
2.08.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.000.000
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.729.000
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	698.895.000
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	955.834.000
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	928.664.000
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.251.000
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	349.140.000
2.08.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.900.000
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.809.000
2.08.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.164.000
2.08.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.400.000
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	513.278.000
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	276.591.000
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	56.450.000
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	48.641.000
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	171.500.000
2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	-

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	36.687.000
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	17.470.000
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	19.217.000
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	16.000.000
2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	150.000.000
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	34.000.000
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	489.794.000
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	97.577.000
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	97.577.000
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	327.623.000
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.752.000
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	303.871.000
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	64.594.000
2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20.585.000
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	-
2.08.03.1.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan	44.009.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	296.472.000
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	89.955.000
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	-
2.08.04.1.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	89.955.000
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-
2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	54.742.000
2.08.04.1.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	22.392.000
2.08.04.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	32.350.000
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151.775.000
2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151.775.000
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.250.000
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	40.250.000
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	40.250.000
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	-
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.068.000
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	190.000.000
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	70.000.000
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	120.000.000
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	18.068.000
2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4.568.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4.500.000
2.08.06.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4.500.000
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	202.138.000
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51.768.000
2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	14.250.000
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	37.518.000
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	98.934.000
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	62.258.000
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	12.830.000
2.08.07.1.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11.916.000
2.08.07.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	11.930.000
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	51.436.000
2.08.07.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	13.750.000
2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	37.686.000
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	563.278.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	200.000.000
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	113.055.000
2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	60.800.000
2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	26.014.000
2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	26.241.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.12.02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	-
2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	42.178.000
2.12.02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	17.629.000
2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	-
2.12.02.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	-
2.12.02.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	24.549.000
2.12.02.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	44.767.000
2.12.02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	25.952.000
2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	18.815.000
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	64.828.000
2.12.03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	14.510.000
2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	21.944.000
2.12.03.1.01.03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	-
2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	28.374.000
2.12.03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	-
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	103.495.000
2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	53.018.000
2.12.03.1.02.02	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	22.407.000
2.12.03.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	14.035.000
2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	-
2.12.03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	14.035.000
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	31.677.000
2.12.03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	17.392.000
2.12.03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	14.285.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	113.278.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.12.04.1.01	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-
2.12.04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-
2.12.04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	-
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	91.288.000
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.570.000
2.12.04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.570.000
2.12.04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-
2.12.04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	7.785.000
2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17.390.000
2.12.04.1.02.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	-
2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.973.000
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	21.990.000
2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.445.000
2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	10.545.000
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.000.000
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	50.000.000
2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	36.287.500
2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	13.712.500
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	550.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	200.000.000
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	86.767.000
2.14.02.1.01.03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	15.250.000
2.14.02.1.01.07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	14.450.000
2.14.02.1.01.09	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	42.367.000
2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	14.700.000
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	113.233.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.14.02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	16.099.000
2.14.02.1.02.03	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	41.217.000
2.14.02.1.02.06	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	55.917.000
2.14.02.1.02.07	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	-
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	175.000.000
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100.917.000
2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-
2.14.03.1.01.04	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	69.602.000
2.14.03.1.01.05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	-
2.14.03.1.01.08	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	31.315.000
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	74.083.000
2.14.03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	55.860.000
2.14.03.1.02.03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	18.223.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	175.000.000
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	91.274.000
2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-
2.14.04.1.01.04	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	25.408.000
2.14.04.1.01.08	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	23.818.000
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	42.048.000
2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	83.726.000
2.14.04.1.02.01	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-
2.14.04.1.02.03	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	-
2.14.04.1.02.04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	62.164.000
2.14.04.1.02.05	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	21.562.000
2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	20.830.409.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.830.409.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	20.830.409.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.871.609.000
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.021.000
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.196.000
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.420.000
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.420.000
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.420.000
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.420.000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.385.000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.760.000
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.042.710.000
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.640.000.000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	352.710.000
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.000.000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000
2.09.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.062.000
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.770.000
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.473.000
2.09.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.799.000
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.000.000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.820.000
2.09.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.200.000
2.09.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.423.230.000
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	336.000.000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.082.130.000
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.586.000
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	418.086.000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.500.000
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.408.800.000
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	370.000.000
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	170.000.000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	200.000.000
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	588.800.000
2.09.03.1.02.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	115.000.000
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	473.800.000
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	100.000.000
2.09.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	100.000.000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	350.000.000
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	200.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	200.000.000
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	200.000.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	350.000.000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	150.000.000
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
2.11.3.28.0.00.02.00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.842.302.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	48.016.002.000
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	48.016.002.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.636.002.000
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
2.11.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
2.11.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2.11.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
2.11.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.330.044.000
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.301.000.000
2.11.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	986.044.000
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000
2.11.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000
2.11.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.000.000
2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000
2.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.000.000
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000
2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000
2.11.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.000.000
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.000.000
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.000.000
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	325.000.000
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.000.000
2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.000
2.11.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.000.000
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000
2.11.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000
2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.573.258.000
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	627.000.000
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.946.258.000
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.476.700.000
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	570.000.000
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.700.000
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
2.11.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.000.000
2.11.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	890.000.000
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	680.000.000
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	330.000.000
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	200.000.000
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	150.000.000
2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	180.000.000
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	150.000.000
2.11.03.1.02.02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15.000.000
2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	15.000.000
2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	30.000.000
2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	15.000.000
2.11.03.1.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	15.000.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30.000.000
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	30.000.000
2.11.04.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15.000.000
2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	15.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	400.000.000
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	400.000.000
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	200.000.000
2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	15.000.000
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	150.000.000
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	35.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	860.000.000
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	860.000.000
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	20.000.000
2.11.11.1.01.06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	840.000.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	4.826.300.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.826.300.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3.436.300.000
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	200.000.000
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	75.000.000
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	25.000.000
3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	25.000.000
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.641.300.000
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	50.000.000
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.438.000.000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	150.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	423.300.000
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	300.000.000
3.28.03.1.04.07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	230.000.000
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	50.000.000
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	220.000.000
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	50.000.000
3.28.03.1.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.000.000
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	150.000.000
3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	10.000.000
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	200.000.000
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	60.000.000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	70.000.000
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.000.000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	175.000.000
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	50.000.000
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	25.000.000
3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	50.000.000
3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	25.000.000
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	25.000.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	920.000.000
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	540.000.000
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	40.000.000
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	130.000.000
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	40.000.000
3.28.04.1.01.04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	40.000.000
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	40.000.000
3.28.04.1.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	40.000.000
3.28.04.1.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	20.000.000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	60.000.000
3.28.04.1.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	60.000.000
3.28.04.1.01.10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	35.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.28.04.1.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	35.000.000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	60.000.000
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	60.000.000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	320.000.000
3.28.04.1.03.01	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	25.000.000
3.28.04.1.03.02	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	30.000.000
3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	25.000.000
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	30.000.000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	60.000.000
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	150.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	200.000.000
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	200.000.000
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	50.000.000
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	75.000.000
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	75.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	270.000.000
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	270.000.000
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	30.000.000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	100.000.000
3.28.06.1.01.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	20.000.000
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100.000.000
3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	10.000.000
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	10.000.000
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.616.935.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21.616.935.000
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21.616.935.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.746.539.000
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.731.000
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.198.000
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.500.000
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.033.000
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	404.000.000
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.212.390.000
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.954.000.000
2.13.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	246.390.000
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.000.000
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000
2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000
2.13.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000
2.13.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000
2.13.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
2.13.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
2.13.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.000.000
2.13.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.000.000
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000
2.13.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	507.000.000
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.590.500

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.409.500
2.13.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000
2.13.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.000.000
2.13.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.000.000
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	745.214.000
2.13.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	195.214.000
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000
2.13.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.964.294.000
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	721.000.000
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.243.294.000
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	809.910.000
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.410.000
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.000.000
2.13.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.140.000
2.13.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	85.000.000
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.360.000
2.13.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000
2.13.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	725.000.000
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	725.000.000
2.13.02.1.01.01	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000
2.13.02.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	50.000.000
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	400.000.000
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	225.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	450.000.000
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	450.000.000
2.13.03.1.01.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	125.000.000
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	125.000.000
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	200.000.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.695.396.000
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.695.396.000
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	75.000.000
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	250.000.000
2.13.05.1.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200.000.000
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	275.000.000
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	650.000.000
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	95.396.000
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	47.126.035.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.126.035.000
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	47.126.035.000
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.121.035.000
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000
2.15.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.000
2.15.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.15.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.000.000
2.15.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.022.400.000
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.307.570.000
2.15.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.830.000
2.15.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.210.000
2.15.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.150.000
2.15.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	28.491.000
2.15.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.824.000
2.15.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	325.000
2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.100.000
2.15.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.100.000
2.15.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000
2.15.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.000.000
2.15.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90.000.000
2.15.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.000.000
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.150.141.763
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	913.198.863
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	674.386.650
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.940.000
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.510.000
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	487.166.250
2.15.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.940.000
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.491.237
2.15.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-
2.15.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000
2.15.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.491.237
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.430.542.000
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.430.542.000
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.360.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	800.000.000
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
2.15.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
2.15.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.360.000
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.805.000.000
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	700.000.000
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	700.000.000
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	500.000.000
2.15.02.1.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	500.000.000
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	6.150.000.000
2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	100.000.000
2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.515.000.000
2.15.02.1.05.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	500.000.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2.000.000.000
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	35.000.000
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-
2.15.02.1.07.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-
2.15.02.1.07.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	-
2.15.02.1.07.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000
2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	155.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.15.02.1.13.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	155.000.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.000.000.000
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	570.000.000
2.15.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60.000.000
2.15.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	510.000.000
2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.000
2.15.03.1.08.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	300.000.000
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	130.000.000
2.15.03.1.09.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	130.000.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	200.000.000
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	200.000.000
2.15.05.1.06.01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	200.000.000
2.16.2.20.2.21.04.00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	44.250.673.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.250.673.000
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.814.093.000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.763.801.000
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	498.000.000
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	275.000.000
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.000.000
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.667.643.400
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.276.963.400

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	342.180.000
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.000.000
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000
2.16.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	157.000.000
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.000.000
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.000.000
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	90.000.000
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.000.000
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.500.000.000
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.600.000.000
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	985.157.600
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.157.600
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	380.000.000
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.195.000.000
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7.195.000.000
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.000.000
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	232.500.000
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.000.000.000
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	400.000.000
2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2.417.500.000
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	100.000.000
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.500.000.000
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100.000.000
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	150.000.000
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	14.855.292.000
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	11.124.200.000
2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	14.200.000
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	110.000.000
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	11.000.000.000
2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3.731.092.000
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	762.020.000
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	649.920.000
2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	14.000.000
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	900.000.000
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	955.152.000
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	300.000.000
2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	30.000.000
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	120.000.000
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	836.580.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	836.580.000
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	836.580.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	836.580.000
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	600.000.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	600.000.000
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	600.000.000
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	600.000.000
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.793.329.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	25.793.329.000
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	25.793.329.000
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.691.343.000
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.177.248.500
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	988.535.000
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.627.500
2.17.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.200.000
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.200.000
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.200.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.086.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.400.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.718.463.000
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.343.000.000
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	366.570.000
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000
2.17.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.675.000
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.918.000
2.17.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	500.000
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000
2.17.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000
2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.600.000
2.17.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.600.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.000.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.000.000
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.000.000
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.000.000
2.17.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.000.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
2.17.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.573.660.000
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	942.410.000
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.606.500.000
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	505.371.500
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.360.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.350.000
2.17.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.661.500
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1.885.679.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.635.679.000
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1.435.679.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	200.000.000
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.000
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang	250.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.651.363.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.651.363.000
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.434.204.500
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	217.158.500
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.564.944.000
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.564.944.000
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	4.564.944.000
2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.897.394.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24.897.394.000
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	24.897.394.000
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.647.394.000
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.000.000
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.000.000
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.525.170.000
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.155.000.000
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	359.130.000
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.050.000
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.640.000
2.18.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.350.000
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.534.000
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.534.000
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.670.000
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.660.000
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.010.000
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000
2.18.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.824.560.000
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.624.560.000
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.460.000
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000
2.18.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.460.000
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	900.000.000
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	200.000.000
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	200.000.000
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	700.000.000
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	400.000.000
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	300.000.000
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.500.000.000
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.500.000.000
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	500.000.000
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1.000.000.000
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	500.000.000
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	-
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	500.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150.000.000
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	200.000.000
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.100.000.000
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.100.000.000
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	500.000.000
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	400.000.000
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	250.000.000
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	250.000.000
2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	56.107.505.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	56.107.505.000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	56.107.505.000
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.722.952.596
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	178.090.000
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.710.000
2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
2.19.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.388.000
2.19.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.992.000
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.871.558.000
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.310.422.000
2.19.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	533.280.000
2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.925.000
2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.658.000
2.19.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	975.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.236.000
2.19.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	100.000.000
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.000.000.000
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	5.750.000.000
2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	500.000.000
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	700.000.000
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	700.000.000
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	2.250.000.000
2.19.02.1.01.05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	500.000.000
2.19.02.1.01.06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	150.000.000
2.19.02.1.01.07	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	500.000.000
2.19.02.1.01.08	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	150.000.000
2.19.02.1.01.09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	300.000.000
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	1.250.000.000
2.19.02.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	100.000.000
2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1.150.000.000
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	25.384.552.404
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8.500.000.000
2.19.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1.050.000.000
2.19.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	300.000.000
2.19.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	7.150.000.000
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.700.000.000
2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	3.000.000.000
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	500.000.000
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	2.200.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	6.784.552.404
2.19.03.1.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	334.552.404
2.19.03.1.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	6.200.000.000
2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	250.000.000
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	4.400.000.000
2.19.03.1.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	2.000.000.000
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	600.000.000
2.19.03.1.04.03	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1.800.000.000
2.23.2.24.0.00.02.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.101.806.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22.101.806.000
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	21.301.806.000
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.301.806.000
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.290.000
2.23.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.565.000
2.23.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.150.000
2.23.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.650.000
2.23.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000
2.23.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.000.000
2.23.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	525.000
2.23.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.400.000
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.270.305.000
2.23.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.835.150.000
2.23.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.850.000
2.23.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.850.000
2.23.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.200.000
2.23.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	900.000
2.23.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.100.000
2.23.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.750.000
2.23.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	505.000
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000
2.23.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.000.000
2.23.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.23.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000
2.23.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000
2.23.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
2.23.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
2.23.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000
2.23.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000
2.23.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
2.23.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	100.000.000
2.23.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000.000
2.23.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	690.000.000
2.23.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
2.23.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.300.000.000
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.211.000
2.23.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
2.23.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000
2.23.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.211.000
2.23.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.000.000.000
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	800.000.000
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	200.000.000
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	200.000.000
2.23.02.1.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	200.000.000
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000
2.23.02.1.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	200.000.000
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	800.000.000
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	600.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	200.000.000
2.24.02.1.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	160.000.000
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	40.000.000
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	200.000.000
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200.000.000
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	200.000.000
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	200.000.000
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	200.000.000
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	200.000.000
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	200.000.000
3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.796.264.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	87.796.264.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.796.264.000
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	41.405.223.300
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	295.000.000
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000
3.25.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000
3.25.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000
3.25.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.737.469.200
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.012.000.000
3.25.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	558.240.000
3.25.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.100.000
3.25.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.564.400
3.25.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.148.800
3.25.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	35.721.600
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.347.200
3.25.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.347.200
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	atau Lapangan	
3.25.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	450.137.940
3.25.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	62.200.000
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.836.060
3.25.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221.000.000
3.25.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	303.348.000
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.121.800.000
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	400.000.000
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	75.000.000
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	175.000.000
3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	397.100.000
3.25.02.1.02.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	75.000.000
3.25.02.1.02.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	50.000.000
3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	172.100.000
3.25.02.1.02.05	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	100.000.000
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	324.700.000
3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000
3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	144.700.000
3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	41.873.781.700
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	390.000.000
3.25.03.1.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	125.000.000
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	180.000.000
3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	85.000.000
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	265.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	95.000.000
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	85.000.000
3.25.03.1.03.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	85.000.000
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	41.218.781.700
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	50.000.000
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	40.883.881.700
3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	284.900.000
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.926.400.000
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	435.500.000
3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	320.500.000
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	115.000.000
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.490.900.000
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.050.000.000
3.25.04.1.05.03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	353.000.000
3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	87.900.000
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	422.040.000
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	310.040.000
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	85.040.000
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	75.000.000
3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	75.000.000
3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	75.000.000
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112.000.000
3.25.05.1.02.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	35.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.25.05.1.02.02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Kewenangannya	42.000.000
3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.000.000
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.047.019.000
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.000.000
3.25.06.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000
3.25.06.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000
3.25.06.1.01.03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	400.000.000
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	200.000.000
3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	200.000.000
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	472.019.000
3.25.06.1.03.01	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000
3.25.06.1.03.02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	150.000.000
3.25.06.1.03.03	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	122.019.000
3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	48.337.300.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	48.337.300.000
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	48.337.300.000
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.605.696.000
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.500.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	245.400.000
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
3.26.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
3.26.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.240.000
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.860.000
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.383.000.000
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.753.000.000
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600.000.000
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000
3.26.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000
3.26.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000
3.26.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.500.000
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000
3.26.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.120.267.560
3.26.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.000
3.26.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.252.040
3.26.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000
3.26.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.381.520
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670.000.000
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.747.060.000
3.26.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000
3.26.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	150.000.000
3.26.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	797.060.000
3.26.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.251.668.440
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	254.971.920
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.996.696.520

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696.200.000
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	237.558.000
3.26.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.003.520
3.26.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.638.480
3.26.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	180.000.000
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.303.424.000
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	4.953.424.000
3.26.02.1.01.01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	203.424.000
3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4.750.000.000
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12.350.000.000
3.26.02.1.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	200.000.000
3.26.02.1.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	11.150.000.000
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.000.000.000
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.000.000.000
3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	600.000.000
3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	400.000.000
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.844.600.000
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.844.600.000
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2.523.000.000
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.477.000.000
3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	844.600.000
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.000.000.000
3.26.04.1.01.01	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	500.000.000
3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	500.000.000
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.583.580.000
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.583.580.000
3.26.05.1.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	500.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	783.580.000
3.26.05.1.01.09	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300.000.000
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian	92.013.113.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	92.013.113.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	92.013.113.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	74.614.429.262
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	674.552.000
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.418.000
3.27.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	134.525.000
3.27.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	62.771.000
3.27.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	134.525.000
3.27.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	62.771.000
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	62.771.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.771.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.906.421.962
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.738.561.962
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	967.860.000
3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.820.000
3.27.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.830.000
3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.720.000
3.27.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.120.000
3.27.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.710.000
3.27.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.800.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000
3.27.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.428.130.300
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.200.500
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	532.700.800
3.27.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.463.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.568.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.882.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.316.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.244.940.000
3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.700.000
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.216.000
3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.124.000
3.27.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.900.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.657.259.580
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.247.600.000
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.700.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.305.959.580
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.125.420
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	669.989.420
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.236.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	596.900.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.647.757.200
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1.100.000.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	600.000.000
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	500.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.297.757.200
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	350.000.000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	800.000.000
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.747.757.200
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	400.000.000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	750.000.000
3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	500.000.000
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	250.000.000
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	500.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	250.000.000
3.27.02.1.04.03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	250.000.000
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.000.000.000
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	500.000.000
3.27.02.1.05.02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	1.500.000.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.088.802.500
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	2.088.802.500
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	800.000.000
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	300.000.000
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	638.802.500
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	350.000.000
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.762.124.038
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	450.000.000
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	450.000.000
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	400.000.000
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	400.000.000
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	500.000.000
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	500.000.000
3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	412.124.038
3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	412.124.038
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	500.000.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	500.000.000
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250.000.000
3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250.000.000
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	400.000.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	400.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	5.000.000.000
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	4.000.000.000
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	4.000.000.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	1.000.000.000
3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	500.000.000
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	500.000.000
3.29.0.00.0.00.01.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	49.200.909.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	49.200.909.000
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	49.200.909.000
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.327.827.000
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	970.364.000
3.29.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	280.364.000
3.29.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000
3.29.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000
3.29.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000
3.29.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550.000.000
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.314.000.000
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.659.350.000
3.29.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	604.650.000
3.29.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000
3.29.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000
3.29.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000
3.29.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000
3.29.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000
3.29.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000
3.29.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	25.000.000
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000
3.29.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	119.750.000
3.29.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.172.000
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.825.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.29.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.253.000
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	879.195.000
3.29.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	239.570.000
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.625.000
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
3.29.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000
3.29.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.000.000.000
3.29.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000
3.29.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	150.000.000
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	250.000.000
3.29.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.993.268.000
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.276.000
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.602.992.000
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	871.000.000
3.29.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.000.000
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
3.29.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.300.000.000
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	900.000.000
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	900.000.000
3.29.02.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	800.000.000
3.29.02.1.02.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	736.760.000
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	63.240.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	600.000.000
3.29.02.1.03.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	600.000.000
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	608.082.000
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	175.000.000
3.29.03.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100.000.000
3.29.03.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	25.000.000
3.29.03.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	50.000.000
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	113.082.000
3.29.03.1.03.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	92.264.500
3.29.03.1.03.03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	19.500.000
3.29.03.1.03.04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1.317.500
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	320.000.000
3.29.03.1.04.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	200.000.000
3.29.03.1.04.03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	8.000.000
3.29.03.1.04.05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	112.000.000
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	18.965.000.000
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	125.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.29.06.1.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	125.000.000
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	400.000.000
3.29.06.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	400.000.000
3.29.06.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	400.000.000
3.29.06.1.03.06	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	400.000.000
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	18.040.000.000
3.29.06.1.06.03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.440.000.000
3.29.06.1.06.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.500.000.000
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	15.100.000.000
3.31.3.30.0.00.02.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	95.641.038.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	95.641.038.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.480.000.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	300.000.000
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	300.000.000
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	100.000.000
3.30.02.1.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	600.000.000
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	600.000.000
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	150.000.000
3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	300.000.000
3.30.03.1.01.03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	150.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.200.000.000
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub	200.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	Distributor	
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	100.000.000
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	700.000.000
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	500.000.000
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.000.000
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	200.000.000
3.30.04.1.03.01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	50.000.000
3.30.04.1.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	50.000.000
3.30.04.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	50.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.300.000.000
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.300.000.000
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	200.000.000
3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	200.000.000
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	200.000.000
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	500.000.000
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	200.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.700.000.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	400.000.000
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	200.000.000
3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	400.000.000
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	122.000.000
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	378.000.000
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	200.000.000
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	300.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	300.000.000
3.30.06.1.03.02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	400.000.000
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	380.000.000
3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	150.000.000
3.30.07.1.01.01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	150.000.000
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	150.000.000
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	150.000.000
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	80.000.000
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	80.000.000
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	89.161.038.000
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	85.861.038.000
3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000
3.31.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	260.000.000
3.31.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.700.000
3.31.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.700.000
3.31.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.700.000
3.31.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.700.000
3.31.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.000.000
3.31.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.200.000
3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.640.420.000
3.31.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.553.000.000
3.31.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	972.420.000
3.31.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000
3.31.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000
3.31.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
3.31.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000
3.31.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000
3.31.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000
3.31.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	347.000.000
3.31.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	122.000.000
3.31.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	225.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.591.906.000
3.31.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.000.000
3.31.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	326.892.000
3.31.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	135.256.000
3.31.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	350.000.000
3.31.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	362.500.000
3.31.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.144.000
3.31.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	7.000.000
3.31.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
3.31.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.123.114.000
3.31.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000
3.31.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.016.690.000
3.31.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000
3.31.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	266.000.000
3.31.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.713.572.000
3.31.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.042.118.000
3.31.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.195.000.000
3.31.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000
3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.433.546.000
3.31.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.700.000
3.31.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	779.600.000
3.31.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.620.246.000
3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.331.476.000
3.31.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	374.040.000
3.31.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.790.000
3.31.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	36.850.000
3.31.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	272.880.000
3.31.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.054.916.000
3.31.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000
3.31.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.200.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.200.000.000
3.31.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	100.000.000
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	200.000.000
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	600.000.000
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	500.000.000
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.700.000.000
3.31.02.1.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100.000.000
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	50.000.000
3.31.04.1.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	433.699.868.970
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	433.699.868.970
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	433.699.868.970
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	205.262.989.770
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	825.815.000
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	407.685.000
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	52.580.000
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.705.000
4.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	43.030.000
4.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	42.495.000
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.402.500
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.917.500
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97.810.271.070
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	92.695.719.070
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.563.680.000
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	325.000.000
4.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	58.370.000
4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.220.000
4.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.652.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	92.860.000
4.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.770.000
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000
4.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
4.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
4.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.415.976.000
4.01.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	250.126.000
4.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	379.350.000
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000.000
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	270.000.000
4.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	266.500.000
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.718.822.600
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	273.839.300
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.674.727.000
4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	585.904.000
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.133.088.000
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.409.133.800
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	62.049.500
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.443.462.000
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.601.611.000
4.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	535.008.000
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.584.735.800
4.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-
4.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.909.000.000
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	804.610.800
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.790.160.000
4.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.965.000
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.071.763.450
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.577.534.750

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	429.633.800
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	711.674.000
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.438.817.200
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	176.810.000
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	304.454.000
4.01.02.1.02.03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	155.402.200
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	358.845.000
4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	443.306.000
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.785.000.000
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	700.000.000
4.01.03.1.01.01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	150.000.000
4.01.03.1.01.02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	100.000.000
4.01.03.1.01.03	Fasilitasi Penataan Wilayah	450.000.000
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	835.000.000
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	250.000.000
4.01.03.1.02.02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	250.000.000
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	335.000.000
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.250.000.000
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	1.050.000.000
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	100.000.000
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100.000.000
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	211.207.870.000
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	210.057.870.000
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	6.500.000.000
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	203.557.870.000
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	650.000.000
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	200.000.000
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	200.000.000
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	250.000.000
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	500.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	575.000.000
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	160.000.000
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	115.000.000
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	300.000.000
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.531.036.000
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	793.071.000
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	334.996.000
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	231.025.000
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	227.050.000
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	737.965.000
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	198.680.000
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	169.555.000
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	369.730.000
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	303.016.971.194
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	303.016.971.194
4.02	SEKRETARIAT DPRD	303.016.971.194
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	153.972.166.494
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	621.225.000
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	232.495.000
4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	53.520.000
4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	71.020.000
4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.100.000
4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.400.000
4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.690.000
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.589.212.000
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.297.220.000
4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.514.800.000
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750.150.000
4.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.850.000
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	927.192.000
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.447.675.000
4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	272.100.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	497.540.000
4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	678.035.000
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.410.866.000
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	197.940.000
4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.536.551.000
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.512.000
4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.218.170.000
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	854.880.000
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.003.813.000
4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400.000.000
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.308.662.000
4.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	308.662.000
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000.000
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.393.543.000
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150.339.000
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.514.000.000
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.729.204.000
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.742.419.300
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.494.470.800
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.247.948.500
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000.000
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74.958.564.194
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	72.113.664.194
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.419.900.000
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	425.000.000
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	1.500.000.000
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.500.000.000
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	149.044.804.700
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.205.782.000
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	366.000.000
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	84.752.000
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	755.030.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	171.000.000
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	34.200.000
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	34.200.000
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	34.200.000
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	34.200.000
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	34.200.000
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	250.000.000
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50.000.000
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50.000.000
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.000.000
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.000.000
4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.000.000
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	27.025.480.000
4.02.02.1.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	2.380.000.000
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	19.915.000.000
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4.644.000.000
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	86.480.000
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	17.121.198.950
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	47.040.000
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	17.074.158.950
4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.748.100.000
4.02.02.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	248.100.000
4.02.02.1.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.500.000.000
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	101.523.243.750
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	98.883.199.250
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	93.118.000
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	102.700.000
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.444.226.500
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.403.217.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	52.403.217.000
5.01	PERENCANAAN	49.325.213.000
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.982.029.000
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.007.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	91.847.000
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.200.000
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.400.000
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.200.000
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.200.000
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.260.000
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.900.000
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.650.267.000
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.636.724.500
5.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	996.530.000
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.150.000
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.425.000
5.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	750.000
5.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.500.000
5.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	187.500
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.800.000
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	700.000
5.01.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.100.000
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.055.000
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.025.000
5.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	980.000
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000
5.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.050.000
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.342.900.000
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	306.000.000
5.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	108.900.000
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.000.000
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.01.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.000.000
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.000.000
5.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	470.000.000
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.520.000.000
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.000.000
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.750.000.000
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.761.000.000
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	280.000.000
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.260.000.000
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.000.000
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.000.000
5.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.023.930.000
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	4.346.067.000
5.01.02.1.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.331.825.000
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	501.840.000
5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	236.351.000
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	31.974.000
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	447.027.000
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.797.050.000
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	753.068.000
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	263.486.000
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	361.060.000
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	38.220.000
5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	90.302.000
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.924.795.000
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	1.264.490.000
5.01.02.1.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	50.430.000
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	366.308.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	243.567.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.319.254.000
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	864.357.000
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.250.000
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	18.250.000
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	42.027.000
5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	190.455.000
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.287.500
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27.916.500
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.140.000
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	310.031.000
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	915.278.000
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196.585.500
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	57.690.000
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	132.378.000
5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	228.624.500
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	38.540.000
5.01.03.1.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	21.450.000
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	49.397.000
5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	190.613.000
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	539.619.000
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,	124.872.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	RPJMD dan RKPD)	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	38.411.000
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	131.818.000
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	94.518.000
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.375.000
5.01.03.1.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.150.000
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	37.275.000
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.200.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.078.004.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.078.004.000
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	821.430.000
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	241.815.000
5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	131.785.000
5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	131.785.000
5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	131.785.000
5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	-
5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	52.475.000
5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	131.785.000
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1.020.710.000
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	98.215.000
5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	131.785.000
5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	131.785.000
5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	131.785.000
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	131.785.000
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	131.785.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	131.785.000
5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	131.785.000
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	735.000.000
5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	146.340.000
5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	-
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	146.340.000
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	149.640.000
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	-
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	146.340.000
5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-
5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	146.340.000
5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	-
5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	500.864.000
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	308.350.000
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	150.906.000
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	41.608.000
5.02.0.00.0.00.02.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.974.412.329.498
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.974.412.329.498
5.02	KEUANGAN	2.974.412.329.498
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.572.260.000
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	328.000.000
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.000.000
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.000.000
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.849.000.000
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.444.420.000
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.293.580.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.000.000
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.000.000
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.410.000
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.450.000
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12.460.000
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.500.000
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.500.000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.500.000
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.957.350.000
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.000.000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718.000.000
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	322.350.000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	400.000.000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.000.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.000.000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900.000.000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	200.000.000
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	700.000.000
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.957.000.000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	602.000.000
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.250.000.000
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.513.000.000
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	230.000.000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	487.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
	atau Lapangan	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.000.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	508.000.000
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.927.783.499.498
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.431.000.000
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	54.000.000
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	54.000.000
5.02.02.1.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	549.000.000
5.02.02.1.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	511.000.000
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	500.000.000
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	321.000.000
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	600.000.000
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	142.000.000
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	700.000.000
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.639.000.000
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	214.000.000
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	200.000.000
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	200.000.000
5.02.02.1.02.06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	625.000.000
5.02.02.1.02.08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	50.000.000
5.02.02.1.02.09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	50.000.000
5.02.02.1.02.11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	100.000.000
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	650.000.000
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100.000.000
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	75.000.000
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	20.000.000
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	150.000.000
5.02.02.1.03.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	75.000.000
5.02.02.1.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30.000.000
5.02.02.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	75.000.000
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	75.000.000
5.02.02.1.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	50.000.000
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	495.000.000
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150.000.000
5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	120.000.000
5.02.02.1.04.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000
5.02.02.1.04.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	75.000.000
5.02.02.1.04.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	50.000.000
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.921.018.499.498
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	37.030.000.000
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.900.000.000
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	73.088.499.498
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	2.629.000.000.000
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	550.000.000
5.02.02.1.06.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	50.000.000
5.02.02.1.06.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.02.02.1.06.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	400.000.000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.056.570.000
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.056.570.000
5.02.03.1.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	180.000.000
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.000.000
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200.000.000
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	53.000.000
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	150.000.000
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	7.438.570.000
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	100.000.000
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	45.000.000
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	400.000.000
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100.000.000
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	140.000.000
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.00	Badan Pendapatan Daerah	324.393.421.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	324.393.421.000
5.02	KEUANGAN	324.393.421.000
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	303.616.473.800
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.350.000
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.350.000
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.350.000
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.350.000
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.865.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.735.000
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	236.873.555.000
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	233.118.700.000
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.632.760.000
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14.280.000
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.815.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	40.000.000
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	136.000.000
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	600.000.000
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	370.000.000
5.02.01.1.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	150.000.000
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	80.000.000
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000
5.02.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40.000.000
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000
5.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000
5.02.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.587.717.000
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	341.228.000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.919.650.000
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	348.175.000
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	716.950.000
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.521.714.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140.000.000
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000.000
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000.000
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	-
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000.000
5.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.140.625.008
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.311.653.408
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.456.040.000
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.372.931.600
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.808.576.792
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	837.754.500
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.485.822.292
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	720.000.000
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.650.000.000
5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	435.000.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20.776.947.200
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	20.776.947.200
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	400.000.000
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	400.000.000
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.000.000.000
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.895.398.200
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.000.000.000
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	140.000.000
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	200.000.000
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	13.541.549.000
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	200.000.000
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	600.000.000
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.00	Badan Kepegawaian Daerah	45.025.910.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	45.025.910.000
5.03	KEPEGAWAIAN	45.025.910.000
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	36.777.510.000
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	970.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000.000
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000
5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	365.000.000
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.440.949.000
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.760.949.000
5.03.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000.000
5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000
5.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000
5.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000
5.03.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000
5.03.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	235.000.000
5.03.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000
5.03.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.591.137.000
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.375.000
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.655.000
5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.130.000
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139.595.000
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	565.600.000
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
5.03.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	52.782.000
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.084.278.000
5.03.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.200.000.000
5.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.884.278.000
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.514.006.000
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.106.691.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.407.315.000
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.942.140.000
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	809.895.000
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.245.000
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000.000
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	8.248.400.000
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	3.483.400.000
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	33.400.000
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.000.000.000
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	30.000.000
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	300.000.000
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.000.000.000
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.050.000.000
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	50.000.000
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	2.005.000.000
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	155.000.000
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350.000.000
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	1.500.000.000
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	1.330.000.000
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	800.000.000
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	500.000.000
5.03.02.1.03.15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	30.000.000
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.430.000.000
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	300.000.000
5.03.02.1.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	80.000.000
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	150.000.000
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	700.000.000
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100.000.000
5.03.02.1.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	100.000.000
5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.163.486.100
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	56.163.486.100

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	56.163.486.100
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.930.803.600
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.460.000
5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.560.000
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.550.000
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.550.000
5.04.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.900.000
5.04.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.900.000
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.500.000
5.04.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.500.000
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.679.993.600
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.032.038.600
5.04.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	518.730.000
5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.919.000
5.04.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.104.000
5.04.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.109.000
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.862.000
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.484.500
5.04.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.746.500
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	395.000.000
5.04.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
5.04.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	195.000.000
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.705.000.000
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	175.000.000
5.04.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000
5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	340.000.000
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	190.000.000
5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.000.000
5.04.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000
5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	150.000.000
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.315.000.000
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.315.000.000
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.314.350.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.429.000.000
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.885.350.000
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.240.000.000
5.04.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	600.000.000
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	640.000.000
5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000.000
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.232.682.500
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.178.380.000
5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	3.178.380.000
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	10.054.302.500
5.04.02.1.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	403.000.000
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	135.000.000
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	350.000.000
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	1.110.000.000
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.663.830.000
5.04.02.1.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabat	392.472.500
5.06.5.07.0.00.01.00	Badan Penghubung	9.494.309.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	9.494.309.000
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.494.309.000
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.352.977.920
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.260.000
5.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.410.500
5.07.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.667.000
5.07.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.435.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.07.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.195.000
5.07.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.380.500
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.605.000
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.567.000
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.250.600.000
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.945.000.000
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.600.000
5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.926.000
5.07.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.840.000
5.07.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.234.000
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.940.000
5.07.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000
5.07.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.940.000
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.811.000
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.730.000
5.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.858.000
5.07.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.954.170
5.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.850.000
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.183.000
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.235.830
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.537.700
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.537.700
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	968.010.000
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.000.000
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	815.010.000
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.819.220
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.450.300
5.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	421.468.920
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.900.000
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.141.331.080
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.141.331.080

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
5.07.02.1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	175.027.400
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	275.700.000
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	349.297.800
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	10.000.000
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	331.305.880
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	68.502.408.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	68.502.408.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	68.502.408.000
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	58.706.428.000
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.710.000
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.500.000
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.710.000
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.500.000
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.067.820.000
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.748.000.000
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.150.000
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.670.000
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	940.500.000
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	198.000.000
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	742.500.000
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.304.098.000
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	107.800.000
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	345.684.000
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	313.714.000
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
6.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	186.900.000
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517.755.000
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	517.755.000
6.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.817.830.000
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	641.462.400
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.176.367.600
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.715.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	900.000
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.000.000
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.950.000
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.719.923.004
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.283.923.004
8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	421.000.000
8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.500.000
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000
8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398.472.156
8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	193.960.000
8.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	7.000.000
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	39.172.156
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000
8.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.340.000
8.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120.000.000
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.439.440
8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	296.475.440
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	224.000.000
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.964.000
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.670.310.156
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	76.138.000
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	394.172.156
8.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.200.000.000
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.242.541.560
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	322.285.560
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.920.256.000
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.093.684
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.010.365.840
8.01.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	405.827.844

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.900.000
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.346.250.000
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.346.250.000
8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	240.000.000
8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	950.000.000
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.156.250.000
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	21.238.449.000
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	21.238.449.000
8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.538.449.000
8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350.000.000
8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350.000.000
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	550.000.000
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	550.000.000
8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550.000.000
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.150.000.000
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.150.000.000
8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	450.000.000

KODE	PERANGKAT DAERAH/URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	700.000.000
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	22.050.000.000
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	22.050.000.000
8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20.550.000.000
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	900.000.000
8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	500.000.000
	JUMLAH	11.845.833.109.839

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2022 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan telah ditetapkan Program dan kegiatan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 bahwa Rancangan Perkada tentang RKPD disampaikan oleh gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi secara lengkap melampirkan dokumen gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.

Secara lengkap Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD disusun dalam Lampiran yang menjadi satua kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya, dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD. Selain Indikator kinerja daerah ditetapkan pula indikator kinerja Perangkat Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung Perangkat Daerah, merupakan target selama lima tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun target indikator makro sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah pada tahun 2022 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 7-1. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020		Target Tahun 2022
			Target	Realisasi	RPJMD
1	LPE	Persen	5.80	5.77	6.10
2	Inflasi	Persen	4.20	3.30	3.70
3	Pengangguran	Persen	8.20	8.11	7.84

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	110,00
2	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	%	85,00
2	Penanganan konflik masyarakat	%	100,00
2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1201	Ketenaga Kerjaan		
2	Persentase pekerja Penuh Waktu	%	46,29
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72,74
2	Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	100,00
2	Indeks pembangunan gender (IPG)	Nilai	92,79
1203	Pangan		
2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	85,00
1205	Lingkungan Hidup		
2	Emisi Rumah Kaca	%	100,00
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,79
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil		
2	Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100,00
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	25,00
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2,26
1209	Perhubungan		
2	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	%	20,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	%	100,00
1210	Komunikasi dan Informatika		
2	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Nilai	4,00
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90,00
1211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2	Indeks Keuangan Inklusif	Nilai	3,00
2	Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	6,00
2	Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	1,00
1212	Penanaman Modal		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN
2	Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai	2,26
2	Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)		
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	20,00
1213	Kepemudaan dan Olahraga		100,00
2	Indeks Pembangunan Kepemudaan		
2	Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	4,00
1214	Statistik	Nilai	90,00
2	Maturitas Data Base Statistik Sektoral		
2	Maturitas SIPD	%	3,00
1215	Persandian	%	6,00
2	Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	1,00
1216	Kebudayaan		
2	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	%	5,00
1217	Perpustakaan	%	53,90
2	Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	85,97
1218	Kearsipan		
2	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	45,00
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan	%	45,00
2001	Kelautan dan Perikanan		
2	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	100,00
2002	Pariwisata		
2	Persentase peningkatan nilai PDRB sektor Pariwisata	%	3,09
2003	Pertanian		
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	6,40
2	Pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	%	6,20
2004	Kehutanan		
2	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	%	33,21
2005	Energi dan Sumberdaya Mineral		
2	Rasio elektrifikasi	%	100,00
2	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB		0,60
2006	Perdagangan		
2	LPE Sektor Perdagangan	%	6,90
2	Tingkat Inflasi Bahan Pokok	%	4,00
2007	Perindustrian		
2	LPE Sektor Perindustrian	%	4,70
2	Fokus Administrasi Pemerintahan		
3001	Administrasi Pemerintahan		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN
2	Capaian Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	%	100,00
2	Persentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100,00
2	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100,00
2	Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	100,00
2	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	100,00
2	Capaian Pelayanan Publik	%	100,00
2	Persentase Realisasi Kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	100,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	100,00
2	Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	100,00
2	Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 Kebijakan)	%	100,00
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	85,00
2	Persentase Manajemen Reformasi birokrasi	%	100,00
2	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	85,00
2	Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Banten	%	100,00
2	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	Nilai	85,00
3002	Pengawasan		
2	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	4,00
2	Capaian Kapabilitas APIP	Level	4,00
3003	Perencanaan		
2	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	%	80,00
2	Penilaian Perencanaan, Pengukuran, pelaporan dan capaian kinerja	Nilai	85,00
3004	Keuangan		
2	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100,00
2	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	%	64,44
3005	Kepegawaian		
2	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	95,00
3006	Pendidikan dan Pelatihan		

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN
2	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	30,00
3007	Penelitian dan Pengembangan		
2	Cakupan Penelitian dan pengembangan	%	100,00
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
3	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	92,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
	Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	72.75	72,74	100.01
10	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Perempuan	17. Pemenuhan Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	72.33	100	72.33
11	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	18. Angka Kelahiran Total (TFR)	%	2.37	2,26	104.86
12	Meningkatnya Minat Baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah	19. Indek Minat Baca Masyarakat	Nilai	59,79	50	119,58
13	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan Serta Meningkatkan Cabang Olahraga Berprestasi dalam Keikutsertaan Kejuaraan Tingkat Nasional	20. Indeks Pembangunan Kepemudaan	Nilai	52,17	45	173,9
		21. Indeks Pembangunan Olahraga	Nilai	28	45	93,33
14	Meningkatnya Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur di Wilayah Provinsi Banten	22. Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur	%	0	90	0
		23. Persenatse Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	94,41	100	94,41
		24. Persentase Jembatan dalam kondisi Mantap	%	90,7	100	97,01
15	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan Provinsi Banten	25. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88,7	92,5	101,03
16	Meningkatnya Kinerja Layanan Infrastruktur Transportasi	26. Persentase Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara	%	90.42	100	90,42
17	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Lebih Baik	27. Persentase Kebutuhan Srana dan Prasarana Transportasi	%	5.93	90	81

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
26	Meningkatnya Kompetensi dan Penyaluran Tenaga Kerja	39. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	7,25	5,74	126,3
27	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten	40. Persentase Pekerja Paruh Waktu	%	40,43	46,29	87,34
28	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	41. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	%	-3,38	6,4	-52,81
29	Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat	42. Indeks Keuangan Inklusif	Nilai		3	
30	Meningkatnya Daya Saing Daerah	43. Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan Provinsi Lain di Indonesia	Nilai		5	
31	Tersedianya Cadangan Pangan Yang Memadai dan Pemenuhan Protein Hewani	44. Indeks Ketahanan Pangan Daerah	%	81,39	85	95,7
32	Meningkatnya Produksi, Inovasi dan nilai tambah hasil pertanian melalui pemanfaatn teknologi tepat guna	45. Pertumbuhan Sektor Pertanian Yang Optimal	%	3,55	6,2	57,2
33	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis di Provinsi Banten	46. LPE Sektor Perindustrian	%	-5.12	4,7	-108.93
34	Meningkatnya Kualitas Iklim usaha dan Investasi serta Meningkatkan Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi	47. Jumlah Realisasi Investasi (PMA + PMDN)	Triliyun	62,01	53,9	115,04
		48. Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	%	89,33	85,97	103,9
35	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal	49. LPE Sektor Perdagangan	%	-2,24	6,9	-32,46
		49. LPE Sektor Perdagangan	%	-2,24	6,9	-32,46
		50. Tingkat Inflasi Bahan	%	2,67	4	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
	untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten	Pokok				
36	Meningkatnya Kemitraan Strategis antara Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Kecil	51. Persentase Peningkatan Omset Usaha Kecil	%	0	3	80
37	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Kreatif	52. Persentase Peningkatan Kualitas Koperasi	%	1	18	83,33
38	Meningkatnya Kualitas Destinasi Pariwisata	53. Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pariwisata	%	2,91	3,09	100
39	Meningkatnya Pembinaan Pengembangan Energi Baru terbarukan dan konservasi Energi	54. Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	0,68	0,6	104,6
40	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengawasan Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	55. Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	%	4,72	4,93	95,74
41	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman Yang Layak, Ketersediaan Air Limbah regional serta pengelolaan sampah regional	56. Luasan Kawasan Kumuh Yang ditangani	Hektar	256.41	375.29	68.32
		57. Persentase Rumah Layak Huni	%	73.51	88.66	82.91
		58. Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah	%	5.00	80.00	25.00
42	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis Provinsi Yang Berkualitas	59. Persentase Penyelenggaraan Bangunan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi	%	69.91	100	69.91
43	Tercapaiannya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	60. Capaian SAKIP	Nilai	B	A	
		61. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	A	
		62. Capaian SAKIP OPD	Nilai		A	
44	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	63. Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	%	66,05	95	69,52

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
45	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Aparatur	64. Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	%	11.35	30	37.8
46	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	65. Maturitas SIPD	%	70	80	88
47	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	66. Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian	%	85,3	80	107
		67. Penilaian Perencanaan, pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja	Nilai	75	A	88
48	Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan	68. Cakupan Penelitian dan Pengembangan	%	100	100	100
49	Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	69. Capaian Maturitas SPIP	Nilai	3	4	75
		70. Capaian Kapabilitas APIP	Nilai	3	4	75
50	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi, Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	71. Capaian Program – program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD	%	98.76	100.00	98.76
51	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	72. Capaian Pelayanan	%	100	100	100
52	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	73. Indeks Demokrasi Indonesia	Nilai	76	80	95
		74. Penanganan Konflik Masyarakat	%	100	100	100
53	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan	75. Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	100	WTP	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
	Transparan untuk mendukung nilai Opini BPK					
54	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis Teknologi Informasi	76. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	61.91	64,44	86,98
55	Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri	77. Capaian Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan di 48 desa tertinggal dan berkembang yang diberdayakan	%	41.67	25	166.68
56	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah serta Ketentraman dan ketertiban umum	78. Rasio Penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah	%	80	85	94.11
57	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	79. Persentase Sarana dan Prasarana Persandian	%	100	100	100
		80. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96.01	90	106.07
58	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah untuk kebutuhan Informasi Publik	81. Maturitas Data Base Statistik Sektoral	Nilai	100	100	100
59	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk	82. Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	%	0	80	-
		83. Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	%	100	100	100
60	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	84. Persentase OPD yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Ketentuan Kearsipan	%	95.35	100	95,35
61	Meningkatkan Kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	85. Persentase Realisasi kebijakan kerjasama Pemerintahan	%	97,07	100	97,07
		86. Capaian Laporan Penyelenggaraan	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian 2020 Terhadap RPJMD Akhir Tahun
		Pemerintah Daerah Provinsi Banten				
62	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	87. Persentase realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM yang terpublikasi	%	100	100	100
63	Meningkatkan Tatalaksana Organisasi Daerah yang Efektif	88. Persentase Manajaemen Reformasi Birokrasi	%	100	100	100
64	Meningkatkan Pelayanan Umum yang Prima	89. Persentase Peningkatan Pelayanan Umum yang Prima	%	100	100	100
65	Meningkatkan Pelayanan dan Fasilitas Pimpinan	90. Persentase Peningkatan Pelayanan Fasilitas Pimpinan	%	100	100	100
66	Meningkatkan Administrasi Pembangunan Daerah	91. Persentase Realisasi Layanan dan Pembangunan Administrasi Daerah	%	100	100	100
67	Tersusunnya Kebijakan tentang Infrastruktur Daerah	92. Persentase Rumusan Kebijakan Infrastruktur Daerah (Total 40 kebijakan)	%	57.14	100	57,14
68	Meningkatkan Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian	93. Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah	%	100	100	95,15
69	Meningkatkan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	94. Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100

